



**PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

**PEMERINTAH KOTA CIREBON
2025**



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 88);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 145);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
13. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
14. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

15. Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
19. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta target pembangunan nasional.
22. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
23. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

24. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
25. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
26. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
27. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
28. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
29. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
30. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
31. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
32. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
33. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RPJMD ini sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan RKPD; dan

- c. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD ini yaitu untuk:
 - a. menetapkan Visi, Misi dan Program pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran; dan
 - c. mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kota serta dengan daerah kabupaten yang berbatasan.

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 3

Kedudukan RPJMD ini sebagai:

- a. penjabaran Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke dalam strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, Program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Arah Kebijakan keuangan Daerah dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- b. dokumen perencanaan Daerah Kota yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD meliputi:
 - a. bab I (satu) memuat pendahuluan;
 - b. bab II (dua) memuat gambaran umum Daerah;
 - c. bab III (tiga) memuat Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. bab IV (empat) memuat Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. bab V (lima) memuat penutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
- (2) Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 7

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup Program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD untuk menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan Sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah; dan
 - b. indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan kedalam rencana Program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan

pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD yang digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana Program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana Program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dicapai untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil monitoring dan evaluasi hasil RKPD.

Pasal 9

Pengendalian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERUBAHAN RPJMD

Pasal 10

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat; dan
 - b. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar.
- (2) Perubahan kebijakan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. terjadinya bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan; dan
 - f. pemekaran Daerah.

- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman perubahan RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 19 Agustus 2025

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON

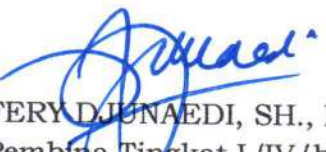
ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT:
(5/129/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.197112281998031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 65 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta Menyusun dan menetapkan RKPD.

Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan "Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik".

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta memperhatikan keselarasan dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah, mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJMD, Keselarasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan proses dan pendekatan substantif. Pendekatan proses meliputi pendekatan politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*).

Sedangkan pendekatan substantif adalah holistik-tematik; integratif; dan spasial.

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif adalah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Daerah Kota, Daerah Provinsi, hingga nasional.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan teknokratik; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan, dimana setiap tahapannya dengan melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sangat tergantung dari komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Kota Cirebon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

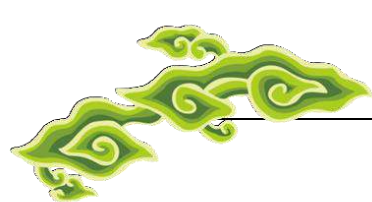
Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 152



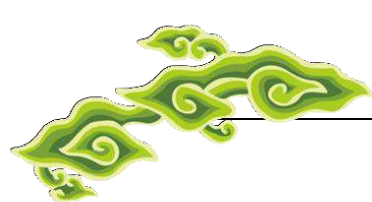
KATA PENGANTAR

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembangunan dengan tetap selaras dengan kebijakan nasional serta mempertimbangkan karakteristik dan potensi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan berjenjang, mulai dari RPJPD (20 tahun), RPJMD (5 tahun), hingga RKPD dan Renja PD (tahunan).

RPJMD menjadi dokumen perencanaan jangka menengah yang mengarahkan pembangunan daerah secara sistematis dan terukur. Di dalamnya terdapat Visi Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Cirebon. Pernyataan visi Kota Cirebon periode 2025-2029 yakni **TERWUJUDNYA KOTA CIREBON YANG SEJAHTERA, TERTATA, ASPIRATIF, RELIGIUS, AMAN DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029** menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 tahun mendatang dan menjadi tujuan pencapaian RPJPD Kota Cirebon tahun 2025-2045 tahap pertama dalam rangka penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Visi Kota Cirebon tahun 2025-2029 bertujuan mewujudkan seluruh bidang pembangunan berada dalam kondisi SETARA yaitu: Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman dan Berkelanjutan, sehingga Kota Cirebon Setara dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi Masyarakat, Sosial dan dalam segala aspek kehidupan bidang-bidang lainnya berada dalam kondisi SETARA Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kota Cirebon tahun 2025-2029, tersebut.

Selanjutnya RPJMD Kota Cirebon 2025-2029 ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kota Cirebon tahun 2025-2029 sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing; 2. Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal; 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Bebas KKN Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Mewujudkan Keseimbangan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan Dan Berketahanan; dan 5. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial Dan Budaya Lokal.

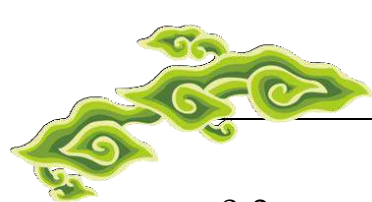
Dengan disusun dan ditetapkannya RPJMD merupakan upaya untuk mewujudkan keselarasan antara perencanaan strategis di lingkup nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten/Kota sekitar pada lingkup operasional di setiap perangkat daerah dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan jangka menengah dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 5 (lima) tahun kedepan, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



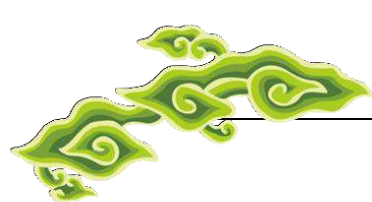
DAFTAR ISI

Halaman

BAB I	7
Pendahuluan	7
1.1 LATAR BELAKANG	7
1.2 DASAR HUKUM.....	11
1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA.....	14
1.3.1 Hubungan Antara RPJMD Kota Cirebon dengan RPJMN.....	15
1.3.2 Hubungan Antara RPJMD Kota Cirebon dengan RPJPD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.....	17
1.3.3 Hubungan Antara RPJMD Kota Cirebon dengan RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045.....	17
1.3.4 Hubungan Antara RPJMD Kota Cirebon dengan Dokumen Perencanaan Sektor Lain.....	18
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	19
1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMD TAHUN 2025-2029.....	20
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	22
2.1 KONDISI DAERAH.....	22
2.1.1 Aspek Geografi.....	22
2.1.2 Aspek Demografi.....	58
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	66
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	88
2.1.5 Aspek Pelayanan Umum	117
2.1.6 Aspek Pemenuhan Pelayanan Dasar	128
2.1.7 Aspek Kerja Sama Daerah	132
2.1.8 Aspek Kinerja Badan Usaha Milik Daerah.....	132
2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	139
2.2.1 Realisasi APBD.....	140
2.2.2 Rata-Rata Pertumbuhan APBD	155
2.2.3 Neraca Keuangan Daerah.....	158
2.2.4 Rasio Likuiditas.....	162
2.2.5 Rasio Solvabilitas	162
2.2.6 Proyeksi Keuangan Daerah tahun Anggaran 2025-2029.....	163
2.2.7 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah tahun 2025-2029	168
2.2.8 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah.....	174
2.2.9 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon.....	178

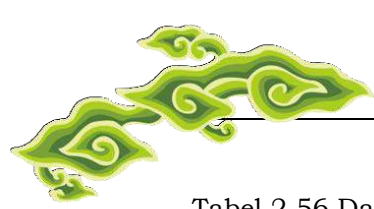


2.3	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	180
2.3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	180
2.3.2	Isu Strategis.....	200
BAB III		208
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS		208
PEMBANGUNAN DAERAH		208
3.1	VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2025-2029	208
3.1.1	Visi dan Misi.....	208
3.1.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2029.....	213
3.2	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	228
3.2.1	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2025-2029	228
3.2.2	Pentahapan Pembangunan	285
3.2.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	286
3.2.4	Proyek Prioritas Pembangunan Daerah.....	314
3.2.5	Dukungan Program Daerah Terhadap Program Nasional	331
BAB IV		336
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		336
4.1	PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	336
4.2	KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH.....	416
4.2.1	Indikator Kinerja Utama.....	417
4.2.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	424
BAB V		449
P E N U T U P		449
5.1	KAIDAH PELAKSANAAN.....	450
5.2	PENGENDALIAN DAN EVALUASI	451

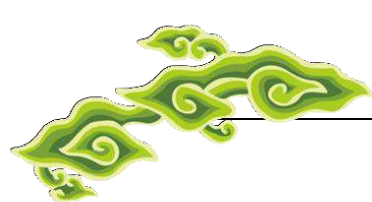


Daftar Tabel

Tabel 2.1 Jumlah RW dan RT Kota Cirebon tahun 2024	24
Tabel 2.3 Kondisi Kemiringan Tanah Kota Cirebon (Ha)	26
Tabel 2.4 Suhu Udara Rata-rata Kota Cirebon (°C)	28
Tabel 2.5 Curah Hujan (total, tertinggi harian) dan Hari Hujan di Kota Cirebon	29
Tabel 2.6 Kecepatan Angin di Kota Cirebon (km/jam)	30
Tabel 2.7 Intensitas Matahari di Stamet Kertajati (%).....	31
Tabel 2.8 Klasifikasi Nilai Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang	36
Tabel 2.9 Penilaian Simpangan Pemanfaatan Ruang.....	37
Tabel 2.10 Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Kota Cirebon .	43
Tabel 2.11 IKD Kota Cirebon	46
Tabel 2.12 Luasan Daerah Rawan Banjir (Ha).....	48
Tabel 2.14 Penggunaan Lahan Kota Cirebon per Kecamatan (Ha).....	51
Tabel 2.15 Kondisi Air Bersih Kota Cirebon	54
Tabel 2.17 Inflasi Kota Cirebon (%).....	69
Tabel 2.18 Penemuan Kasus Baru TBC SO Kota Cirebon	76
Tabel 2.19 Penemuan Kasus Baru TBC RO Kota Cirebon.....	76
Tabel 2.20 Pengukuran Kualitas Perlindungan Anak	78
Tabel 2.21 Upaya Pemberdayaan Ekosistem Kebudayaan Serta Meningkatkan, Memperkaya, dan Menyebarluaskan Kebudayaan;	82
Tabel 2.22 Upaya Keberlanjutan Kebudayaan Sebagai Warisan Bagi Dunia dan Generasi Penerus.....	82
Tabel 2.23 Upaya Pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Untuk Memperkuat Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan	83
Tabel 2.24 upaya meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan	83
Tabel 2.25 Daftar Cagar Budaya di Kota Cirebon	84
Tabel 2.28 Angka Literasi Kota Cirebon	89
Tabel 2.29 Angka Numerasi Kota Cirebon.....	89
Tabel 2.30 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Cirebon	90
Tabel 2.31 Indeks Pendidikan	93
Tabel 2.32 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Cirebon	93
Tabel 2.38 Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Sektor Pelaku Usaha 2021	111
Tabel 2.39 Indeks Daya Saing Daerah Kota Cirebon	112
Tabel 2.40 Nilai Investasi di Kota Cirebon.....	112
Tabel 2.41 Angka Kriminalitas Kota Cirebon.....	114
Tabel 2.42 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan	115
Tabel 2.43 Agama Penduduk di Kota Cirebon tahun 2024	117
Tabel 2.44 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Cirebon	118
Tabel 2.45 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cirebon	119
Tabel 2.46 Indeks Pelayanan Publik Kota Cirebon	120
Tabel 2.47 Indeks SPBE Kota Cirebon	121
Tabel 2.48 Struktur Penilaian SPBE	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.49 Indeks Inovasi Daerah Kota Cirebon.....	122
Tabel 2.50 Perjanjian Kerja Sama Pemda Kota Cirebon dengan Pihak lain.....	132
Tabel 2.51 Data Kepegawaian	133
Tabel 2.52 Data Pelanggan.....	133
Tabel 2.53 Data Keuangan	134
Tabel 2.54 Data Kepegawaian	134
Tabel 2.55 Data Keuangan	135



Tabel 2.56 Data Kepegawaian	135
Tabel 2.57 Data Keuangan	137
Tabel 2.58 Data Kepegawaian	138
Tabel 2.59 Data Keuangan	138



Daftar Gambar

Gambar 1-2 Tahapan Perencanaan Pembangunan	18
Gambar 2.2 Peta Ketinggian Kota Cirebon	26
Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kota Cirebon	27
Gambar 2.4 Peta Geologi Kota Cirebon	28
Gambar 2.5 Peta Curah Hujan Kota Cirebon	30
Gambar 2.6 Penggunaan Lahan Kota Cirebon	33
Gambar 2.7 Peta Daerah Aliran Sungai Kota Cirebon	35
Gambar 2.8 Indeks Kualitas Air Kota Cirebon	39
Gambar 2.9 Indeks Kualitas Udara Kota Cirebon	40
Gambar 2.10 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Cirebon	40
Gambar 2.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	41
Gambar 2.12 Jumlah Penegakan Hukum Lingkungan (Pelaku Usaha)	42
Gambar 2.13 Laju perubahan suhu udara rata-rata tahunan	44
Gambar 2.14 Peta Sebaran EBT di Jawa Barat	45
Gambar 2.15 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kota Cirebon	49
Gambar 2.16 Grafik Penggunaan Lahan Kota Cirebon (Ha)	51
Gambar 2.18 Peta Status Ketersediaan Air Kota Cirebon tahun 2024	55
Gambar 2.19 Peta Status Air Kota Cirebon tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.20 Peta Status Ketersediaan Air Kota Cirebon tahun 2029	56
Gambar 2.21 Peta Status Air Kota Cirebon tahun 2026	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.22 Indeks Ketahanan Pangan Kota Cirebon	57
Gambar 2.23 Indeks Ketahanan Pangan tahun 2024 di Jawa Barat	58
Gambar 2.24 Jumlah Penduduk Kota Cirebon	59
Gambar 2.25 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cirebon	60
Gambar 2.26 Kepadatan Penduduk tahun 2024 Kota Cirebon per Kelurahan	61
Gambar 2.27 Grafik Piramida Penduduk Kota Cirebon tahun 2024	62
Gambar 2.28 Rasio Jenis Kelamin Kota Cirebon	62
Gambar 2.29 Rasio Ketergantungan Kota Cirebon	63
Gambar 2.30 Penduduk Menurut Agama tahun 2024	63
Gambar 2.31 Penduduk Kota Cirebon tahun 2024 berdasarkan Status Pekerjaan	64
Gambar 2.32 Penduduk Kota Cirebon tahun 2024 berdasarkan Pendidikan Terakhir	64
Gambar 2.33 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Usia Produktif	65
Gambar 2.34 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	65
Gambar 2.35 Tingkat Capaian dan Target LPE Kota Cirebon	66
Gambar 2.36 Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon, Jawa Barat dan Nasional	67
Gambar 2.37 LPE Kota di Jawa Barat	67
Gambar 2.38 LPE Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2020	68



BAB I

PENDAHULUAN

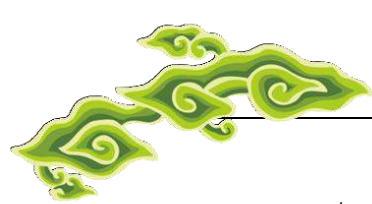
1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya adalah sebuah proses transformasi yang direncanakan untuk memajukan berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Tingginya tingkat kompleksitas dalam pembangunan, yang disebabkan oleh tantangan yang terus bermunculan, dinamika lingkungan yang fluktuatif, serta pergeseran paradigma mengenai kualitas hidup, menjadikan pembangunan sebagai sebuah upaya berkelanjutan yang tidak pernah final.

Sejalan dengan dinamika otonomi daerah, beban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu terus ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan. Di sisi lain, daerah dihadapkan pada berbagai kendala antara lain terbatasnya ketersediaan sumber daya pembangunan, terutama sumber daya finansial.

Dengan permasalahan dan tantangan tersebut, maka penyelenggaraan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Pendekatan *Strategic Dynamic Governance* menjadi sangat relevan untuk diadopsi, yaitu sebuah konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pada kapasitas strategis pemerintah untuk bersikap adaptif, inovatif, dan responsif dalam menghadapi perubahan serta ketidakpastian. Pendekatan ini dijabarkan melalui tiga pilar utama:

1. *Thinking Ahead*: Kapasitas untuk berpikir ke depan dengan menyusun perencanaan yang berbasis pada proyeksi tren masa depan dan scenario planning. Dalam konteks perencanaan daerah, hal ini diwujudkan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tidak hanya responsif terhadap kondisi saat ini tetapi juga antisipatif terhadap berbagai peluang dan tantangan di masa mendatang. RPJMD disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *bottom-up*, dan *top-down*, serta mempertimbangkan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Masing-masing pendekatan memiliki fokus dan prinsip yang berbeda; pendekatan teknokratik menjamin basis data dan metodologi yang kuat, partisipatif memastikan aspirasi masyarakat terakomodir, politis



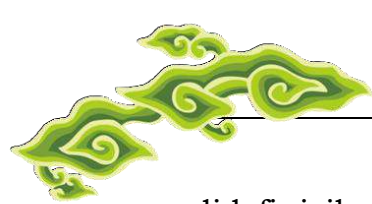
mentransformasi-kan visi-misi kepemimpinan, sementara mekanisme *bottom-up* dan *top-down* memadukan kebutuhan lokal dengan kebijakan nasional. Pendekatan holistik-tematik memandang pembangunan secara menyeluruh namun fokus pada isu strategis, integratif memadukan program lintas sektor, dan spasial memastikan perencanaan berbasis ruang. Semua pendekatan ini saling melengkapi untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, realistis, dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan.

2. *Thinking Again*: Kapasitas untuk terus-menerus melakukan evaluasi dan pembelajaran ulang terhadap kebijakan dan program yang telah berjalan. Pilar ini menekankan pentingnya proses sinkronisasi dan integrasi hasil evaluasi dari pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya sebagai bahan pembelajaran kritis untuk perbaikan dan penyempurnaan siklus perencanaan berikutnya.
3. *Thinking Across*: Kapasitas untuk berpikir melampaui batasan birokrasi tradisional dengan menerapkan pendekatan lintas perangkat daerah, lintas sektor, dan lintas wilayah. Kolaborasi dan sinergi ini penting untuk menghindari kerja yang berjalan sendiri-sendiri (silo), memecahkan masalah yang kompleks, serta memanfaatkan sumber daya secara lebih optimal dan efektif.

Oleh karena itu, melalui penerapan prinsip-prinsip *Strategic Dynamic Governance* ini, penyelenggaraan pembangunan daerah diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan pembangunan yang tidak terpisahkan dalam kerangka pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berisi arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi rencana pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang disingkat sebagai RPJMD, merupakan dokumen pembangunan daerah yang ditetapkan melalui mekanisme Peraturan Daerah (Perda). Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD

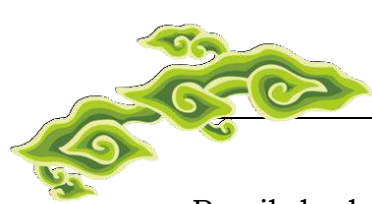


didefinisikan sebagai bentuk penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan Bersifat Indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Penyusunan RPJMD merupakan keharusan mengingat fungsinya sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan RPJMD Kota Cirebon menggunakan gabungan pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, top-down, dan bottom-up untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, sinergis, dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat serta kondisi daerah. Pendekatan ini mencakup analisis ilmiah dan metode perencanaan (teknokratis), pelibatan DPRD dan elemen politik (politik), partisipasi aktif masyarakat (partisipatif), penyelarasan rencana dari pusat hingga daerah (*top-down*), serta masukan dari tingkat lokal (*bottom-up*).

Pendekatan Teknokratis melibatkan penggunaan metode dan kerangka ilmiah oleh pemerintah daerah dan pakar perencanaan untuk menganalisis kondisi, potensi, masalah, serta isu-isu strategis lima tahun ke depan. Pendekatan Partisipatif melibatkan masyarakat, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya melalui forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Konsultasi Publik untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan dalam proses perencanaan. Pendekatan Politik mengakomodasi keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembahasan rancangan awal hingga penetapan RPJMD menjadi peraturan daerah, yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pendekatan Atas-Bawah (Top-Down) menyelaraskan rencana pembangunan dari tingkat yang lebih tinggi (nasional dan provinsi) ke tingkat daerah, memastikan adanya keselarasan arah kebijakan. Serta Pendekatan Bawah-Atas (Bottom-Up) mengintegrasikan masukan dari tingkat paling bawah, seperti desa dan kecamatan, melalui forum perencanaan untuk memastikan perencanaan yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengamatkan pada pasal 201 ayat (8) bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.



Pemilukada serentak¹ bertujuan untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan anggaran pemerintah yang berujung pada terwujud pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Dengan adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, maka penyusunan dokumen RPJMD baru pun dilaksanakan serentak. Hal ini merupakan momentum yang tepat untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pusat dengan daerah. Penyeragaman periodisasi RPJMD diseluruh daerah merupakan upaya untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Periode/waktu pembangunan yang sama akan semakin memudahkan dalam mencapai target pembangunan nasional maupun daerah.

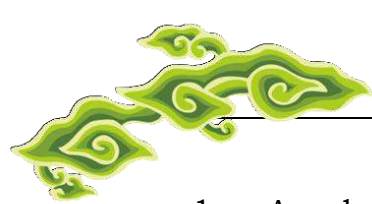
Kota Cirebon merupakan salah satu daerah yang melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tanggal 27 November 2024. Selanjutnya, berdasarkan ditetapkan pemenangnya yaitu pasangan Bapak Effendi Edo, S.AP., M.Si dan Ibu Siti Farida Rosmawati, S.Pd.I sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih periode 2025-2030 serta telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.

RPJMD Kota Cirebon sebagai penjabaran visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Cirebon 2025-2045 pada Periode 1 Tahun 2025-2029, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Cirebon 2025-2029 dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Adapun muatan RPJMD meliputi: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, RPJMD yang telah disusun menjadi dasar bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di RPJMD dengan perencanaan operasional di Perangkat Daerah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Bidang pembangunan yang termuat dalam RPJMD ini mencakup seluruh aspek dan urusan dalam pembangunan wilayah di Kota Cirebon , mencakup:

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

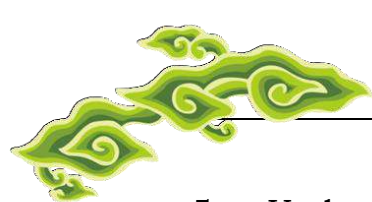


1. Aspek geografi dan demografi, meliputi kondisi fisik alami wilayah hingga kependudukan dan komponen didalamnya;
2. Aspek kesejahteraan masyarakat, mencakup kesejahteraan ekonomi maupun kesejahteraan sosial budaya;
3. Aspek daya saing daerah, mencakup daya saing ekonomi, daya saing sumber daya manusia, daya saing infrastruktur, serta daya saing iklim investasi; serta
4. Aspek pelayanan umum (bidang Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan permukiman, perlindungan masyarakat, dan social), urusan wajib (bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, perhubungan, kominfo, KUKM, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, dll), urusan pilihan (bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, ESDM, Perdagangan, dan perindustrian), fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

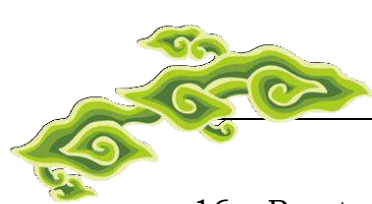
1.2 Dasar Hukum

Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

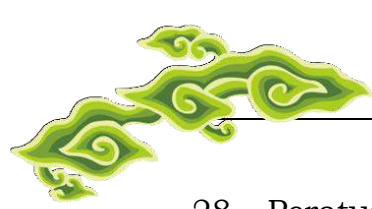
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);



5. Undang-undang (UU) Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);



16. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;



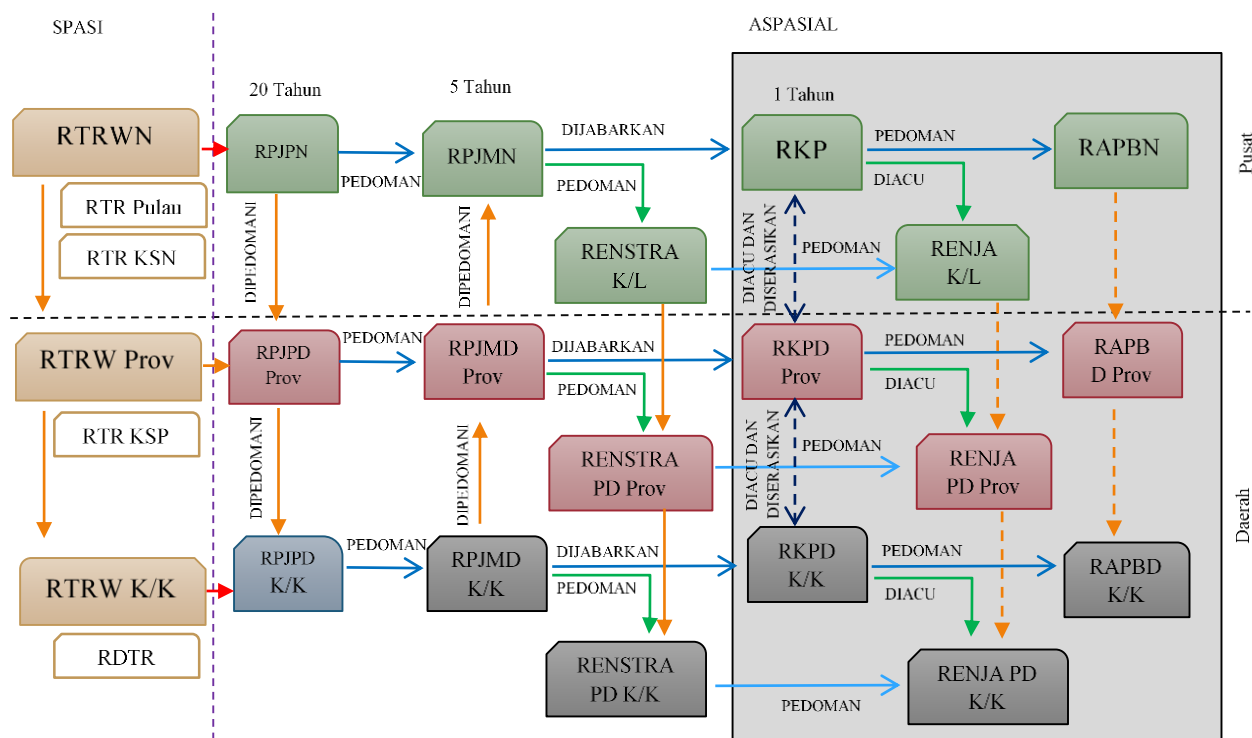
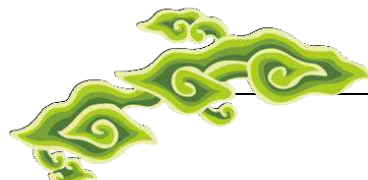
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2025-2045;

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu Dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Cirebon 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029.

Terdapat dua aspek utama keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dipahami pada uraian dan gambar berikut:

1. Sinkronisasi perencanaan; pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, seperti RPJPN dan RPJMN;
2. Konsistensi; apa yang direncanakan perlu disusun pula anggarannya, dan apa yang telah dianggarkan sudah sesuai dengan dasar perencanaan. Tidak boleh ada program / kegiatan yang tercantum dalam dokumen APBD namun tidak ada dalam RKPD (dan juga sebaliknya).



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan (pengembangan dari Permendagri 86/2017 dan UU 25/2004)

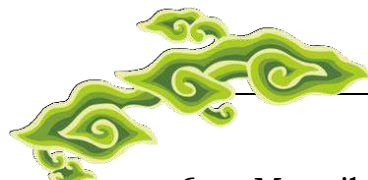
Sumber: Permendagri 86/2017 dan UU 25/2004; diolah.

RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan arahan dan amanat kebijakan yang tercantum dalam dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sejumlah keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan baik yang bersifat nasional maupun regional Jawa Barat dijelaskan di bawah ini.

1.3.1 Hubungan Antara RPJMD Kota Cirebon dengan RPJMN

Kebijakan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 tidak lepas dari penyelarasan dengan agenda pembangunan nasional tahun 2025-2029 yang tertuang pada RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu ASTA CITA sebagai berikut:

1. Memberi makanan dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.

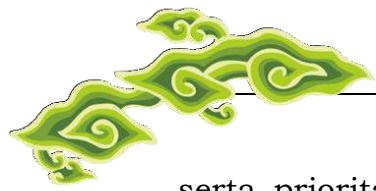


6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23 persen.

Selain harus diselaraskan dengan 17 Program Prioritas pada RPJMN yaitu:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersantitas baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya.
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA, termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Penyusunan RPJMD Kota Cirebon perlu memperhatikan arahan-arahan nasional yang termuat dalam RPJMN, khususnya yang berkaitan dengan lokus wilayah dan kebijakan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan di daerah. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 dengan arah kebijakan umum



serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

1.3.2 Hubungan Antara RPJMD Kota Cirebon dengan RPJPD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah

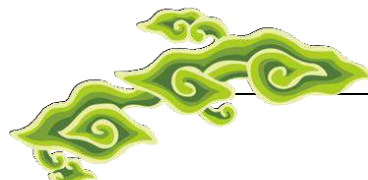
Dokumen RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045 memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, merupakan salah satu pedoman bagi penyusunan RPJMD. Penyusunan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap I RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045.

RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD ini, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota Cirebon. Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun, berdasarkan Renstra PD.

1.3.3 Hubungan Antara RPJMD Kota Cirebon dengan RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045

RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045. RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD Tahap 1, sehingga diperlukan keselarasan dalam penyusunannya untuk mendukung pembangunan jangka panjang daerah.

RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahap 1 yaitu Tahapan Pondasi dalam skenario pembangunan jangka panjang daerah.



Gambar 0-1 Tahapan Perencanaan Pembangunan

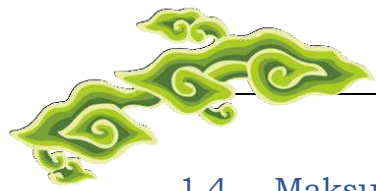
Sumber : Bappelitbangda Kota Cirebon, 2024

1.3.4 Hubungan Antara RPJMD Kota Cirebon dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu RPJMD Kota Cirebon 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Cirebon 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045, dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Selain dokumen-dokumen perencanaan di atas juga perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain: (1) Agenda pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs); (2) RPJMD dan RTRW kabupaten sekitar; dan (3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Cirebon 2025-2029.

Selanjutnya RPJMD Kota Cirebon 2025-2029 dilakukan penyempurnaan berdasarkan hasil fasilitasi dengan Gubernur Jawa Barat cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. RPJMD Kota Cirebon 2025-2029 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029.



1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kota Cirebon 2025-2029 adalah:

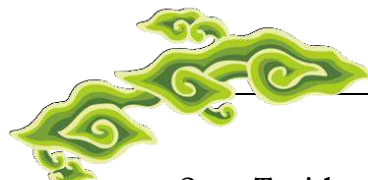
1. Memberikan pedoman dan arah pembangunan bagi seluruh stakeholders pembangunan Kota Cirebon untuk pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;
5. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah;
6. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Cirebon dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Cirebon 2025-2029.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kota Cirebon 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih melalui perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan;
2. Mewujudkan pembangunan daerah yang mengedepankan pada pembangunan kewilayahan, dengan memperhatikan potensi daerah;
3. Menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah antara Kota Cirebon dengan daerah sekitar, Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat;
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sasaran penyusunan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 dirancang untuk mencapai hal-hal berikut yang bersifat konkret dan terukur:

1. Tersusunnya Dokumen RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.



2. Teridentifikasinya secara komprehensif potensi, permasalahan, tantangan, dan pelaku pembangunan di Kota Cirebon berdasarkan hasil evaluasi RPJMD sebelumnya serta kajian data dan prognosa terkini.
3. Terwujudnya partisipasi aktif dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk Perangkat Daerah, DPRD, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam seluruh tahapan penyusunan RPJMD.
4. Terjaminnya keselarasan dan keterkaitan (*linkage and match*) antara RPJMD dengan RPJPD, RTRW, serta dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat).
5. Terintegrasinya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan gender, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan hidup dalam setiap program dan kebijakan pembangunan yang dirumuskan.
6. Tersedianya kerangka pendanaan yang realistis dan indikatif untuk seluruh program prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan, yang menjadi acuan bagi penyusunan anggaran tahunan (RKPD).
7. Terciptanya sebuah dokumen perencanaan yang aplikatif, mudah dipahami, dan dapat dijadikan pedoman yang efektif bagi semua pihak dalam melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan Kota Cirebon untuk periode 2025-2029.

1.5 Sistematika Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029

Sistematika penyusunan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, sebagai berikut :

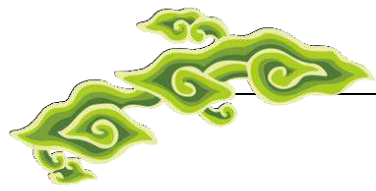
BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menjelaskan kondisi daerah dari 4 (empat) aspek yaitu: Aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, menyajikan capaian Standar Pelayanan Minimal, Kerjasama Daerah, Rencana Pembangunan Infrastruktur serta BUMD yang mendukung kinerja. Bab ini juga menyajikan gambaran ringkas kondisi keuangan daerah lima tahun 2020 – 2024 dan proyeksi keuangan daerah lima tahun ke depan yaitu 2025-2029, serta memuat permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah

BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN



DAERAH

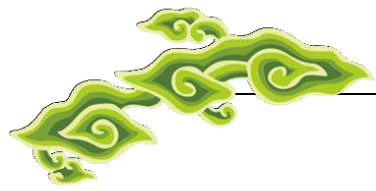
Bab ini menjelaskan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Kondisi Daerah

Kondisi Daerah di deskripsikan dari berbagai aspek yaitu: Geografi, Demografi, Kesejahteraan Rakyat, Daya Saing Daerah, Pelayanan Umum, Pemenuhan Pelayanan Dasar, Kerjasama Daerah dan Kinerja BUMD.

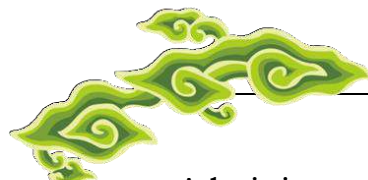
2.1.1 Aspek Geografi

Karakteristik geografis Kota Cirebon meliputi informasi mengenai letak, luas, geologi, topografi, iklim, dan hidrologi yang memiliki potensi bahaya dan risiko terhadap wilayah tersebut. Karakteristik Geografi lainnya seperti pemanfaatan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), laju konversi lahan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Risiko Bencana (IRB), Indeks Ketahanan Daerah (IKD), Indeks Ketahanan Pangan, Indeks Ketahanan Energi, Indeks Ketahanan Air dan informasi indikator lainnya.

2.1.1.1 Wilayah Administrasi

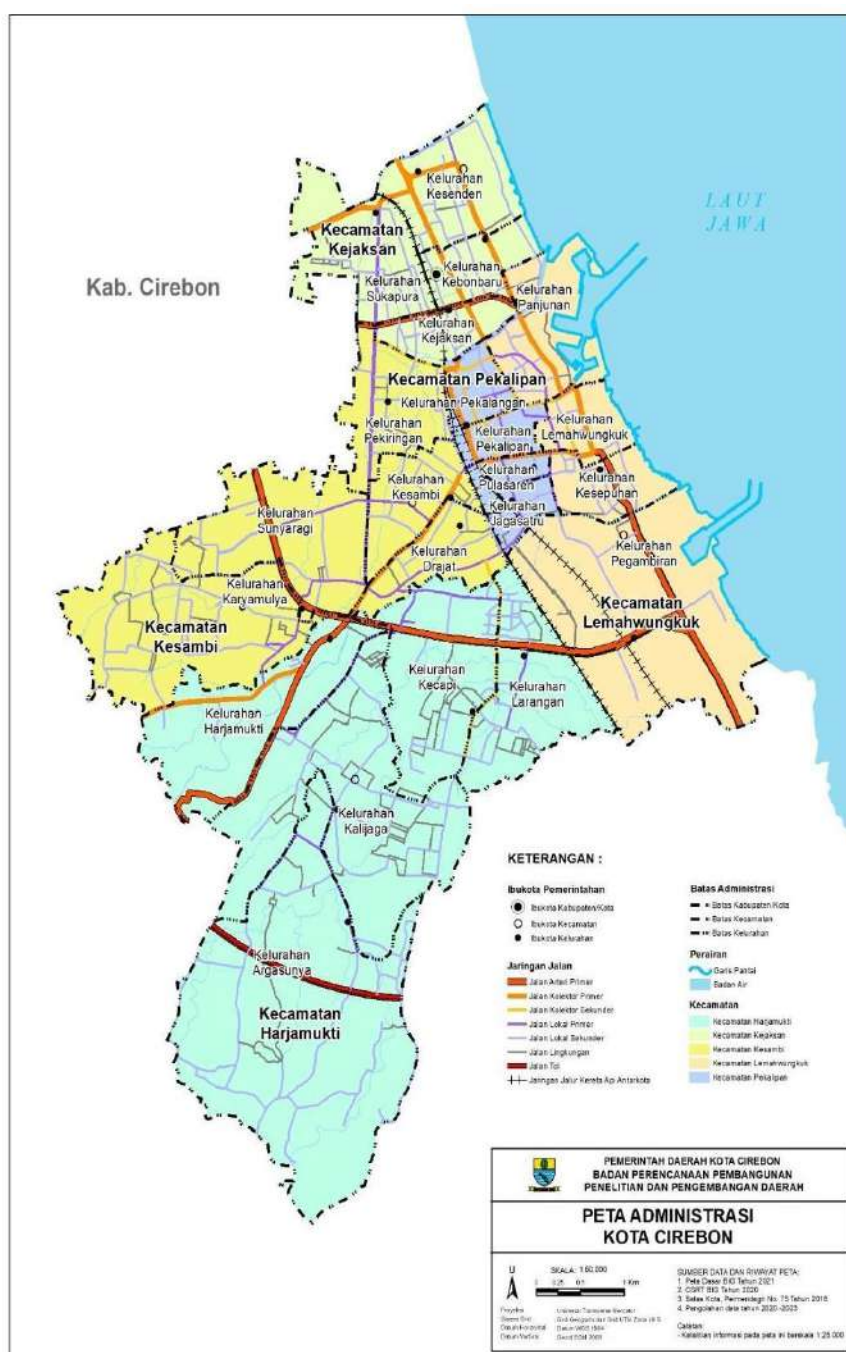
Kota Cirebon adalah kota yang terletak di daerah pesisir Pulau Jawa pada bagian timur laut wilayah Jawa Barat berbatasan langsung dengan Laut Jawa mendekati perbatasan Jawa Tengah pada sisi bagian Timur Laut setelah melewati wilayah Kabupaten Cirebon. Sebelum dokumen Rencana Tata Ruang & Wilayah 2011-2031 Kota Cirebon yg ditetapkan dalam tahun 2012, luas daerah Kota Cirebon adalah 38,1 km² sedangkan luas daerah Kota Cirebon pada Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 3 tahun 1989 adalah 37,35 km². Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 18 tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, ditetapkan luas daerah administrasi Kota Cirebon 37,36 km². Dengan adanya Peraturan Menteri dalam Negeri RI nomor 75 tahun 2018 mengakhiri perseteruan batas wilayah antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, dampak dari penetapan batas daerah terakhir adalah luas daerah Kota Cirebon menjadi bertambah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 050-145 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, menetapkan luas daerah administratif Kota Cirebon sebesar 39,44 km². Luas daerah tadi belum termasuk daerah Pelabuhan yg dikelola PT Pelabuhan Indonesia Regional II Cirebon seluas ±0,03 km² sehingga usulan perubahan perda Kota Cirebon nomor 8 tahun 2012 untuk luas wilayah Kota Cirebon sebesar 39,47 km². Mengacu pada Undang-Undang terbaru di tahun 2024 terkait Kota Cirebon sehingga luas Kota Cirebon dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 300.2.2-2138 tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah

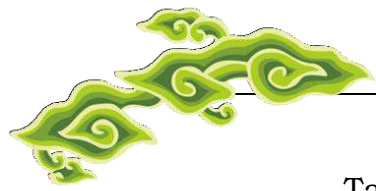


Administrasi Pemerintahan, dan Pulau maka ditetapkan daerah Kota Cirebon saat ini seluas 39,398 km².

Wilayah administrasi Kota Cirebon terdiri menurut 5 (lima) Kecamatan & 22 (dua puluh dua) Kelurahan dengan 249 total Rukun Warga (RW) dan 1.385 Rukun Tetangga (RT). Berikut merupakan Peta Wilayah Administrasi Kota Cirebon dengan pembagian wilayah kecamatan & wilayah kelurahan beserta rincian untuk RT/RW di 22 kelurahan per kecamatan.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Cirebon
Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon 2024



Tabel 2.1 Jumlah RW dan RT Kota Cirebon tahun 2024

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Harjamukti	Argasunya	11	59
		Kalijaga	15	121
		Harjamukti	13	59
		Kecapi	19	116
		Larangan	19	116
2.	Lemahwungkuk	Pegambiran	17	83
		Kesepuhan	9	63
		Lemahwungkuk	6	44
		Panjunan	10	42
3.	Pekalipan	Jagasatru	10	51
		Pulasaren	8	40
		Pekalipan	12	50
		Pekalangan	9	45
4.	Kesambi	Karyamulya	18	92
		Sunyaragi	11	55
		Drajat	9	62
		Kesambi	7	47
		Pekiringan	11	57
5.	Kejaksan	Kejaksan	7	40
		Sukapura	10	58
		Kebonbaru	7	37
		Kesenden	11	48
Jumlah		22	249	1.385

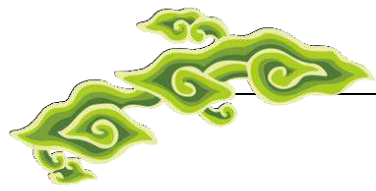
Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2025

2.1.1.2 Karakteristik Geografis

Posisi Kota Cirebon yang strategis karena berada di perlintasan jalur utara ke arah jalur selatan di ujung utara sebelah timur Provinsi Jawa Barat. Letak titik nol Kota Cirebon Koordinat berada pada koordinat 6° 43' 10.5" lintang selatan dan 108° 34' 18.7" bujur timur. Bentuk wilayah Kota Cirebon memanjang ±7,96 kilometer dari barat ke arah timur dan ±11,9 kilometer dari utara ke arah selatan.

2.1.1.2.1 Topografi

Sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi yang rata-rata berada pada ketinggian ±5 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan dataran tinggi pada wilayah selatan hingga ±136 mdpl pada sebagian kecamatan Harjamukti, yaitu 287,59 Ha di ketinggian 50-100 mdpl dan 78,45 Ha di ketinggian 100-136 mdpl.



Tabel 2.2 Kondisi Topografi Kota Cirebon (Ha)

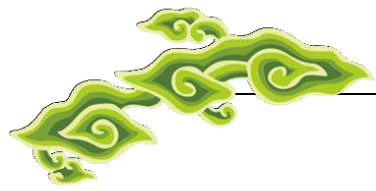
Wilayah	0-50 mdpl	50-100 mdpl	100-136 mdpl	Jumlah
Kecamatan Kejaksan	442,93	-	-	442,93
Kecamatan Lemahwungkuk	718,94	-	-	718,94
Kecamatan Harjamukti	1.394,3	287,59	78,45	1.760,35
Kecamatan Pekalipan	159,76	-	-	159,76
Kecamatan Kesambi	865,31	-	-	865,31

Sumber : Laporan KLHS RTRW, 2022

Wilayah Kota Cirebon dapat diklasifikasikan kemiringan lahannya berdasarkan rentang berikut: (1) Kemiringan 0-2% wilayah Kota Cirebon dengan luasan sebesar 3.442,05 Ha, kecuali sebagian kecil wilayah di Kecamatan Harjamukti; (2) Kemiringan 2-15% di sebagian wilayah Kecamatan Harjamukti dengan luasan sebesar 338,59 Ha; (3) Kemiringan 15-25% di sebagian wilayah Kecamatan Harjamukti dengan luasan sebesar 166,64 Ha.

Besar kemiringan tanah menentukan tingkat resapan terhadap air hujan, semakin landai maka tingkat resapan semakin besar. Hal ini terkait curah hujan tahunan di Kota Cirebon termasuk dalam klasifikasi hujan infiltrasi rendah² yaitu 1500-3000 mm per tahun, yang mempengaruhi kuantiti potensi air tanah dari resapan air hujan di wilayah dengan kemiringan tanah yang besar untuk wilayah selatan Kota Cirebon.

² Chow, V.T. 1968. Handbook of Applied Hydrology. McGraw-Hill Book Co. New York.

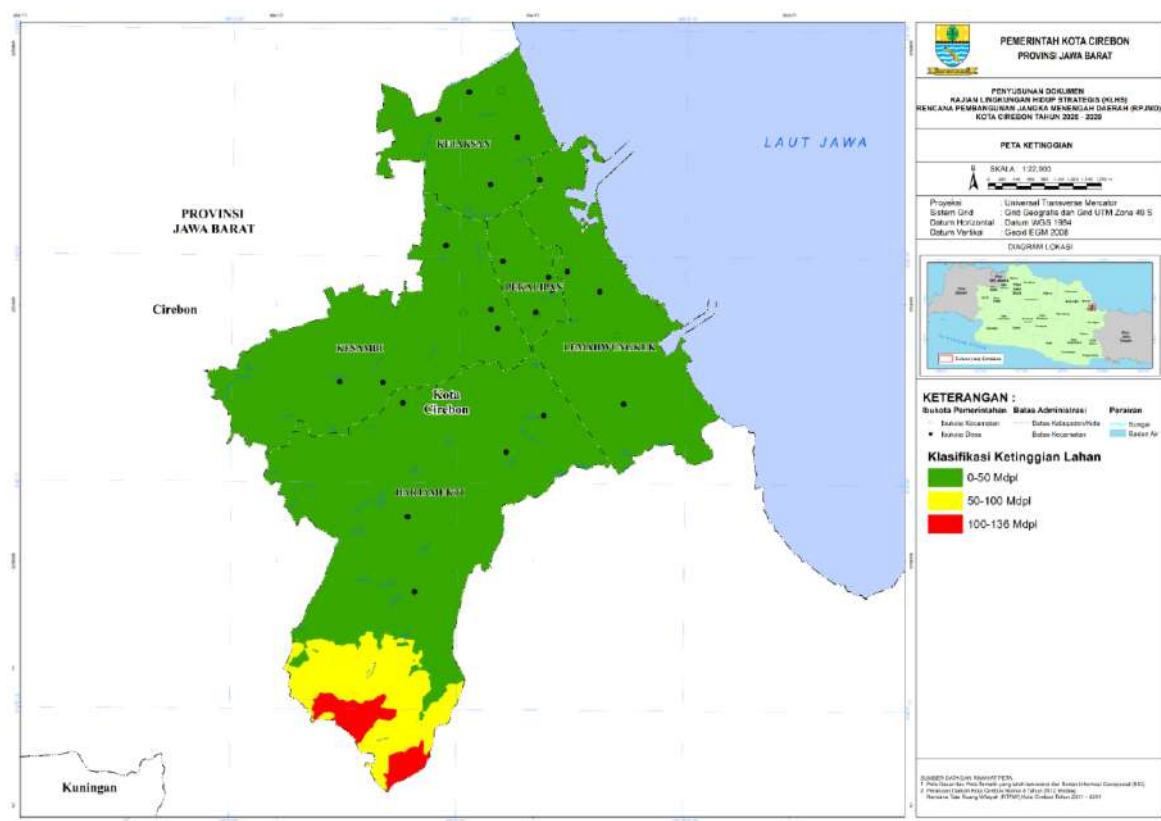


Tabel 2.2 Kondisi Kemiringan Tanah Kota Cirebon (Ha)

Wilayah	0-2 %	2-15 %	15-25 %	Jumlah
Kecamatan Kejaksan	442,93	-	-	442,93
Kecamatan Lemahwungkuk	718,94	-	-	718,94
Kecamatan Harjamukti	1.255,11	338,59	166,65	1.760,35
Kecamatan Pekalipan	159,76	-	-	159,76
Kecamatan Kesambi	865,31	-	-	865,31

Sumber : Laporan KLHS RTRW, 2022

Berikut peta ketinggian dan peta kemiringan lereng yang dapat menggambarkan Kota Cirebon dari sisi topografi hasil kajian lingkungan hidup strategis untuk dokumen RPJMD Kota Cirebon 2025-2029.



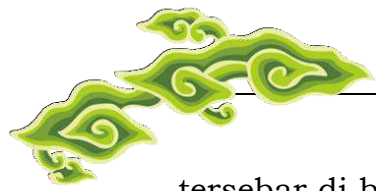
Gambar 2.1 Peta Ketinggian Kota Cirebon

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kota Cirebon 2025-2029.

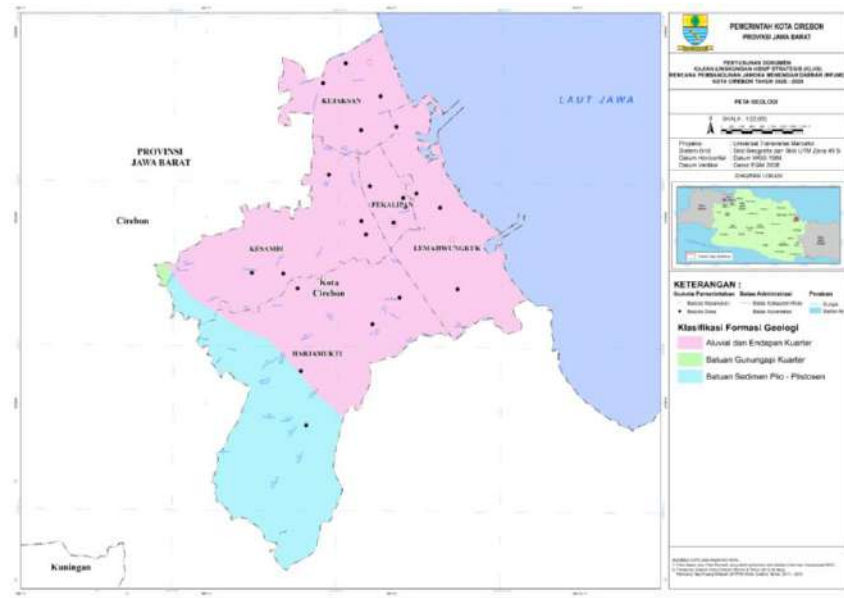


Hasil kajian pemetaan geologi regional ³ menunjukkan bahwa wilayah pesisir Cirebon dan sekitarnya mempunyai endapan aluvial (Qa) yang terdiri dari kerikil berwarna abu-abu, pasir, dan lempung. Sedangkan endapan di wilayah pesisir (Qac) terdiri dari tanah liat berwarna abu-abu dengan lumpur, lanau, dan cangkang kerang setebal beberapa meter dari endapan rawa. Secara geologi wilayah pesisir Pelabuhan Cirebon, litologi endapan aluvial pesisir terdiri dari endapan lempung dan pasir berselang-seling. Morfologi dasar laut perairan pelabuhan Cirebon sangat landai dan tinggi, hal ini kemungkinan erat kaitannya dengan aktivitas pasang surut perairan tersebut. Aluvium sendiri terdiri dari kerikil, pasir, dan lempung berwarna abu-abu merupakan hasil endapan setebal ± 5 meter di sepanjang dataran banjir. Endapan permukaan ini menyebar ke utara dan timur.

³ Silitonga, P.H., Masria, M., dan Suwarna, N., 1996, Peta Geologi Regional



tersebar di bagian selatan. Kelompok batuan ini berasal dari gunung berapi dan dapat dikendalikan serta dipisahkan oleh pengaruh derajat erosi dan mekanisme pembentukannya. Berikut adalah Peta Geologi Kota Cirebon berdasarkan Dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RPJMD Kota Cirebon 2025-2029.



Gambar 2.3 Peta Geologi Kota Cirebon

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Cirebon 2025-2029

2.1.1.2.3 Klimatologi

Di Indonesia beberapa tahun terakhir, terjadi fluktuasi curah hujan akibat dampak fenomena El Niño dan La Niña. El Niño merupakan fenomena yang mempengaruhi wilayah Indonesia melalui kekeringan. Sedangkan fenomena La Niña membawa curah hujan lebih banyak dari biasanya.

Suhu di Kota Cirebon cukup tinggi karena terletak di pesisir utara Pulau Jawa, dan suhu rata-rata pada tahun 2023 diperkirakan antara 26,4°C hingga 30,6°C. Sedangkan rata-rata suhu minimum dan maksimum bulanan adalah 28,3 °C. Pada tabel berikut disajikan data fluktuasi suhu udara di Kota Cirebon yang bersumber dari Pos Meteorologi Penggung.

Tabel 2.3 Suhu Udara Rata-rata Kota Cirebon (°C)

Bulan	2020			2021			2022			2023			2024		
	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks
Januari	23,6	27,8	35,2	23,2	26,5	33,0	23,0	27,3	34,4	22,8	26,9	35,5	23,2	28,0	35,4
Februari	23,0	27,2	33,8	22,8	26,5	33,8	23,0	26,9	34,6	22,8	26,4	33,6	23,4	28,0	35,4
Maret	21,4	27,7	34,4	22,2	27,3	34,6	22,6	27,4	34,5	22,2	27,3	34,8	23,4	28,1	35,4
April	23,2	28,0	34,8	22,8	28,1	35,0	22,8	27,9	34,8	22,8	27,8	34,6	24,0	29,2	35,8
Mei	23,8	28,3	34,8	22,9	28,4	34,8	22,8	28,1	34,4	22,7	28,6	34,2	22,8	29,1	35,6
Juni	22,8	27,8	34,6	23,0	27,3	34,4	22,4	27,2	33,6	21,9	28,4	35,6	22,4	28,2	34,7
Juli	21,0	28,0	34,0	21,2	27,7	34,6	21,0	27,5	34,0	22,0	28,1	34,4	19,2	27,8	34,8
Agustus	22,4	28,5	35,6	22,8	28,6	36,4	22,8	28,2	35,2	19,0	28,1	36,2	19,8	28,4	37,0
September	23,2	29,7	36,4	22,6	28,9	35,8	22,8	29,0	36,0	20,6	29,3	36,8	23,3	29,7	36,5
Oktober	23,2	29,2	37,0	23,0	29,5	37,0	22,6	28,0	35,4	21,5	30,6	38,4	22,0	30,7	38,1



Bulan	2020			2021			2022			2023			2024		
	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks
Nopember	23,6	28,6	35,4	22,2	27,6	35,0	22,0	27,5	35,0	24,2	30,2	37,4	23,4	29,2	36,0
Desember	22,9	26,9	34,0	22,8	27,4	34,4	22,4	27,2	34,0	23,8	29,4	36,4	23,8	28,0	35,0
Rata-rata	22,8	28,1	35,0	22,6	27,8	34,9	22,5	27,7	34,7	24,0	29,9	36,9	23,6	28,6	35,5

Sumber: Posmet BMKG Penggung Cirebon.

Curah hujan umumnya terjadi pada bulan Oktober hingga Juni dan hujan tidak terjadi pada bulan Agustus hingga September. Peningkatan intensitas curah hujan tidak berbanding lurus dengan jumlah curah hujan yang turun pada setiap periodenya. Hal ini terlihat pada tahun 2022 dengan curah hujan mencapai puncaknya sebesar 2.725 mm dan mengalami penurunan rata-rata 15,67 hari per bulan.

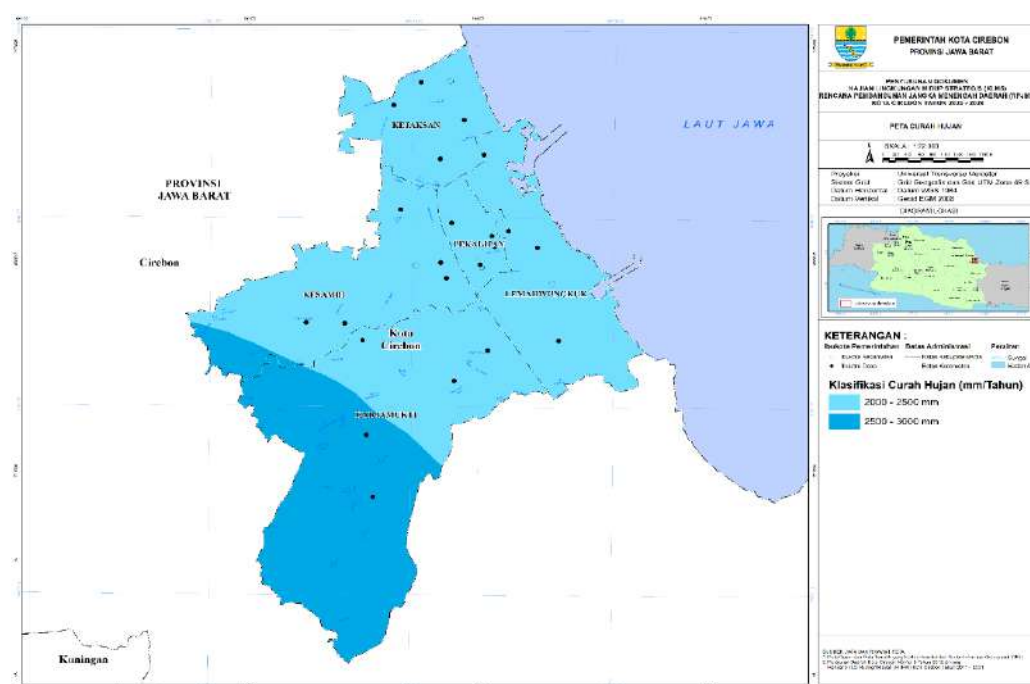
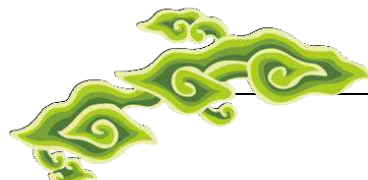
Tabel 2.4 Curah Hujan (total, tertinggi harian) dan Hari Hujan di Kota Cirebon

Bulan	2020			2021			2022			2023			2024		
	Curah Hujan	Hari	Harian Tertinggi	Curah Hujan	Hari	Harian Tertinggi	Curah Hujan	Hari	Harian Tertinggi	Curah Hujan	Hari	Harian Tertinggi	Curah Hujan	Hari	Harian Tertinggi
Januari	550	24	148,0	437,5	25	77,3	490,1	26	99,5	409,8	18	120,5	387,1	22	75,3
Februari	588,3	25	146,1	540,5	21	102,5	242,9	22	40,2	396,1	23	89,5	599,0	20	146,0
Maret	370,5	25	101,8	261,7	19	64,4	242,9	22	78,0	204,8	10	73,9	147,2	11	47,2
April	176,5	16	34,8	134,6	11	44,5	293,5	15	81,0	207,3	20	47,5	126,0	12	37,0
Mei	240,1	17	51,2	55	7	27,1	168,3	16	59,5	86,5	10	29,2	48,4	4	21,5
Juni	92,6	7	33,0	159,4	14	68,8	126,6	14	30,0	62,3	3	35,2	92	8	45,0
Juli	50,9	3	28,0	20,4	5	8,4	212,1	10	81,0	11,0	3	11,0	60,9	4	63,7
Agustus	8,3	6	3,0	16,5	4	8,0	1,7	2	1,2	0	0	0	1,0	1	1,0
Septemb er	18,6	4	9,6	118,1	7	45,6	27,1	7	10,0	0	0	0	35,0	4	18,0
Oktober	137,7	9	48,6	67,8	5	40,5	327,6	16	139,4	5	4	5	0	0	0
Nopembe r	212,8	14	83,2	302,5	23	59,5	182,2	20	46,3	82,5	11	46,5	2,0	2	1,0
Desembe r	212,8	22	120,7	418,3	27	101,4	409,8	18	130,8	114,7	14	30,7	263	15	62
Jumlah	2.659,1	172		2.532,3	168		2.724,8	188		1.580	116		1761,6	103	
Rata-rata	221,59	14,33		211,03	14		227,1	15,67		131,67	9,67		146,8	8,6	

Sumber: BMKG Posmet Penggung

Catatan: satuan Hari Hujan (Jumlah Hari Hujan), Satuan Curah Hujan (mm)

Hujan deras di beberapa wilayah Kota Cirebon telah mengakibatkan banjir besar, hal ini disebabkan oleh daya tampung drainase yang kurang mencukupi dan berkurangnya kapasitas resapan air akibat tutupan lahan sebagai dampak dari pembangunan disamping dampak curah hujan yang lebih besar pada wilayah dataran tinggi sebelah selatan Kota Cirebon juga akan berimbas ke arah perkotaan di pesisir laut Jawa yang merupakan dataran rendah.



Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kota Cirebon

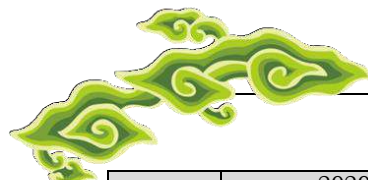
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Cirebon 2025-2029.

Kecepatan angin di Kota Cirebon cukup kencang, hal ini disebabkan lokasi Kota Cirebon yang berada di pesisir utara pulau jawa. Dalam tahun 2023, kecepatan tertinggi dari arah selatan terjadi pada bulan Agustus dan bulan September sebesar 56 km/jam. Sedangkan kecepatan rata-rata tertinggi terjadi pada bulan september antara 11-43 km/jam. Kecepatan angin 2 meter per detik (7,2 km/jam) memiliki potensi untuk menjadi sumber energi yang menghasilkan listrik melalui turbin⁴. Berikut data BMKG untuk kecepatan angin di Kota Cirebon.

Tabel 2.5 Kecepatan Angin di Kota Cirebon (km/jam)

Bulan	2020			2021			2022			2023			2024		
	Maks	Rata ²	Arah Angin	Maks	Rata ²	Arah Angin	Maks	Rata ²	Arah Angin	Maks	Rata ²	Arah Angin	Maks	Rata ²	Arah Angin
Januari	26	N/A	Barat	30	5-15	Barat	46	5-20	Timur Laut	46	7-18	Barat	50	2-20	Barat Laut
Februari	35	N/A	Barat	37	N/A	Barat	46	6-16	Barat	48	7-28	Barat	41	3-20	Barat Laut
Maret	26	N/A	Barat	37	N/A	Barat	72	6-18	Barat	46	6-24	Barat	48	3-24	Barat
April	22	N/A	Timur Laut	39	7-13	Timur Laut	44	6-8	Timur	31	7-20	Barat Laut	41	4-13	Timur
Mei	24	N/A	Timur	24	13-24	Timur	43	6-16	Timur	46	8-28	Selatan	46	5-25	Timur Laut
Juni	22	N/A	Timur	26	9-26	Timur	41	4-25	Selatan	33	9-23	Selatan	33	5-21	Timur

⁴ Suandi, Andi, et al. "Analisis Pengaruh Kecepatan Angin Pada Pembangkit Listrik Tenaga Angin." Teknobiz: Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Teknik Mesin 12.3 (2022): 168-173.



Bulan	2020			2021			2022			2023			2024		
	Maks	Rata ²	Arah Angin	Maks	Rata ²	Arah Angin	Maks	Rata ²	Arah Angin	Maks	Rata ²	Arah Angin	Maks	Rata ²	Arah Angin
Juli	37	N/A	Selatan	35	8-35	Selatan	35	6-24	Selatan	52	10-38	Selatan	46	12-31	Selatan
Agustus	33	N/A	Timur	37	8-37	Selatan	43	8-33	Selatan	56	9-41	Selatan	52	19-30	Selatan
September	37	N/A	Selatan	37	8-37	Selatan	37	8-25	Selatan	56	12-43	Selatan	46	8-31	Timur Laut
Oktober	46	N/A	Selatan	33	7-33	Selatan	30	5-19	Selatan	21	11-26	Timur Laut	48	8-27	Selatan
November	41	N/A	Timur	33	5-11	Timur Laut	41	6-15	Timur Laut	33	8-24	Timur Laut	22	9-22	Timur Laut
Desember	52	N/A	Barat	26	4-26	Timur Laut	46	7-18	Barat	37	4-16	Timur Laut	26	8-26	Barat

Sumber: Posmet BMKG Penggung Cirebon.

Di samping angin yang cukup kencang karena lokasinya sebagai kota di pesisir Pulau Jawa, potensi intensitas matahari maksimal sepanjang tahun walaupun terjadi anomali pada tahun 2022 karena curah hujan yang tinggi dan hujan selama 188 hari. Intensitas matahari yang cukup menjadi sumber energi yang sangat potensial untuk memenuhi kebutuhan di Kota Cirebon seperti disajikan pada data BMKG untuk potensi intensitas sinar matahari dengan sumber data Stasiun Meteorologi Kertajati. Untuk itu diperlukan upaya pemerintah dalam mendorong pengembangannya sebagai sumber energi terbarukan yang dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik.

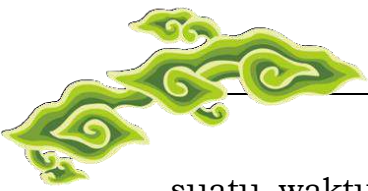
Tabel 2.6 Intensitas Matahari di Stamet Kertajati (%)

Bulan	2020			2021			2022			2023			2024		
	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²
Januari	100	55	91,5	100	68	89	100	64	85	100	49	78	100	75	94,2
Februari	100	67,5	92,8	100	3	83	100	54	81	100	43	88	100	60	88,8
Maret	100	62,5	93,8	100	60	89	N/A	N/A	N/A	100	25	89	100	75	92,0
April	100	45	93	100	74	93	100	63	90	100	2,5	83,2	100	78	96,0
Mei	100	56,3	95	100	78	97	100	13	84	100	16,3	89,43	100	62,5	96,5
Juni	100	91	98	100	56	92	100	63	88,3	100	51	95	100	8	71
Juli	100	88	98,8	100	34	88	100	41	79	100	70	97	100	58	95
Agustus	100	88	99	100	12	86	100	75	91	100	88	96	100	90	95
September	100	73	96	100	56	96	75	13	56	100	90	100	100	67,5	98
Oktober	100	59	93	100	63	94	100	34	76	100	37,5	96,2	100	58	95
November	100	62,5	92,7	100	13	80	93	41	68	100	73	93	100	51	84
Desember	100	3	87	100	16	82	100	49	82	100	12,5	86,8	100	10	88

Sumber: Stamet BMKG Kertajati

2.1.1.2.4 Penggunaan Lahan

Lahan merupakan salah satu elemen utama pembentuk ruang kota tempat berlangsungnya aktivitas perkotaan, tata guna lahan harus dikelola agar dapat memberikan manfaat optimal sebagai sumber daya yang sangat penting bagi suatu kota. Dari sudut pandang ekonomi, lahan merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam produksi (Lichrield dan Drabkin, 1980). Penggunaan lahan dapat dipahami sebagai wujud atau bentuk usaha kegiatan, pemanfaatan suatu bidang tanah pada

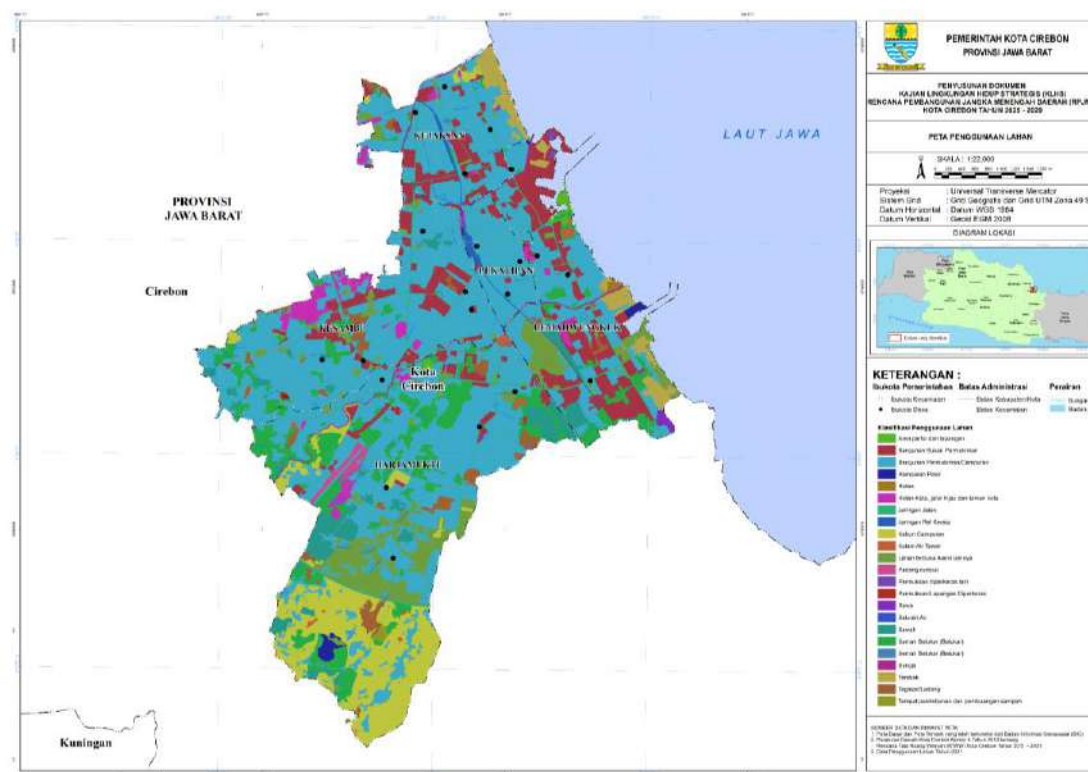
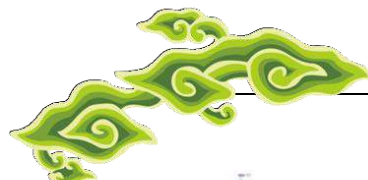


suatu waktu (Jayadinata, 1992). Secara umum penggunaan lahan dapat diperkirakan dari rasio lahan terbangun dan lahan belum dikembangkan dengan 24 jenis lahan.

Secara visual pada peta penggunaan lahan Kota Cirebon tahun 2023 pola ruang untuk guna lahan ruang terbuka yang berkurang cukup signifikan, hal ini merupakan konsekuensi terhadap perkembangan kota dan pertambahan jumlah penduduk dalam pemanfaatan ruang. Berdasarkan hasil kajian penggunaan lahan tahun 2009 oleh Bappeda Kota Cirebon, persentase lahan terbangun sebesar 53,25% dan lahan belum terbangun sebesar 46,75%. Sedangkan persentase lahan terbangun pada tahun 2023 sebesar 63,41% dan sebesar 36,59% merupakan lahan yang belum dikembangkan. Sebagai kota dengan wilayah yang relatif kecil dan karakter kawasan urban, tak heran jika penggunaan lahan di wilayah Kota Cirebon didominasi oleh lahan terbangun. Hal ini berkorelasi erat dengan dinamika pembangunan sektor perdagangan dan jasa yang menjadi penggerak pembangunan Kota Cirebon.

Pengendalian penggunaan lahan perkotaan telah diupayakan melalui penyusunan Rencana Tata Ruang. Berdasarkan hasil penilaian terhadap pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon 2011-2031, Kawasan Lindung yang ditetapkan seluas 372,98 Ha, diperoleh hasil penilaian perwujudan rencana pola ruang kawasan lindung dalam RTRW Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

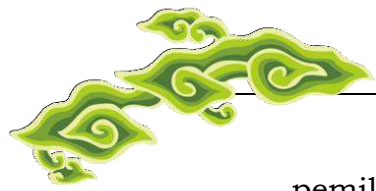
- Nilai pemanfaatan ruang yang tidak mendukung fungsi lindung adalah seluas 27,96 Ha atau 7,49% dari luas kawasan lindung yang ditetapkan;
- Nilai perwujudan yang sudah terwujud adalah seluas 345,03 Ha atau 92,51% dari luas kawasan lindung yang ditetapkan.



Gambar 2.5 Penggunaan Lahan Kota Cirebon
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Cirebon 2025-2029.

Sementara itu, Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya yang ditetapkan adalah seluas 3.489,44 Ha, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

- Nilai perwujudan rencana pola ruang kawasan budidaya adalah seluas 1.987,64 Hektar atau 56,96% dari kawasan budidaya yang ditetapkan.
- Nilai pemanfaatan ruang yang belum terwujud adalah seluas 1.475,81 Ha atau 42,29% dari luas kawasan budidaya yang ditetapkan.
- Nilai pemanfaatan ruang yang tidak sesuai adalah seluas 25,99 Ha atau 0,74% dari luas kawasan budidaya yang ditetapkan.
- Terdapat banyak tantangan dalam upaya perwujudan rencana tata ruang. Dalam perwujudan kawasan lindung, lebih dari 90% rencana telah terwujud. Hal ini menunjukkan berhasilnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang telah dilakukan, antara lain melalui mekanisme perizinan yang selama ini berlangsung. Selain itu, terdapat regulasi yang mendukung upaya perlindungan terhadap kawasan lindung yang umumnya merupakan ruang-ruang hijau, baik regulasi di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.
- Sementara itu, tantangan yang lebih besar dihadapi dalam upaya perwujudan kawasan budidaya. Nilai perwujudan kawasan budidaya diperoleh sekitar 57% atau dapat dikatakan perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya belum terwujud. Dalam realitasnya, tidak mudah menaklukkan kondisi eksisting di lapangan yang berbeda dengan rencana karena berbenturan dengan kepentingan



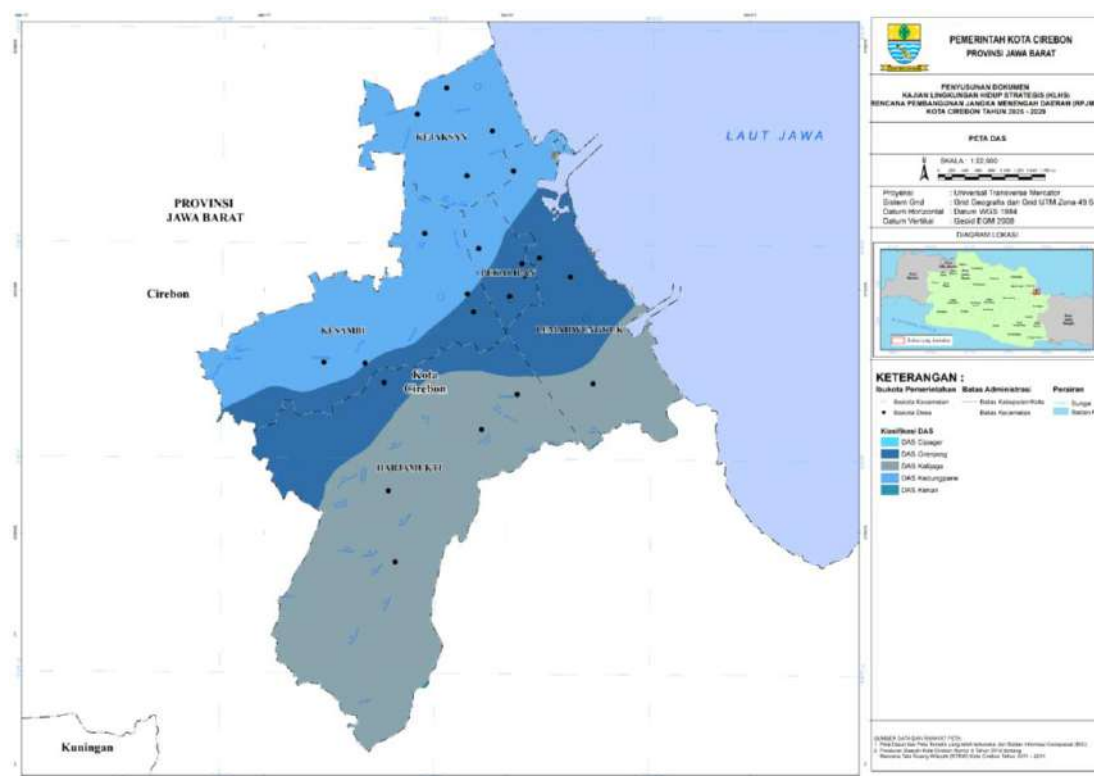
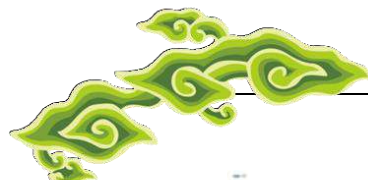
pemilik bangunan maupun pemilik lahan. Upaya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan seringkali menemui kondisi deadlock karena konsekuensi membongkar bangunan memiliki konsekuensi biaya yang tidak sedikit. Di luar itu, masih terhadap beberapa kelemahan pada sistem pengendalian yang melibatkan banyak pihak, kelembagaan maupun dukungan regulasi.

2.1.1.2.5 Hidrologi

Potensi air Kota Cirebon meliputi air laut, air permukaan, air tanah dangkal dan dalam. Kondisi air tanah relatif baik dengan kedalaman 5-10 meter untuk dataran rendah dan untuk dataran tinggi mencapai 20-30 meter khususnya di Wilayah kelurahan Argasunya. Sementara untuk air tanah di kawasan pantai pada umumnya sudah terkontaminasi air laut yang disebabkan adanya intrusi air laut.

Air bersih sebagai konsumsi rumah tangga sebagian besar bersumber dari pasokan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Giri Nata Kota Cirebon, yang sumber mata airnya berasal dari Cipaniis Kabupaten Kuningan. Sedangkan untuk keperluan lainnya sebagian besar diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara 2 (dua) meter sampai dengan 6 (enam) meter. Pada beberapa daerah/wilayah pesisir yang kondisi air tanahnya relatif sangat rendah dan rasanya asin karena intrusi air laut dan tidak dapat digunakan untuk keperluan air minum.

Kondisi air permukaan berupa air yang mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai. Di Kota Cirebon terdapat 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar merata di seluruh wilayah yaitu DAS Cipager (0,64 Ha), DAS Grenjeng (1.013,55 Ha), DAS Kalijaga (1.678,18 Ha), DAS Kedungpane (1.254,41 Ha), dan DAS Kenari (1,26). Beberapa sungai yang berada dalam lima DAS tersebut diantaranya Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila (penyatuan dari Sungai Sicemplung dan Sungai Sijarak), Sungai Kesunean (Kriyan) dan Sungai Kalijaga (penyatuan dari Sungai Cikalong, Sungai Cideng, dan Kali Lunyu). Sungai juga berfungsi sebagai batas wilayah antara Kabupaten Cirebon dan sebagai saluran pembuangan air.



Gambar 2.6 Peta Daerah Aliran Sungai Kota Cirebon
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Cirebon tahun 2025-2029

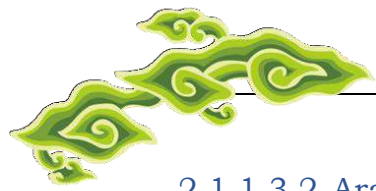
2.1.1.3 Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang merupakan upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya yang sesuai RTRW. Sesuai Pedoman RTRW dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang disebutkan bahwa arahan pemanfaatan ruang merupakan arahan pembangunan atau pengembangan wilayah kota untuk mewujudkan struktur dan pola ruang, yang meliputi:

1. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
2. Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan;
3. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

2.1.1.3.1 Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Penilaian terhadap simpangan pemanfaatan ruang dilakukan dengan cara melakukan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif. Simpangan pemanfaatan ruang dinilai dari besaran, jenis, dan dampak simpangan pemanfaatan ruang dengan rincian kriteria sebagai berikut



2.1.1.3.2 Arahan Pemanfaatan Ruang

1. Perwujudan struktur ruang, terdiri dari perwujudan dan pengembangan sistem pusat pelayanan/sistem perkotaan, perwujudan dan pengembangan sistem transportasi, perwujudan dan pengembangan sistem utilitas serta prasarana lingkungan;
2. Perwujudan pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya; dan
3. Pentahapan penanganan Kawasan Strategis Kota/KSK.

2.1.1.3.3 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. Ketentuan umum peraturan zonasi;
2. Ketentuan perizinan;
3. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
4. Arahan sanksi

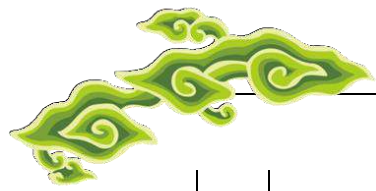
Implementasi yang sukses atau tidak sukses sebagai kepatuhan atau konsistensi antara rencana dan pengembangan aktual merupakan definisi dari pendekatan berbasis kesesuaian (Spurlock, 2019). Alat yang ampuh untuk merangsang dan menginformasikan kepada publik tentang rencana dan implementasi adalah wujud dari analisis implementasi rencana berbasis kesesuaian (Padeiro, 2016).

Hal-hal di atas memberikan gambaran akan pentingnya melakukan penilaian terhadap kebijakan rencana, dengan melakukan penilaian kesesuaian antara eksisting dengan rencana. Dalam kajian ini penilaian kesesuaian dilakukan berdasarkan pedoman dan berkaitan dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang, guna memberi penilaian kesesuaian realisasi program pemanfaatan ruang dengan indikasi program.

Kesesuaian atau kecocokkan program pemanfaatan ruang merupakan keberadaan program pembangunan sektor yang sesuai dengan indikasi program dalam Rencana Tata Ruang (RTR). Menilai kesesuaian program pemanfaatan perwujudan struktur ruang atau pola ruang merupakan jumlah program pemanfaatan ruang yang membentuk struktur ruang atau pola ruang yang sesuai dikaji dan dibandingkan dengan total jumlah program pemanfaatan ruang wujud struktur ruang atau pola ruang yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100%.

Tabel 2.7 Klasifikasi Nilai Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang

No	Nilai	Klasifikasi
1	0% - <50%	Kesesuaian pemanfaatan ruang diklasifikasikan tidak berkualitas, dalam artian pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR.

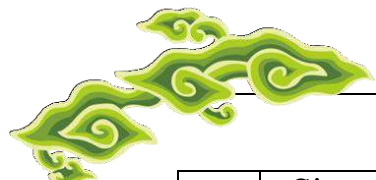


2	50% - <80%	Kesesuaian pemanfaatan ruang masuk dalam klasifikasi kurang berkualitas, dapat dikatakan pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR.
3	80% - 100%	Kesesuaian pemanfaatan ruang dianggap berkualitas, dalam pengertian pelaksanaan pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR

Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2017)

Tabel 2.8 Penilaian Simpangan Pemanfaatan Ruang

No.	Simpangan Pemanfaatan Ruang	Hasil Penilaian	Kriteria Minimal Yang Harus Dipenuhi	
1	Besaran Simpangan	Rendah	1	Realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam indikasi program 5 tahunan sama dengan atau lebih dari 50% dari rencana yang telah ditetapkan
			2	Penyimpangan Pemanfaatan Ruang kurang dari 20% dari Rencana dan Lokasi yang telah ditetapkan
		Tinggi	1	Realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam indikasi program 5 tahunan kurang dari 50% dari rencana yang telah ditetapkan
			2	Penyimpangan Pemanfaatan Ruang sama dengan atau lebih dari 20% dari rencana dan lokasi yang telah ditetapkan
2	Jenis Simpangan	Belum Terlaksana	1	Belum terlaksananya program karena terdapatnya kendala pembiayaan atau masalah lain yang merupakan penghambat realisasi program
		Tidak Sesuai	1	Terdapat program yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang
3	Dampak Simpangan	Kecil	1	Adanya dampak lingkungan dan/atau sosial ekonomi yang berskala kecil, yaitu dampak kepada individu



No.	Simpangan Pemanfaatan Ruang	Hasil Penilaian	Kriteria Minimal Yang Harus Dipenuhi	
				maupun lingkungan lokal setempat
			2	Tidak memberikan dampak ikutan terhadap lingkungan lokal setempat
		Besar	1	Adanya dampak lingkungan dan/atau sosial ekonomi yang berskala minimal kawasan dan/atau wilayah
			2	Memberikan dampak ikutan terhadap kawasan dan/atau wilayah yang ada disekitarnya

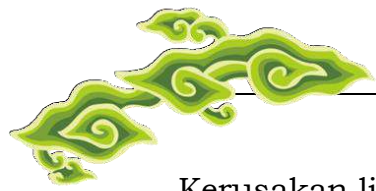
Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2017)

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap simpangan pemanfaatan ruang RTRW Kota Cirebon, maka penilaian terhadap simpangan pemanfaatan ruang RTRW Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Besaran Simpangan : Besaran simpangan pemanfaatan ruang di Kota Cirebon termasuk dalam kategori “RENDAH” karena :
 - Realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam indikasi program lima tahunan sama dengan atau lebih dari 50% dari rencana yang telah ditetapkan
 - Penyimpangan pemanfaatan ruang kurang dari 20% dari rencana dan lokasi yang telah ditetapkan
2. Jenis Simpangan : Jenis simpangan pemanfaatan ruang di Kota Cirebon termasuk dalam kategori “BELUM TERLAKSANA” karena masih banyaknya program yang belum direalisasikan, terutama disebabkan kendala pembiayaan atau masalah lain yang merupakan penghambat realisasi program.
3. Dampak Simpangan : Dampak simpangan pemanfaatan ruang di Kota Cirebon termasuk dalam kategori “KECIL” karena simpangan pemanfaatan ruang berdampak besar bagi Kota Cirebon, hal ini ditunjukkan dengan simpangan pemanfaatan ruang permukiman di kawasan ruang terbuka hijau berdampak terhadap kurangnya ruang terbuka hijau di beberapa kawasan Kota Cirebon.

2.1.1.4 Kualitas Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup menjadi dasar untuk menjaga kualitas lingkungan Hidup yang mencakup kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan secara berkelanjutan terutama pada aspek lingkungan seperti udara, air, tanah, serta keanekaragaman hayati.

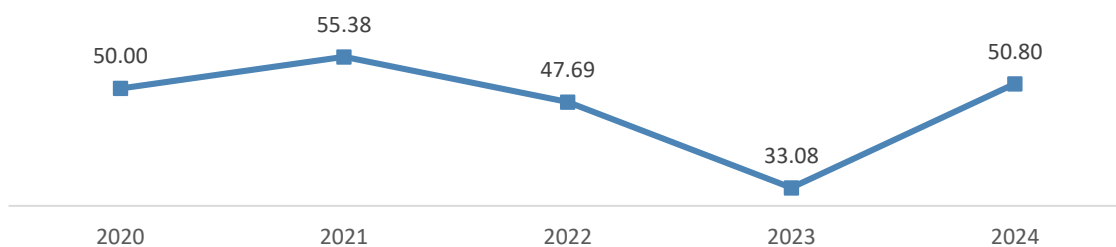


Kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor terjadinya bencana, seperti tersirat dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Berkurangnya daya serap air karena tutupan lahan sebagai dampak menurunnya kualitas lingkungan di Kota Cirebon. Hal ini disebabkan oleh adanya pembangunan tanpa diimbangi dengan pembangunan sumur resapan yang mengakibatkan bencana banjir di beberapa titik wilayah Kota Cirebon saat curah hujan yang tinggi melebihi daya tampung drainase yang kurang mencukupi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 tahun 2021 tentang IKLH yang merupakan nilai yang dapat menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada periode tertentu. Dalam mengukur capaian IKLH, dilakukan klasifikasi penilaian menjadi 5 kategori yaitu:

1. Sangat baik ($IKLH \geq 90$);
2. Baik ($70 \leq IKLH < 90$);
3. Sedang ($50 \leq IKLH < 70$);
4. Buruk ($25 \leq IKLH < 50$); dan
5. Sangat buruk ($IKLH < 25$).

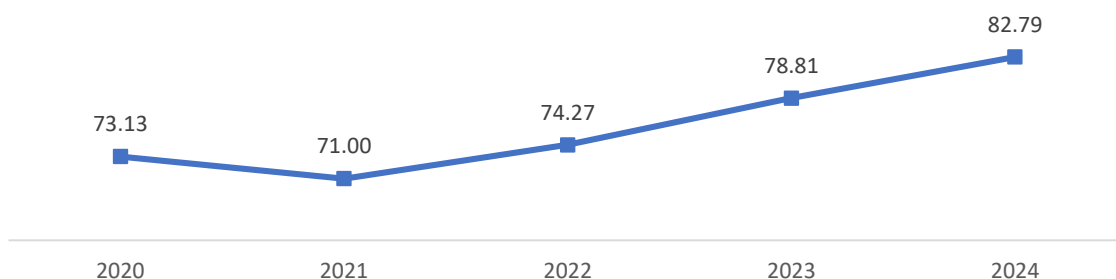
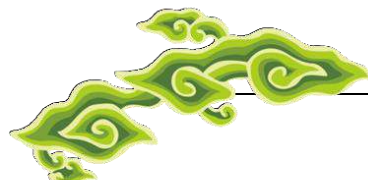
Indeks ini mencakup sejumlah kriteria yang mencerminkan keadaan lingkungan, baik dari segi biologis, fisik, maupun kimia dengan 4 (empat) indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Tolok ukur IKLH Kabupaten/Kota melalui perhitungan $(0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$.



Gambar 2.7 Indeks Kualitas Air Kota Cirebon

Sumber: DLH Kota Cirebon 2025

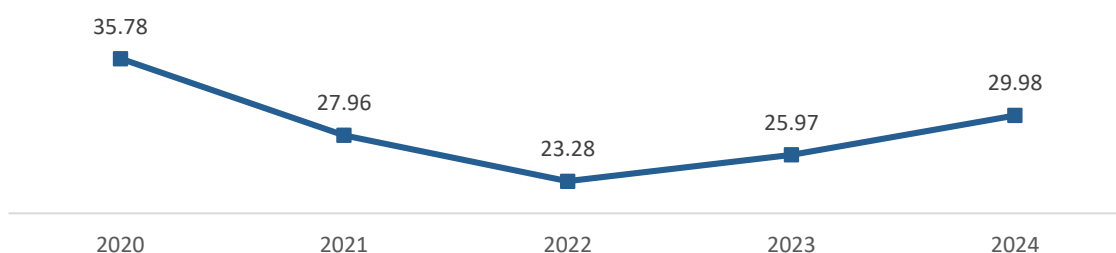
Pengambilan sampel dilakukan pada titik pengamatan yang mewakili sungai-sungai utama di Kota Cirebon sebagai perhitungan IKA. Nilai IKA Kota Cirebon cenderung mengalami penurunan sampai dengan tahun 2023. Penyebab penurunan IKA ini bisa termasuk karena adanya peningkatan pencemaran industri, perubahan pola penggunaan lahan, atau masalah lain yang mempengaruhi kualitas air.



Gambar 2.8 Indeks Kualitas Udara Kota Cirebon

Sumber: DLH Kota Cirebon 2025

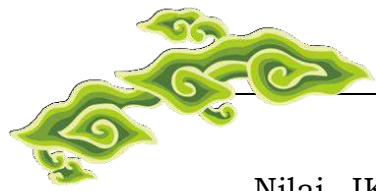
IKU di Kota Cirebon dihitung berdasarkan kualitas udara ambien di wilayah pemukiman, perkantoran, kawasan industri, dan transportasi. Pengujian laboratorium untuk kualitas udara hasil pengukuran beberapa titik pengamatan di Kota Cirebon. Kandungan Nitrogen Dioksida (NO_2) yang terkecil terdapat di kawasan pemukiman sedangkan nilai kandungan yang terbesar terdapat berada di wilayah perkantoran dan transportasi. Kandungan rata-rata Sulfur dioksida (SO_2) yang terkecil terdapat di wilayah perkantoran, sedangkan kandungan yang terbesar terdapat kawasan industri. Nilai IKU cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2021.



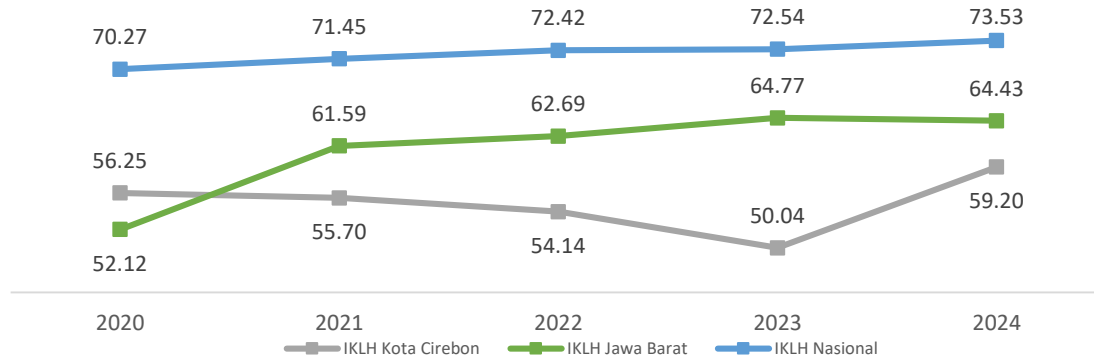
Gambar 2.9 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Cirebon

Sumber: DLH Kota Cirebon 2025

Nilai IKL merupakan fungsi dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), namun IKEG tidak ada di wilayah pulau Jawa sehingga IKL Kota Cirebon dihitung dengan menjumlahkan luas tutupan hutan yang ada. Tutupan hutan tersebut terbagi menjadi beberapa kategori yaitu hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, semak/belukar, semak/belukar rawa, dan ruang terbuka hijau. Terjadi penurunan cukup signifikan nilai IKL sampai dengan tahun 2022, hal ini akibat terjadinya alih fungsi lahan di Kota Cirebon yang menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan nilai IKTL.



Nilai IKLH Kota Cirebon sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan kategori “Sedang” dan berada dibawah nilai IKLH Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

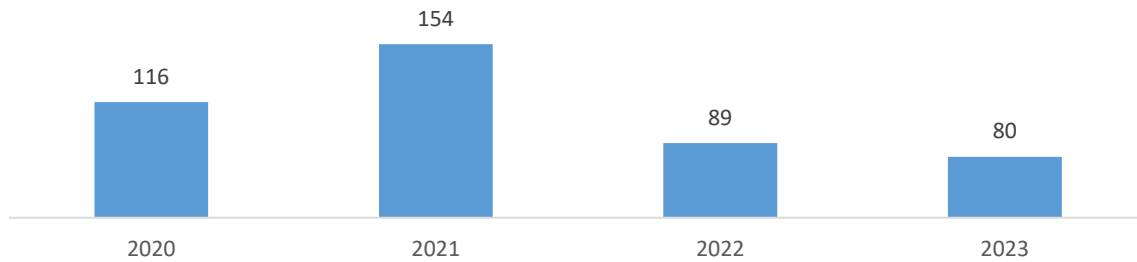
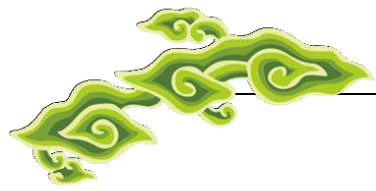


Gambar 2.10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Sumber: DLH Kota Cirebon

2.1.1.4.1 Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya preventif maupun represif dalam menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, hal tersebut perlu dilakukan dalam proses pembangunan guna meminimalisir dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap makhluk hidup. Adanya perusahaan yang belum memiliki pengolahan limbah, akan berisiko pada kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat mencemari air, udara, dan tanah, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan sehingga dapat membahayakan kehidupan hewan dan tanaman, serta mengganggu kesehatan manusia. Berikut merupakan pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan perizinannya dan diberikan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Sanksi administrasi diperlukan dalam penegakan hukum yaitu berupa sanksi yang ringan, seperti teguran tertulis, peringatan hingga kepada perintah penghentian sementara atau penghentian permanen untuk sebagian kegiatan atau seluruhnya. Dalam Penegakan hukum lingkungan, diperlukan pengawasan oleh aparaturnya Pemerintah Daerah melalui instrumen elektronik berupa sensor yang harus dimiliki oleh perusahaan guna memantau pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.



Gambar 2.11 Jumlah Penegakan Hukum Lingkungan (Pelaku Usaha)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, 2023

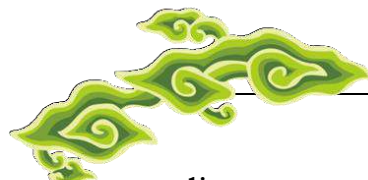
2.1.1.4.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berdasarkan KLHS

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam menghitung atau menentukan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diperlukan beberapa pertimbangan ruang dan sifatnya, tipe pemanfaatan ruang, ukuran produk lingkungan hidup utama (udara dan air), penggunaan atau penutupan lahan mendukung publik (hutan), dan penggunaan tertentu untuk keperluan pribadi.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat dimodelkan dengan jasa ekosistem penyediaan pangan dan jasa ekosistem penyediaan air bersih.

2.1.1.4.3 Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim

Kenaikan suhu yang terjadi di bumi berdampak besar bagi iklim dunia yang dikenal dengan istilah perubahan iklim. Perubahan iklim kini telah dilihat sebagai isu global yang mungkin menjadi ancaman manusia. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 perubahan iklim, berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim dapat ditunjukkan oleh beberapa hal



diantaranya peningkatan suhu rata-rata, perubahan rata-rata curah hujan, kenaikan suhu dan Tinggi Muka Laut (TML), terjadinya pergeseran musim, dan sebagainya (Hairiah K., dkk., 2016).

Berikut merupakan contoh dampak dari perubahan iklim:

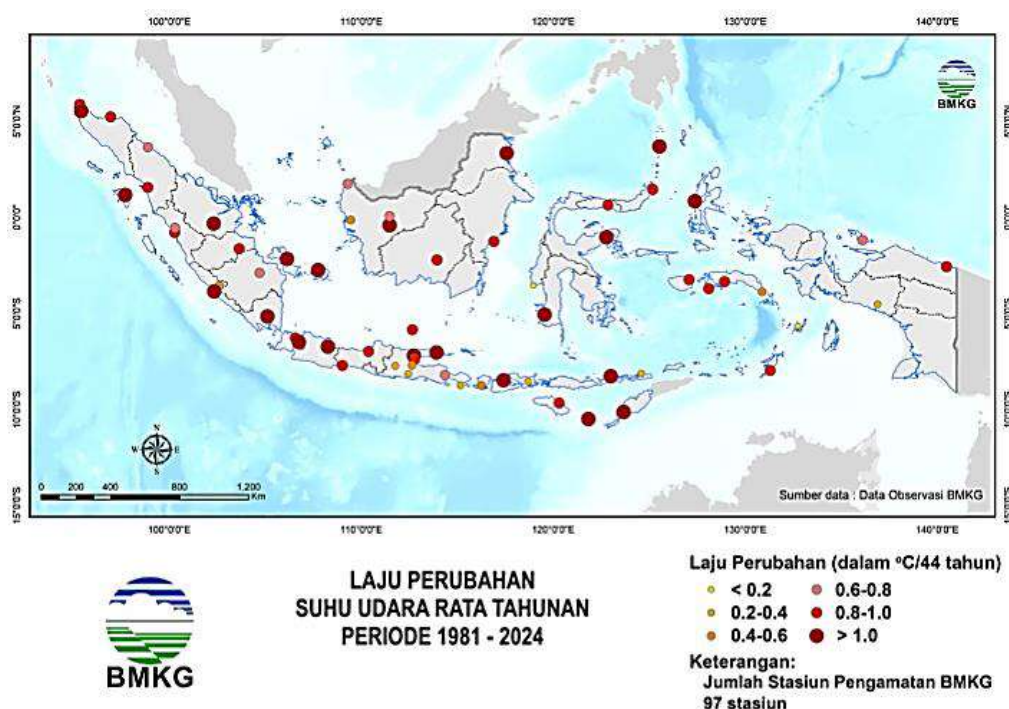
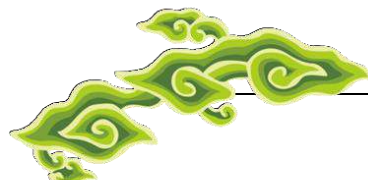
- Dampak dari peningkatan suhu bumi dapat meningkatkan konsumsi energi dan ancaman kelaparan akibat penurunan produksi tanaman, serta meningkatnya beberapa serangan wabah penyakit seperti malaria, demam berdarah, diare, dan gangguan pernafasan.
- Dampak dari perubahan curah hujan dapat menyebabkan banjir dan longsor jika curah hujan meningkat di musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau mengalami kekeringan yang berkepanjangan.
- Dampak dari kenaikan suhu dan TML diantaranya dapat merusak terumbu karang, berpengaruh terhadap pola migrasi ikan sehingga berdampak besar terhadap penghasilan nelayan, dan sebagainya.

Tabel 2.9 Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim
Kota Cirebon

Kecamatan	Indeks Kapasitas Adaptif	Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
Harjamukti	0,54014	0,3839	3	3	3
Lemahwungkuk	0,577705	0,3534	3	3	3
Pekalipan	0,57989	0,5874	3	3	3
Kesambi	0,513375	0,2859	3	3	3
Kejaksan	0,57985	0,4099	3	3	3

Sumber : sidik.menlhk, 2023

Berdasarkan ilustrasi dari BMKG, laju perubahan suhu area sekitar wilayah Kota Cirebon melebihi 1°C dalam 44 tahun terakhir. Kota Cirebon yang berada di dataran rendah pesisir utara pulau Jawa merupakan salah satu dari wilayah di Indonesia dengan Laju Perubahan Suhu yang cukup tinggi.



Gambar 2.12 Laju perubahan suhu udara rata-rata tahunan
Sumber : Catatan Iklim dan Kualitas Udara Indonesia, 2024

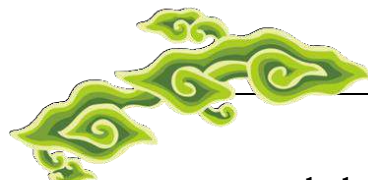
2.1.1.5 Ketahanan Energi

Dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Tujuan ke-7 (Energi Bersih dan Terjangkau), Tujuan ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan Tujuan ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim), Pemerintah Kota mengupayakan dalam beberapa tahun ke depan menjadikan kota bebas emisi yang mengedepankan pemenuhan kebutuhan dengan Energi Baru Terbarukan.

Potensi Kota Cirebon untuk mendapatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang bersih dan terjangkau antara lain pemanfaatan sumber daya angin, air, biogas dan sinar matahari, walaupun untuk investasinya dibutuhkan biaya yang cukup besar.

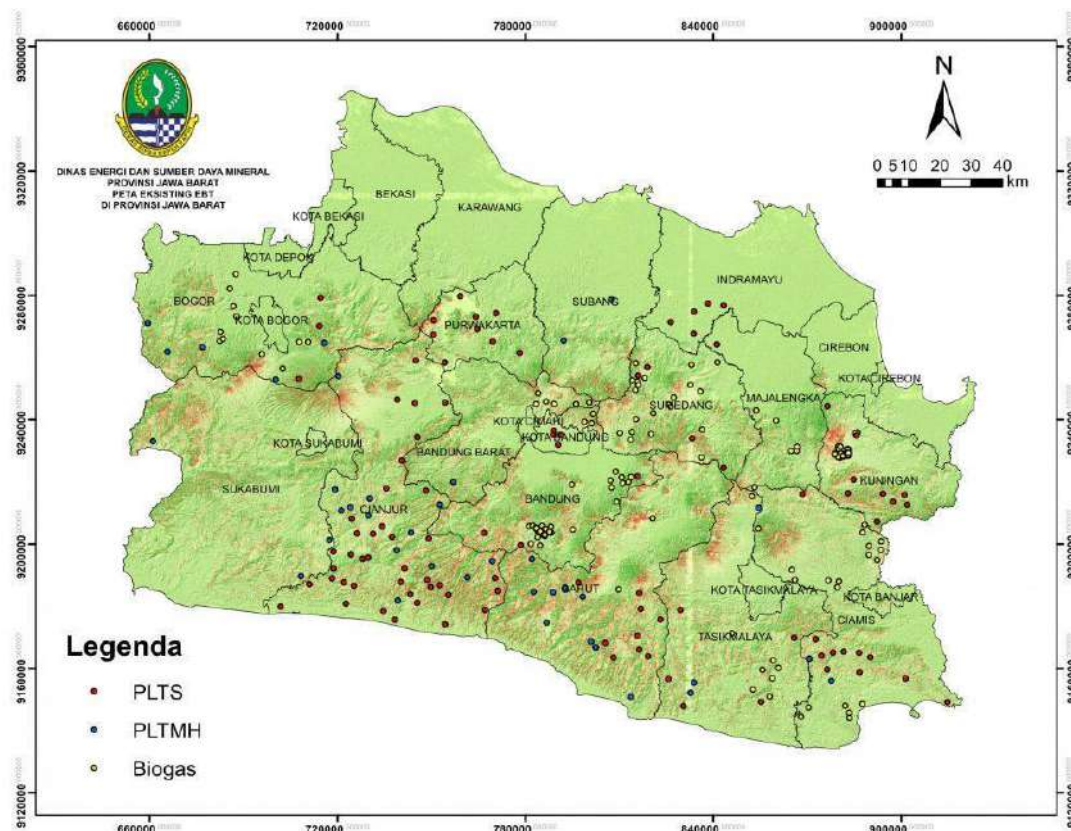
Dengan adanya fasilitas sumber energi baru terbarukan, faktor kebutuhan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi akan muncul. Di samping adanya pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan baru, pengeluaran biaya untuk energi bersih yang murah akan menekan biaya produksi dan biaya hidup sehingga ada pendapatan masyarakat yang dapat disimpan karena biaya yang dikeluarkan menjadi berkurang.

Energi yang bersih akan mengurangi dampak emisi dari sumber energi fosil sehingga dapat menekan perubahan iklim yang diakibatkan meningkatnya emisi gas rumah kaca. Kota Cirebon telah mengimplementasi pemanfaatan sinar matahari di Kampung Proklam Kelurahan Larangan,



namun belum teridentifikasi potensi Energi Baru Terbarukan lainnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sementara ini di wilayah Kota Cirebon yang padat penduduk menyebabkan eksplorasi mineral sangat minim, walaupun sebelumnya ada permasalahan penambangan pasir ilegal yang menyebabkan rusaknya lingkungan. Namun tidak menutup kemungkinan Kota Cirebon memiliki kandungan mineral yang dapat dimanfaatkan dengan tidak mengesampingkan untuk menjaga pelestarian lingkungan hidup.



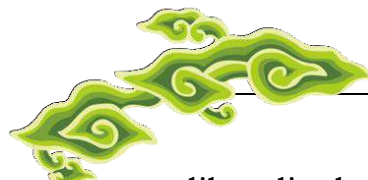
Gambar 2.13 Peta Sebaran EBT di Jawa Barat

Sumber: <http://esdm.jabarprov.go.id>

2.1.1.5.1 Ketahanan Bencana

Berdasarkan RTRW Kota Cirebon, wilayah rawan bencana terdiri dari beberapa kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang memiliki kecenderungan terjadi rawan gelombang pasang, genangan banjir, rawan kebakaran dan pergerakan tanah.

Pelayanan penanggulangan bencana di Kota Cirebon dilakukan antara lain dengan mengupayakan turunnya angka resiko bencana yang dapat mengancam masyarakat di wilayah Kota Cirebon. IRB Kota Cirebon cenderung menurun menjadi 141,07 (kategori sedang) pada tahun 2022. Nilai IRB Kota Cirebon lebih tinggi dari IRB Provinsi Jawa Barat. Jika pada tahun sebelumnya terdapat gap yang cukup besar antara Nilai IRB Kota Cirebon



dibandingkan Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2022, gap ini mengecil di kisaran kurang dari 10 poin.

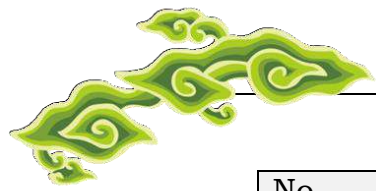
Nilai IRB ini diperoleh berdasarkan Kajian Risiko Bencana yang dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas. Dalam upaya pelayanan penanggulangan bencana, intervensi terhadap komponen kapasitas terus dilakukan untuk memperkecil resiko bencana.

Sebagai salah satu komponen penilaian IRB, komponen penilaian kapasitas dapat direpresentasikan oleh IKD dari seluruh stakeholder penanggulangan bencana. Dalam hal ini, IKD merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Perangkat perhitungan IKD menggunakan 71 indikator yang meliputi tujuh prioritas, yakni perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, serta pengembangan sistem pemulihan bencana.

Hasil perhitungan terhadap 71 indikator ini dapat menjadi rekomendasi sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga merupakan input pengukuran penurunan IRB kabupaten/kota. Pada tahun 2021, capaian IKD Kota Cirebon tahun 2021 sebesar 0,49 (tingkat kapasitas sedang). Angka ini masih jauh di bawah capaian IKD Provinsi Jawa Barat sebesar 0,67 sebagaimana dirilis dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat 2022-2026. Pada tahun 2022, IKD Kota Cirebon membaik menjadi 0,57.

Tabel 2.10 IKD Kota Cirebon

No	Prioritas	2021	2022
1	Perkuatan kebijakan dan kelembagaan	0.38	0.57
2	Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	0.47	0.50
3	Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik	0.43	0.62
4	Penanganan tematik kawasan rawan bencana	0.66	0.55
5	Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0.56	0.62
6	Perkuatan kesiapsiagaan dan	0.39	0.61

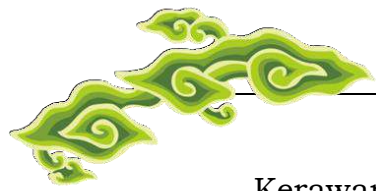


No	Prioritas	2021	2022
	penanganan darurat bencana		
7	Pengembangan sistem pemulihan bencana	0.60	0.44
	Indeks Kapasitas	0.49	0.57
	Tingkat Kapasitas	Sedang	Sedang

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat 2022-2026

Upaya perbaikan pada lima prioritas indikator yang terlihat pada kenaikan skor ke-5 prioritas tersebut. Namun, hal sebaliknya terlihat pada dua prioritas lainnya, yakni pada prioritas ke-4 (penanganan tematik kawasan rawan bencana) serta prioritas ke-7 (pengembangan sistem pemulihan bencana).

Masih diperlukan penguatan kebijakan dan kelembagaan, pemutakhiran kajian risiko bencana dan rencana kontijensi untuk bencana beresiko tinggi, serta pembangunan sistem informasi yang mendukung penanggulangan bencana, yang di dalamnya termasuk sistem peringatan dini. Saat ini, baru terdapat sistem peringatan dini berupa Percepatan Gempa Bumi (*Accelerograph*). Diperlukan juga penguatan kesiapsiagaan, penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan bencana di Kota Cirebon. Keberadaan dengan sesar baribis kendeng (Cirebon2) di Kota Cirebon, memiliki risiko gempa tektonik sehingga perlu juga dilakukan mitigasi dalam perencanaan. Risiko pergeseran tanah untuk daerah pesisir cukup rendah namun untuk daerah selatan Kota Cirebon khususnya daerah berbukit untuk wilayah sumurwuni dan sekitarnya masuk dalam kategori risiko tinggi walaupun areanya tidak terlalu luas. Daerah risiko pergerakan tanah tampak pada peta yang bersumber dari Badan Geologi, Kementerian ESDM. Di samping risiko banjir, kekeringan dan pergerakan tanah, Kota Cirebon yang berada di pesisir menjadi kawasan terhadap rawan gelombang pasang terutama untuk lokasi Kelurahan Kesenden, Kelurahan Lemahwungkuk dan Kelurahan Panjunan. Kawasan sepanjang pesisir pantai Kota Cirebon memiliki potensi bahaya rob dan juga akan memiliki risiko tertinggi ketika terjadi gelombang tsunami. Banjir rob sering terjadi di daerah pesisir yang rendah dan dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur (bangunan, jalan, dan fasilitas umum), gangguan transportasi, dampak kegiatan ekonomi (perdagangan dan perikanan), meningkatnya risiko pencemaran, merusak ekosistem pantai, meningkatnya risiko penyakit dan masalah kesehatan. Banjir rob di Kota Cirebon pada Kelurahan Kebon Baru, Panjunan, Lemahwungkuk, Kesepuhan. Banjir rob merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan terintegrasi antara kebijakan, teknologi, dan keterlibatan masyarakat untuk mitigasi dan adaptasi.



Kerawanan bencana lainnya adalah kawasan untuk Kerawanan Kebakaran meliputi kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi, seperti di Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Jagasatru, Kelurahan Panjunan, Kelurahan Kasepuhan, dan Kelurahan Kecapi, sebagaimana terlihat pada peta bahaya kebakaran dan peta kerentanan kebakaran.

Kondisi topografi sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dan sebagian kecil merupakan dataran tinggi yang berada di wilayah selatan kota. Kondisi wilayah kota yang sebagian besar berupa dataran rendah menjadi kendala tersendiri, karena kecepatan aliran air hujan yang terbuang ke laut menjadi lambat dan sangat berpotensi menimbulkan genangan banjir di beberapa lokasi. Karenanya di beberapa titik dibangun stasiun pompa yang berfungsi mempercepat pembuangan air hujan ke laut.

Cuaca ekstrim di Kota Cirebon yang menyebabkan banjir akibat lebatnya curah hujan, angin kencang saat hujan lebat yang kadangkala disertai puting beliung mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan kekeringan akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Banjir yang disebabkan drainase yang tidak sesuai pedoman desain drainase jalan dan juga akibat curah hujan yang sangat lebat sehingga melampaui batas daya tampung drainase yang ada. Untuk dampak kekeringan di Kota Cirebon akan sangat terasa di wilayah selatan Kota Cirebon karena ada sebagian wilayah tersebut belum terjangkau oleh Jaringan Pipa PDAM Tirta Giri Nata.

Daerah rawan bencana banjir terdapat dalam luasan sebesar 1.3471,41 Ha. Kecamatan Harjamukti memiliki luasan rawan bencana banjir paling besar yaitu 423,41 Ha, dan Kecamatan Pekalipan paling rendah, yaitu 88,46 Ha.

Tabel 2.11 Luasan Daerah Rawan Banjir (Ha)

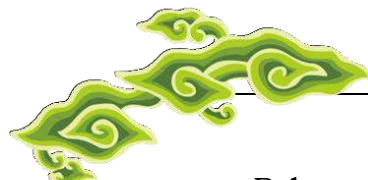
Kecamatan	Rawan Bencana Banjir
Harjamukti	423,41
Kejaksan	200,91
Kesambi	371,12
Lemahwungkuk	263,52
Pekalipan	88,46
Total	1.347,41

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat 2022-2026

Pada saat musim kemarau biasanya terjadi tren peningkatan kebakaran di Kota Cirebon dan meningkat pada sekitar bulan Juli-September untuk setiap tahunnya, hal ini terjadi dampak dari *El Nino*. Tren peningkatan

Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Cirebon mencatat, sejak Januari hingga awal Oktober 2023, telah terjadi 69 kali peristiwa kebakaran. Sedangkan untuk September 2023, terjadi 20 kali kebakaran dan didominasi oleh kebakaran lahan kosong/sampah yang terbakar. Perinciannya untuk tahun 2023 adalah 45 lahan kosong/sampah, 20 bangunan semi permanen, 3 kebakaran kendaraan bermotor dan sisanya lain-lain. Kecenderungan kebakaran terjadi di lahan kosong/sampah, Selain fenomena *El Nino*, kejadian kebakaran di Kota Cirebon juga tidak lepas dari faktor kelalaian manusia. Seperti di antaranya, karena warga bakar sampah dan ilalang di lahan terbuka hingga korsleting. Kejadian di lingkungan perumahan itu biasa akibat korsleting listrik, sama dengan yang masak ditinggal. Ada beberapa kebakaran juga karena masak ditinggal akhirnya kompor terbakar walaupun hanya beberapa kali kejadian.

49



Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam memberikan layanan oleh pemberi pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan pemerintah. Perkembangan menuntut agar institusi pemadam kebakaran melakukan pula tugas-tugas penyelamatan terhadap bencana umum perkotaan lainnya, serta penanganan benda berbahaya. Cakupan pelayanan bencana kebakaran pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kota Cirebon telah 100%.

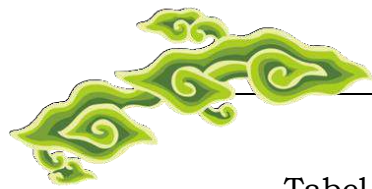
Tabel 2.13Jumlah Kejadian Bencana Alam per Kecamatan di Kota Cirebon, 2020-2024

Kecamatan	Kejadian								
	Angin Puting Beliung	Banjir	Banjir Rob	Cuaca Ekstrem	Gempa Bumi	Kebakaran Lahan	Kekeringan	Tanah Longsor	Tsunami
Harjamukti	-	7	-	18	25	14	1	5	-
Lemahwungkuk	-	4	4	7	20	6	-	-	-
Pekalipan	-	1	-	1	20	-	-	-	-
Kesambi	-	7	-	26	25	7	-	-	-
Kejaksan	-	4	-	8	20	-	-	-	-
Kota Cirebon	-	-	23	4	60	110	27	1	5

Sumber: BPS 2025

Dengan fungsi kota dan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka rentan terjadi alih fungsi lahan seperti dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun, di Kota Cirebon alih fungsi lahan terjadi dari laaaahan pertanian menjadi lahan terbangun terutama menjadi kawasan perumahan dan kawasan perdagangan dan jasa, faktor ini dikarenakan luas wilayah administrasi yang kecil serta pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga alih fungsi lahan tidak dapat dihindari.

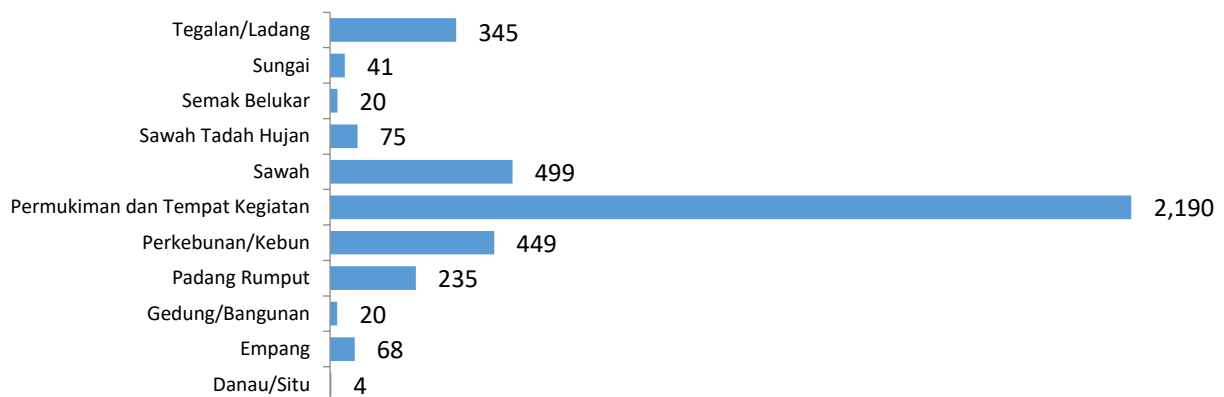
Penggunaan lahan di Kota Cirebon terdiri dari danau/situ, empang, gedung/bangunan, padang rumput, perkebunan/kebun, permukiman dan tempat kegiatan, sawah, sawah tadah hujan, semak belukar, sungai dan tegalan. Guna lahan yang mendominasi yaitu permukiman dan tempat kegiatan seluas 2.190,07 Ha dan guna lahan Sawah seluas 499,23 Ha. Persentase Guna lahan jika mengacu pada luasan Sektor Guna Lahan, maka dapat diklasifikasikan besarannya sebagai berikut :



Tabel 2.12 Penggunaan Lahan Kota Cirebon per Kecamatan (Ha)

Klasifikasi Lahan (Ha)	Harjamukti	Kejaksan	Kesambi	Lemahwungkuk	Pekalipan	Total	(%)
Lahan Tidak Terbangun	685,67	90,82	241,58	143,43	9,74	1.171,24	29,67
Danau/Situ	2,39	Ø	Ø	1,7	Ø	4,09	0,10
Empang	Ø	47,53	Ø	20,12	Ø	67,65	1,71
Padang Rumput	95,63	11,85	31,24	86,12	9,74	234,58	5,94
Sawah	381,9	4,69	89,19	23,46	Ø	499,24	12,65
Semak Belukar	8,42	Ø	Ø	12,03	Ø	20,45	0,52
Tegalan/Ladang	197,33	26,75	121,15	Ø	Ø	345,23	8,75
Lahan Terbangun	1074,67	352,11	623,73	567,64	157,87	2.776,02	70,33
Gedung/Bangunan	1,4	0,06	0,89	16,25	1,46	20,06	0,51
Perkebunan/Kebun	416,38	Ø	25,14	Ø	7,85	449,37	11,38
Permukiman dan Tempat Kegiatan	603,69	348	595,12	496,06	147,19	2.190,06	55,48
Sawah Tadah Hujan	28,42	Ø	Ø	47,04	Ø	75,46	1,91
Sungai	24,78	4,05	2,58	8,29	1,37	41,07	1,04
Kota Cirebon	1760,34	442,93	865,31	711,07	167,61	3.947,26	100,00

Sumber : Bappelitbangda, Interpretasi GIS, 2022

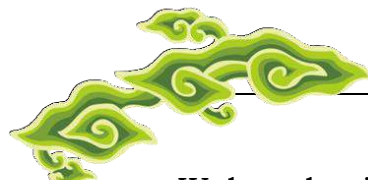


Gambar 2.15 Grafik Penggunaan Lahan Kota Cirebon (Ha)

Sumber : Bappelitbangda, Interpretasi GIS, 2022

Persentase Guna Lahan di Kota Cirebon yang tidak termasuk pada lahan terbangun adalah, Danau/Situ, Empang, Padang Rumput, Sawah, Semak Belukar dan Tegalan/Ladang dengan total luasan seluas 1.171,24 Ha atau 29,67%. Dengan total luas Kota Cirebon seluas 3.947,29 Ha, kondisi persentase luasan tersebut yang digunakan sebagai kawasan terbangun sebesar 70,33% atau sejumlah 2.776,02 Ha.

Persentase Guna Lahan luasan terbesar di wilayah administrasi Kota Cirebon sebesar 70,33 Persen sudah difungsikan sebagai Lahan Terbangun, sedangkan sejumlah 29,67 persen merupakan Lahan Tidak Terbangun.



Walau demikian, Lahan terbangun belum bisa dipastikan sesuai dengan ketentuan lahan yang sudah ditetapkan peruntukannya pada pola ruang.

Beberapa permasalahan yang terjadi di Kota Cirebon yang disebabkan oleh alih fungsi lahan adalah sebagai berikut:

2.1.1.5.2 Banjir

Kota Cirebon termasuk dalam kategori bentang alam dataran rendah/pantai. Kondisi seperti ini memiliki tingkat kerawanan banjir yang sangat tinggi, baik di wilayah daratan dengan karakteristik banjir kiriman akibat tingginya intensitas hujan di daerah hulu maupun banjir rob di Kawasan pesisir/pantai yang disebabkan karena kenaikan muka air laut (cuaca ekstrim). Kota Cirebon memiliki tingkat resiko banjir terbagi kedalam tiga resiko rendah, sedang dan tinggi, hampir seluruh kecamatan di Kota Cirebon masuk kedalam resiko banjir, luas total resiko bencana banjir di Kota Cirebon yaitu sebesar 2.072,43 ha

2.1.1.5.3 Kekeringan

Kekeringan merupakan keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Di Kelurahan Argasunya kekeringan sering terjadi pada musim kemarau, apalagi ketika musim kemarau panjang melanda.

2.1.1.5.4 Daya Dukung Penyedia Pangan

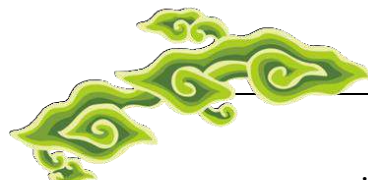
Dengan fungsi kota dan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka rentan terjadi alih fungsi lahan seperti dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun, di Kota Cirebon alih fungsi lahan terjadi dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun terutama menjadi kawasan perumahan dan kawasan perdagangan dan jasa, faktor ini dikarenakan luas wilayah administrasi yang kecil serta pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga alih fungsi lahan tidak dapat dihindari.

2.1.1.5.5 Kawasan Permukiman Kumuh

Dampak dari terjadinya permasalahan alih fungsi lahan adalah terdapatnya kawasan permukiman kumuh, dimana masyarakat membuat hunian tidak pada kawasan yang sesuai dengan peruntukannya, sehingga menghambat Dampak dari adanya permukiman kumuh dapat dikategorikan sebagai berikut yaitu pertama dampak fisik kepada lingkungan atau alam yaitu lingkungan menjadi rusak, contohnya adalah banyaknya penduduk di permukiman kumuh yang membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan menjadi rusak.

2.1.1.5.6 Kerentanan Perubahan Iklim

Kualitas udara kota Cirebon masih berada di batasan yang masih aman untuk dihirup. Namun sumber polusi udara didominasi oleh sektor



transportasi. Ada dua faktor yang menyebabkan polusi udara di Cirebon. Pertama, pembakaran bahan bakar dari kendaraan bermotor, Kedua, kegiatan pengangkutan dan pembongkaran batu bara di Pelabuhan Cirebon juga berdampak pada kualitas udara. Kepadatan penduduk di Kota Cirebon cukup tinggi dengan aktivitas-aktivitas dominan yang berkontribusi pada polusi udara seperti aktivitas rumah tangga, transportasi, industri dan kegiatan perkantoran.

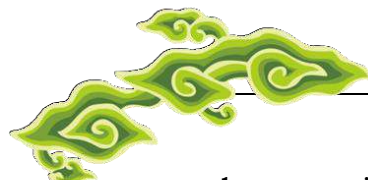
2.1.1.5.7 Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kota Cirebon sebagian besar berasal dari sektor energi, khususnya subsektor transportasi, diikuti oleh sektor limbah, serta pertanian dan penggunaan lahan. Pada tahun 2024, Kota Cirebon berhasil menurunkan emisi GRK sebesar 5.587,79 ton CO₂eq melalui implementasi 34 aksi mitigasi yang dilaporkan ke aplikasi AKSARA. Aksi tersebut mencakup sektor energi, pengelolaan limbah, AFOLU (pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan), serta kawasan pesisir dan kelautan (blue carbon). Namun demikian, kontribusi sektor energi masih sangat dominan. Emisi dari subsektor transportasi pada tahun 2023 tercatat sebesar 244,25 GgCO₂, jauh lebih tinggi dibandingkan sektor limbah (62,24 GgCO₂) maupun pertanian (3,67 GgCO₂). Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan mobilitas masyarakat menjadi faktor kunci dalam pengendalian emisi di Kota Cirebon.

Untuk memperkuat komitmen jangka panjang, Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan target-target strategis dalam dokumen perencanaan pembangunan. Salah satunya adalah penurunan intensitas emisi GRK, dari baseline 0,15 ton CO₂eq/2010 IDR Milyar pada tahun 2025 menjadi 1,52 pada tahun 2030. Selain fokus pada pengendalian emisi, Cirebon juga mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan Indeks Ekonomi Hijau Pilar Ekonomi, yang ditargetkan naik dari 69,19 pada tahun 2024 menjadi 79,31 pada tahun 2030, serta menjaga kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB pada kisaran 0,25%.

Dalam aspek ketahanan pangan, Pemerintah Kota Cirebon menargetkan peningkatan Indeks Ketahanan Pangan Daerah dari 83,78 pada tahun 2024 menjadi 85,80 pada tahun 2030, disertai dengan penurunan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan dari 6,56% menjadi 4,55% pada periode yang sama. Target ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon tidak hanya diarahkan untuk mengurangi emisi, tetapi juga memastikan ketersediaan pangan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan ekonomi hijau dan biru.

Dengan demikian, meskipun capaian awal telah menunjukkan kemajuan, upaya mitigasi perubahan iklim di Kota Cirebon masih perlu diperluas, terutama pada sektor transportasi yang menjadi penyumbang



terbesar emisi. Oleh karena itu, strategi yang lebih transformatif, terintegrasi, dan berkelanjutan sangat diperlukan agar Kota Cirebon tidak hanya mampu memenuhi target pembangunan rendah karbon, tetapi juga memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.5.8 Ketahanan Air

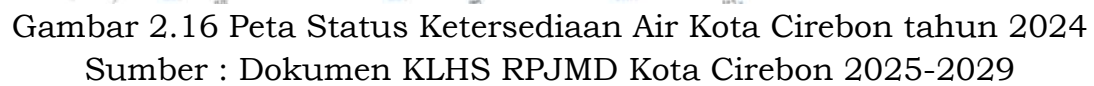
Penentuan daya dukung air dilakukan dengan menghitung terlebih dahulu mengenai potensi ketersediaan air yang ada di Kota Cirebon, yang dimana sumber air bakunya berasal dari air permukaan. Kebutuhan air domestik, dihitung dengan mengacu pada SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional serta diselaraskan dengan KLHS RTRW Kota Cirebon tahun 2023.

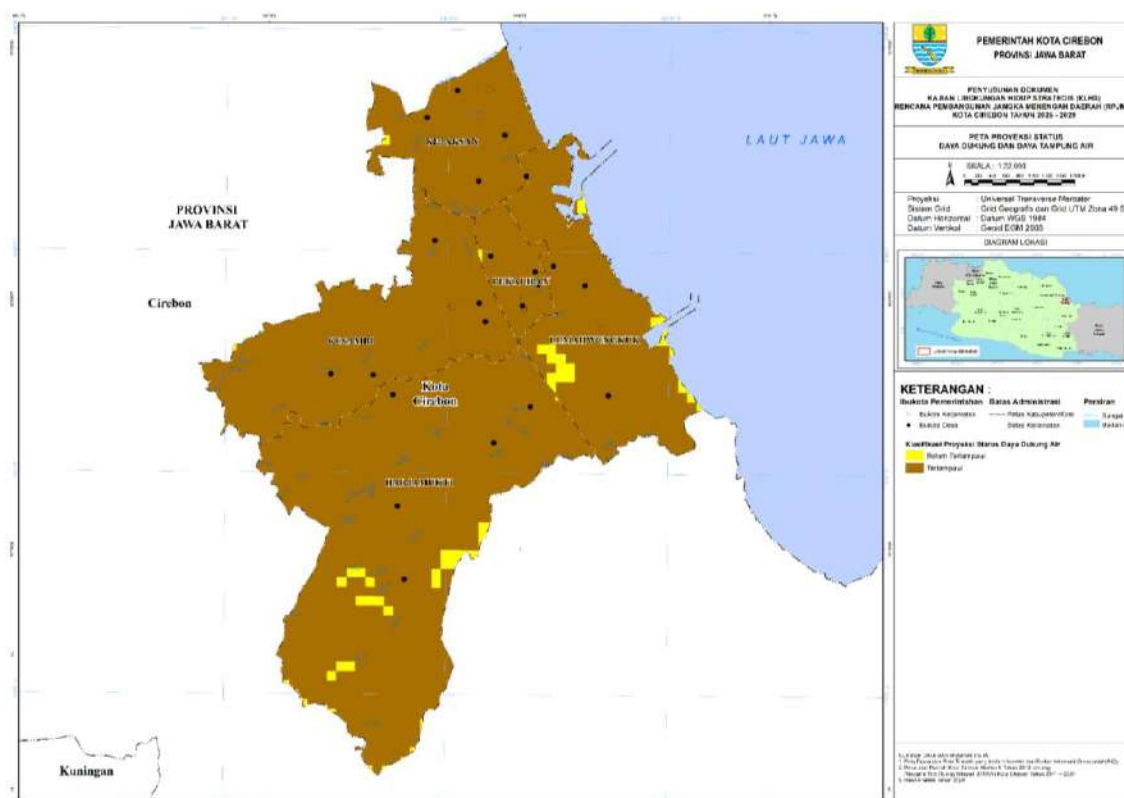
Status daya dukung penyedia air di Kota Cirebon yang sudah melampaui seluas 3.854,67 Ha, sedangkan untuk daya dukung air yang belum melampaui seluas 92,62 Ha. Ketersediaan air di Kota Cirebon yaitu sebesar 23.596.593,36 m³/tahun dan untuk kebutuhan air di Kota Cirebon yaitu sebesar 279.616.052,08 m³/tahun. Sehingga Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu mencermati kondisi proyeksi air bersih dalam lima tahun ke depan dan harus mengantisipasi defisit kebutuhan air minum dengan konservasi air tanah dari pencemaran dan mencegah eksploitasi air tanah secara berlebihan oleh gedung perkantoran, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hotel. Pengendalian terhadap eksploitasi air tanah dapat dicegah melalui pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah.

Tabel 2.13 Kondisi Air Bersih Kota Cirebon

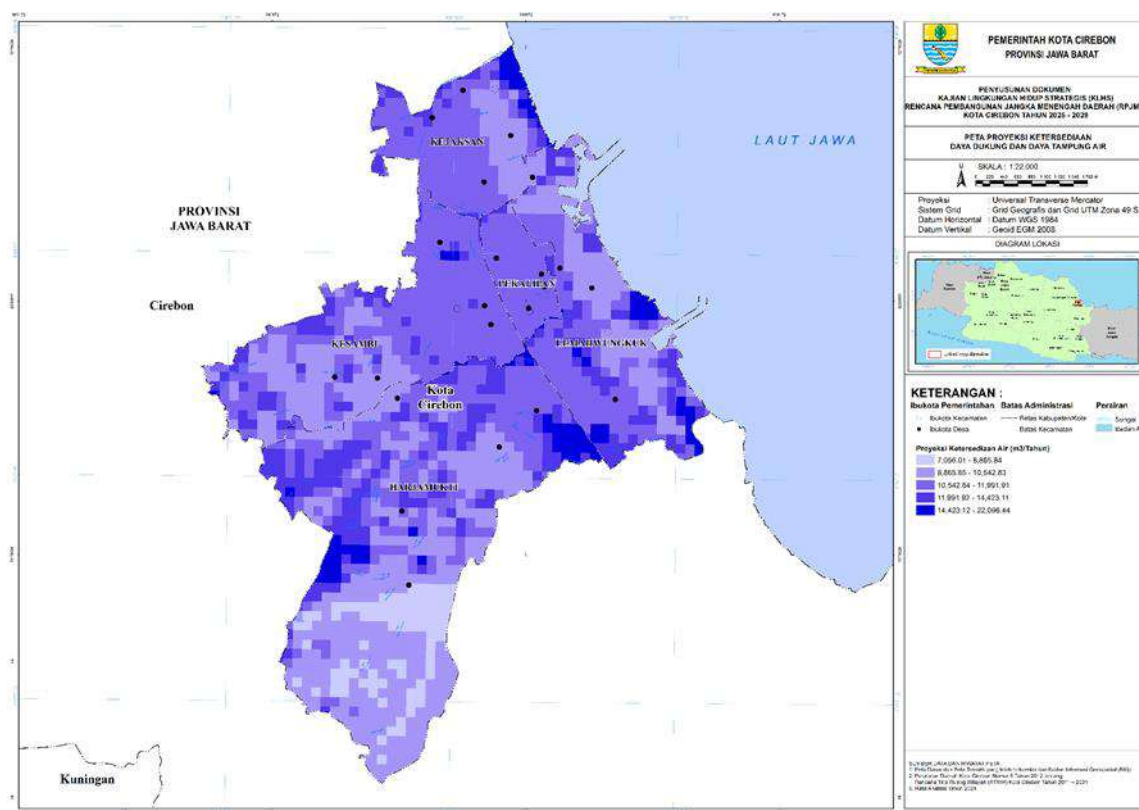
Administrasi Kecamatan	Proyeksi Daya dukung Air tahun 2024		Luas Proyeksi Status Daya Dukung Air (Ha)	
	Ketersediaan (m ³ /Tahun)	Kebutuhan (m ³ /Tahun)	Belum Terlampaui	Terlampaui
HARJAMUKTI	9.630.457,45	105.916.469,24	49,25	1.711,10
KEJAKSAN	2.835.775,58	34.640.541,32	1,70	441,23
KESAMBI	5.222.133,82	73.657.804,64	0,54	864,77
LEMAHWUNGKUK	4.804.759,03	50.730.836,89	37,75	681,19
PEKALIPAN	1.103.467,49	14.670.400,00	1,13	158,63
Total	23.596.593,36	279.616.052,08	90,37	3.856,92

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Cirebon 2025-2029

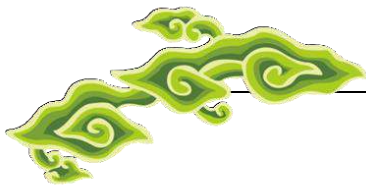




Gambar 2.18 Peta Status Ketersediaan Air Kota Cirebon tahun 2029
Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Cirebon 2025-2029

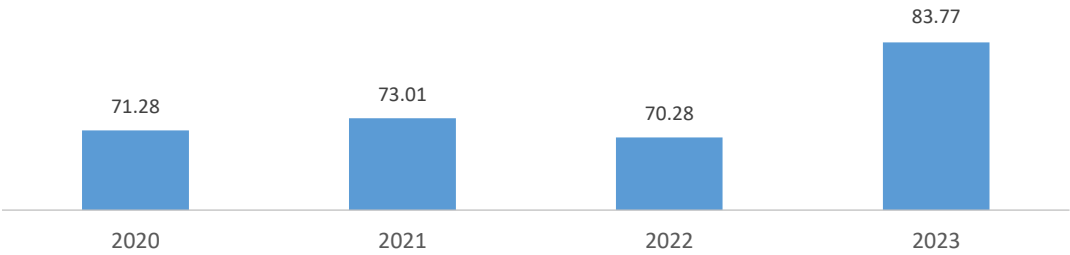


Gambar 2.19 Peta Status Air Kota Cirebon tahun 2026
Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Cirebon 2025-2029



2.1.1.6 Ketahanan Pangan

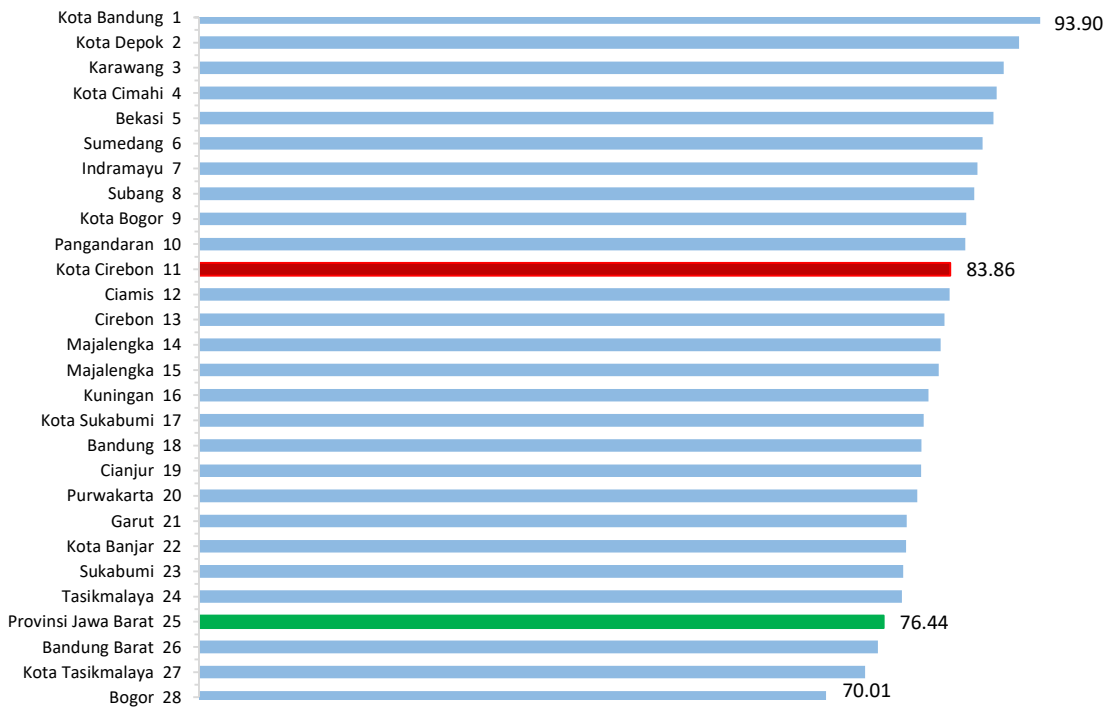
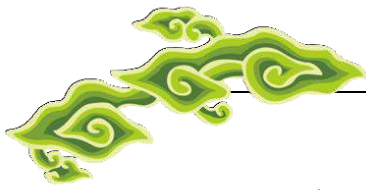
Ketahanan Pangan berdasarkan UU No.18/2012 tentang Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan, tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.



Gambar 2.20 Indeks Ketahanan Pangan Kota Cirebon

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai IKP.



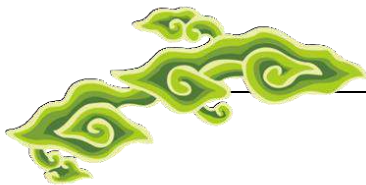
Gambar 2.21 Indeks Ketahanan Pangan tahun 2024 di Jawa Barat
Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan 2025

Berdasarkan pada grafik tersebut, Kota Cirebon berada pada peringkat 11 nilai Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Barat dengan nilai 83,86 dan berada di atas nilai Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat. Hubungan antara indeks ketahanan pangan dengan indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan, dan indeks pemanfaatan adalah korelasional, di mana peningkatan pada satu atau beberapa aspek dapat berkontribusi pada peningkatan keseluruhan ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan Kota Cirebon pada tahun 2024 meningkat yang terjadi ke-3 (tiga) aspeknya. Dalam menghadapi risiko ketidakpastian pangan dan kelemahan dalam sistem pangan lokal karena adanya penurunan nilai Indeks Ketahanan Pangan, perlu diidentifikasi penyebab penurunan dan merumuskan strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan.

2.1.2 Aspek Demografi

Kota Cirebon memiliki potensi sumber daya manusia yang menjadi bagian penting dari modal pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan yang baik cukup dapat menjadi sumber daya pada sektor produksi yang menghasilkan suplai barang dan jasa untuk kebutuhan pasar lokal dan luar daerah. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Pendidikan yang merupakan representasi indikator Angka Melek Huruf dan indikator Rata-rata Lama Sekolah. Pengendalian penduduk diperlukan agar permasalahan, pengangguran, kemiskinan, stunting dan permasalahan lainnya untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di masa depan dalam menyongsong era Indonesia Emas tahun 2045.

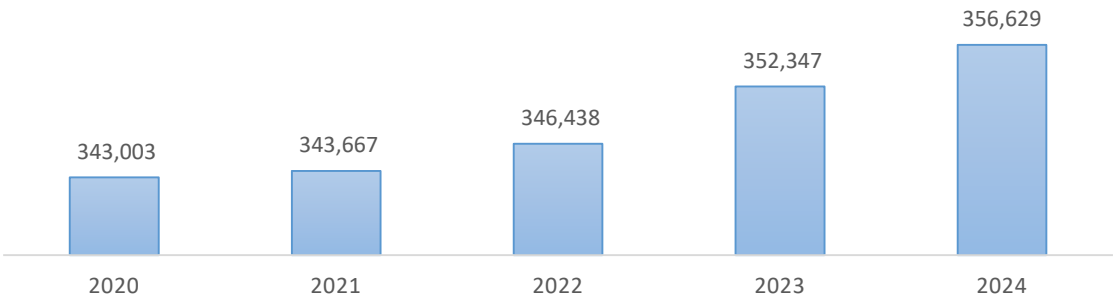
Data dan informasi kependudukan dalam perencanaan pembangunan mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 pada Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa “Data



Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan”. Untuk itu segala bentuk perumusan kebijakan yang membutuhkan perhitungan atas dasar data penduduk, wajib menggunakan data penduduk yang dihasilkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, sehingga terjadi keseragaman terhadap penggunaan data yang dipergunakan.

2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Kota Cirebon merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dengan peran untuk melayani kegiatan skala internasional yang telah ditetapkan Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

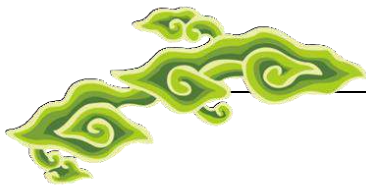


Gambar 2.22 Jumlah Penduduk Kota Cirebon
Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon, 2025

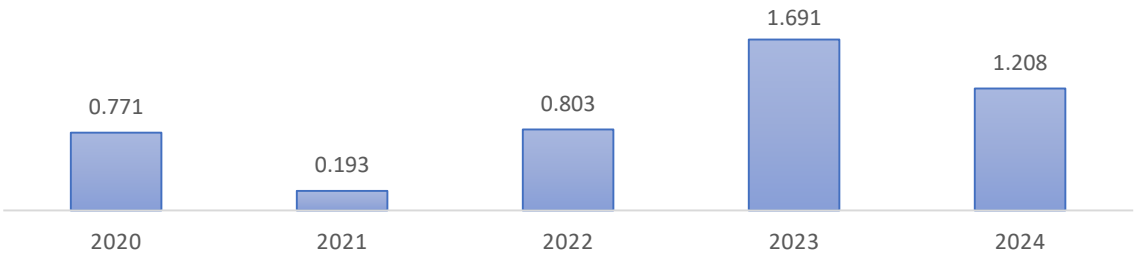
Hal tersebut menjadi daya tarik yang mengakibatkan adanya perpindahan penduduk dari wilayah lain di pedesaan ke Kota Cirebon (Urbanisasi) di samping jumlah kelahiran yang surplus terhadap jumlah kematian sehingga jumlah penduduk di Kota Cirebon cenderung meningkat setiap tahunnya dan juga adanya duplikasi data kependudukan yang mengakibatkan data tidak akurat. Duplikasi data penduduk yang berhasil dieliminasi melalui pemutakhiran data kependudukan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, merupakan proses percepatan untuk mengeliminir duplikasi data penduduk yang akan digunakan pada Pemilihan Umum Presiden dan Anggota Legislatif pada tahun 2019. Adanya pemutakhiran data kependudukan dalam upaya pemerintah dalam mewujudkan Satu Kartu Tanda Penduduk Satu Identitas Penduduk agar data kependudukan di Indonesia memiliki keakuratan untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan.

2.1.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi penduduk. Kota Cirebon seperti dijelaskan di atas sebagai kota besar yang memiliki berbagai kelengkapan fasilitas sehingga banyak penduduk yang bermigrasi dan menetap di Kota



Cirebon. Banyaknya penduduk dari wilayah daerah sekitar dan wilayah lainnya yang cukup besar yang berkeinginan menetap di Kota Cirebon menjadi salah satu faktor meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Cirebon, pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan pada tahun 2023.



Gambar 2.23 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cirebon
Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon, 2025

2.1.2.3 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk Kota Cirebon tersebar di 5 kecamatan. Penduduk terbanyak berada pada kecamatan Harjamukti sedangkan jumlah penduduk terkecil berada pada kecamatan Pekalipan. Namun jika dilihat dari kepadatan penduduknya yang dihitung dari jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah kecamatan, nampak terlihat kepadatan penduduk tertinggi berada pada kecamatan Pekalipan dan kepadatan penduduk terendah pada kecamatan Harjamukti.

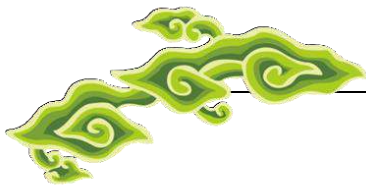
Tabel 2.16 Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Cirebon tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km²)	Kepadatan (Jiwa/Km²)
Kejaksan	51.683	4,441	11.638
Lemahwungkuk	61.723	7,185	8.591
Harjamukti	130.803	17,602	7.431
Pekalipan	31.446	1,585	19.840
Kesambi	80.974	8,653	9.358
Kota Cirebon	356.629	39,398	9.052

Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2025

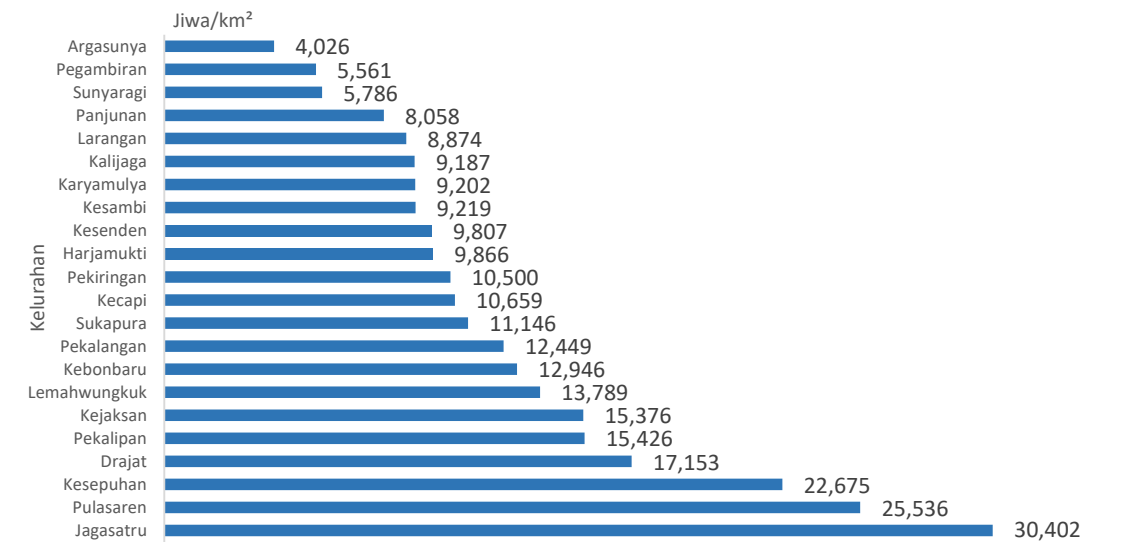
Gambaran sebaran penduduk di Kota Cirebon yang cenderung berdomisili di wilayah tengah/pusat kota dengan fasilitas pelayanan umum dan aktivitas perekonomian yang lebih lengkap, sehingga lebih padat dari daerah yang jauh dari fasilitas pelayanan umum. Dari seluruh kelurahan yang ada di Kota Cirebon, Kelurahan Jagasatru merupakan kelurahan terpadat penduduknya. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menunjukkan tingkat urbanisasi dan tekanan kebutuhan pada sumber daya seperti lahan, air dan infrastruktur.

Tersedianya fasilitas yang merata untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan mengurangi penumpukan pemukiman penduduk di pusat kota. Disisi lain kepadatan penduduk terendah berada di kelurahan Argasunya. Kelurahan Argasunya yang berada di Kecamatan Harjamukti memiliki luas wilayah paling luas di antara



kelurahan lainnya, namun memiliki jumlah kepadatan penduduk yang paling rendah. Kepadatan penduduk yang rendah dapat menunjukkan wilayah yang kurang berkembang atau kurang diminati sebagai tempat tinggal.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya kepadatan penduduk diantaranya letak geografi yang jauh dari pusat kota, tingkat perkembangan ekonomi yang jauh dari pusat perdagangan dan industri, rendahnya peluang usaha, jauh dari tempat bekerja dan faktor sosial lainnya seperti jauh dari layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan yang kurang memadai. Dilihat dari wilayahnya yang luas, Argasunya memiliki potensi untuk wilayah pengembangan pusat pelayanan umum dan ekonomi guna mengurai kepadatan penduduk di wilayah pusat kota. Kepadatan penduduk dihitung disesuaikan atas dasar penetapan luas wilayah yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



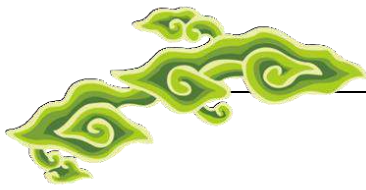
Gambar 2.24 Kepadatan Penduduk tahun 2024 Kota Cirebon per Kelurahan

Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2025

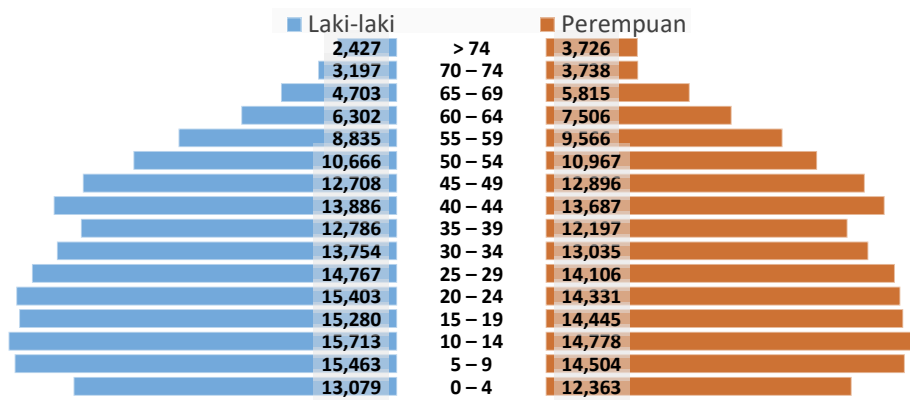
2.1.2.4 Struktur Penduduk

Bentuk grafik penduduk Kota Cirebon tersebut sebagian besar penduduk berusia muda, sedangkan penduduk lanjut usia relatif sedikit, angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian, pertumbuhan penduduk sangat cepat, kebutuhan lapangan pekerjaan dan rasio ketergantungan yang besar. Banyaknya jumlah penduduk muda sering dikaitkan dengan fenomena bonus demografi yaitu terjadi saat proporsi kategori penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif) lebih dari setengah total populasi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Gambaran struktur penduduk Kota Cirebon dapat dilihat pada grafik berikut yang menyajikan data penduduk berdasarkan usia.

Jumlah penduduk Kota Cirebon di tahun 2020 sebesar 343.003 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,72 menunjukkan antara laki-laki dan perempuan hampir berimbang. Keseimbangan gender dapat mempengaruhi pengembangan perencanaan pembangunan yang

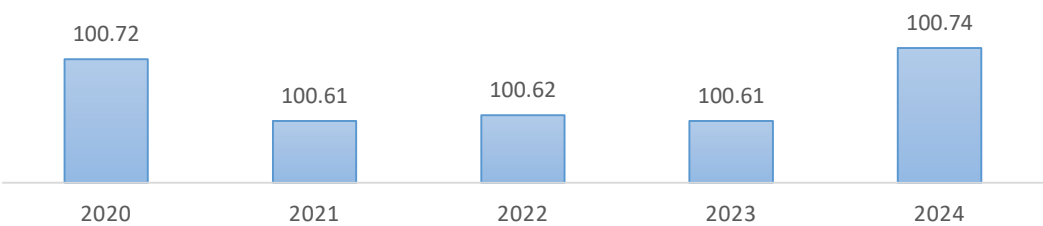


berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Sepuluh tahun kemudian, jumlah penduduk Kota Cirebon di tahun 2024 meningkat menjadi 356.629 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,74.



Gambar 2.25 Grafik Piramida Penduduk Kota Cirebon tahun 2024
Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2025

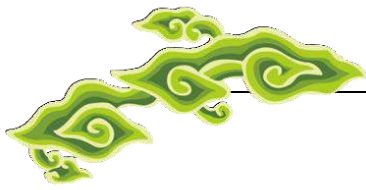
Berdasarkan kelompok umur, di tahun 2020 hingga tahun 2024 jumlah penduduk paling banyak terdapat di kelompok umur 10-14 tahun. Jumlah penduduk paling sedikit berada pada kelompok umur di atas 75 tahun. Berdasarkan pola peningkatan jumlah penduduk usia sekolah, pemerintah daerah perlu direncanakan secara matang pelayanan kepada anak usia sekolah terutama terkait dengan pembangunan pendidikan dan kesehatan dan kelompok usia lansia sehingga perlu direncanakan pula secara matang terkait kesehatan dan fasilitas umum yang ramah lansia. Hubungan penduduk produktif dan tidak produktif dapat dilihat pada rasio ketergantungan penduduk (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan penduduk usia 0-14 tahun lebih tinggi daripada penduduk usia 65+ tahun.



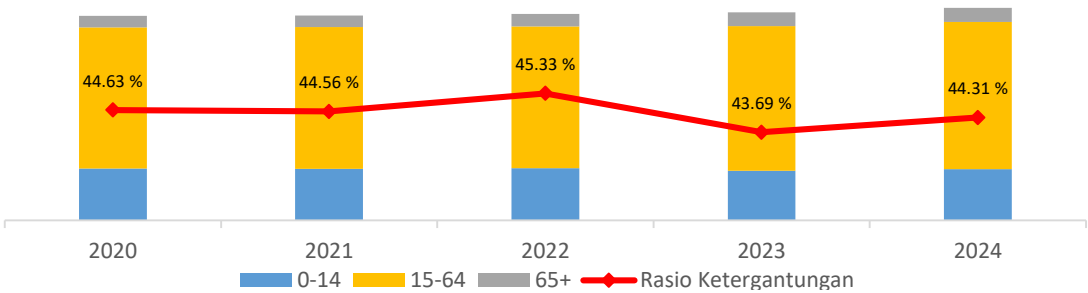
Gambar 2.26 Rasio Jenis Kelamin Kota Cirebon
Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon, 2025

Rasio ketergantungan yang tinggi (baik kaum muda maupun lanjut usia) dapat mengindikasikan potensi tantangan ekonomi, karena sebagian besar penduduk mungkin bergantung pada penduduk yang aktif secara ekonomi. Hal ini dapat membebani sumber daya seperti layanan kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan. Sebaliknya, rasio ketergantungan yang lebih rendah dapat mengindikasikan terdapat populasi usia kerja yang relatif lebih besar, sehingga berpotensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari struktur penduduk Kota Cirebon yang nampak didominasi oleh penduduk usia produktif menunjukkan Kota Cirebon mendapatkan



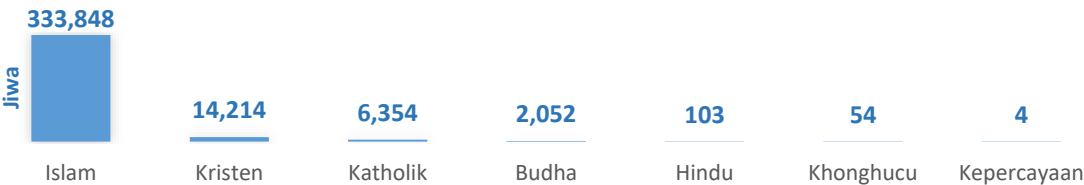
bonus demografi. Jika bonus demografi dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, kondisi ini akan menjadi modal penting untuk membangun menuju 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045. Namun, jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi beban dan permasalahan sosial bagi Pemerintah Daerah.



Gambar 2.27 Rasio Ketergantungan Kota Cirebon
Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon, 2025

2.1.2.5 Penduduk Menurut Agama

Keberagaman di Kota Cirebon tampak dari penduduknya yang berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa seluruh penjuru tanah air, hal ini merupakan ciri khas dari kota di wilayah pesisir yang pada umumnya sebagai kota tempat berdagang sejak zaman dahulu. Keberagaman daerah dan suku bangsa juga selaras dengan keyakinan yang dibawa masing-masing penduduk yang merupakan agama penduduk tersebut sehingga hampir seluruh agama yang diakui negara dianut oleh penduduk Kota Cirebon.

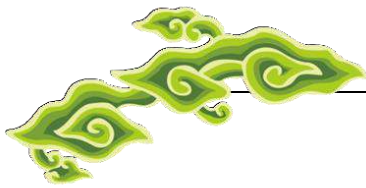


Gambar 2.28 Penduduk Menurut Agama tahun 2024
Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2024.

Keberadaan agama yang dianut penduduk Kota Cirebon tampak dari keberadaan rumah ibadah di wilayah Kota Cirebon, seperti: Masjid, Vihara, Pura, Gereja dan Klenteng yang merupakan rumah ibadah untuk agama konghucu. Berdasarkan data disdukcapil Kota Cirebon tahun 2024 untuk penganut terbesar secara berurutan adalah umat islam; umat Kristen; umat Katolik; umat Budha; umat Hindu; umat Konghucu dan sisanya sebagai penganut kepercayaan.

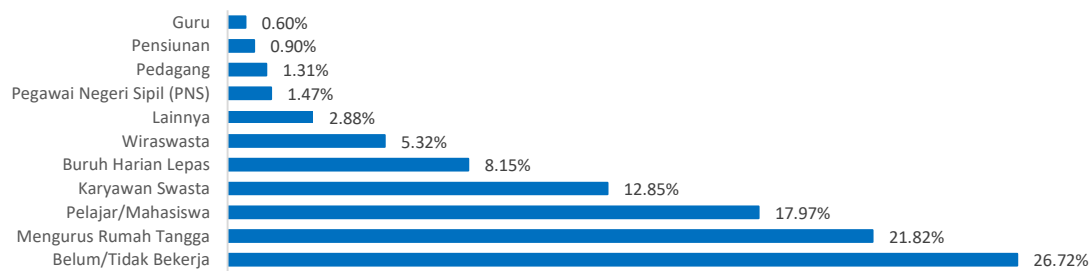
2.1.2.6 Penduduk Menurut Pekerjaan

Sebagian besar penduduk Kota Cirebon berprofesi sebagai Karyawan Swasta, Buruh Harian Lepas, Guru dan Aparat Pemerintah di samping profesi sebagai Pedagang/Wiraswasta dengan komoditas berupa barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan kondisi dan potensi Kota Cirebon sebagai PKN kota perdagangan dan jasa khususnya untuk wilayah Rebana. Profesi lainnya adalah Sopir, pekerja di bidang



kesehatan, Nelayan dan sebagian kecil adalah Tukang Batu serta Petani dengan lahan yang sangat terbatas. Dari jenis pekerjaan yang tersedia pada data kependudukan, jenis profesi penduduk Kota Cirebon yang ditekuni sebanyak 71 jenis pekerjaan dari jumlah keseluruhannya adalah 99 jenis pekerjaan.

Untuk Jumlah status pekerjaan “Belum/Tidak Bekerja”, merupakan campuran dari anak-anak yang belum masuk usia sekolah dan orang dewasa yang tidak memiliki pekerjaan serta penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya. Dari persentase penduduk yang “Belum/Tidak Bekerja” sebesar 26,72%, di antaranya merupakan penduduk usia di bawah lima tahun (0 – 4) sebesar 7,13%.

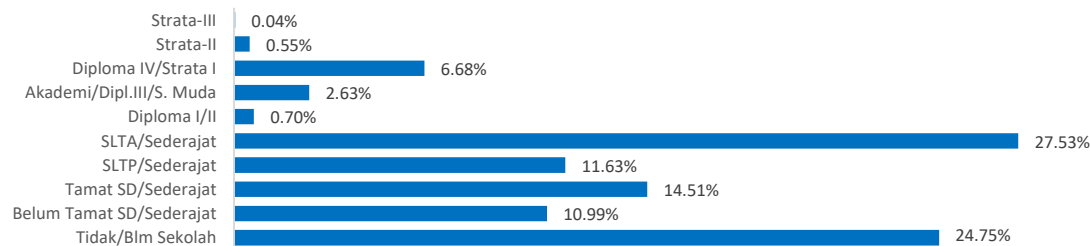


Gambar 2.29 Penduduk Kota Cirebon tahun 2024 berdasarkan Status Pekerjaan

Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2025

2.1.2.7 Penduduk Menurut Pendidikan

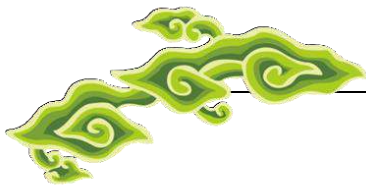
Tingkat pendidikan penduduk di Kota Cirebon sudah cukup tinggi, hal ini terlihat dari indikator indeks pendidikan di Kota Cirebon yang cukup besar. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menjadi kontribusi terbesar suksesnya sektor pendidikan di samping faktor sarana dan prasarana pendidikan yang baik. Hal ini dapat terlihat dari jumlah penduduk lulusan Sarjana dan SMA yang cukup banyak, yaitu sebesar 34,21% dari penduduk Kota Cirebon atau 122.018 siswa.



Gambar 2.30 Penduduk Kota Cirebon tahun 2024 berdasarkan Pendidikan Terakhir

Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2025

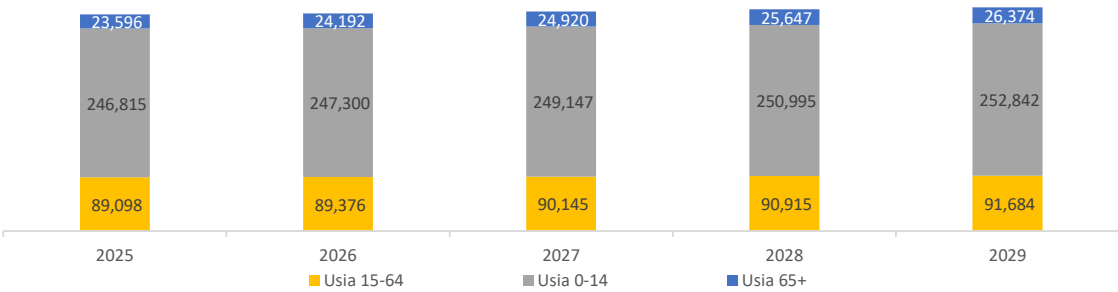
Data pendidikan terkait hal tersebut dapat dilihat pada grafik Indeks Pendidikan yang memperlihatkan Indikator Angka Melek Huruf dan Harapan Lama Sekolah. Perlu peningkatan dan pemerataan kualitas tenaga didik serta lulusan peserta didik, agar dapat bersaing ditingkat nasional maupun internasional. Grafik tersebut menggambarkan tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh penduduk di Kota Cirebon bahwa



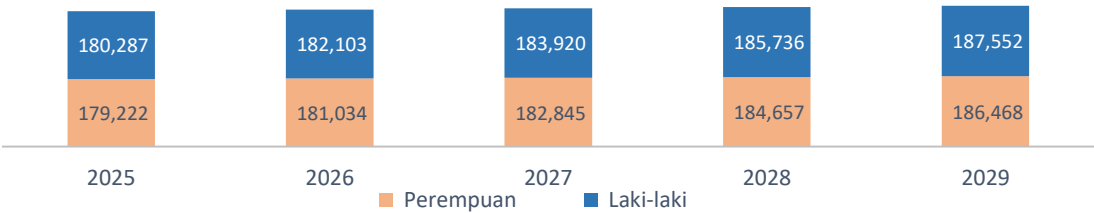
mayoritas berasal dari tingkat SMA dan sebagian kecil dari tingkat SD dan SMP. Untuk kategori Tidak/Belum sekolah masih perlu informasi lebih lanjut, karena data tersebut belum diklasifikasi berdasarkan usia sehingga ada golongan penduduk dewasa dan golongan balita masuk dalam kategori tersebut. Jumlah penduduk balita Kota Cirebon usia 0 – 4 berjumlah 25.442 atau sebesar 7,13%, sehingga jumlah penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar ± 63 ribu orang yang termasuk dalam golongan usia dewasa dan usia sekolah namun tidak melanjutkan pendidikan di sekolah formal. Untuk itu perlu tindak lanjut dalam memberikan pendidikan luar sekolah kepada golongan penduduk dewasa yang belum tersentuh pendidikan formal.

2.1.2.8 Proyeksi Demografi

Perkembangan penduduk Kota Cirebon untuk 5 (lima) tahun mendatang akan meningkat cukup signifikan, proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2029 diperkirakan berjumlah 374.021 jiwa yang merupakan ±95,35% dari jumlah pada tahun 2024 yaitu sebesar 356.629 jiwa. Namun proporsi kepadatan penduduk tidak terlalu banyak berubah.

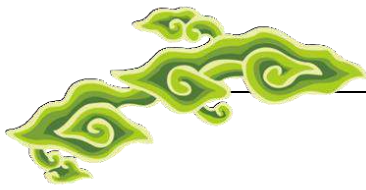


Gambar 2.31 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Usia Produktif
Sumber:Bappelitbangda, 2025



Gambar 2.32 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber:Bappelitbangda, 2025

Untuk proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin tidak mengalami perubahan yang signifikan. Namun perlu diantisipasi perubahan demografi menurut kelompok umur, khususnya kelompok umur produktif dan kelompok umur non-produktif. UHH Kota Cirebon yang semakin baik akan memberikan dampak jumlah penduduk usia lanjut yang akan bertambah. Dampak bertambahnya penduduk usia lanjut akan meningkatkan bertambahnya angka ketergantungan di Kota Cirebon. Untuk itu perlu dipersiapkan fasilitas pelayanan dasar penduduk usia lanjut dan penyediaan lapangan pekerjaan penduduk usia produktif agar kebutuhan penduduk Kota Cirebon dapat terpenuhi, walaupun akan terjadi bonus demografi di Kota Cirebon. Berikut



ilustrasi perkembangan penduduk berdasarkan proyeksi menurut jenis kelamin dan usia baik produktif dan non-produktif.

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

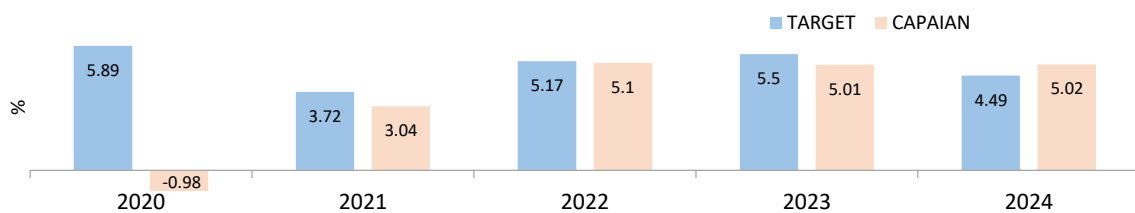
Tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi: (1) aspek kesejahteraan ekonomi; dan (2) aspek kesejahteraan sosial budaya.

2.1.3.1 Kesejahteraan Ekonomi

Salah satu dari tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan ekonomi yang dimaksud meliputi: Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, angka kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka.

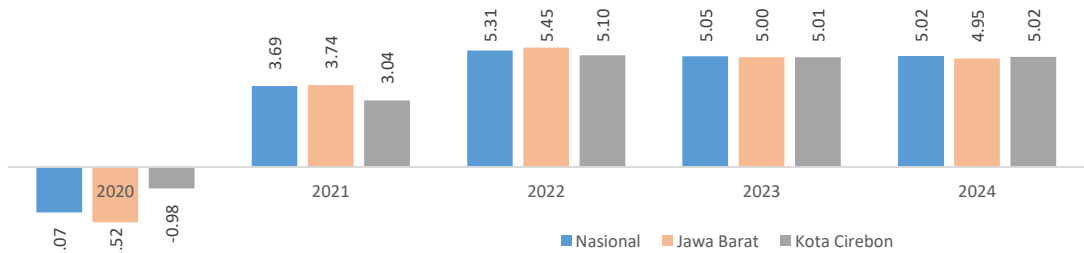
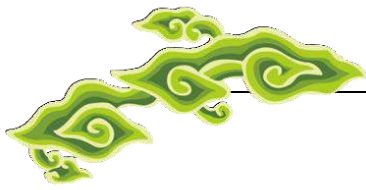
2.1.3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

salah satu indikator penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk oleh berbagai macam sektor ekonomi yang dapat menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi daerah atau yang dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) diukur melalui pertumbuhan PDRB.



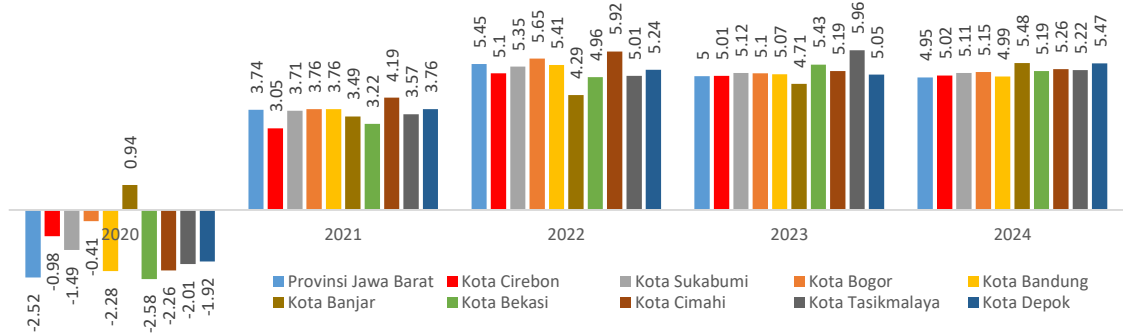
Gambar 2.33 Tingkat Capaian dan Target LPE Kota Cirebon
Sumber: Dok. Perencanaan Kota Cirebon & BPS 2025

Kinerja pembangunan ekonomi di kota Cirebon tahun 2020–2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan ditandainya capaian pertumbuhan yang terus meningkat setelah terjadinya pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dimana pertumbuhan ekonomi kota Cirebon saat awal pandemi Covid-19 terkontraksi hingga minus 0,99 di tahun 2020 dan kembali menggeliat di tahun 2021 dan 2022 akibat dari keberhasilan pengendalian dampak pandemi Covid-19 serta adanya stimulus fiskal oleh Pemerintah. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3,04% sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 3,72% dan di tahun 2022 kembali meningkat sebesar 5,1% mendekati target dengan tingkat capain sebesar 98,65% namun turun menjadi 5,01% pada tahun 2023.



Gambar 2.34 Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon, Jawa Barat dan Nasional
Sumber: BPS, 2025

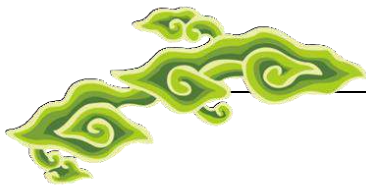
Pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon searah dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon sebelum terjadinya pandemi covid-19 berada di atas Provinsi Jawa Barat dan Nasional begitupun di saat hantaman Covid-19 terjadi, kontraksi pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon terbilang rendah bila dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pemulihan perekonomian Kota Cirebon pasca pandemi Covid-19 terlihat masih berada di bawah provinsi Jawa Barat dan Nasional hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon pasca pandemi Covid-19 berada di bawah provinsi Jawa Barat maupun Nasional dan belum mampu mengejar pertumbuhan ekonomi sebelum terjadinya pandemi Covid-19.



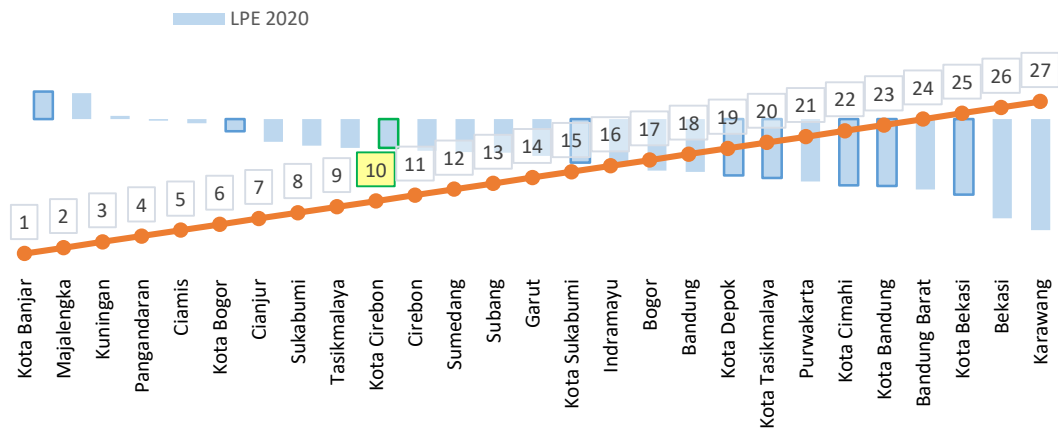
Gambar 2.35 LPE Kota di Jawa Barat
Sumber: BPS, 2025

Roda perekonomian kembali menunjukkan geliatnya, hal ini dapat dilihat dari bervariasinya perkembangan LPE Kota di Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2024 adalah Kota Banjar, sedangkan Kota Cirebon berada pada posisi terendah sebelum Kota Bandung. Di saat pandemi Covid-19 terjadi di tahun 2020, hanya Kota Banjar yang mampu bertahan dengan laju pertumbuhan positif, sementara kota lainnya di Jawa Barat termasuk Kota Cirebon berkontraksi negatif.

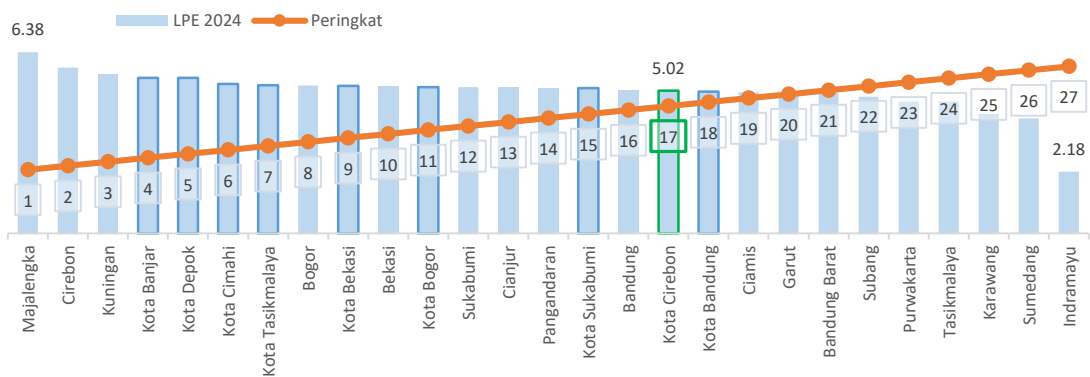
Seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, geliat ekonomi di wilayah ini mulai terlihat tumbuh positif semua. Kondisi ini dimungkinkan dengan meredanya pandemi Covid-19 dan penghentian kebijakan PPKM, sehingga roda perekonomian kembali menuju normal dan diharapkan ekonomi di Kota Cirebon mampu melaju lebih cepat dari



sebelum terjadinya pandemi Covid-19 yang mencapai angka 6% atau lebih.



Gambar 2.36 LPE Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2020
Sumber: BPS 2025

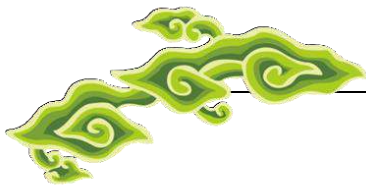


Gambar 2.39 LPE Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2024
Sumber: BPS 2025

Pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon tahun 2023 berdasarkan lapangan usaha, dari 16 (enam belas) sektor lapangan usaha yang ada, sebanyak 14 (empat belas) lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif dan terdapat 2 (dua) lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Lapangan usaha yang tumbuh positif, terlihat pertumbuhan paling besar ada pada sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh mencapai 9,99%, di urutan kedua ada pada sektor Perumahan tumbuh sebesar 9,22% dan di urutan ketiga adalah Pengadaan Listrik dan Gas yang bertumbuh sebesar 8,92%. Sedangkan 2 (dua) sektor yang masih tumbuh negatif ada pada usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar negatif 1,34% dan negatif 1,33% untuk Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

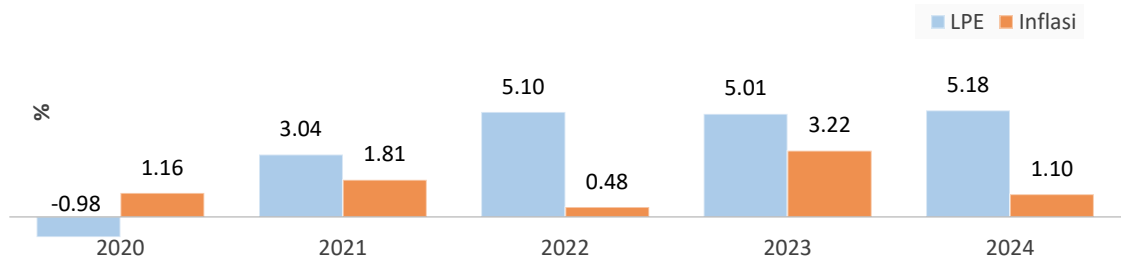
2.1.3.1.2 Laju inflasi

Fluktuasi harga-harga yang tercermin dari nilai inflasi yang merupakan indikator kondisi baik atau buruknya perekonomian. Perkembangan harga-harga secara umum merupakan salah satu indikator penting dalam menunjukkan kinerja perekonomian suatu



daerah. inflasi yang rendah menunjukkan baiknya perekonomian, sedangkan inflasi yang tinggi menunjukkan adanya permasalahan perekonomian walaupun hal ini tidak selalu sejalan dengan lajunya pertumbuhan ekonomi.

Laju inflasi Kota Cirebon mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Inflasi Kota Cirebon mengalami penurunan menjadi 1,1% pada tahun 2024 dari sebelumnya 1,16% di tahun 2020, walaupun sempat menyentuh 4,86% di tahun 2022.



Gambar 2.40 Komparasi Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: BPS 2025

Perkembangan inflasi di Kota Cirebon dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk setiap bulannya berdasarkan sumber BPS seperti disajikan pada tabel berikut.

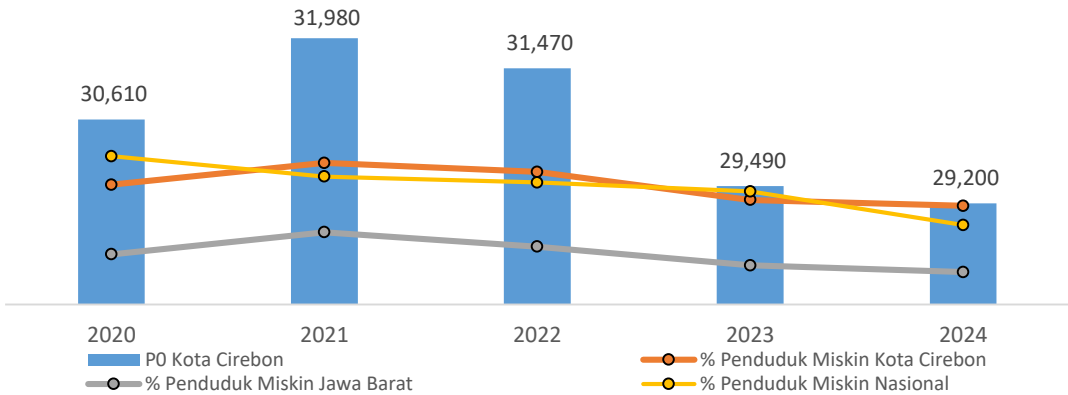
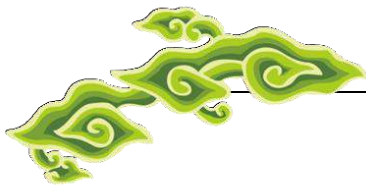
Tabel 2.14 Inflasi Kota Cirebon (%)

No.	Bulan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Januari	1,39	1,14	2,29	5,5	1,97
2.	Pebruari	1,76	1,04	2,38	5,72	2,19
3.	Maret	1,98	0,82	2,96	5,22	2,70
4.	April	1,82	1,13	3,37	4,85	2,57
5.	Mei	1,47	1,56	3,45	4,57	1,97
6.	Juni	1,76	0,93	4,13	4,27	1,43
7.	Juli	1,51	1,07	4,49	4,13	1,01
8.	Agustus	1,05	1,39	4,37	4,04	1,18
9.	September	1,13	1,59	5,60	3,07	0,83
10.	Oktober	1,03	1,66	5,41	3,20	0,88
11.	Nopember	1,18	1,75	5,06	3,27	0,85
12.	Desember	1,16	1,81	4,86	3,22	1,10

Sumber: BPS 2025

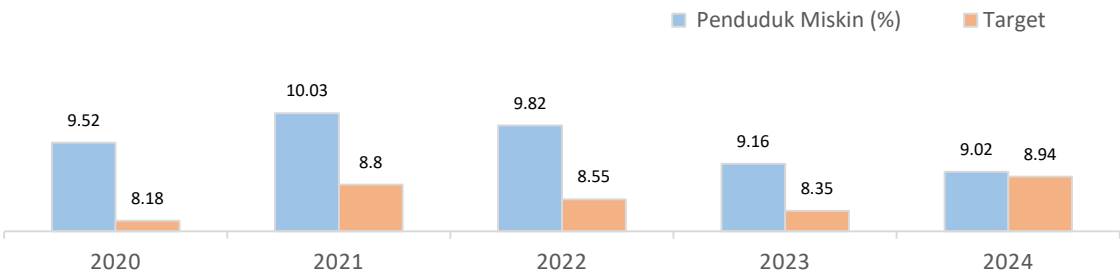
2.1.3.1.3 Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana kebutuhan dasar hidup yang layak tidak terpenuhi, sarana dan prasarana tidak memadai. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach untuk mendefinisikan penduduk miskin. BPS menentukan garis kemiskinan (*poverty line*) setiap tahunnya sebagai ambang batas, dimana jika pendapatan seseorang atau rumah tangga memiliki pendapatan dibawahnya dianggap hidup dalam kondisi kemiskinan.



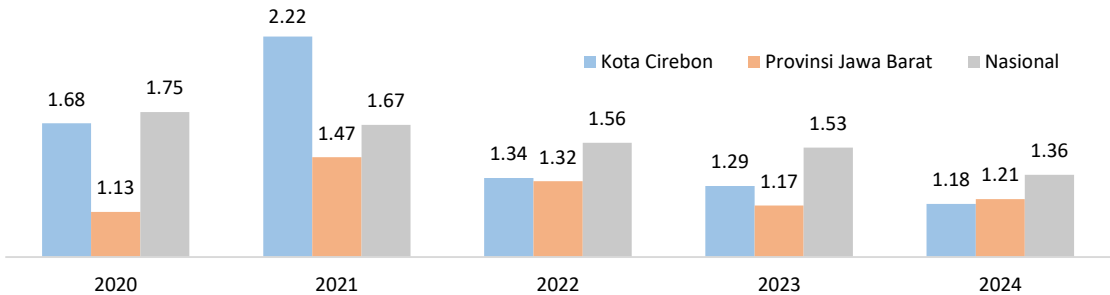
Gambar 2.41 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Cirebon
Sumber: BPS, 2025

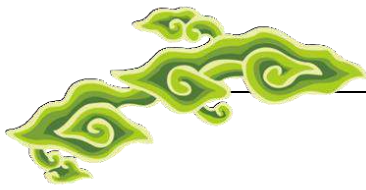
Secara umum, pada periode 2020-2024 tingkat kemiskinan di Kota Cirebon menunjukkan tren menurun baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Namun terjadi kenaikan kemiskinan yang disebabkan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Kota Cirebon. Sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 kemiskinan di Kota Cirebon mengalami penurunan kembali. Adapun persentase penduduk miskin di Kota Cirebon periode 2021-2022 dan 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pasca Covid-19 menunjukkan Kota Cirebon bahwa pemulihan ekonomi di Kota Cirebon masih belum optimal terutama bagi penduduk miskin.



Gambar 2.42 Target dan Realisasi Penduduk Miskin Kota Cirebon
Sumber: BPS 2025 dan Evaluasi RPJPD Kota Cirebon 2005-2025

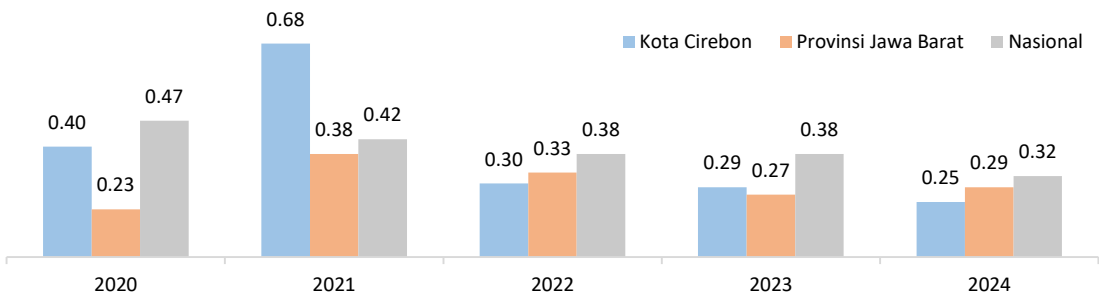
Tidak hanya jumlah dan persentase penduduk miskin, namun dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) adalah ukuran sejauh mana penduduk miskin dalam suatu wilayah berada di bawah garis kemiskinan, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinan yang lebih besar. Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.





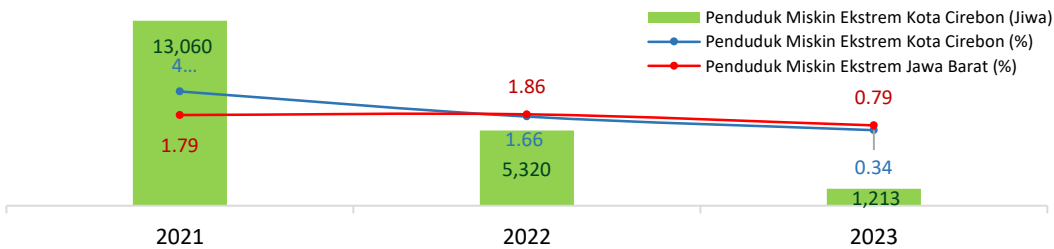
Gambar 2.43 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)
Sumber: BPS 2025

Grafik P_1 dan grafik P_2 menunjukkan pola Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kota Cirebon yang fluktuatif dalam periode tahun 2020-2024.



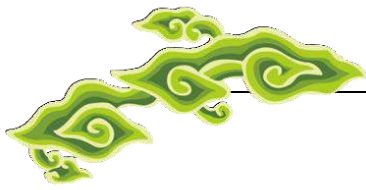
Gambar 2.44 Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
Sumber: BPS 2025

Pada tahun 2022, nilai P_1 dan P_2 di Kota Cirebon mengalami penurunan yang signifikan. Peningkatan penduduk miskin dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 juga berpengaruh pada kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kota Cirebon. Adapun pada tahun 2022 penurunan cukup signifikan pada P_1 sebesar 1,34 dan P_2 sebesar 0,30. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa upaya seperti bantuan-bantuan sosial yang dilakukan pada masa pemulihan pandemi Covid-19 mampu mengurangi kedalaman dan keparahan dari penduduk miskin terdampak pandemi. Dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, nilai indeks P_1 dan P_2 Kota Cirebon lebih fluktuatif. Meskipun ada beberapa tahun dengan penurunan kedalaman dan keparahan kemiskinan, masih ada tantangan serius dalam mengatasi kemiskinan di Kota Cirebon.



Gambar 2.45 Jumlah dan persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kota Cirebon
Sumber: BPS, 2025

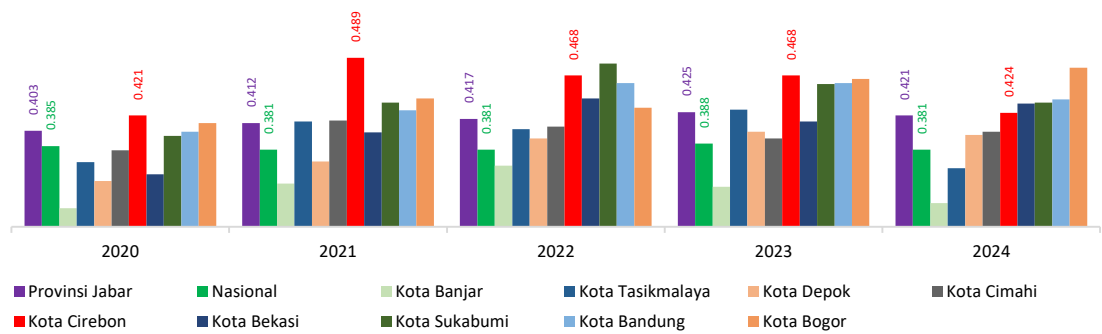
Pada perkembangan isu kemiskinan berkembang pada pengentasan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim berdasarkan definisi World Bank adalah kondisi individu atau keluarga dengan biaya hidup dibawah US\$1,90 per hari atau indikator nilai paritas daya beli. Jumlah penduduk ekstrim dan persentasenya cenderung mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin ekstrim Provinsi Jawa Barat sebesar 1,79% lalu meningkat menjadi 1,86% maka dapat diindikasikan Kota Cirebon dapat memberikan



kontribusi yang signifikan pada penurunan penduduk miskin ekstrim di Jawa Barat.

2.1.3.1.4 Rasio Gini

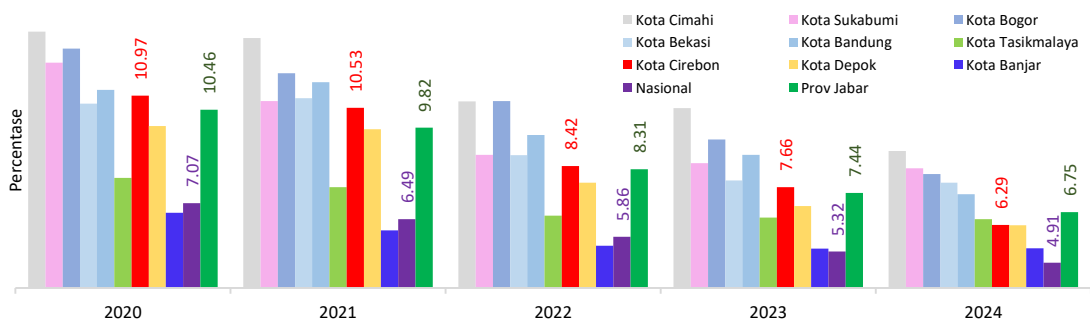
Rasio Gini Kota Cirebon termasuk yang cukup tinggi di area wilayah jawa barat dan cenderung mengalami peningkatan sejak masa pandemi Covid-19, hal ini sejalan dengan indikator kemiskinan lainnya. Peningkatan rasio gini yang terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,489 sebagai indikator pertumbuhan ekonomi kelompok dengan pendapatan rendah lebih lambat dibandingkan dengan kelompok pendapatan yang lebih tinggi.



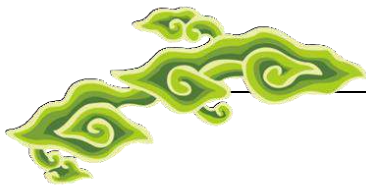
Gambar 2.6 Indeks Gini Kota di Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Sumber: BPS 2025

2.1.3.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

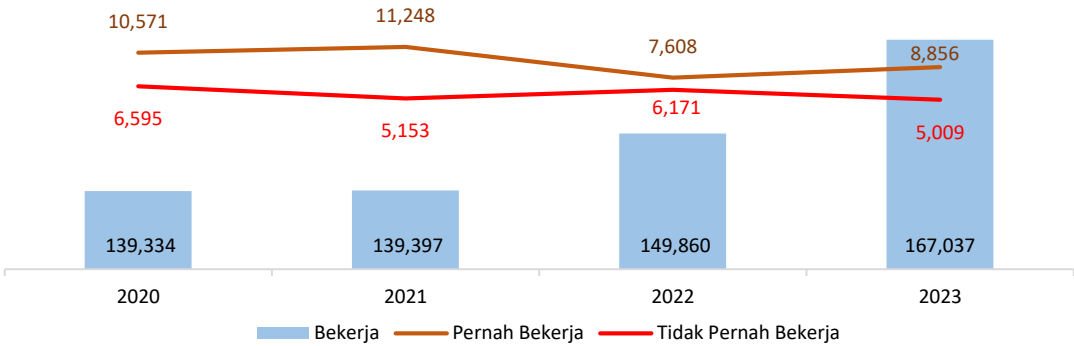
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dalam penentuan indikator kinerja pembangunan daerah, ketercapaian TPT merupakan salah satu indikator makro untuk melihat keberhasilan pembangunan daerah. Persentase TPT Kota Cirebon 2020-2023 lebih tinggi daripada TPT Jawa Barat dan Nasional, namun pada tahun 2024 Kota Cirebon berhasil menekan angka pengangguran terbuka dengan persentase angka TPT lebih rendah dari persentase angka TPT Provinsi Jawa Barat. Penurunan cukup signifikan sebesar 2,11% persentase angka TPT terjadi pada tahun 2022.



Gambar 2.47 Perbandingan TPT Kota di Provinsi Jawa Barat dan Nasional (%)
Sumber: BPS, 2025



Kontribusi para mitra kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Tenaga Kerja yang aktif membantu membuka peluang kerja dengan langkah konkretnya untuk membentuk Bursa Kerja Khusus (BKK) di lingkungan SMA, SMK, dan perguruan tinggi menjadi salah satu aspek yang turut berkontribusi terhadap turunnya persentase angka TPT. BKK ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara pencari kerja muda dengan dunia industri di kota yang berbasis dalam perdagangan dan jasa. Hal ini merupakan bukti nyata dari kolaborasi antara lembaga ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Kota Cirebon belum memenuhi target capaian TPT dalam beberapa tahun terakhir pada angkatan kerja di Kota Cirebon. Berikut data Angkatan Kerja di Kota Cirebon.



Gambar 2.48 Angkatan Kerja Kota Cirebon

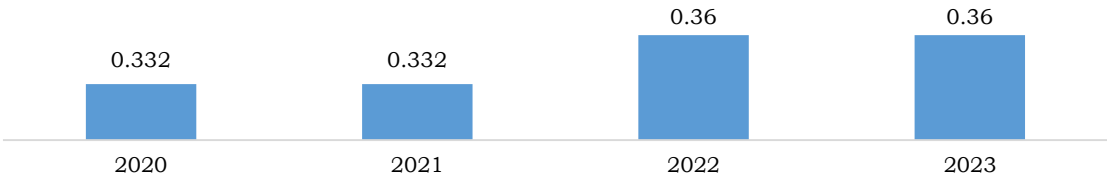
Sumber: BPS 2025

2.1.3.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya adalah suatu kondisi dimana setiap individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Kesejahteraan sosial budaya yang dimaksud meliputi: Indeks Keluarga Sehat, Indeks Kualitas Keluarga, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Gender/ Indeks Pemberdayaan Gender/ Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda, dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

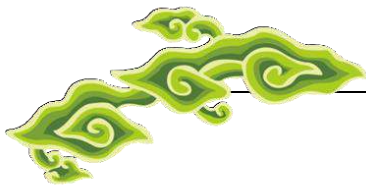
2.1.3.2.1 Keluarga Sehat

Indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat adalah Indeks Keluarga Sehat (IKS). IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai.



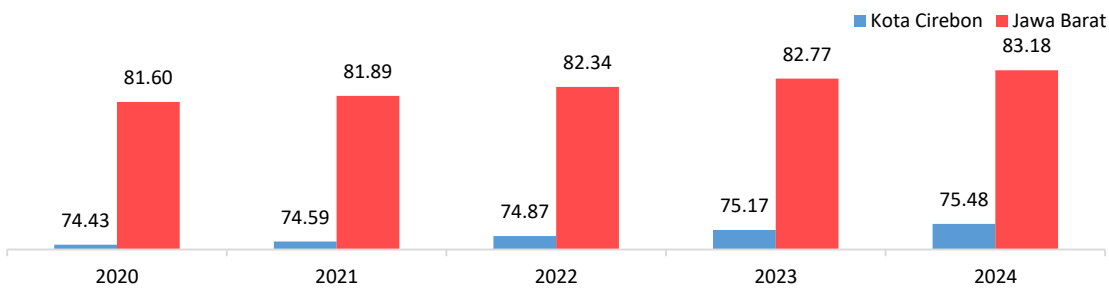
Gambar 2.49 IKS Kota Cirebon

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cirebon 2025



IKS erat kaitannya dengan Usia Harapan Hidup (UHH), yaitu angka yang Data pada Gambar 2. menunjukkan bahwa Kota Cirebon merupakan Kota dengan Keluarga Tidak Sehat. Hal ini sesuai dengan kategori sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga, yaitu:

- 1. Nilai indeks > 0,800 : keluarga sehat
- 2. Nilai indeks 0,500-0,800 : keluarga pra sehat
- 3. Nilai indeks <0,500 : keluarga tidak sehat

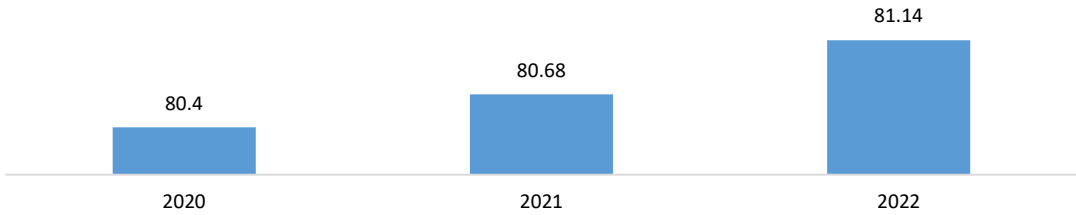
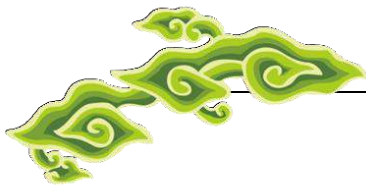


Gambar 2.50 Usia Harapan Hidup Kota Cirebon
Sumber: BPS 2025

UHH menunjukkan perkiraan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh seseorang pada suatu populasi tertentu. Perhitungan UHH diketahui dari jumlah usia semua orang yang meninggal dibagi jumlah orang yang meninggal pada tahun tersebut, dengan dasar tersebut maka:

- 1. Kematian ibu dan bayi menurunkan UHH;
- 2. Kematian Balita menurunkan UHH;
- 3. Kematian karena penyakit menular pada orang remaja, dewasa dan usia produktif menurunkan UHH;
- 4. Kematian karena kecelakaan menurunkan UHH; dan
- 5. Usia penduduk di atas 76 tahun menaikkan UHH.

Kenaikan UHH Kota Cirebon dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 1,05 tahun. UHH Kota Cirebon masih lebih rendah jika dibandingkan dengan UHH Provinsi Jawa Barat. Besaran UHH mempengaruhi capaian Indeks Kesehatan di Kota. Indeks Kesehatan Kota Cirebon cenderung meningkat setiap tahun.

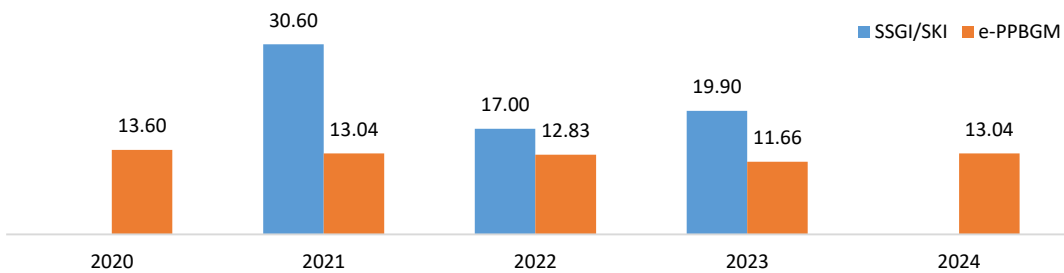


Gambar 2.51 Indeks Kesehatan Kota Cirebon
Sumber: BPS 2024

Meskipun capaian UHH dan Indeks Kesehatan semakin membaik dari tahun ke tahun, beberapa gambaran kesehatan mengenai kondisi kesehatan di Kota Cirebon masih menjadi masalah, antara lain Prevalensi Balita Stunting, kasus Tuberkulosis serta HIV-AIDS. Wacana Program *One Stop Service* TBC-HIV sebagai layanan terpadu satu pintu dalam upaya meningkatkan cakupan skrining dan pengobatan penyakit TBC-HIV, rencananya akan dilaksanakan serentak pada layanan Poli DOTS dan HIV/AIDS-IMS.

2.1.3.2.2 Prevalensi Balita Stunting

Terdapat perbedaan prevalensi balita stunting Kota Cirebon antara data SSGI/SKI dengan data berdasarkan pengukuran rutin Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM).



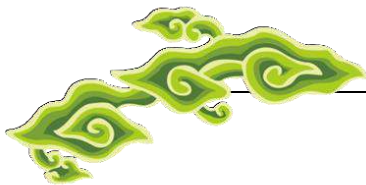
Gambar 2.52 Prevalensi Balita Stunting Kota Cirebon
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2024

Meskipun menurut e-PPBGM terjadi penurunan prevalensi balita stunting pada tahun 2023, akan tetapi berdasarkan data SKI, terdapat kenaikan prevalensi balita stunting. Berbagai upaya telah dilakukan Pemda Kota Cirebon dalam rangka percepatan penurunan stunting, terutama peningkatan konvergensi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

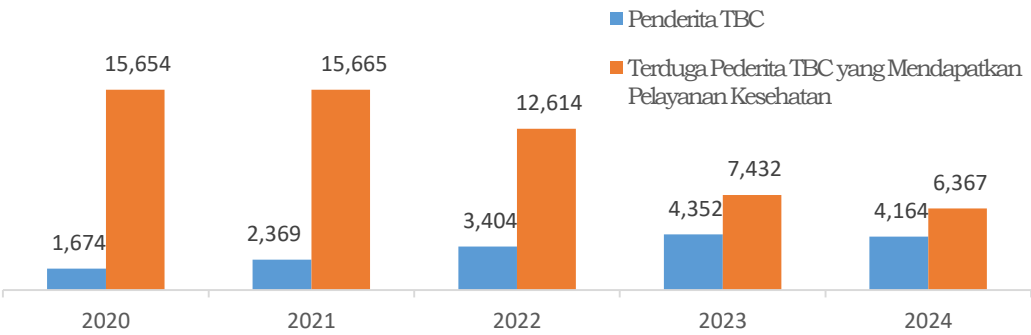
2.1.3.2.3 Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) terdiri dari TBC Sensitif Obat (SO) dan TBC Resisten Obat (RO). TBC SO adalah TBC yang biasanya menyerang paru-paru, namun bisa juga menyerang organ tubuh lain. Sementara TBC RO adalah TBC paru dan TBC ekstra paru yang telah kebal atau resisten terhadap obat pada lini pertama atau obat TBC SO sebelumnya.

Jumlah penderita TBC di Kota Cirebon justru menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Capaian positif ini tidak lepas dari peran aktif petugas kesehatan, kader, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan keterlibatan komunitas yang membantu meningkatkan capaian penemuan kasus dengan melacak



kontak erat serta menjalankan strategi program Pencegahan dan Pengendalian TBC di Kota Cirebon.



Gambar 2.53 Penderita TBC dan Terduga Penderita TBC yang Mendapat Pelayanan Kesehatan
Sumber: Open Data Kota Cirebon 2025

Meski terjadi penurunan secara agregat, penemuan kasus baru TBC SO di Kota Cirebon pada kelompok usia anak-anak 0-4 tahun selama tahun 2021 sampai dengan 2023 justru semakin meningkat. Tingginya kasus TBC di Kota Cirebon juga tidak hanya terjadi pada kasus TBC SO, tetapi juga terjadi pada kasus TBC RO, meskipun jumlah kasus RO jauh lebih sedikit.

Tabel 2.15 Penemuan Kasus Baru **TBC SO** Kota Cirebon

Kelompok Umur	2021			2022			2023		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
0 - 4	134	134	268	275	355	630	399	400	799
5-14	74	46	120	176	134	310	179	165	344
15-24	102	111	213	132	121	253	171	196	367
25 - 34	123	100	223	150	117	267	154	127	281
35 - 44	101	76	177	134	101	235	136	125	261
45 - 54	125	75	200	171	120	291	196	156	352
55 - 64	107	58	165	150	99	249	198	134	332
>=65	73	36	109	117	64	181	183	108	291
Total	839	636	1.475	1.305	1.111	2.416	1.616	1.411	3.027

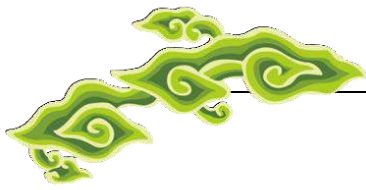
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cirebon 2024

Tabel 2.16 Penemuan Kasus Baru **TBC RO** Kota Cirebon

Kelompok Umur	2021			2022			2023		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
0 - 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-14	0	0	0	1	0	1	0	1	1
15-24	4	2	6	4	7	11	5	7	12
25 - 34	7	5	12	7	5	12	16	12	28
35 - 44	13	4	17	11	9	20	11	9	20
45 - 54	8	2	10	16	8	24	12	7	19
55 - 64	2	2	4	5	5	10	7	5	12
>=65	1	2	3	3	5	8	1	5	6
Total	35	17	52	47	39	86	52	46	98

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cirebon 2024

Penemuan kasus TBC yang semakin tinggi dalam data temuan baru pada periode tahun 2021-2023, didukung dengan adanya kegiatan skrining TBC oleh fasilitas kesehatan Kota Cirebon di wilayah berisiko tinggi TBC, di antaranya pondok pesantren, sekolah, pasar modern,



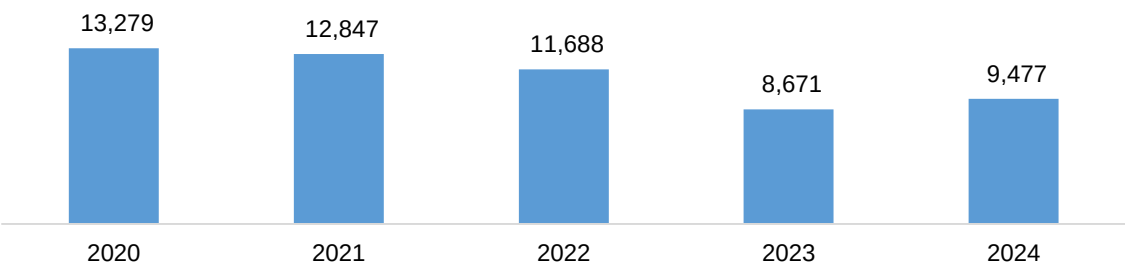
pasar swalayan, perusahaan, dan tempat risiko lainnya. Selain itu, adanya peran aktif dari berbagai pihak dalam penatalaksanaan kasus, pendampingan pasien, dan pelacakan kontak erat telah berkontribusi pada penemuan kasus yang lebih komprehensif.

2.1.3.2.4 HIV-AIDS

Infeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)-AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) juga menjadi masalah kesehatan yang harus ditangani secara serius di Kota Cirebon. Data menunjukkan tren penurunan jumlah kasus HIV yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023, dari 13.279 kasus menjadi 8.671 kasus. Namun, terjadi sedikit kenaikan pada tahun 2024 menjadi 9.477 kasus.

Upaya pencegahan penularan kasus HIV di Kota Cirebon dilakukan secara konvergen, mulai dari penerapan perilaku aman, dimana orang yang berisiko terhadap penularan HIV dapat mengkonsumsi obat yang merupakan program profilaksis pra pajanan, serta memberikan motivasi untuk berobat terhadap orang yang berisiko terinfeksi HIV. Percepatan penurunan kasus HIV terus diupayakan dengan konsep jejaring layanan HIV di Fasilitas Kesehatan Publik dan Swasta.

Penerapan kewaspadaan standar yang dilakukan oleh multisektor yang berperan dalam pencegahan penularan HIV melalui pemberian alat kontrasepsi pada komunitas berisiko juga terus dilaksanakan untuk mempertahankan tren penurunan kasus yang telah dicapai.

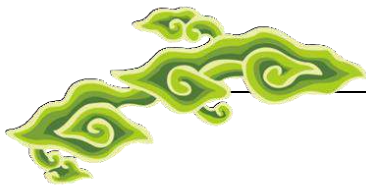


Gambar 2.54 Jumlah Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV di Kota Cirebon

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2025

2.1.3.2.5 Kualitas Keluarga

Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang terbentuk atas dasar perkawinan yang sah yang bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, jumlah anak ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, rukun dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara konseptual, pengertian keluarga berkualitas di atas erat kaitannya dengan pengertian ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yaitu keadaan keluarga yang mempunyai ketangguhan dan ketangguhan, kemampuan jasmani dan rohani untuk hidup mandiri, serta mencakup kemampuan fisik materiil untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarga agar hidup harmonis dan sejahtera, meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) digunakan sebagai indikator dalam mengukur kualitas keluarga, IPK



kota cirebon berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana tahun 2023 adalah sebesar 61,14 dan tahun sebelumnya sebesar 55,43.

2.1.3.2.6 Perlindungan Anak

Untuk mengukur dan meningkatkan kualitas perlindungan anak pada suatu daerah, Indeks Perlindungan Anak mempunyai peran penting sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan perlindungan anak. Indeks Perlindungan Anak digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Indeks Perlindungan Anak terdiri atas 5 (lima) klaster yaitu hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan dasar, pendidikan, dan perlindungan khusus. Kelima klaster ini beserta unsur kelembagaan juga yang menjadi dasar dalam penilaian Kota Layak Anak. Berikut Capaian Nilai dari masing-masing klaster pada tahun 2023 :

Tabel 2.17 Pengukuran Kualitas Perlindungan Anak

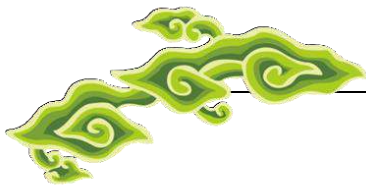
Pengukuran	Nilai Maksimal	Verifikasi Akhir
Kelembagaan	164,00	107,48
Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	115,00	34,25
Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	156,00	82,00
Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	150,00	94,50
Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	110,00	35,00
Klaster V Perlindungan Khusus	205,00	70,50
Kelana dan Dekela	100,00	86,85
Total	1000,00	510,58

Sumber : DP3APPKB Kota Cirebon, 2024

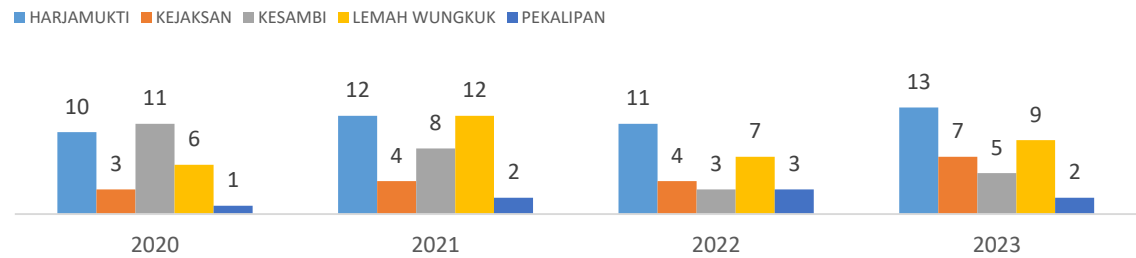
Total nilai evaluasi Kota Layak Anak Kota Cirebon mencapai 510,58, dengan nilai tersebut Kota Cirebon mendapat penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Pratama. Nilai terbesar diperoleh dari Kelana dan Dekela yaitu penyelenggaraan Kota Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan nilai 86,85. Nilai tersebut diperoleh dengan terlaksananya KLA di 3 Kecamatan Kota Cirebon dan 12 Kelurahan di Kota Cirebon. Sedangkan Indikator dengan nilai terkecil diperoleh dari Klaster Hak Sipil dan Kebebasan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya Indikator Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) yang hanya mencapai nilai 17,67 dari nilai maksimal 45,00.

Tercapainya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak tidak lepas dari peran pemerintah untuk menangani kasus terhadap anak dalam suatu daerah. perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan individu untuk melindungi hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Seluruh kasus kekerasan yang dilaporkan pada anak telah ditangani oleh pemerintah, akan tetapi jumlah kasus kekerasan pada



anak kembali meningkat pada tahun 2023 dimana mencapai 36 kasus dibandingkan dengan tahun 2022 hanya sebanyak 28 kasus. Untuk itu diperlukan peningkatan upaya dalam pencegahan yang dimulai dari tingkat keluarga terhadap kekerasan pada anak.



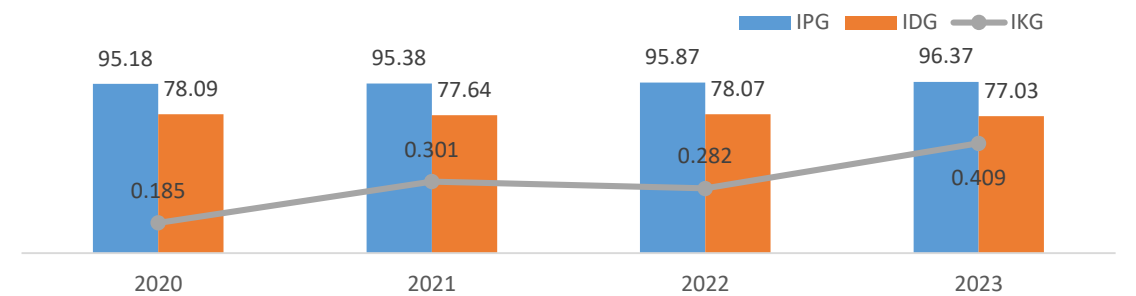
Gambar 2.55 Data Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak
Sumber : BPS 2025

2.1.3.2.7 Pembangunan Gender

Pengertian gender mengacu pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, aktivitas, dan karakteristik yang dibangun secara sosial. Perbedaan tersebut tidak menjadi masalah jika pelayanan dan perlakuannya sama.

Indikator yang digunakan untuk melihat capaian pembangunan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG merupakan perubahan indikator pembangunan gender pada tingkat nasional yang semula adalah IDG.

IKG yang tinggi mencerminkan IPG dengan nilai rendah. Nilai IPG di Kota Cirebon cenderung meningkat, hal ini disebabkan oleh perbaikan besaran kesehatan reproduksi dan pemberdayaan.

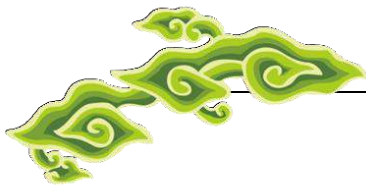


Gambar 2.56 Indikator Gender
Sumber: BPS 2025

Ketimpangan gender yang masih cukup besar di Kota Cirebon, maka diperlukan peran semua pihak untuk memperbaikinya dalam berbagai dimensi. Untuk itu perlu ada perbaikan, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan terhadap perempuan untuk memiliki lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan akses dan kemampuannya.

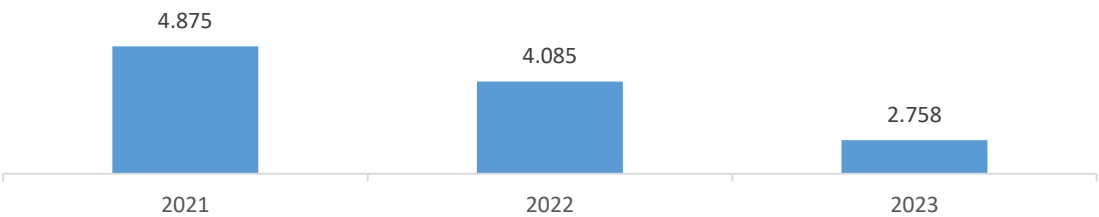
2.1.3.2.8 Pembangunan Pemuda

Indikator yang mendukung Indeks Pembangunan Pemuda Kota Cirebon antara lain: jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan, jumlah atlet yang dibina, rasio kewirausahaan, Jumlah Organisasi Kepemudaan, dan Jumlah



Wirausaha Muda. Berkaitan dengan kepemudaan, tren data yang ditampilkan menunjukkan beberapa pola menarik terkait jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan, dan jumlah atlet yang dibina dari 12 cabang olahraga sejak tahun dari 2020 hingga 2023.

Pelatihan kepemimpinan yang telah dilakukan berjumlah 32 orang pemuda per tahun sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, kemudian pelatihan kepemimpinan pada tahun berikutnya diganti dengan pelatihan kewirausahaan sebanyak 30 orang pemuda. Untuk pembinaan terhadap 12 cabang olah raga, pada tahun 2022 dilakukan pembinaan sebanyak 2.300 orang pemuda dan pada tahun berikutnya sebanyak 3.100 orang pemuda.

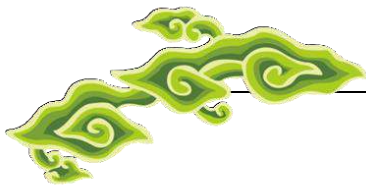


Gambar 2.57 Data Rasio Kewirausahaan Daerah Kota Cirebon
Sumber : BPS, 2025

Rasio Kewirausahaan Daerah akan diperoleh berdasarkan persentase berusaha yang dibantu buruh tetap per total angkatan kerja. Jika membandingkan rasio kewirausahaan di Kota Cirebon antara tahun 2021 dan tahun 2022 maka dapat diketahui bahwa rasio kewirausahaan di Kota Cirebon mengalami penurunan sebesar 0,79%. Selain itu dampak pandemi Covid-19 masih dirasakan di tahun 2022 yaitu dengan berkurangnya jumlah pengusaha dibantu buruh tetap, sedangkan angkatan kerja terus bertambah sehingga peluang bekerja menjadi menurun.

Untuk organisasi kepemudaan meningkat jumlahnya dari 54 organisasi tahun 2020 menjadi 56 organisasi pada tahun 2021. Ini menunjukkan pertumbuhan dalam jumlah organisasi yang berfokus pada pengembangan kepemudaan, kegiatan sosial, atau program-program lainnya yang mendukung generasi muda. Terdapat pertumbuhan dalam jumlah organisasi kepemudaan, yang menunjukkan peningkatan minat dan dukungan terhadap kegiatan kepemudaan.

Jumlah wirausaha muda adalah 26.433 orang pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Ini menunjukkan stabilitas dalam jumlah wirausaha muda selama periode ini. Jumlah wirausaha muda meningkat menjadi 31.720 orang pada tahun 2022, mencerminkan peningkatan dalam jumlah wirausaha muda, yang menunjukkan pertumbuhan dalam sektor kewirausahaan, dukungan untuk *start-up*, serta keberhasilan program pelatihan wirausaha. Jumlah wirausaha muda tetap stabil selama dua tahun dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022. Ini menunjukkan keberhasilan dalam program-program



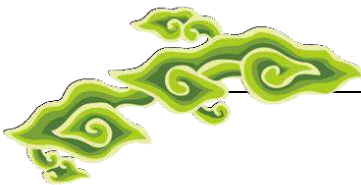
kewirausahaan, peningkatan peluang bisnis, atau dukungan yang lebih baik bagi wirausaha muda.

2.1.3.2.9 Pembangunan Kebudayaan

Keanekaragaman budaya merupakan modal dasar pembangunan. Kekayaan budaya merupakan aset yang sangat berharga. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, melalui pembangunan kebudayaan yang diupayakan oleh pemerintah. Tujuan utama pembangunan kebudayaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan berbagai upaya pembangunan dan perubahan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional.

IPK memiliki korelasi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu nilai IPK berbanding lurus dengan IPM. Sebagai contoh semakin tinggi tingkat budaya suatu daerah maka semakin besar pula kesejahteraan masyarakatnya. Upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal sangat penting dalam upaya melestarikan budaya lokal. Semakin berkembangnya konsolidasi modernitas di lingkungan global yang berujung pada berkurangnya apresiasi terhadap budaya lokal merupakan hal yang perlu diwaspadai, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memasuki berbagai aspek kehidupan manusia dan belum terealisasi pemanfaatannya.

Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengeluarkan indikator proksi sebagai pengganti IPK, yaitu Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Indikator proksi tersebut menekankan pada empat langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon, yaitu:



Tabel 2.18 Upaya Pemberdayaan Ekosistem Kebudayaan Serta Meningkatkan, Memperkaya, dan Menyebarluaskan Kebudayaan;

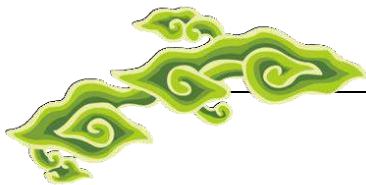
No	Pemajuan Kebudayaan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah	Yang Dikembang kan	%	Jumlah	Yang Dikembang kan	%	Jumlah	Yang Dikembang kan	%
1	Tradisi Lisan	35	19	54	35	20	57	35	21	60
2	Manuskrip	12	1	8	12	1	8	12	1	8
3	Adat Istiadat	28	17	61	28	17	61	28	17	61
4	Ritus	34	25	74	34	26	76	34	27	79
5	Pengetahuan Tradisional	52	35	67	52	39	75	52	40	77
6	Teknologi Tradisional	9	3	33	9	3	33	9	3	33
7	Seni	28	22	79	28	22	79	28	22	79
8	Bahasa	10	10	100	11	11	100	11	11	100
9	Permainan Rakyat	21	5	24	21	5	24	21	5	24
10	Olahraga Tradisional	9	5	56	9	5	56	9	5	56
Total		238	142	59,66	239	149	62,34	239	152	63,60

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2024

Tabel 2.19 Upaya Keberlanjutan Kebudayaan Sebagai Warisan Bagi Dunia dan Generasi Penerus

No	Pemajuan kebudayaan	Jumlah			Yang Dilindungi			%		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Tradisi Lisan	35	35	35	25	26	74	71	27	77
2	Manuskrip	12	12	12	6	6	50	50	6	50
3	Adat Istiadat	28	28	28	17	17	61	61	17	61
4	Ritus	34	34	34	29	30	88	85	31	91
5	Pengetahuan Tradisional	52	52	52	39	43	83	75	45	87
6	Teknologi Tradisional	9	9	9	9	9	100	100	9	100
7	Seni	28	28	28	24	24	86	86	24	86
8	Bahasa	10	10	10	10	11	110	100	12	120
9	Permainan Rakyat	21	21	21	10	10	48	48	10	48
10	Olahraga Tradisional	9	9	9	8	8	89	89	8	89
TOTAL		238	238	238	177	184	77,31	74,37	189	79,41

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2024



Tabel 2.20 Upaya Pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Untuk Memperkuat Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan

No	Pemajuan Kebudayaan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah	Yang Dimanfaatkan	%	Jumlah	Yang Dimanfaatkan	%	Jumlah	Yang Dimanfaatkan	%
1	Tradisi Lisan	35	19	54	35	19	54	35	19	54
2	Manuskrip	12	2	17	12	2	17	12	2	17
3	Adat Istiadat	28	17	61	28	17	61	28	17	61
4	Ritus	34	25	74	34	25	74	34	25	74
5	Pengetahuan Tradisional	52	24	46	52	24	46	52	24	46
6	Teknologi Tradisional	9	3	33	9	3	33	9	3	33
7	Seni	28	22	79	28	22	79	28	22	79
8	Bahasa	10	10	100	10	10	100	10	10	100
9	Permainan Rakyat	21	0	0	21	0	0	21	0	0
10	Olahraga Tradisional	9	5	56	9	5	56	9	5	56
Total		238	127	53,36	238	127	53,36	238	127	53,36

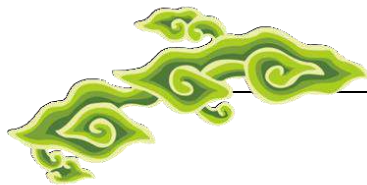
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2024

Tabel 2.21 upaya meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan

NO	DATA PEMAJUAN KEBUDAYAAN, MELIPUTI	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah	Yang Dibina	%	Jumlah	Yang Dibina	%	Jumlah	Yang Dibina	%
1	Tradisi Lisan	35	0	0	35	0	0	35	0	0
2	Manuskrip	12	0	0	12	0	0	12	0	0
3	Adat Istiadat	28	3	11	28	3	11	28	3	11
4	Ritus	34	2	6	34	2	6	34	2	6
5	Pengetahuan Tradisional	52	0	0	52	0	0	52	0	0
6	Teknologi Tradisional	9	0	0	9	0	0	9	0	0
7	Seni	28	7	25	28	7	25	28	7	25
8	Bahasa	10	3	30	10	3	30	10	3	30
9	Permainan Rakyat	21	0	0	21	0	0	21	0	0
10	Olahraga Tradisional	9	1	11	9	1	11	9	1	11
Total		238	16	6,72	238	16	6,72	238	16	6,72

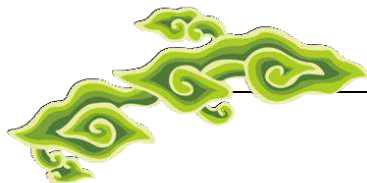
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2024

Pemerintah Kota Cirebon juga berupaya untuk memelihara dan tetap melestarikan budaya lokal, untuk itu upaya merealisasi kawasan wisata dengan daya tarik budaya pada beberapa kawasan menjadi hal penting dalam pembangunan kebudayaan di Kota Cirebon. antara lain: Kampung Arab, Kampung Cina, Kampung Benda Kerep dan juga kawasan keraton sebagai cagar budaya dimana terdapat benda-benda bersejarah. Adapun data cagar budaya yang tercatat di Kota Cirebon sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.22 Daftar Cagar Budaya di Kota Cirebon

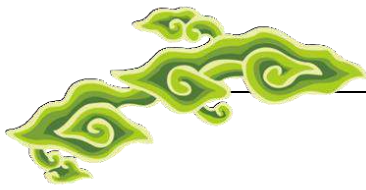
No	NAMA	Lokasi
1.	Petilasan Sunan Kalijaga	Jl. Pramuka, Kelurahan Kalijaga
2.	Gedung SMP Negeri 1 Cirebon	Jl. Siliwangi, Kelurahan Kebonbaru
3.	Stasiun Kereta Api Kejaksan	Jl. Siliwangi, Kelurahan kebonbaru
4.	SDN Kebonbaru I, II, III, VI	Jl. Veteran, Kelurahan Kebonbaru
5.	Balai Kota Cirebon	Jl. Siliwangi, Kelurahan Kebonbaru
6.	Kompleks Gedung Pamitran	Jl. KS. Tubun, Kelurahan Kejaksan
7.	Pendopo Kabupaten Cirebon	Jl. RA. Kartini, Kelurahan Kejaksan
8.	Gedung Negara / Keresidenan	Jl. Siliwangi, Kelurahan Kesenden
9.	Petilasan Sunan Drajat	Jl. Pangeran Drajat, Kelurahan Drajat
10.	Lapas. Klas I Kesambi	Jl. Raya Kesambi, Kelurahan Kesambi
11.	RSUD. Gunung Jati	Jl. Raya Kesambi, Kelurahan Kesambi
12.	Taman Kepurbakalaan Gua Sunyaragi	Jl Brigjend Dharsono, Kelurahan Sunyaragi
13.	Keraton Kasepuhan	Jl Kasepuhan, Kelurahan Kesepuhan
14.	Keraton Kanoman	Jl Kanoman, Kelurahan Lemahwungkuk
15.	Masjid Agung Sang Cipta Rasa	Jl. Kasepuhan, Kelurahan Lemahwungkuk
16.	Gedung Bunder	Jl. Kebumen, Kelurahan Lemahwungkuk
17.	Gedung Cipta Niaga	Jl. Kebumen, Kelurahan Lemahwungkuk
18.	Gedung SMP Negeri 14	Jl. Kebumen, Kelurahan Lemahwungkuk
19.	Gedung SMP Negeri 16	Jl. Kebumen, Kelurahan Lemahwungkuk
20.	Gereja Pasundan	Jl. Kebumen, Kelurahan Lemahwungkuk
21.	Gedung PT. British American Tobaccos	Jl. Pasuketan, Kelurahan Lemahwungkuk
22.	Klenteng Talang	Jl. Talang, Kelurahan Lemahwungkuk
23.	Gedung Bank Indonesia	Jl. Yos Sudarso, Kelurahan



No	NAMA	Lokasi
		Lemahwungkuk
24.	Gereja Santo Yusuf Cirebon	Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Lemahwungkuk
25.	Kantor PT. POS Indonesia	Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Lemahwungkuk
26.	Gedung Bank Mandiri	Jl. Kantor, Kelurahan Panjunan
27.	Klenteng Dewi Welas Asih	Jl. Kantor, Kelurahan Panjunan
28.	Masjid Merah Panjunan	Jl. Pengobongan, Kelurahan Panjunan
29.	Makam Pangeran Sipat Lurung	Jl. Buyut, Kelurahan Pegambiran
30.	Situs Kejawanan	Jl. Kalijaga, Kelurahan Pegambiran
31.	Pedati Gede Pekalangan	Gang Pedati Gede, Kelurahan Pekalangan
32.	Makam Syekh Maghribi	Jl. Astana Garib, Kelurahan Pekalangan
33.	Menara Air Parujakan	Jl. Parujakan, Kelurahan Pekalangan
34.	Klenteng Winaon (Pemancar Keselamatan)	Jl. Winaon, Kelurahan Pekalangan
35.	Stasiun Kereta Api Parujakan	Jl.Nyi Mas Gandasari, Kelurahan Pekalangan
36.	Keraton Kacirebonan	Jl Pulasaren, Kelurahan Pulasaren

Sumber: Profil Budaya dan Bahasa Kota Cirebon 2025

Berbagai warisan sejarah dan budaya ini menjadikan Kota Cirebon sebagai salah satu destinasi pariwisata, khususnya destinasi wisata religi dan budaya. Situs bersejarah destinasi berziarah sebagai tempat peristirahatan Wali Songo yaitu Sunan Gunung Jati atau atau lebih di kenal sebagai Sayyid Al-Kamil, disamping religius lainnya yang ada di Kota Cirebon. Beberapa even yang rutin menyelenggarakan kegiatan seni dan budaya juga menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan pengelolaannya sebagai promosi warisan budaya Kota Cirebon. Hal ini dimaksudkan untuk menarik wisatawan mengunjungi Kota Cirebon yang telah disusun dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.



Gambar 2.58 Seni Tari Topeng
Sumber : jabar.antaranews.com,
11 Desember 2022



Gambar 2.59 Seni Tari Sintren
Sumber : jabar.antaranews.com,
31 Oktober 2013

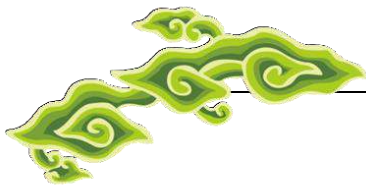
Seni budaya Cirebon antara lain: Wayang Babad, Singa Depok Cirebonan, Sintren, Tari Topeng, Jaran Lumping, Genjring Akrobat. Sedangkan benda seni kerajinan Cirebon antara lain: Batik, Topeng, Anyaman, Lukisan Kaca dan masih banyak lagi. Seni Tari Topeng ataupun Sintren merupakan satu dari budaya Cirebon yang sering ditampilkan dalam acara resmi dan tidak resmi baik di dalam maupun di luar Kota Cirebon.

2.1.3.2.10 Pemberdayaan Masyarakat

Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencaharian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju, dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa Swasembada dapat dilihat dari persentase desa/kelurahan berstatus Swa-sembada.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang mengatur klasifikasi desa berdasarkan tingkat perkembangannya, yaitu desa Swasembada, desa Swakarya, dan desa Swadaya, dengan definisi sebagai berikut:

1. Desa Swasembada merupakan desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan. Ciri-ciri desa Swasembada antara lain:
 - a. Kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan.
 - b. Penduduknya padat-padat.
 - c. Tidak terikat dengan adat istiadat Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain.
 - d. Partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.



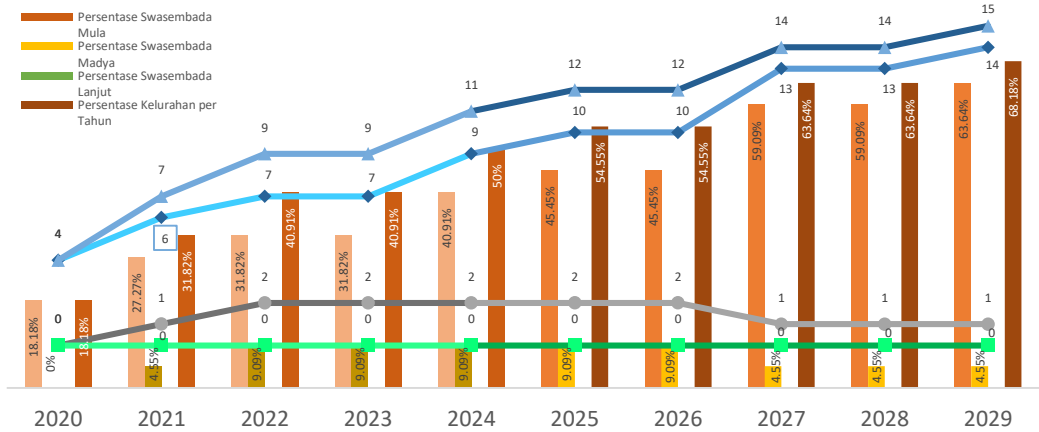
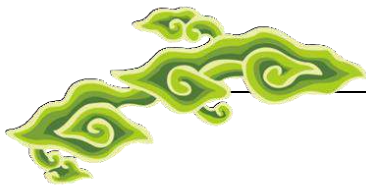
2. Desa Swakarya merupakan peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa Swasembada. Ciri-ciri desa Swakarya antara lain :
 - a. Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh.
 - b. Sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi
 - c. Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian.
 - d. Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain.
 - e. Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.
3. Desa Swadaya merupakan desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya. Ciri-ciri desa Swadaya antara lain:
 - a. Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya.
 - b. Penduduknya jarang.
 - c. Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris.
 - d. Bersifat tertutup. Masyarakat memegang teguh adat.
 - e. Teknologi masih rendah.
 - f. Sarana dan prasarana sangat kurang.
 - g. Hubungan antar manusia sangat erat.
 - h. Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

Sebagai acuan untuk kriteria penilaian status kualifikasi kelurahan terdiri dari beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Ekonomi Masyarakat
2. Pendidikan Masyarakat
3. Kesehatan Masyarakat
4. Keamanan dan Ketertiban
5. Kedaulatan Politik Masyarakat
6. Peran serta masyarakat dalam pembangunan

Kriteria penilaian status kualifikasi Kelurahan diatas dijadikan acuan dalam melakukan penilaian status kualifikasi kelurahan sampai saat ini, Persentase kelurahan berstatus Swasembada terhadap total kelurahan adalah proporsi jumlah kelurahan berswasembada terhadap jumlah kelurahan. Berikut hasil penilaian berdasarkan kriteria kelurahan sampai tahun 2023 dan proyeksi dalam 5 (lima) tahun ke depan hingga tahun 2029.

Berdasarkan pada data klasifikasi status kelurahan, jumlah swasembada dapat diproyeksikan sampai dengan tahun perencanaan 2029 diperkirakan terdapat 15 (lima belas) kelurahan dengan total persentase 68,18% diantaranya Swasembada Mula sejumlah 14 (empat belas) kelurahan dengan persentase 63,64% serta Swasembada Madya 1 (satu) Kelurahan dengan persentase 4,55%.



Gambar 2.60 Jumlah, Proyeksi dan Persentase Kelurahan Swasembada di Kota Cirebon

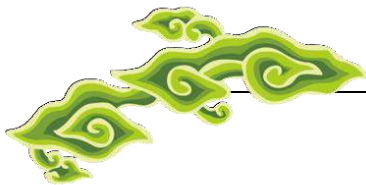
Sumber : Bappelitbangda, 2025

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Di samping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan modal penting dalam mencapai keberhasilan tujuan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan Kota Cirebon sebagai pusat perdagangan dan jasa, diperlukan performa daya saing yang optimal guna menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan aktivitas ekonomi di sektor perdagangan dan jasa. Diharapkan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk menciptakan iklim kondusif bagi kegiatan ekonomi ini dijabarkan melalui program-program pembangunan bertujuan memperkuat faktor-faktor pembentuk daya saing yang dimiliki oleh Kota Cirebon.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, terdapat empat aspek yang dapat mempengaruhi performa daya saing suatu daerah yakni aspek daya saing ekonomi daerah, aspek daya saing sumber daya manusia, aspek daya saing fasilitas/ infrastruktur wilayah, aspek daya saing iklim investasi. Optimalisasi performa pada masing-masing aspek ini diyakini dapat mendongkrak daya saing suatu



daerah. Hal ini tentu juga perlu didukung oleh kebijakan yang dibuat, kelembagaan yang dibangun, model pengelolaan sumber daya, serta karakteristik-karakteristik ekonomi lainnya yang mendukung sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

2.1.4.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

SDM merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah Kota Cirebon. Indikator daya saing SDM Kota Cirebon meliputi Angka Literasi/Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Indeks Literasi Digital, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Angka Ketergantungan dan Indikator lain sesuai konteks daerah.

2.1.4.1.1 Angka Literasi/Numerasi

Angka Literasi adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan dan memahami informasi. Literasi merujuk pada kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sedangkan numerasi merujuk pada kemampuan memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Keterampilan literasi sangat penting dalam kehidupan modern karena dibutuhkan hampir di setiap bidang kehidupan. Keterampilan literasi juga sangat penting dalam pendidikan. Siswa yang memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang baik memiliki keunggulan dalam memahami pelajaran dan memecahkan masalah. Membaca dan menulis merupakan dua keterampilan dasar yang wajib dipelajari dan dikuasai oleh setiap orang, khususnya anak usia sekolah.

Tabel 2.23 Angka Literasi Kota Cirebon

Jenjang Pendidikan	Angka Literasi			
	2020	2021	2022	2023
SD/ sederajat	n/a	n/a	74,89	84,98
SMP/ Sederajat	n/a	n/a	77,01	84,93

Sumber: Dinas Pendidikan tahun 2024

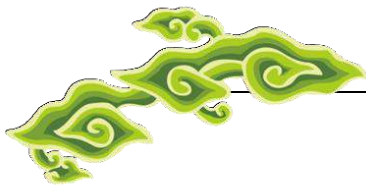
Ketercapaian angka literasi didukung oleh beberapa variabel pendukung antara lain kemampuan siswa dalam membaca, mengakses internet dan mengunjungi perpustakaan berdasarkan asesmen di sekolah tingkat nasional.

Tabel 2.24 Angka Numerasi Kota Cirebon

Jenjang Pendidikan	Angka Numerasi			
	2020	2021	2022	2023
SD/ sederajat	n/a	n/a	58,71	78,23
SMP/ Sederajat	n/a	n/a	56,06	79,01

Sumber: Dinas Pendidikan tahun 2024

Ketercapaian angka numerasi didukung oleh beberapa variabel pendukung antara lain kemampuan menghitung dan estimasi, pemahaman konsep matematika, pengenalan angka dan huruf, serta pengukuran dan geometri.



2.1.4.1.2 Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Tabel 2.25 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Cirebon

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n/a	10,69	92,62	87,75	95,37

Sumber: BPS 2025

Ketercapaian IPLM didukung oleh Unsur-unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang terdiri dari 7 (tujuh) unsur yaitu Pemerataan Layanan Perpustakaan, Pemerataan Koleksi Perpustakaan, Pemerataan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Pemustaka, Perpustakaan Ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan dan Jumlah Pemustaka.

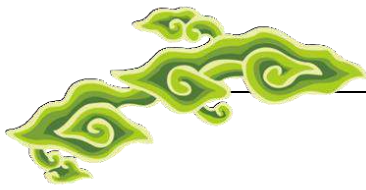
Walaupun terjadi penurunan IPLM pada tahun 2023 dikarenakan terjadi penurunan nilai unsur pemerataan koleksi perpustakaan dimana pada tahun 2022 sebesar 2,2384 dan pada tahun 2023 senilai 0,6369.

2.1.4.1.3 Literasi Digital

Literasi digital di Kota Cirebon menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat. Literasi digital mengacu pada kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, dan jaringan untuk mengakses, mengelola, mengevaluasi, dan menciptakan informasi. Di Kota Cirebon, upaya untuk meningkatkan literasi digital mencakup berbagai program pelatihan, seminar, dan workshop yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Program-program ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan digital yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam ekonomi digital dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik telah melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat sebanyak 250 orang, kemudian pada tahun 2023 sosialisasi kembali dilakukan di lingkungan di beberapa sekolah baik untuk para siswa dan guru sebanyak 250 orang pada tahun 2023.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kota Cirebon telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan infrastruktur digital, seperti perluasan jaringan internet dan peningkatan akses terhadap perangkat teknologi, telah mendorong adopsi TIK di berbagai sektor, termasuk pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Pemerintah Kota Cirebon juga telah berupaya memanfaatkan TIK untuk meningkatkan pelayanan publik, seperti melalui pengembangan aplikasi pelayanan online dan portal informasi yang memudahkan warga dalam mengakses layanan pemerintah.

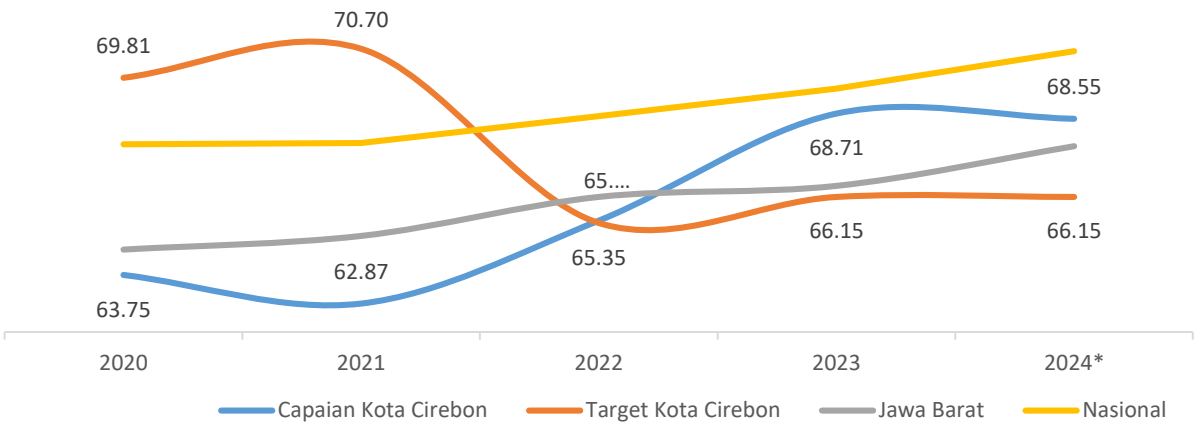


Inisiatif ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Di sisi lain, sektor pendidikan dan bisnis di Kota Cirebon juga merasakan manfaat dari kemajuan TIK. Sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan semakin banyak yang mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, memungkinkan akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas dan metode pengajaran yang lebih interaktif. Di sektor bisnis, adopsi teknologi digital telah membantu pelaku usaha, terutama UMKM, dalam memperluas jangkauan pasar melalui e-commerce dan pemasaran digital. Namun, tantangan tetap ada, termasuk kesenjangan digital dan kebutuhan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat agar semua warga dapat memanfaatkan TIK secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.

2.1.4.1.4 Angkatan Kerja

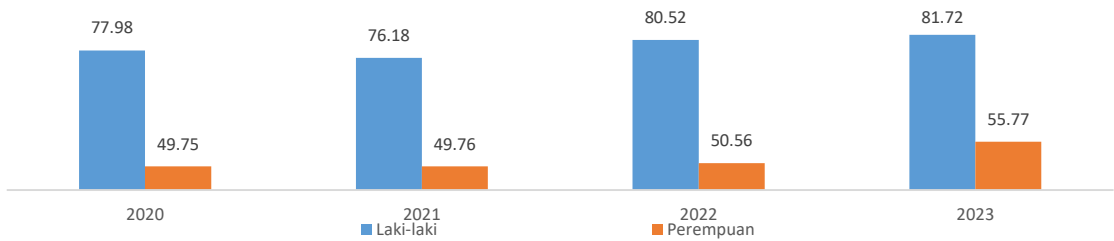
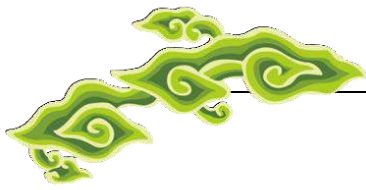
Persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja yang tercermin dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.



Gambar 2.61 Perbandingan TPAK Kota Cirebon, Jawa Barat dan Nasional (%)

Sumber: RPJMD Kota Cirebon 2018-2023, RPD 2024-2026, BPS 2025

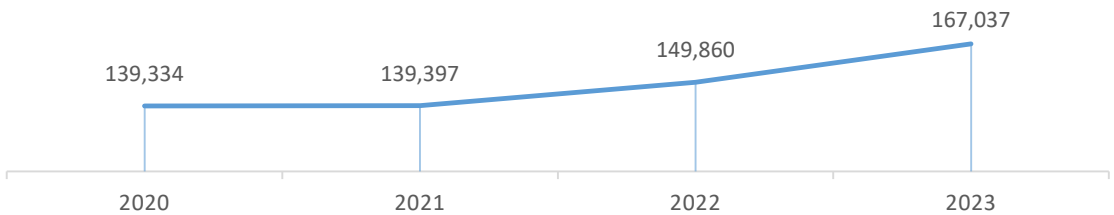
TPAK Kota Cirebon cenderung meningkat dan telah masuk dalam kategori tinggi (Mala et al., 2017). Beberapa faktor yang mempengaruhi TPAK, yaitu jumlah penduduk yang masih bersekolah, jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga, umur, tingkat pendidikan, serta upah. Meskipun demikian, untuk periode 2020-2022, TPAK Kota Cirebon lebih rendah dibandingkan TPAK Jawa Barat dan TPAK Nasional. Sejak tahun 2022 TPAK Kota Cirebon telah mencapai target dan cenderung meningkat termasuk TPAK perempuan.



Gambar 2.62 Target dan Capaian TPAK Kota Cirebon (%)
Sumber: BPS 2025

2.1.4.1.5 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan sangat erat kaitannya dengan produktivitas penduduk dalam suatu wilayah. Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketergantungan tinggi, maka ketergantungan penduduk usia sekolah dan usia lanjut semakin besar bebannya pada usia produktif. Rasio ketergantungan dapat menjadi salah satu indikator yang menunjukkan kondisi perekonomian. Dengan perekonomian berbasis perdagangan dan jasa, Kota Cirebon belum memenuhi target capaian TPT Kota Cirebon beberapa tahun terakhir. Berikut data penduduk di Kota Cirebon yang bekerja:

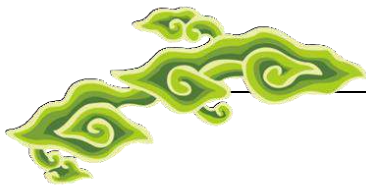


Gambar 2.63 Jumlah Angkatan Kerja Kota Cirebon
Sumber: BPS 2025

Penduduk di Kota Cirebon didominasi tamatan sekolah menengah atas, walaupun untuk wilayah kecamatan Harjamukti diantaranya masih tercatat adanya penduduk yang belum mendapatkan pendidikan, hal ini kemungkinan ada sebagian warga masih berada pada usia dibawah lima tahun yang belum masuk usia sekolah.

2.1.4.1.6 Pendidikan

Pendidikan merupakan amanat Undang-Undang 1945 yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan hak pendidikan kepada semua warga negara dan menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan negara dan daerah. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 13 (tiga belas) tahun. Dalam menyongsong Indonesia Emas, pendidikan merupakan kunci utama untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia, yang tergambarkan melalui indeks pendidikan Kota Cirebon yang terus meningkat secara bertahap. Perkembangan ini menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Cirebon selama periode tersebut.



Tabel 2.26 Indeks Pendidikan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pendidikan	69.48	70.21	70.93	71.12	71.69

Sumber: BPS 2025, diolah

Indikator Indeks Pendidikan terbentuk dari komponen indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Tingkat pendidikan penduduk di Kota Cirebon sudah cukup tinggi, begitu pula dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Sedangkan Harapan Lama Sekolah semakin tinggi jenjang pendidikannya. Hal ini tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.27 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Cirebon

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Harpan Lama Sekolah	13,12	13,13	13,14	13,16	13,17
Rata-rata Lama Sekolah	9,91	10,12	10,33	10,37	10,53

Sumber: BPS 2025

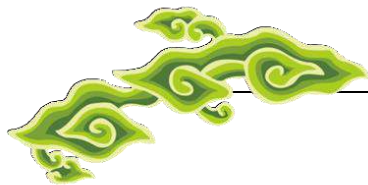
Berdasarkan tabel di atas, nilai capaian Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah mengalami kenaikan setiap tahunnya, Rata-rata Lama Sekolah mencapai nilai sebesar 10,53 dan Harapan Lama Sekolah sebesar 13,17. Hal tersebut terjadi karena banyaknya upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon diantaranya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan kemudahan akses menuju sarana pendidikan.

2.1.4.2 Daya Saing Ekonomi

Daya saing (*competitiveness*) dapat diartikan sebagai kemampuan suatu entitas ekonomi, seperti Kota Cirebon, untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah Daerah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bertindak untuk meningkatkan tata kelola dan layanan publik serta daya saing. Daerah yang memiliki kemampuan bersaing tinggi akan menghasilkan nilai tambah, kesempatan kerja, kekayaan daerah, dan lain-lain. Dalam situasi global yang terus berkembang menuju keterbukaan pasar dan integrasi ekonomi, penguatan daya saing dapat dilakukan dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki. Ada 4 (empat) aspek yang mempengaruhi performa daya saing suatu daerah, yaitu kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur wilayah, iklim investasi, dan sumber daya manusia.

2.1.4.2.1 Lapangan Usaha Unggulan dan Potensial

Pada tahun 2023, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap struktur PDRB di Kota Cirebon adalah Perdagangan Besar dan



Eceran, Transportasi dan Pergudangan beserta Jasa Keuangan dan Asuransi. Peningkatan pesat dalam nilai nominal produk nasional bruto pada sektor-sektor tersebut disebabkan oleh berbagai strategi pemulihan ekonomi yang diterapkan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas. Jenis usaha yang berkembang, apakah berbasis tenaga kerja, modal, atau teknologi, mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan akhirnya produktivitas ekonomi. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap, semakin tinggi output yang dihasilkan. Sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan meningkatkan kapasitas produksi meliputi:

1. Transportasi dan Pergudangan;
2. Real estat;
3. Penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman;
4. Pasokan air, limbah padat, limbah padat dan pengelolaan daur ulang;
5. Pelayanan pendidikan;
6. Industri Pengolahan; dan
7. Jasa Lainnya.

Di antara sektor potensial tersebut di atas, sektor akomodasi dan jasa makanan serta transportasi dan pergudangan mempunyai kontribusi pertumbuhan yang lebih tinggi.

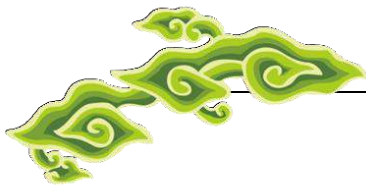
2.1.4.2.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) per individu yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Angka PDRB per kapita diperoleh dengan membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah dan penyajian secara berkala dapat menunjukkan perubahan dalam kemakmuran tersebut. PDRB Per Kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per individu, sedangkan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) berguna untuk menilai pertumbuhan ekonomi nyata per kapita di suatu wilayah.

Data menunjukkan bahwa pada periode 2018-2022, PDRB per kapita ADHB di Kota Cirebon mengalami peningkatan dari Rp68,42 juta pada tahun 2018 menjadi Rp78,53 juta pada tahun 2022. Namun, terdapat penurunan pada tahun 2020, di mana nilai PDRB per kapita menurun menjadi Rp70,47 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan PDRB Per Kapita ADHB selama periode tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam tingkat kemakmuran penduduk Kota Cirebon. Untuk memastikan bahwa kemakmuran ini dapat dinikmati secara merata, perlu diimbangi dengan pertumbuhan penduduk yang tidak terlalu cepat. Namun, pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan pendapatan per kapita penduduk Kota Cirebon sebesar Rp0,89 juta.

Dengan meningkatnya PDRB Per Kapita ADHB pada periode tahun 2018-2022, maka telah terjadi perubahan tingkat kemakmuran yang



lebih baik bagi penduduk Kota Cirebon. Hal ini harus diimbangi dengan pertumbuhan penduduk yang tidak terlalu cepat, sehingga tingkat kemakmuran dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk Kota Cirebon. Namun dengan adanya pandemi Covid-19, berdampak terhadap penurunan pendapatan per kapita penduduk Kota Cirebon sebesar Rp.0,89 juta.

Tabel 2.33 PDRB Per Kapita Kota Cirebon dan Laju Pertumbuhannya

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
PDRB ADHB Per Kapita (Juta Rupiah)	70,47	72,98	78,53	84,14	88,56
PDRB ADHK Per Kapita (Juta Rupiah)	50,07	51,09	53,20	55,37	57,66
Pertumbuhan PDRB Per Kapita	-5,95	2,03	4,13	4,08	4,14

Sumber : BPS 2025

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

2.1.4.2.3 Pengeluaran Per Kapita

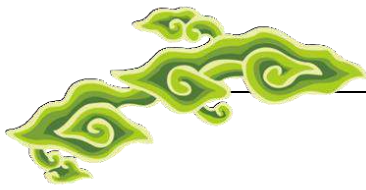
Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi rasio atau angka konsumsi rumah tangga, maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman dan Non-Makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya per jumlah penduduk.

Tabel 2.34 Pengeluaran per Kapita sebulan Menurut Komoditi

No	Tahun	Non-Makanan		Makanan		Jumlah
		Rp	%	Rp	%	Rp
1	2020	820.119	55,63	654.100	44,37	1.474.219
2	2021	960.673	58,95	669.035	41,05	1.629.708
3	2022	850.872	54,57	708.258	45,43	1.559.130
4	2023	1.040.035	56,89	788.126	43,11	1.828.161
5	2024	886.953	53,72	764.040	46,28	1.650.993

Sumber: BPS 2025

Rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan di Kota Cirebon yang fluktuatif cenderung mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2022 dan tahun 2024 mengalami penurunan. Pengeluaran perkapita Kota Cirebon pada tahun 2020 rendah karena dampak adanya pandemi Covid-19, turunnya konsumsi rumah tangga akibat daya beli masyarakat yang rendah mendorong untuk lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan. Porsi persentase terbesar pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita pada komoditi Bukan



Makanan. Pengeluaran per kapita yang cenderung meningkat sejak tahun 2021, hal ini mengindikasikan pemulihan ekonomi dan peningkatan pendapatan rumah tangga di Kota Cirebon.

2.1.4.3 Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif adalah proses yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian melibatkan memperluas peluang ekonomi dan kesejahteraan serta memberikan akses yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, diperlukan strategi tertentu untuk memastikan pembangunan menyeluruh dan merata. Pemerintah Kota Cirebon dalam hal ini telah memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk turut berperan dalam meningkatkan perekonomian di Kota Cirebon.

Posisi Kota Cirebon yang berada dipesisir utara Pulau Jawa, pemanfaatan sumber daya hasil laut harus lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus mengorbankan kelestarian ekosistem laut daalam mngukung ekonomi biru. Dalam mendukung ekonomi hijau, Kota Cirebon berupaya menjaga kelestarian lingkungan seperti dukungan terhadap sektor transportasi yang bertenaga listrik dalam hal peningkatan lokasi terminal isi ulang baterai yang digunakan sebagai sumber tenaga kendaraan listrik. Capaian indikator ekonomi hijau Kota Cirebon tahun 2024 adalah sebesar 68,8 sedangkan kontribusi Kontribusi PDRB tahun 2024 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam mendukung ekonomi biru sebesar 0,25 persen.

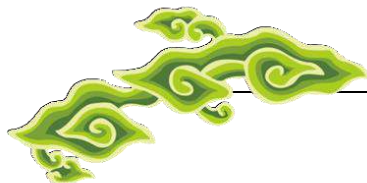
2.1.4.4 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.1.4.4.1 Kualitas Layanan Infrastruktur

Komponen *City Development Index* yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar. Dalam menilai Indeks Infrastruktur di Kota Cirebon dihitung berdasarkan kinerja terhadap kondisi layanan Air Minum, Sanitasi, Akses terhadap listrik, Akses terhadap Telepon, Kemantapan Jalan, Tingkat Konektivitas Antar Wilayah, Rasio Rumah Layak Huni, dan Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani.

2.1.4.4.2 Air Minum

Kota Cirebon merupakan pusat aktivitas jasa, ekonomi, perdagangan, transportasi, pendidikan, pariwisata dan lain-lain untuk daerah kabupaten lainnya seperti Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka. Posisi Cirebon dengan aktivitas yang tinggi berdampak kepada perkembangan kota yang pesat, sehingga banyak membutuhkan dukungan penyediaan Infrastruktur yang memadai salah satunya adalah penyediaan kebutuhan dasar akan air bersih. Dimana kondisi Kota Cirebon tidak



mempunyai sumber air baku untuk air bersih sehingga mengandalkan sekali kepada daerah kabupaten yang punya sumber air baku.

Tingkat konsumsi air di Kota Cirebon sudah melebihi 200 liter/orang/hari. Tingginya tingkat pemakaian dipengaruhi oleh pola hidup dan aktifitas sehari-hari, pada umumnya masyarakat tidak pernah kesulitan akan air bersih maka secara tidak langsung sudah membentuk kebiasaan pemakaian yang berlebihan. Jumlah pelanggan PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon tahun 2020 berdasarkan data yang tercatat di bagian pelanggan adalah 57.923 SL dengan konsumsi pemakaian/penjualan air sebesar 1.382.818 m³ atau 42.211 m³/hari, atau 516 liter/detik. Sistem Penyediaan Air Minum Kota Cirebon meliputi Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan

2.1.4.4.3 Jaringan Perpipaan

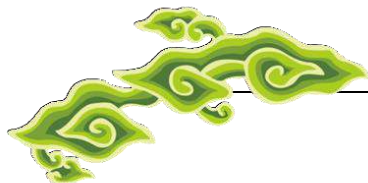
Unit-unit sistem penyediaan dan pelayanan air bersih PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon dengan sistem perpipaan secara garis besar meliputi :

1. Unit Air Baku
2. Unit Transmisi
3. Unit Produksi
4. Unit Distribusi
5. Unit Pelayanan

Unit Air Baku Saat ini PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon memiliki dua buah sumber air baku berupa mata air yang lokasinya saling berdekatan, terletak di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan pada ketinggian +375 m di atas permukaan air laut yang berjarak ± 22 Km dari Kota Cirebon. Berdasarkan kajian yang terdapat *Cirebon Urban Development Project III*, Keandalan debit maksimum dan minimum Cipaniis pada tahun 1975 sebesar 3000 liter/detik dan 1500 liter/detik dan informasi dari PDAM Tirta Giri Nata menyatakan bahwa total kapasitas air baku sekitar 1000 liter/detik. Sistem Sumber Air 1. sumur pengumpul (*Collector Well*) terdiri 24 pipa inlet berdiameter 200 mm dan pipa outlet berdiameter 700 mm. Sistem ini dioperasikan sejak tahun 1982. SIPPA untuk sistem ini adalah 910 liter/detik. 2. Tunnel yaitu terowongan air yang dibangun pada jaman Belanda dengan outlet berdiameter 250 dan 350 mm. Sistem ini dioperasikan sejak tahun 1937 dan dikembangkan tahun 1960. SIPA untuk sistem ini adalah 151 liter/detik.

Unit Transmisi PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon memiliki unit transmisi untuk sistem baru dengan menggunakan pipa 700 mm dari collector well menuju ke IPA Plangon (Aerator) yang berjarak kurang lebih 8,2 km. Sedangkan untuk sistem lama menggunakan pipa 250 mm dan 350 mm dari tunnel ke unit aerator baru (sistem dressner) yang jaraknya tidak terlalu jauh dan masih berlokasi di sumber Paniis.

Unit Produksi Pengolahan air dilakukan untuk menurunkan CO₂ agresif dengan menggunakan sistem aerasi yaitu memberi kesempatan air kontak dengan udara sehingga CO₂ agresif akan bersenyawa dengan



udara dan terjadi penurunan kadar CO₂ yang hasilnya sesuai dengan standar air minum yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Sesuai dengan sumber yang ada, maka instalasi pengolahan terdiri dari dua buah instalasi yang ditujukan untuk mengolah air baku dari kedua sumber tersebut. Unit produksi PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon terdapat di pengolahan Plangon yang mendapat pasokan air baku dari mata air Paniis di Kabupaten Kuningan dan berjarak sekitar 8,2 km dengan debit rata-rata 800 liter/detik.

Unit Distribusi Sistem distribusi Dalam sistem penyediaan air minum Unit Distribusi terdiri dari sistem perpompaan, jaringan pipa distribusi, bangunan penampungan air minum (reservoir), alat ukur dan peralatan pemantauan. Unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan kontinuitas pengaliran yang memberikan jaminan pengaliran selama 24 jam per hari, serta memenuhi standar tekanan minimal. Reservoir diperlukan dalam unit distribusi karena adanya fluktuasi (variasi) dalam pemakaian air setiap jamnya agar sistem dapat memenuhi kebutuhan pada saat pemakaian serempak.

Pada sistem pelayanan PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon terdapat 3 (tiga) buah reservoir distribusi yaitu:

- a. Reservoir menara ada 2 unit (Gunung Sari dan Parujakan), tetapi dikarenakan adanya masalah teknis yang menyebabkan kurangnya tekanan air di jaringan distribusi sehingga air tidak dapat mencapai reservoir yang mengakibatkan kedua reservoir ini tidak dapat digunakan
- b. Reservoir bawah ada 1 unit (Kepongpongan) kondisi masih berfungsi.

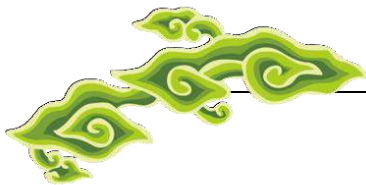
2.1.4.4.4 Bukan Jaringan Perpipaan

Bukan Jaringan Perpipaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2005, Pasal 5, dinyatakan bahwa sistem penyediaan air minum (SPAM) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan. SPAM dengan jaringan perpipaan dapat meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan. Sedangkan SPAM bukan jaringan perpipaan, dapat meliputi sumur dalam, sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air.

Lokasi pembangunan unit sumur dalam yang teridentifikasi berada di 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan harjamukti, kelurahan Kalijaga, Kelurahan Argasunya, dan kelurahan sunyaragi, ke 4 (empat) kelurahan tersebut berada di Kecamatan Harjamukti dan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon

2.1.4.4.5 Sanitasi

Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha-usaha lingkungan hidup manusia. Sanitasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu sanitasi air, sanitasi



pengelolaan sampah, sanitasi makanan, sanitasi dasar, sanitasi lingkungan.

Sanitasi rumah tinggal merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap struktur fisik tempat tinggal yang memengaruhi derajat kesehatan manusia. Sarana tersebut antara lain ventilasi, suhu, kelembaban, kepadatan hunian, penerangan alami, konstruksi bangunan, sarana pembuangan sampah, sarana pembuangan kotoran manusia, dan penyediaan air bersih.

Indikator persentase rumah tinggal bersanitasi dihitung sebagai perbandingan jumlah rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi dasar terhadap jumlah rumah tangga keseluruhan. Sarana sanitasi dasar yang dimaksud dibatasi pada:

- 1. Sarana air bersih,
- 2. Sarana pembuangan kotoran/jamban,
- 3. Sarana pembuangan air limbah,
- 4. Sarana pembuangan sampah.

Sebuah rumah tangga dikategorikan bersanitasi apabila memiliki keempat sarana sanitasi dasar tersebut, meskipun tanpa memperhitungkan kualitasnya. Semakin tinggi persentase rumah tinggal bersanitasi berarti semakin banyak rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi lengkap.

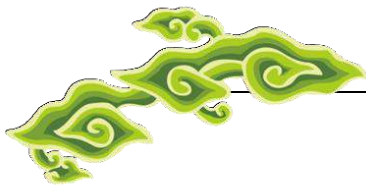
Berdasarkan data, jumlah rumah yang memiliki sanitasi di Kota Cirebon pada tahun 2020 tercatat sebanyak 8.548 rumah, meningkat drastis pada 2021 menjadi 98.662 rumah. Sementara itu, persentase rumah tinggal bersanitasi baru tersedia pada tahun 2023 yaitu sebesar 90,4%. Data juga menunjukkan bahwa pada 2022 sekitar 86,7% rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (BPS, Seri Kota Cirebon Dalam Angka).

Tabel 2.35 Rumah Tinggal Bersanitasi

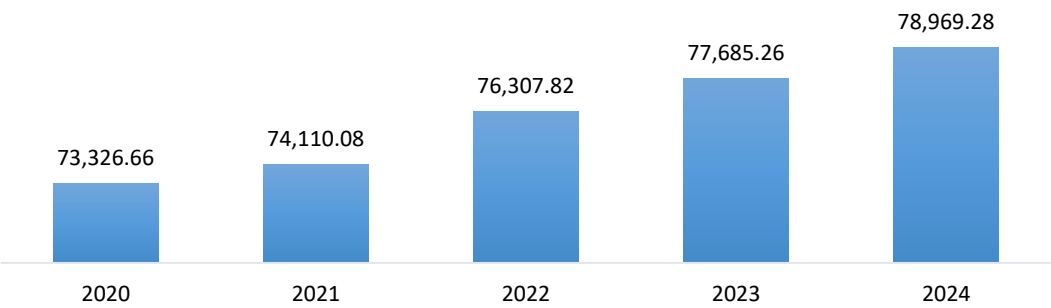
Keterangan	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rumah yang Memiliki Sanitasi	8.548	98.662	N/A	N/A
Persentase rumah tinggal bersanitasi	0	0	N/A	90,4
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	N/A	N/A	86,7	N/A
Proporsi Populasi Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Dan Berkelanjutan	N/A	98,662	N/A	N/A

Sumber: Seri Kota Cirebon Dalam Angka

Di sisi lain, permasalahan persampahan juga menjadi bagian penting dari sanitasi. Timbulan sampah Kota Cirebon terus meningkat setiap tahun, dari 73.326,66 ton/tahun pada 2020 menjadi 78.969,28 ton/tahun pada 2024, atau setara 216,35 ton/hari dengan rata-rata 0,61 kg/orang/hari. Data menunjukkan bahwa volume timbulan

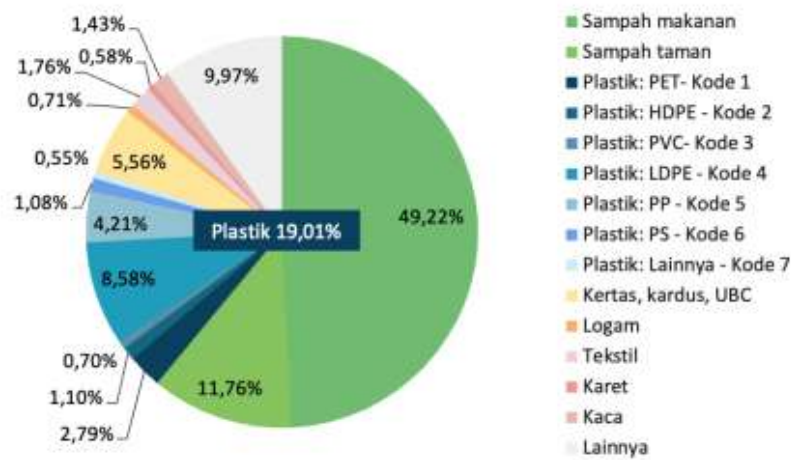


sampah Kota Cirebon terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, berikut data timbulan sampah di Kota Cirebon.



Gambar 2.64 Timbulan Sampah di Kota Cirebon (ton/tahun)
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, 2025

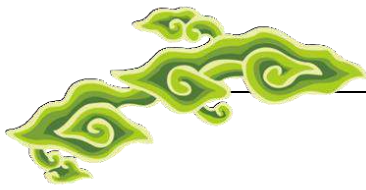
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon komposisi sampah didominasi oleh sampah makanan (49,22%), diikuti sampah plastik (19,01%, dengan porsi terbesar plastik LDPE 8,58%) serta sampah taman (11,76%).



Gambar 2.65 Komposisi Sampah di Kota Cirebon
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, 2025

Dari sisi sumber penghasil, sekitar 45,57% timbulan sampah berasal dari rumah tangga, sedangkan 54,43% berasal dari non-rumah tangga.

Hingga pertengahan tahun 2025, pengelolaan sampah di Kota Cirebon masih menghadapi masalah karena adanya keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah. Satu-satunya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yaitu TPA Kopi Luhur masih menggunakan sistem *open dumping*, yang berisiko menimbulkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Saat ini, Pemerintah Kota Cirebon tengah melakukan pembenahan dengan meningkatkan sistem TPA Kopi Luhur dari *open dumping* menjadi *controlled landfill*, dan dalam kedepannya direncanakan menuju *sanitary landfill*. Selain itu, Kota Cirebon juga telah merencanakan pembangunan TPST RDF di TPA Kopi Luhur yang



ditargetkan terealisasi pada tahun 2028. Upaya lain yang dilakukan yaitu peningkatan TPS menjadi TPS 3R pada tahun 2025, serta optimalisasi Pusat Daur Ulang (PDU) sebagai salah satu sarana pengurangan sampah. Pada tahun 2024, capaian penanganan sampah baru mencapai 74,22% (58.615,90 ton/tahun) dengan pengurangan sampah sekitar 11,04% (8.715,52 ton/tahun).

Selain itu, di tingkat regional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui konsep Wilayah 3 Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumajakuning) telah merencanakan pengembangan TPA Regional Ciwaringin sebagai solusi jangka panjang. TPA ini ditujukan untuk menampung sampah dari beberapa kabupaten/kota di wilayah Ciayumajakuning agar pengelolaan sampah lebih terintegrasi, efisien, dan sesuai standar lingkungan. Rencana ini juga dimaksudkan untuk mengurangi beban TPA lokal seperti Kopi Luhur yang saat ini sudah melebihi kapasitas.

Meskipun berbagai langkah telah dirancang, pengelolaan sampah Kota Cirebon masih belum optimal. Kapasitas pengolahan sangat bergantung pada TPA, sementara skema 3R dan daur ulang belum berjalan maksimal. Dominannya sampah organik menunjukkan bahwa pemilahan dan pengolahan organik seperti komposting belum dikembangkan optimal. Selain masalah teknis, partisipasi masyarakat juga masih rendah: sebagian warga masih membuang sampah ke sungai atau lahan kosong, membakar sampah, dan belum melakukan pemilahan di tingkat rumah tangga. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Kota Cirebon dalam mencapai target pengelolaan sampah berkelanjutan.

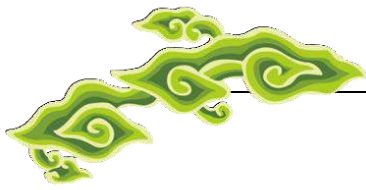
2.1.4.4.6 Akses Terhadap Listrik

Jumlah pelanggan listrik di Kota Cirebon dihitung berdasarkan 6 kategorisasi yang meliputi Sosial, Rumah Tangga, Bisnis, Industri, Gedung Pemerintahan, Penerangan Jalan Umum disajikan sebagaimana tabel dibawah berikut:

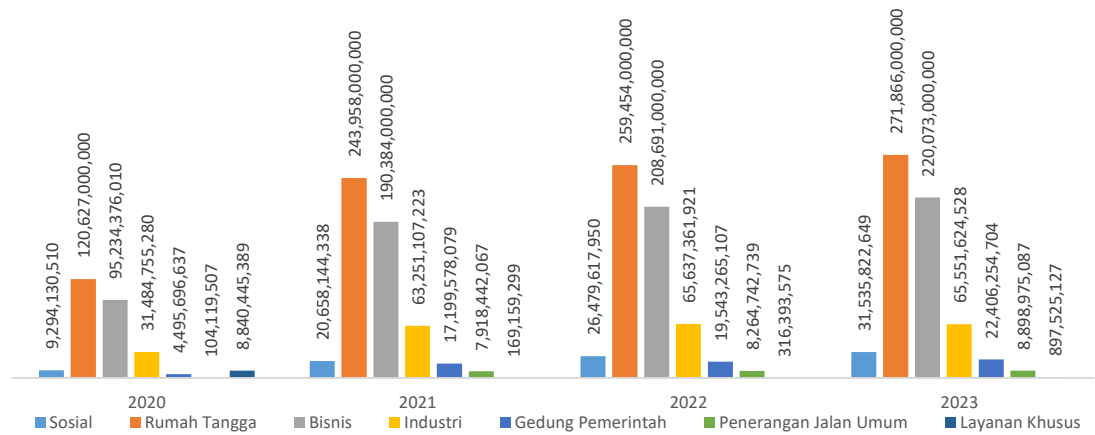
Tabel 2.36 Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Cirebon

Golongan Tarif	2020	2021	2022	2023
Sosial	2.490	2.613	2.613	2.880
Rumah Tangga	105.349	109.114	109.114	114.565
Bisnis	11.340	12.107	12.107	13.451
Industri	142	140	140	141
Gedung Pemerintahan	709	410	410	405
Penerangan Jalan Umum	390	709	709	725
Layanan Khusus	57	68	68	74
Kota Cirebon	120.477	125.161	125.161	132.241

Sumber: BPS 2025



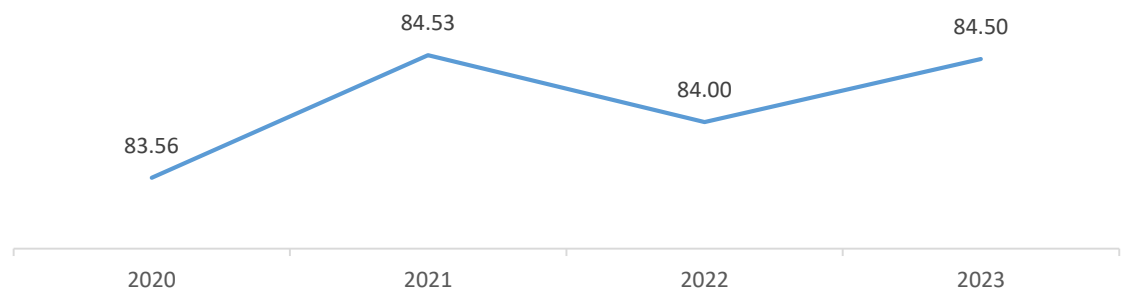
Jumlah pelanggan listrik terbesar di tahun 2020-2023 terdapat pada sektor rumah tangga dan terkecil pada sektor Penerangan Jalan Umum. Jumlah pelanggan listrik cenderung bertambah, kecuali untuk gedung pemerintah yang terus berkurang sejak tahun 2020. Sedangkan untuk pemakaian listrik cenderung meningkat disamping adanya harga tarif listrik, hal ini dapat dilihat dari data pendapatan berdasarkan golongan tarif listrik.



Gambar 2.66 Pendapatan Berdasarkan Golongan Tarif Listrik
Sumber: BPS 2025

2.1.4.4.7 Akses Terhadap Telepon

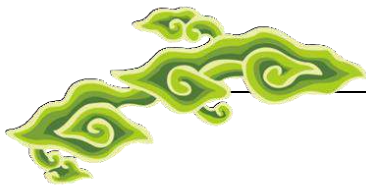
Pada tahun 2020 dan tahun 2021, persentase penduduk yang menggunakan ponsel mencapai 83,56% dan 84,53% yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk telah terhubung dengan teknologi komunikasi mobile yang mencerminkan tingginya penetrasi perangkat seluler di masyarakat disamping maraknya komunikasi online dalam masa pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan orang. sejak tahun 2022 terjadi penurunan dalam persentase pengguna ponsel seiring dengan kondisi pandemi Covid-19 terkendali dan status pandemi berakhir pada Desember 2022.



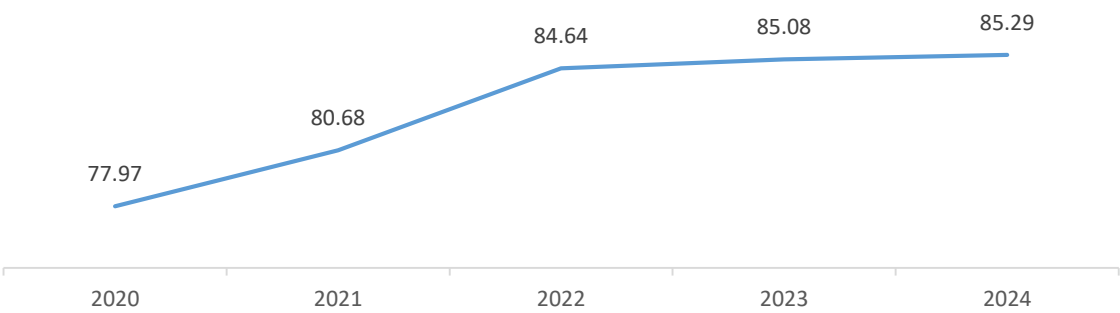
Gambar 2.67 Persentase Penduduk yang Menggunakan Telepon di Kota Cirebon
Sumber: BPS 2025

2.1.4.4.8 Kemantapan Jalan

Salah satu tujuan dari penyelenggaraan jalan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan adalah untuk membangun sistem jaringan jalan yang efektif dan efisien guna



mendukung sistem transportasi yang terintegrasi serta memastikan ketertiban dan kepastian hukum. Jalan juga berperan penting dalam mendukung perkembangan wilayah secara merata, pemerataan hasil pembangunan, serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mencapai pembangunan nasional.



Gambar 2.68 Proporsi Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik (%)
Sumber: BPS, 2025

Sistem jaringan jalan dikelompokkan berdasarkan sistem, fungsi, status, dan kelas. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota ditentukan sesuai dengan status jalan, dengan tanggung jawab penyelenggaraan sesuai kebijakan nasional di bidang jalan, serta mempertimbangkan keserasian antar daerah dan kawasan.

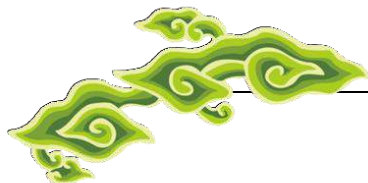
Kondisi jalan yang menjadi kewenangan kota dan dalam kondisi baik dengan proporsi 85,29% pada tahun 2024, sehingga permasalahan mengenai proporsi jalan kondisi baik yang tidak mengalami peningkatan harus diidentifikasi permasalahannya dalam upaya menyelesaikannya termasuk publikasi pendataan secara rutin terhadap kondisi jalan.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan, perlu diperhatikan spesifikasi standar dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)⁵ seperti standar fasilitas pesepeda, standar pejalan kaki, standar pekerjaan jalan, standar pekerjaan jembatan dan juga penataan jaringan instalasi listrik/komunikasi bawah tanah. Dalam 5 tahun ke depan diharapkan penyelenggaraan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, dapat memenuhi kondisi yang layak sesuai dengan NSPK yang telah ditentukan kementerian terkait.

Dalam perencanaan mendatang, desain infrastruktur jalan dan jembatan harus mengikuti spesifikasi standar dan pedoman yang mencakup penyediaan jalur pedestrian dan jalur sepeda, serta elemen tambahan seperti median jalan, lampu penerangan, kamera pengawas, rambu lalu lintas, taman, jaringan listrik/komunikasi bawah tanah dan sistem drainase yang memadai yang sesuai standar yang berlaku ⁶, agar tidak menimbulkan genangan yang akan menurunkan kualitas jalan.

⁵ <https://binamarga.pu.go.id/nspk>

⁶ Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: 23/SE/Db/2021 tentang Pedoman Desain Drainase Jalan

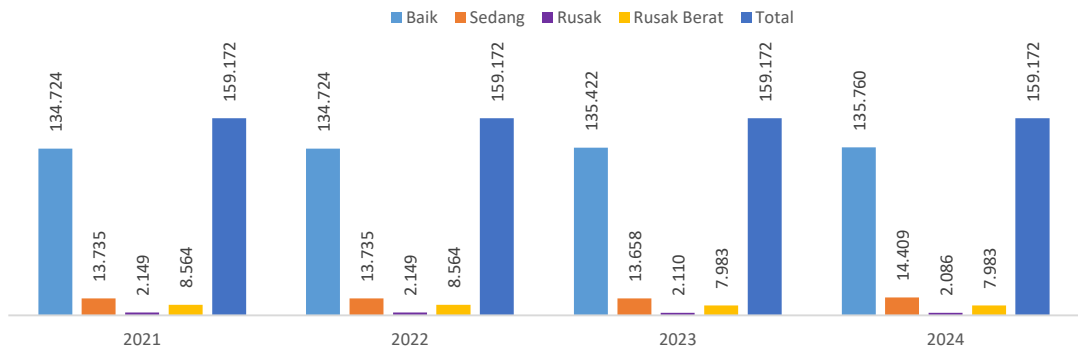
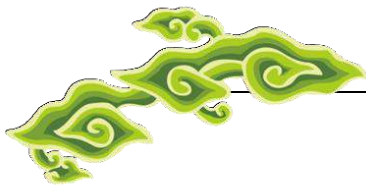


Saat ini, fasilitas jalur pedestrian dan jalur sepeda di Kota Cirebon telah terwujud di beberapa lokasi, termasuk Jalan Wahidin dan sebagian Jalan Siliwangi. Inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan budaya berjalan kaki dan bersepeda, yang berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, kemacetan lalu lintas, serta meningkatkan kebugaran jasmani masyarakat Kota Cirebon. Selain itu, fasilitas seperti median pembatas jalan dan jalur pedestrian juga telah tersedia di Jalan Dokter Wahidin Sudiro Husodo dan sebagian Jalan Dokter Cipto Mangunkusumo. Fasilitas jalan yang memenuhi standar dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi penggunaanya.

2.1.4.4.9 Tingkat Konektivitas Antar wilayah

Kinerja infrastruktur jalan antara lain dapat diwakili oleh panjang jalan dengan perkerasan yang menggambarkan ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung mobilitas orang maupun barang, kinerja infrastruktur jalan juga dapat digambarkan melalui panjang jalan dengan kondisi baik. Panjang jalan dengan kondisi baik dapat menggambarkan layanan infrastruktur jalan dalam mendukung aksesibilitas. Hal ini merupakan perkembangan positif yang dapat meningkatkan kontribusi infrastruktur terhadap daya saing kota. Namun, pada kurun waktu yang sama, kenaikan panjang jalan ini juga sejalan dengan bertambahnya panjang jalan dengan kondisi rusak sedang maupun rusak berat.

Panjang jalan yang sudah diaspal tercatat mencapai 193,92 km termasuk jalan Tol Palikanci sepanjang $\pm 1,87$ km yaitu di wilayah kelurahan Argasunya, walaupun tidak memiliki akses langsung masuk dan keluar tol di wilayah Kota Cirebon. Namun dengan adanya pencatatan berdasarkan klasifikasi menjadi kewenangan Kota Cirebon, Provinsi dan Pusat, maka panjang jalan di Kota Cirebon menjadi 159,17 km. Sedangkan status jalan yang menjadi kewenangan provinsi sepanjang 8.760 km dan status jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sepanjang 15.780 km. Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2018 adalah 151,2 km dan terus menurun hingga sepanjang 134,72 km sampai dengan tahun 2023. Berkaitan dengan hal itu disebabkan pekerjaan peningkatan kualitas jalan hanya memperbaiki jalan yang berlubang. Panjang dan kondisi jalan di Kota Cirebon dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori kondisi jalan baik, yang meliputi proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, persentase jalan provinsi dalam kondisi baik, serta persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik.



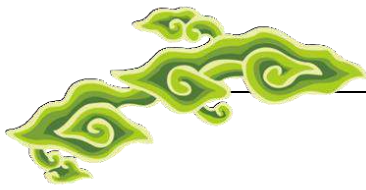
Gambar 2.69 Panjang Jalan di Kota Cirebon Berdasarkan Kondisi (km)
Sumber: BPS 2025

Prasarana jalan yang ada di Kota Cirebon terdiri dari jalan negara sepanjang 21,33 km (Keputusan Menteri PUPR Nomor 1688/KPTS/M/2022) , jalan provinsi sepanjang 6,545 km (Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1086-Rek/2016) serta jalan kota sepanjang 159,172 km (Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 621/Kep.46-DPUPR/2021). Sesuai dengan statusnya, pengelolaan jalan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota adalah ruas-ruas jalan kota di luar jalan negara dan jalan provinsi. Jalan negara 6,545 km salah satu ukuran kinerja infrastruktur jalan adalah kontribusinya terhadap aksesibilitas wilayah. Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas jalan di suatu wilayah maka dilakukan perhitungan rasio panjang jalan dengan luas wilayah. Nilai rasio tersebut menggambarkan panjang jalan yang terdapat dalam 1 km² luas wilayah. Dalam hal ini, nilai rasio berbanding lurus dengan tingkat aksesibilitas jalan di wilayah tersebut.

Jalan eksisting Kota Cirebon sepanjang 159.172 km dan luas wilayah Kota Cirebon saat ini adalah 39,466 km², dengan demikian terdapat rasio panjang jalan terhadap luas wilayah sebesar 4.033. Angka ini jauh di atas angka rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Provinsi Jawa Barat. Secara statistik, hal ini dapat diartikan bahwa aksesibilitas jalan di Kota Cirebon berada dalam kategori baik jika mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain indikator tersebut, kualitas layanan infrastruktur jalan dapat diukur melalui persentase kondisi jalan baik. Terdapat kenaikan angka panjang jalan dengan kondisi baik, namun proporsi kondisi jalan baik menurun menjadi 84,64% di tahun 2023. Sangat disayangkan bahwa terjadi penurunan persentase jalan baik. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa penambahan jalan baru tidak dibarengi oleh pemeliharaan jalan eksisting, atau bahkan dapat mengindikasikan kualitas jalan eksisting yang bisa jadi tidak sesuai dengan usia konstruksinya. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan upaya pengawasan dan pemeliharaan kondisi ruas jalan yang ada di wilayah Kota Cirebon sesuai dengan kewenangan status jalannya sehingga keberadaan infrastruktur jalan dapat menjadi nilai tambah bagi daya saing kota.

Mobilitas penduduk Kota Cirebon dilayani oleh angkutan kota (angkot) berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon nomor 5 tahun 1997



tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota (Angkot), Angkot ini beroperasi pada 10 trayek dengan total panjang trayek 190 km dan armada berjumlah 979 kendaraan. Pada tahun 2021 terlihat adanya penurunan jumlah angkutan umum yang ada di Kota Cirebon. Jumlah penurunan ini melonjak tajam pada tahun 2022 menjadi sekitar setengahnya, dan pada bulan September 2024 tercatat hanya 241 angkutan umum yang tersisa. Hal ini merupakan imbas langsung dari beroperasinya transportasi daring di Kota Cirebon, seperti Gojek, Grab, Maxim dan lainnya.

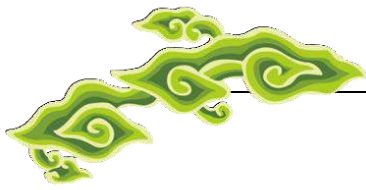
Pada tahun 2021, terdapat penambahan moda transportasi umum sebanyak 10 unit bus ukuran sedang yang digunakan sebagai bagian dari layanan *Bus Rapid Transit* (BRT) di Kota Cirebon. Hal ini sejalan dengan strategi penataan dan pengembangan sistem prasarana wilayah dalam RTRW Provinsi Jawa Barat dimana Kota Cirebon mulai mengembangkan sistem angkutan umum massal untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan.

Tabel 2.37 Panjang Trayek Angkutan Kota Cirebon (km)

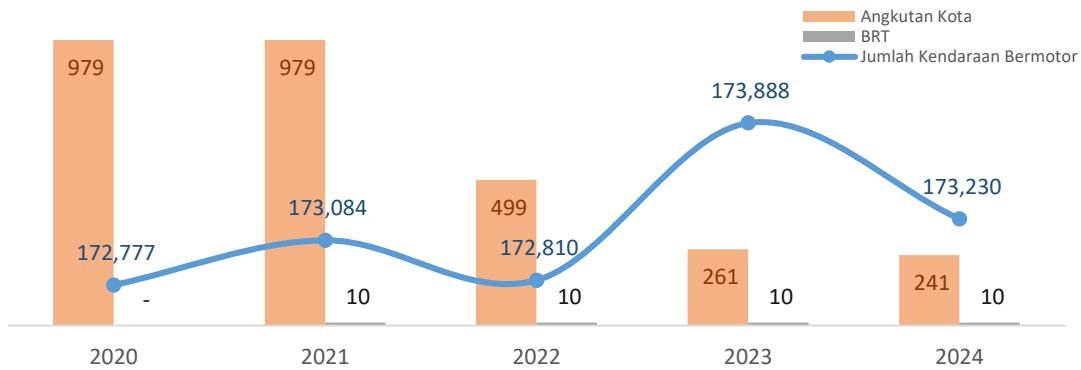
Angkutan Umum	2020	2021	2022	2023	2024
D1	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
D2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
D3	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
D4	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68
D5	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08
D6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
D7	20,2	20,2	20,2	20,2	-
D8	16,3	16,3	16,3	16,3	-
D9	16,4	16,4	-	-	-
D10	27,3	27,3	-	-	-
BRT	-	-	-	30	30
Jumlah	190	190	147	177	140

Sumber:Open Data Kota Cirebon 2025

BRT mulai dioperasikan di Kota Cirebon sejak 12 April 2021. Untuk tahap awal, bus yang dioperasikan sebanyak dua bus dengan dua rute. Rute yang kedua berada di dalam wilayah Kota Cirebon, sementara rute lainnya beroperasi hingga wilayah Kabupaten Cirebon (Koridor I). Koridor I berhenti beroperasi dengan pertimbangan kurangnya jumlah penumpang. Selanjutnya di tahun 2023 dilakukan penambahan Koridor II dengan rute yang melayani hingga Wilayah Selatan Kota Cirebon (Kecamatan Harjamukti) melewati daerah yang strategis seperti daerah-daerah kuliner, wisata, pendidikan, perkantoran dan perbelanjaan. Sejak awal beroperasi hingga bulan September 2023, BRT telah melayani sebanyak 20.824 penumpang. Salah satu indikator kinerja layanan angkutan umum terhadap mobilitas penduduk adalah rasio kendaraan angkutan umum terhadap jumlah penduduk. Rasio kendaraan angkutan umum Kota Cirebon sebesar 0,7038 per 1000 penduduk, dengan jumlah penduduk di Kota Cirebon pada tahun 2024 sebesar



356.629 jiwa dan jumlah angkutan umum sebanyak 251 unit angkutan umum yang terdiri dari Angkot dan BRT.



Gambar 2.70 Jumlah Kendaraan di Kota Cirebon

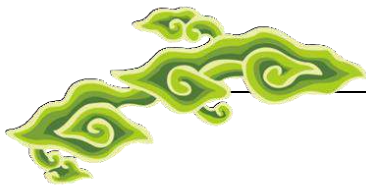
Sumber: Open Data Prov. Jabar 2025, Open Data Kota Cirebon 2025

Angka ini menggambarkan masih rendahnya ketersediaan angkutan umum dalam menunjang mobilitas masyarakat di wilayah Kota Cirebon. Terlebih jika disandingkan dengan jumlah kendaraan pribadi pada tahun 2024 sebanyak 173.230 unit, maka diperoleh proporsi angkutan umum berbanding kendaraan non-angkutan umum adalah 0,15%. Dapat dibayangkan jumlah kendaraan pribadi yang digunakan untuk mobilitas penduduk di dalam wilayah Kota Cirebon.

Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir, transportasi berbasis aplikasi online untuk kendaraan roda dua dan roda empat semakin berkembang. Meskipun belum ada data pasti mengenai jumlah kendaraan yang beroperasi melalui aplikasi online, keberadaan layanan transportasi berbasis aplikasi online yang diyakini telah meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum di Kota Cirebon. Upaya untuk memperbaiki layanan transportasi massal di kota ini telah dimulai dengan peluncuran layanan BRT. Walaupun terdapat kecenderungan awal yang positif dalam jumlah pengguna, perkembangan penumpang pada semester awal tahun 2021 masih mengalami fluktuasi. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan tarif dan penerapan PPKM. Layanan BRT diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan mobilitas warga Kota Cirebon yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan berkembang ke wilayah kabupaten/kota sekitar sehingga akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Kota Cirebon. Meskipun performa angkutan umum saat ini masih rendah, keberadaan BRT diharapkan memberikan nilai tambah pada layanan transportasi umum di masa depan.

2.1.4.4.10 Rasio Rumah Layak Huni

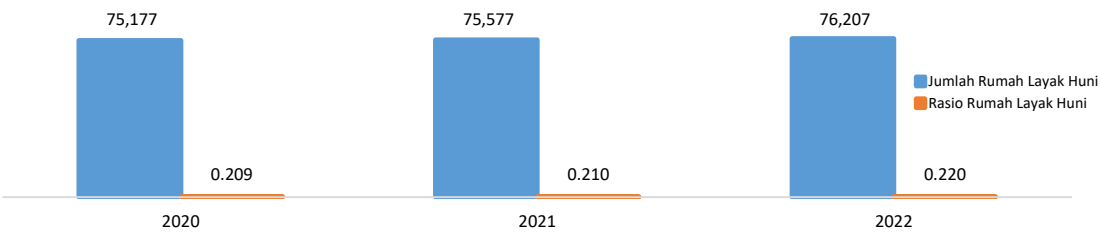
Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni yang ada di Kota Cirebon terhadap jumlah penduduk Kota Cirebon, dalam satuan persentase. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi



persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni, dengan kriteria sebagai berikut:

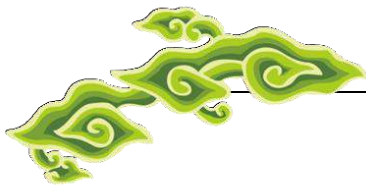
1. Keselamatan bangunan Persyaratan keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan. Komponen struktur meliputi pondasi, sloof, kolom, balok, dan rangka atap. Komponen non struktur bangunan meliputi lantai, dinding, kusen dan daun pintu serta jendela, dan penutup atap.
2. Kesehatan penghuni Persyaratan kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana sirkulasi udara, pencahayaan, akses sanitasi layak, dan akses air minum layak. Sarana sirkulasi udara minimal 5% dari luas lantai bangunan berupa bukaan jendela dengan memperhatikan sirkulasi udara. Sarana pencahayaan minimal 10% dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari. Akses sanitasi layak meliputi bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta septiktank yang layak, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah. Akses air minum layak meliputi pemenuhan akses air minum yang terkoneksi dengan sistem sanitasi di dalam bangunan.
3. Kecukupan minimum luas bangunan Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan hunian. Kecukupan minimum luas per orang dihitung 9 meter² dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Pemenuhan luasan rumah memperhatikan ketersediaan lahan dan kemampuan berswadaya.

Semakin tinggi rasio rumah layak huni menunjukkan semakin berhasil pemerintah/pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak. Jika rasio rumah layak huni bernilai 0,2 artinya untuk setiap 5 (lima) orang penduduk Kota Cirebon, tersedia 1 (satu) unit rumah layak huni. Jika rasio rumah layak huni bernilai 0,25 artinya untuk setiap 4 (empat) orang penduduk Kota Cirebon, tersedia 1 (satu) unit rumah layak huni.



Gambar 2.71 Rumah Layak Huni di Kota Cirebon
Sumber: Open data Cirebon, 2023

Berdasarkan data jumlah rumah sebesar 81.388, proporsi jumlah layak huni adalah sebesar 76.207 rumah atau sebesar 93,63% dan proporsi jumlah rumah tidak layak huni sebesar 5.181 rumah atau sebesar 6,37%.



Tabel 2.38 Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Kota Cirebon

Jumlah Kawasan	2020	2021	2022	2023	2024
HARJAMUKTI	1	5	1	1	1
LEMAHWUNGKUK	4	9	4	4	4
PEKALIPAN	4	7	4	4	4
KESAMBI	-	-	-	-	-
KEJAKSAN	2	3	2	2	2

Sumber : Open Data Kota Cirebon 2025

Performa aspek infrastruktur/fasilitas wilayah merupakan salah satu aspek yang terlihat jelas dalam pembangunan fisik kota, terlebih eksisting Kota Cirebon sebagai wilayah perkotaan yang memiliki visi kota perdagangan dan jasa yang tentunya perlu ditunjang oleh kinerja infrastruktur yang baik. Keberadaan fasilitas wilayah/infrastruktur diyakini dapat meningkatkan daya tarik dunia usaha untuk turut menghidupkan iklim investasi di Kota Cirebon yang dengan sendirinya dapat mendongkrak daya saing Kota Cirebon.

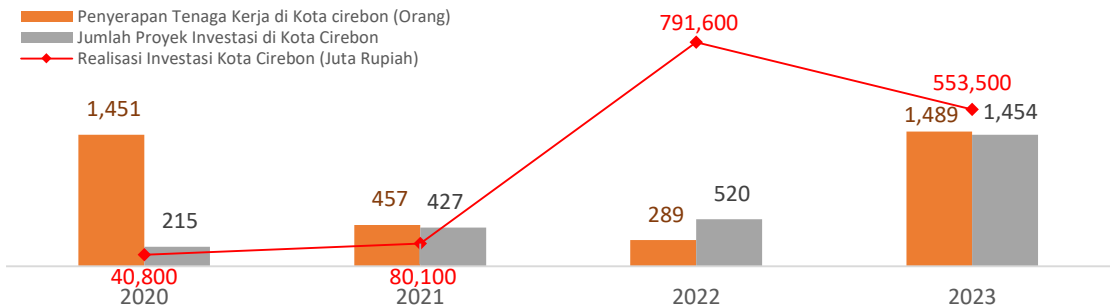
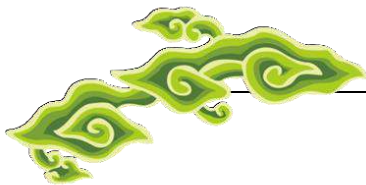
Tabel 2.39 Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Cirebon

Luas Kawasan (Ha)	2020	2021	2022	2023	2024
HARJAMUKTI	29,87	22,02	20,44	20,44	13,58
LEMAH WUNGKUK	75,17	54,98	41,46	41,46	40,38
PEKALIPAN	39,86	30,99	18,35	18,35	18,55
KESAMBI	-	-	-	-	-
KEJAKSAN	40,05	40,55	35,11	35,11	33,33

Sumber : Open Data Kota Cirebon 2025

2.1.4.5 Daya Saing Iklim Investasi

Nilai Investasi di Kota Cirebon sejak tahun 2013-2019 terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan yang ditengarai dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19. Meski demikian, kondisi ini kembali membaik pada tahun 2022. Bahkan, di tahun 2022 Kota Cirebon termasuk dalam sepuluh besar Kabupaten/Kota yang meraih persentase pencapaian realisasi investasi terbesar di Provinsi Jawa Barat, dimana tercatat investasi Rp 791,6 M dapat terealisasi di kota Cirebon dari target sekitar Rp 500 M., MESKI pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan realisasi investasi menjadi 553,5 miliar rupiah, namun angka penyerapan tenaga kerja cenderung mengalami peningkatan kembali. Sementara itu, jumlah proyek di Kota Cirebon terus bertambah.



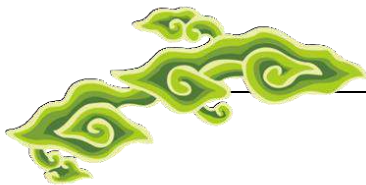
Gambar 2.73 Investasi di Kota Cirebon
Sumber: DPMPTSP Kota Cirebon 2024

Berdasarkan gambaran data tahun 2021, sektor terbesar adalah perdagangan dan reparasi serta hotel dan restoran diantara 10 sektor yang memiliki potensial di Kota Cirebon dalam menarik minat investasi. Selanjutnya disusul sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran diikuti sektor Listrik, Gas dan Air serta konstruksi.

Berkembangnya investasi di Kota Cirebon merupakan hal yang positif mengingat kehadiran investasi merupakan salah satu tahapan awal dalam proses produksi yang dapat memberikan dorongan awal bagi pembangunan ekonomi daerah sehingga memiliki peran penting dalam pembangunan daerah untuk meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu, perlu dilakukan kebijakan yang mendorong tumbuhnya penanaman modal serta upaya untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Tujuannya adalah untuk memperkuat daya saing ekonomi dan mempercepat pertumbuhan investasi.

Tabel 2.28 Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Sektor Pelaku Usaha
2021

No.	Sektor	Jumlah/ Tahap Pelaporan		Status Perusahaan		Periode Pelaporan				Total
		Konstruksi	Produksi	PMA	PMDN	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Perdagangan dan Reparasi	2	134	14	122	39	11	86	N/A	408
2.	Hotel dan Restoran	0	80	30	50	15	35	30	N/A	240
3.	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	3	12	3	12	4	4	7	N/A	45
4.	Listrik, Gas dan Air	2	1	0	3	1	1	1	N/A	9
5.	Konstruksi	0	6	0	7	1	5	1	N/A	20
6.	Transportasi, Gedung dan Telekomunikasi	0	3	0	3	0	1	2	N/A	9
7.	Jasa Lainnya	1	54	9	46	13	11	31	N/A	165
8.	Industri Tekstil	0	2	0	2	1	1	0	N/A	6
9.	Industri Kendaraan Bermotor dan	0	3	0	3	1	0	2	N/A	9



No.	Sektor	Jumlah/ Tahap Pelaporan		Status Perusahaan		Periode Pelaporan				Total
		Konstruksi	Produksi	PMA	PMDN	TW I	TW II	TW III	TW IV	
	Alat Transportasi Lain									
10.	Industri Makanan	0	2	0	2	0	0	2	N/A	6
	Total	8	297	56	250	75	69	162	N/A	917

Sumber : Data Perizinan OSS-RBA, DPMPT Kota Cirebon, tahun 2021

Kondisi iklim investasi di Kota Cirebon yang kondusif tidak lepas dari aspek ketentraman dan ketertiban umum yang relatif stabil. Hal ini juga didukung oleh aspek kemudahan investasi yang tergambar antara lain dari telah berjalannya Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan dukungan Rencana Detail Tata Ruang interaktif yang disahkan pada akhir tahun 2021. Meski demikian, hal ini belum secara optimal didukung oleh daya saing daerah, karena capaian Indeks Daya Saing Kota Cirebon selama tahun 2020 dan 2021 belum terlalu memuaskan. Pada tahun 2021, dari 9 kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, capaian Indeks Daya Saing Kota Cirebon menempati urutan ke-5, dengan perolehan indeks sebesar 3,069. Dari 12 pilar pembentuk Indeks Daya Saing Daerah, terdapat 3 pilar yang memerlukan perhatian untuk peningkatan capaiannya, yaitu pilar kapasitas inovasi, kesiapan teknologi, serta perekonomian daerah.

Tabel 2.29 Indeks Daya Saing Daerah Kota Cirebon

Pilar	2022	2023
1	4,46	4,37
2	-	2,56
3	3,52	4,76
4	2,65	2,85
5	4,00	4,06
6	3,74	4,00
7	5,00	5,00
8	3,51	3,51
9	1,73	2,77
10	1,13	4,37
11	5,00	2,33
12	3,21	3,14

Ket :

Lingkup Pendukung

SDM

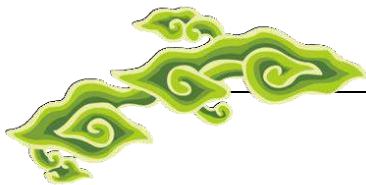
Pasar

Ekosistem Inovasi

Sumber : BRIN

Tabel 2.30 Nilai Investasi di Kota Cirebon

INVESTASI	2021	2022	2023
PMDN UMK	619.864.823.518	764.927.460.042	594.836.183.333
PMDN Non Umk	1.465.226.432.189	4.400.238.628.760	3.398.234.226.752
PMA UMK	500.000.000	11.288.832.982	11.529.160.205



INVESTASI	2021	2022	2023
PMA Non UMK	47.481.800.000	1.418.875.588.501	258.171.382.767

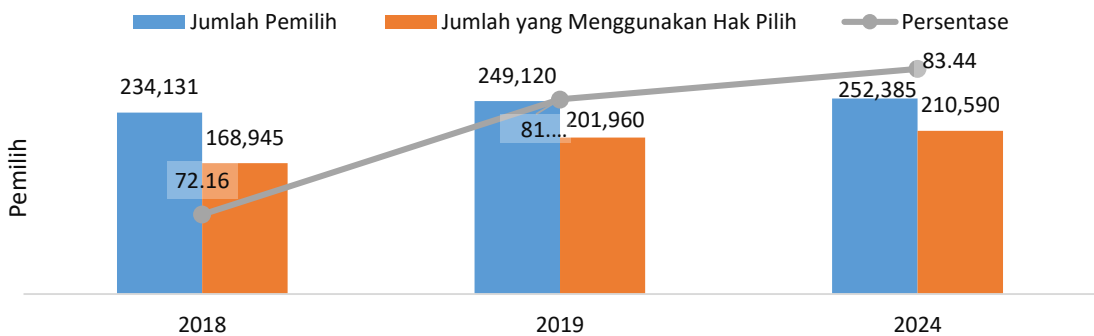
Sumber: Cirebon Satu Data 2023

Peluang investasi di Kota Cirebon sangat berpotensi, hal ini dilihat dari pangsa pasar konsumen yang bukan hanya dari warga Kota Cirebon namun juga dari wilayah sekitar yang merupakan wilayah III Ciayumajakuning. Adanya pelabuhan juga peluang untuk sektor export yang memberi kemudahan untuk melakukan pengiriman produk keluar pulau jawa maupun keluar negeri.

2.1.4.5.1 Indikator Demokrasi

Indeks Demokrasi atau Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi tolak ukur yang menggambarkan kondisi demokrasi dari 3 (tiga) aspek yaitu kebebasan sipil, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Adapun kondisi demokrasi di Kota Cirebon akan digambarkan melalui aspek-aspek kinerja kesatuan bangsa dan politik yaitu partisipasi penduduk dalam Pemilu atau Pilkada.

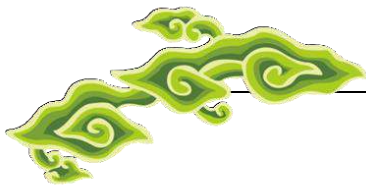
Partisipasi masyarakat Kota Cirebon dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota tahun 2018, Pemilu tahun 2019, dan Pemilu tahun 2024 dapat dilihat pada grafik. Hasil menunjukkan bahwa terjadi peningkatan partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dengan capaian tertinggi pada Pemilu tahun 2024 yaitu 83,44%. Adapun dari segi kesetaraan dalam menggunakan hak pilih, pemilih perempuan dan disabilitas juga menunjukkan adanya peningkatan. Dari sisi kepesertaan partai politik yang dapat menunjukkan kebebasan untuk dipilih dan adanya peningkatan jumlah partai politik, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 20 partai menjadi 24 partai pada pemilihan tahun 2024. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa jaminan dalam kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih maupun dipilih.



Gambar 2.74 Angka Partisipasi Pemilih Kota Cirebon dalam Pemilu/Pilkada

Sumber: KPU Kota Cirebon, tahun 2018-2024

Kinerja baik tersebut menunjukkan meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada yaitu Komisi Pemilihan Umum yang didukung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Pemerintah



Kota Cirebon melakukan upaya-upaya dalam peningkatan partisipasi dalam Pemilu/Pilkada seperti pemutakhiran data pemilih berkala melalui Daftar Pemilih Berkelanjutan, sosialisasi dan pendidikan pemilih, terutama pada pemilih pemula KPU Goes to School, KPU Goes to Campus dan kegiatan lainnya yang mendukung agar kondusifitas penyelenggaraan ‘pesta demokrasi’ ini berjalan lancar tanpa adanya konflik.

2.1.4.5.2 Indikator Rasa Aman

Rasa aman merupakan konsep yang sering digunakan dalam psikologi untuk menggambarkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan seseorang dalam situasi tertentu. Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan untuk melindungi diri dari berbagai bahaya yang mengancam, khususnya dari lingkungan yang ditempati. Terdapat sebuah ukuran untuk mengukur keamanan lingkungan, pribadi, sosial dan lainnya yaitu Indeks Rasa Aman. Namun pendekatan yang digunakan untuk memberikan gambaran keamanan di Kota Cirebon yaitu Angka Kriminalitas / *Crime Rate* pada tabel berikut.

Tabel 2.31 Angka Kriminalitas Kota Cirebon

Nama Data	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus Kriminal	730	496	640	2.270	1.698
Kasus Kriminal diselesaikan (Persen)	88,08	109,07	103,75	79,55	33,69
Rasio Kejahatan (per 100.000 penduduk)	213	145	185	644	476

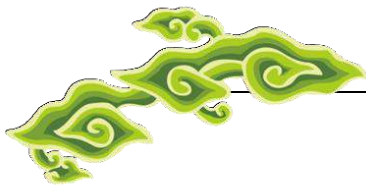
Sumber: Polres Cirebon Kota.

Angka kriminalitas dapat digambarkan melalui 3 (tiga) indikator yaitu jumlah kejadian (*crime total*), tingkat peristiwa kejahatan yang diselesaikan (*crime clearance*), dan rasio penduduk mengalami kejahatan (*crime rate*). Sepanjang tahun 2020-2024 jumlah kejadian dan tingkat penyelesaian kasus cukup fluktuatif sehingga Polres Cirebon Kota harus menyelesaikan kasus kriminal yang semakin bertambah besar.

Adapun rasio kejadian kejahatan dengan jumlah penduduk (*crime rate*) dapat menggambarkan perbandingan angka kriminalitas antara kabupaten/kota karena memiliki karakteristik demografi yang berbeda-beda. Pada perkembangannya *crime rate* Kota Cirebon mengalami penurunan hingga pada tahun 2022 yaitu 185 kejadian per 100.000 penduduk. BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2022 menyatakan bahwa meskipun Kota Cirebon hanya memiliki 640 kejadian, namun dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, Kota Cirebon menjadi kota yang memiliki tingkat risiko penduduk mengalami kriminalitas paling tinggi di Provinsi Jawa Barat.

2.1.4.5.3 Ketentraman dan Ketertiban

Menciptakan kondisi lingkungan yang tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan berdampak positif pada tatanan kehidupan masyarakat. Hal tersebut



merupakan tujuan dari penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kota Cirebon. Adapun kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat ditunjukkan melalui: (1) lokasi rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; (2) kasus pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3); dan (3) kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Cirebon (Satlinmas).

2.1.4.5.4 Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 tahun 2019 tentang Penyelenggara-an Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang mengatur 13 jenis ruang lingkup, antara lain tertib jalan, jalur hijau, trotoar dan fasilitas umum lainnya; tertib angkutan jalan; tertib sungai, saluran air, dan kolam; tertib tempat dan usaha tertentu; tertib lingkungan; tertib tuna sosial, anak jalanan dan psikotik; tertib susila; tertib bangunan dan penghuni bangunan; tertib tempat hiburan dan keramaian; tertib kawasan sekitar bandara; tertib kawasan sekitar pantai; tertib lingkungan pelajar; dan tertib peran serta masyarakat.

Pada dasarnya setiap orang atau lembaga berkewajiban menyelenggarakan trantibum, serta mendapatkan hak terlindungi dari ancaman gangguan dan pelanggaran trantibum. Penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman, dan keindahan (K3) adalah upaya untuk mengatasi atau menangani tindakan atau peristiwa yang melanggar aturan, norma, atau standar yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

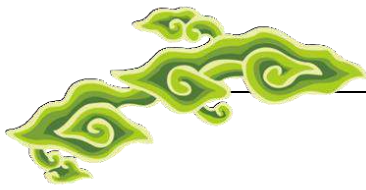
Tabel 2.32 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	91,30	100	100	64,29	64,29
Jumlah Kasus Pelanggaran K3	69	112	108	14	14
Jumlah Kasus Pelanggaran K3 yang diselesaikan	63	112	108	9	9

Sumber: Cirebon Satu Data, 2022

Berdasarkan data tahun 2017 sampai dengan 2022 menunjukkan bahwa terjadi penurunan persentase penyelesaian kasus pelanggaran K3 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penurunan penyelesaian kasus pelanggaran K3 dikarenakan adanya *refocusing* kegiatan pada penegakan disiplin protokol kesehatan pada saat PPKM Darurat.

Adapun fungsi penegakan peraturan/regulasi di tingkat daerah baik Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang telah diselenggarakan mengandung sanksi yustisial. Berdasarkan data tahun 2001-2022 terdapat 60 Perda yang mengandung sanksi yustisial. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon melaksanakan penegakan peraturan/regulasi di tingkat daerah melalui kegiatan operasi gabungan penyakit masyarakat (PEKAT), minuman

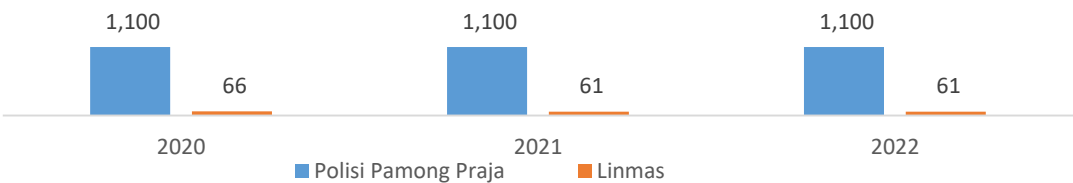


keras dan perbuatan asusila; penertiban reklame; penerapan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan rokok ilegal; serta pengawasan pajak hotel dan restoran. Kendala yang dihadapi dalam penegakan peraturan daerah antara lain kurangnya pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, pembinaan pencegahan secara persuasif yang dilakukan Perangkat Daerah teknis lainnya belum maksimal, serta sanksi yang telah diterapkan belum memberikan efek jera.

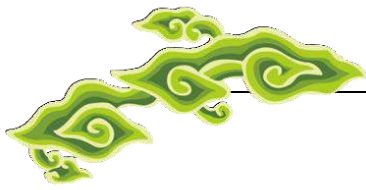
2.1.4.5.5 Perlindungan Masyarakat

Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) dibentuk dalam upaya untuk melindungi dari masyarakat dari bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat umum diarea lokasi yang memiliki potensi rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) maupun pelanggaran peraturan daerah. Selama periode tahun 2019-2022 telah dilakukan identifikasi lokasi prioritas rawan gangguan trantibum. Jumlah lokasi rawan trantibum merupakan hasil dari identifikasi sekaligus menjadi target lokasi prioritas intervensi penurunan rawan gangguan trantibum. Kondisi awal pada periode 2013-2017 terdapat 45 lokasi, sedangkan kondisi awal periode 2019-2022 terdapat 55 lokasi, selanjutnya kondisi awal periode 2023-2024 terdapat 12 lokasi.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan intervensi pada lokasi rawan gangguan trantibum, sehingga adanya penurunan jumlah lokasi pada setiap periode. Intervensi yang dilakukan bertujuan untuk mencegah dan menurunkan kasus dengan patroli pada 6 (enam) ruas jalan Kawasan Tertib Lalu-Lintas yaitu di Jalan Sudarsono, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Jalan Pemuda, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jalan Siliwangi, dan Jalan RA Kartini. Adapun dilakukan Patroli sebanyak 3 *shift* yaitu pagi (pukul 06.00 WIB s.d 12.00 WIB), siang (pukul 12.00 WIB s.d 18.00 WIB) dan malam (pukul 18.00 WIB s.d 24.00 WIB). Frekuensi patroli Satpol PP hanya sampai pukul 24.00 WIB tidak sampai 24 jam artinya sistem kerja Satpol PP masih belum mampu menyediakan layanan 24 jam dalam 7 hari. Kondisi ini dapat di atasi melalui teknologi pada lingkup *smart living* yang merupakan bagian dari *smarcity* dengan adanya CCTV pada lokasi strategis. Namun teknologi ini membutuhkan adanya sensor yang dapat mendeteksi anomali melalui sistem yang mendapatkan masukan dari kamera yang di tempatkan pada lokasi strategis, sebagai bahan informasi untuk dasar penindakan personil Linmas dan Satpol PP.



Gambar 2.75 Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat
Sumber: Open Data Cirebon, 2025



2.1.4.5.6 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan suatu gambaran kehidupan beragama yang harmonis di tengah masyarakat. Aspek toleransi, kesetaraan dan kerja sama merupakan pembentuk Indeks Kerukunan Umat Beragama berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006/8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Dimensi toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, dan menghargai perbedaan; kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas; dan kerja sama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.

Tabel 2.33 Agama Penduduk di Kota Cirebon tahun 2024

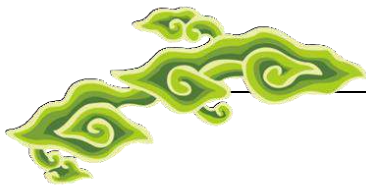
Agama	Islam	Kristen	Katholik	Budha	Hindu	Khonghucu	Kepercayaan
Jumlah (orang)	333.848	14.214	6.354	2.052	103	54	4
Persentase	93,612 %	3,986 %	1,782 %	0,575 %	0,029 %	0,015 %	0,001 %

Sumber: Disdukcapil 2025

Berdasarkan data Disdukcapil Kota Cirebon tahun 2024 untuk persentase penganut terbesar adalah 93,612% dengan jumlah 333.848 orang dan 4 orang terdata sebagai penganut kepercayaan. Keberagaman agama yang dianut penduduk Kota Cirebon tampak dari adanya fasilitas peribadatan seperti: Masjid, Vihara, Pura, Gereja dan Klenteng. Namun dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir terjadi beberapa potensi konflik dan permasalahan berhubungan dengan perizinan tempat beribadah, seperti yang dialami di Kelurahan Pekiringan dan Kelurahan Kalijaga permasalahan yang terjadi seperti penggunaan bangunan yang bukan diperuntukan untuk kegiatan peribadatan atau belum menyelesaikan perizinan tempat ibadah sehingga terjadi pembatasan kegiatan ibadah maupun pengaduan dari warga. Potensi konflik maupun permasalahan tersebut ditengahi oleh tokoh agama dan instansi terkait. Selain itu dalam menciptakan kerukunan umat beragama Pemerintah Kota Cirebon melibatkan masyarakat dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

2.1.5 Aspek Pelayanan Umum

Negara memiliki kewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasar mereka dalam bentuk pelayanan umum. Istilah pelayanan umum seringkali diidentikkan dengan pelayanan publik sebagai terjemahan dari *public service*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang dimaksud pelayanan publik adalah kegiatan/rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan



pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan umum sebagai bentuk pemberian jasa dapat dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah atau pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat. Berikut adalah jumlah Aparatur Sipil Negara yang bertugas melaksanakan pemerintahan dalam melayani masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 2.34 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Cirebon

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
Golongan I	22	16	15	13	10
Golongan II	708	635	618	505	420
Golongan III	2.925	2.767	2.671	2.577	2.497
Golongan IV	1.108	1.073	1.011	970	909
PPPK	-	-	173	562	1.251
Jumlah ASN	4.763	4.491	4.488	4.627	5.087
Jumlah Non ASN	2.952	2.952	1.669	1.669	1.303

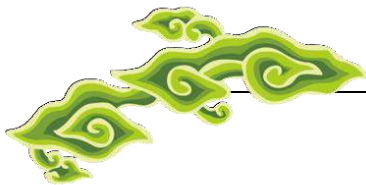
Sumber: BKPSDM Kota Cirebon, 2025

Pemerintah daerah Kota Cirebon sebagai penyedia layanan publik harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat demi peningkatan pemenuhan kebutuhan publik. Beberapa aspek pelayanan umum yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kota Cirebon meliputi reformasi birokrasi, pelayanan publik, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan inovasi daerah.

2.1.5.1 Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi (baik sistem maupun struktur) agar menjadi lebih baik dari segi profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif. Reformasi Birokrasi dilakukan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang akan berdampak perubahan ketatalaksanaan dari mulai budaya birokrasi, pelayanan publik supaya dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Merujuk pada Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 tahun 2023 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kota Cirebon tahun 2023-2026; yang dimaksud Reformasi Birokrasi (RB) adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Pemerintah Daerah Kota Cirebon sudah memiliki Road Map RB sebagai bentuk operasionalisasi Grand Design RB yang disusun dan merupakan



rencana rinci pelaksanaan Road Map RB dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun yang jelas.

Berdasarkan hasil penilaian dari Kemen PAN-RB, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cirebon pada tahun 2023 telah mencapai Predikat “BB” dengan kategori “Sangat Baik” dengan capaian Nilai sebesar 73,91 poin. Capaian ini meningkat bila dibandingkan tahun 2022 mendapat Predikat “B” dengan kategori “BAIK” dengan capaian Nilai sebesar 66,57 poin. Berikut perkembangan capaian capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cirebon dalam kurun waktu tahun 2019-2023.

Tabel 2.35 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cirebon

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Indeks	60,86	62,84	63,544	66,57	73,91
Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

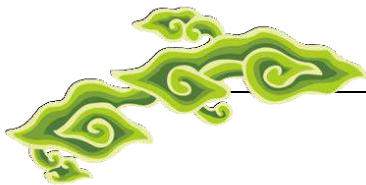
Sumber : Kemen PAN-RB, 2024

Peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cirebon dari tahun ke tahun mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam memastikan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi untuk betul-betul mengungkit capaian indikator kegiatan utama dan mengoptimalkan perannya dalam reformasi birokrasi tematik. Selain itu adanya komitmen bersama dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi di instansinya masing-masing.

Reformasi Birokrasi Kota Cirebon tahun 2023-2026 memiliki slogan RB BerAKHLAK sebagai bentuk kampanye dalam publikasi menginternalisasi nilai-nilai RB yang sinergis dengan Core Values BerAKHLAK. Pemerintah Daerah Kota Cirebon akan terus berusaha dan memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cirebon dapat dilakukan dengan monitoring dan evaluasi berkala capaian rencana aksi dan alternatif strategi, menetapkan minimal satu tematik sebagai tema yang akan dilaksanakan dalam agenda RB internalnya serta kegiatan mereviu rencana aksi yang telah ditetapkan agar lebih menyasar pada penyelesaian permasalahan utama tata kelola dan lebih kolaboratif dalam pelaksanaannya.

Definisi pelayanan publik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas



barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pelayan publik. Pelaksanaan pelayanan publik di Kota Cirebon mempedomani Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, dimana dijelaskan yang termasuk dalam pelayanan publik berupa pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif.

Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik secara nasional dilakukan oleh Kemen PANRB sejak tahun 2015 dan terus bertransformasi guna menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan perkembangan teknologi. Kebijakan terkait Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Evaluasi pelayanan publik didasarkan pada sembilan layanan yang diprioritaskan dalam arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sembilan layanan tersebut antara lain layanan pendidikan, kesehatan, layanan bantuan sosial, layanan kepolisian, administrasi kependudukan, layanan transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan, pertukaran data, serta portal layanan publik.

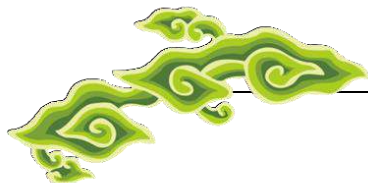
Tabel 2.36 Indeks Pelayanan Publik Kota Cirebon

Kota Cirebon	2020	2021	2022	2023
Nilai Indeks	N/A	3,14	3,43	3,78
Predikat	N/A	B-	B-	B

Sumber : Kemen PAN-RB, 2024

Berdasarkan hasil penilaian dari Kemen PAN-RB, Indeks Pelayanan Publik Kota Cirebon pada tahun 2023 telah mencapai Predikat “B” dengan kategori “BAIK” dengan capaian nilai sebesar 3,78 poin. Capaian ini lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2022 mendapat Predikat “B-” dengan kategori “BAIK” dengan capaian nilai sebesar 3,43 poin.

Berdasarkan penilaian Indeks Pelayanan Publik Kota Cirebon dalam rentang waktu tahun 2018-2023, capaian Kota Cirebon mengalami peningkatan, Hal ini mengindikasikan pelayanan publik di Kota Cirebon semakin berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Penilaian indeks pelayanan publik ini didasarkan pada aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), konsultasi dan



pengaduan dan inovasi. Selain itu nilai indeks pelayanan publik dilihat pula dari penilaian atau persepsi masyarakat, komitmen tata kelola, dan penilaian ahli sesuai bukti dukung serta kesesuaian jawaban.

Di masa mendatang, elaborasi implementasi aspek layanan yang lebih baik dan tetap melaksanakan prinsip-prinsip layanan publik yang konsisten, akan dapat menghasilkan penilaian yang semakin meningkat pula. Hasil indeks pelayanan publik Kota Cirebon setiap tahun diharapkan terus meningkat dikarenakan indeks ini dijadikan salah satu komponen pengukuran reformasi birokrasi.

2.1.5.2 Pemerintahan Berbasis Digital

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, tujuan utama SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

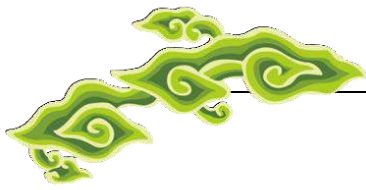
Di Kota Cirebon, penyelenggaraan SPBE didasarkan pada Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2023. Regulasi ini disusun sesuai arahan Kementerian PANRB.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, kegiatan ini dilaksanakan untuk menilai sejauh mana penerapan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah berkontribusi pada kemajuan reformasi birokrasi. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE yang direpresentasikan dalam bentuk nilai Indeks SPBE.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Indeks SPBE Kota Cirebon memperoleh predikat “Sangat Baik” dengan capaian nilai 3,20 poin. Kemudian pada tahun 2025 ditetapkan baseline sebesar 4,13 poin sebagai acuan awal penerapan Indeks Pemerintah Digital. Selanjutnya, target capaian Kota Cirebon adalah 2,70 poin pada tahun 2026–2027, 2,90 poin pada tahun 2028–2029, dan 3,00 poin pada tahun 2030.

Memasuki periode pembangunan 2025–2029, kebijakan SPBE mengalami penguatan dalam Transformasi menjadi Pemerintah Digital (Pemdi) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJP Nasional 2025-2045. Indeks SPBE akan bertransformasi menjadi Indeks Pemerintah Digital, dengan kerangka evaluasi baru yang mencakup 9 aspek dan 35 indikator.

Dengan demikian, layanan Pemerintah Digital di Kota Cirebon ke depan harus mampu menghadirkan birokrasi yang responsif, adaptif,



dan kolaboratif. Transformasi layanan publik menjadi prioritas dengan mendorong interaksi digital yang lebih optimal, baik antar pemerintah (*Government to Government*), antara pemerintah dengan dunia usaha (*Government to Business*), maupun antara pemerintah dengan masyarakat (*Government to Citizen*).

2.1.5.3 Inovasi Daerah

Inovasi merupakan kunci keberhasilan dalam membangun daerah yang maju dan berdaya saing. Inovasi juga digunakan sebagai alat untuk menunjukkan suatu kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menyebutkan definisi Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya inovasi daerah dapat berbentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Penyelenggaraan inovasi daerah di Kota Cirebon telah diatur dan mempedomani Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 67 tahun 2022 Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Cirebon tahun 2023-2026 serta Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 78 tahun 2022 tentang Inovasi Daerah. Berbagai inovasi daerah semakin muncul di Kota Cirebon dilaksanakan sebagai bentuk pembaharuan dan solusi kreatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka memecahkan berbagai masalah layanan publik, serta memanfaatkan peluang yang ada di Kota Cirebon.

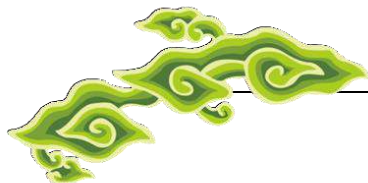
Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui penyelenggaraan *Innovative Government Award* (IGA) sebagai penghargaan rutin bagi daerah terinovatif. Dapat dikatakan pula IGA sebagai pelaporan tahunan inovasi daerah bidang Digital maupun Non Digital melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang kemudian dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap masing-masing inovasi oleh Kemendagri.

Penilaian IID didasarkan pada dua aspek dengan 36 indikator meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan inovasi daerah, dimana terdiri dari 15 indikator satuan pemerintah daerah dan 21 indikator satuan inovasi daerah yang menunjukkan sejauh mana kematangan inovasi.

Tabel 2.37 Indeks Inovasi Daerah Kota Cirebon

Indikator	2020	2021	2022	2023
Nilai Indeks	1.164	43,47	41,41	42,46
Kategori	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber : Kemendagri, Bappelitbangda Kota Cirebon, 2023



Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri, Indeks Inovasi Daerah Kota Cirebon dalam kurun waktu 3 tahun terakhir termasuk dalam kategori “INOVATIF”. Pada tahun 2023 nilai Indeks Inovasi Daerah Kota Cirebon sebesar 42,46 poin dengan kategori inovatif. Capaian ini meningkat bila dibandingkan tahun 2022 sebesar 41,41 poin dengan kategori inovatif. Namun masih lebih rendah dari capaian tahun 2021 sebesar 43,47 point dan capaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2020 yaitu kategori sangat inovatif. Penurunan nilai Indeks Inovasi Daerah di Kota Cirebon disebabkan dari rendahnya tingkat keikutsertaan inovasi daerah Kota Cirebon dalam ajang penilaian *Innovative Government Award* (IGA) serta nilai kematangan suatu inovasi.

Selain gelaran penilaian IGA yang diselenggarakan secara Nasional oleh Kementerian Dalam Negeri, kompetisi inovasi daerah juga digelar oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nama Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB). KIJB dilaksanakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan budaya inovasi. Selain itu juga memberikan apresiasi kepada para inovator berupa penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah. Dalam periode tahun 2022-2023, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah mengikuti KIJB dan menjadi salah satu inovasi Kota Cirebon yang masuk dalam 45 besar.

Memperhatikan hasil penilaian Kota Cirebon pada ajang penilaian inovasi tersebut, langkah strategis selanjutnya yang perlu dilakukan adalah komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun ekosistem inovasi daerah yang lebih baik, salah satunya melalui keikutsertaan dalam gelaran inovasi. Hal lainnya berkaitan dengan kebijakan inovasi melalui penataan daya dukung unsur organisasi, kerangka regulasi, dan internalisasi budaya inovasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan interaksi produktif multi pihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik inovasi terbaik, dan hasil-hasil kelitbangan yang sesuai dengan tantangan dan potensi unggulan di Kota Cirebon saat ini.

Inovasi dalam pembangunan daerah di Kota Cirebon semakin penting, disebabkan pada era global pembangunan perlu lebih mengedepankan aspek pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing atau disebut dengan *innovation-driven development*. Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan *Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi* (IPTEKIN). Harapannya agar tercipta pencapaian inovasi untuk peningkatan potensi daya saing daerah Kota Cirebon secara berkelanjutan.

2.1.5.4 Indikator Capaian Pemerintah

2.1.5.4.1 Indikator Kinerja Makro

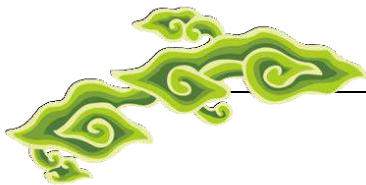
Capaian Indikator Kinerja Makro Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir dapat digambarkan pada data berikut:



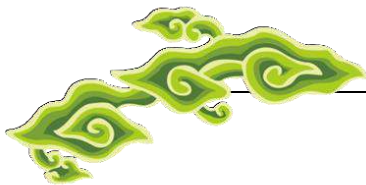
Sumber: BPS 2025, LPPD Kota Cirebon.

Capaian Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir dapat digambarkan pada data berikut:

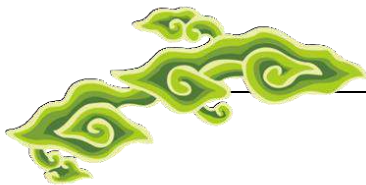
124



No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Sumber Data	2020	2021	2022	2023	2024
		mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota						
23		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	DPUTR	94%	95,06%	95,57%	92,33	97,12%
24		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	DPUTR	100%	100%	100%	100	100%
25		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	DPUTR	92%	93,27%	93,82%	93,81	94,34%
26		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	DPUTR	87,97%	105,82%	46,186	18,03	10,08%
27		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	DPUTR	100%	100%	0	100	100%
28	PRKP	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	DPRKP	100%	20%	100%	0	
29		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	DPRKP	100%	0	100%	0	0
30		Persentase kawasan (ha) di kab/ kota yang ditangani	DPRKP	100%	100%	0,0024%	30,46	10,06%
31		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	DPRKP	5,69%	6,50%	6,52%	5,58	4,05%
32		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	DPRKP	0,692%	0,60%	25,98%	24,81	10,21%
33	Trantibumlinmas	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Satpol PP	71,43%	64,28%	100%	71,42	100%
34		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Satpol PP	100%	100%	100%	100	100%
35		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	BPBD	4000	3000	252,121%	100	100%
36		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD	30	8300	108,284%	100	100%
37		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BPBD	91,95%	0	100%	100	100%
38.		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DPKP	100%	100%	100%	84,7	100%
39.		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (%)	DPKP	10'	9,92'	11,95'	10,37'	100%
40.	Sosial	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Dinsos	100%	100%	100%	38,09	100%
41.		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Dinsos	100%	100%	100%	33,06	100%
42.	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Disnaker	100%	100%	100%	100	100%
43.		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Disnaker	1,76%	47,75%	30,64%	15,96%	15,78%
44.		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker	29139,10%	54,37%	47,22%	4.999.446 .100.282, 20	47,92%
45.		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Disnaker	91,20%	33,57%	38,0232%	29,23%	30,68%
46.		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Disnaker	38,61%	48,57%	48,68%	59,39%	56,93%
47.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	DP3APPKB	0,045%	14,30%	14,82%	9,54	12,88%
48.		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	DP3APPKB	0,027%	0,03%	0,024%	0,03%	100%
49.		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	DP3APPKB	13,488%	15,17%	20,43%	147,15	1.528.100
50.	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	DKP3	1014,56%	15,17%	189,74%	31,62	41,89%
51.	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	DPUTR	100%	250,77%	100%	100	100%
52.		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	DPUTR	43,24%	100%	100%	0	0
53.		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	DPUTR	100%	100%	100%	100	100%
54.		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari	DPUTR	-	100%	100%	0	0

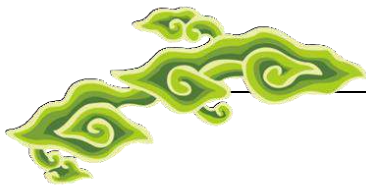


No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Sumber Data	2020	2021	2022	2023	2024
		Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee						
55.		Tersedianya tanah untuk masyarakat	DPUTR	-	-	100%	0	0
56.		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	DPUTR	-	-	100%	0	0
57.	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	DLH	56,25%	55,70%	53,11%	50,04	59,2%
58.		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	DLH	75,47%	82,92%	84,42%	84,91	85,26%
59.		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	DLH	54,54%	35,71%	33,7%	30	28,57%
60.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Disdukcapil	99,76%	99,81%	99,07%	97,29	99,26%
61.		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Disdukcapil	17,91%	85,65%	93,35%	94,55	96,49%
62.		Kepemilikan akta kelahiran	Disdukcapil	82,46%	85,09%	92,82%	90,02	96,86%
63.		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Disdukcapil	51,61%	56,25%	56,25%	56,25	93,75%
64.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pengentasan desa tertinggal	Setda	0	0	100%	0	0
65.		Persentase peningkatan status desa mandiri	Setda	214,286%	0	100%	0	0
66.		TFR (Angka Kelahiran Total)	DP3APPKB	2,16	2,38	2,803%	2,065	2,03%
67.		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern ContraceptivCe Prevalence Rate/mCPR)	DP3APPKB	64,28%	64,59%	52,11%	62,44	62,09%
68.		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	DP3APPKB	18,99%	18,39%	31,78%	17,11	13,09%
69.	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Dishub	100%	100%	0,1%	0,9	70%
70.		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Dishub	-	3,27%	0,59%	0,56	0,55%
71.	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	DKIS	100%	100%	100%	100	100%
72.		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	DKIS	100%	100%	100%	100	100%
73.	Koperasi usaha kecil dan menengah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	DKIS	160%	98,29%	143,86%	92,41	86,67%
74.		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	DKUKMPP	48,24%	49,62%	37,77%	42,96	51,85%
75.		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	DKUKMPP	19,35%	15,60%	16,036%	15,21	9,71%
76.	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	DPMPTSP	31,32%	443,43%	87,142%	64,53	-35,92%
77.	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	DPOR	23,78%	30,90%	37,08%	0,046	36,12%
78.		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	DPOR	4,50%	5,84%	8,85%	0,046	9,05%
79.		Peningkatan prestasi olahraga	DPOR	-	12	2	10	8
80.	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	DKIS	100%	100%	100%	100	100%
81.		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	DKIS	100%	100%	100%	100	100%
82.	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	DKIS	73%	67,90%	69,61%	65,27	86,66%
83.	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Disnudpar	72,41%	72,41%	74,13%	77,58	75,71%
84.	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dispusip	1 org/jam/hari	1 org/jam/hari	100%	100	71,1%
85.	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Dispusip	201,46	40,59%	23,18%	43,22	95,37%
86.	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	Dispusip	75%	48,08%	58,41%	59,94	25,52%
87.	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Dispusip	33,33%	47,92%	47,92%	47,92	33,33%
88.	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP	DKP3	6.210 ton	27,84%	1.397.062	172,27	182,44%
89.	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Disbudpar	-76%	283,61%	56,145%	-59,37	-28,71%
90.		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Disbudpar	-28%	283,61%	17,03%	9,67	-12,73%
91.		Tingkat hunian akomodasi	Disbudpar	29,445%	29,38%	44,92%	44,92	44,81%
92.		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Disbudpar	7,51%	1,875	21,3923%	8,22	8,22%
93.		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Disbudpar	Rp 53.574.214,0	14,05	15300000 000	43,33	43,58%



No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Sumber Data	2020	2021	2022	2023	2024
				76				
94.	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun	DKP3	552%	549,95%	550%	5,13	6,34%
95.		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	DKP3	-100%	0	1	-100	-50%
96.	Kehutanan	Bukan Urusan Pilihan (BUP)	DKP3		0	1	BUP	100%
97.	ESDM	Presentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	BUP		0	1	BUP	100%
98.	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	DKUMKMPP	94,16%	98,28%	89,72%	100	100%
99.		Persentase kinerja realisasi pupuk	DKUMKMPP	81,75%	24,99%	77,12%	47,38	64,89%
100.		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	DKUMKMPP	71,97%	84,25%	79,24%	82,97	75,9%
101.	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	DKUMKMPP	2,58%	7,87%	89,49%	12,06	2,01%
102.		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	DKUMKMPP	-	0	30%	0	3,03%
103.		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	DKUMKMPP	116,67%	10,11%	1,02%	100	100%
104.		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	DKUMKMPP	-	0	0	0	0
105.		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	DKUMKMPP	-	100	100%	0	0
106.		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	DKUMKMPP	-	100	50%	95	125%
107.	Transmigrasi	Bukan Urusan Pilihan (BUP)	BUP		0	BUP	100	100%
108.	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	BPKPD	21,86%	18,02%	1763,327 %	17,67	31,95%
109.		Rasio PAD	BPKPD	1,86%	401.086.1 41.279	2205,949 %	36,55	35,95%
110.		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	BPKPD	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3%
111.		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	BPKPD	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3%
112.		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures	BPKPD	13,03%	112,04	85,76%	88,89	
113.		Opini Laporan Keuangan	BPKPD	WTP	5	8	7	8
114.	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Setda	100%	0	0	0	20,89%
115.		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Setda	4,158	21,2	4,23%	0	83,88%
116.		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Setda	95%	0,17%	20,24%	24,6	65,23%
117.		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Setda	-	-	8,29%	32,8	74,81%
118.	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan	BKPSDM	521,80%	568,30%	690,293%	77,65	65,23%
119.		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	BKPSDM	7,95%	7,65%	9,17%	20,5	74,81%
120.		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan	BKPSDM	252%	86,41%	95,977%	48,18	27,92%
121.	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	BPKPD	12,68%	7,95%	0,79%	2,64	2166%
122.		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	BPKPD	15,93%	22,40%	0,2%	10228	13,91%
123.		Manajemen Aset	BPKPD	Ya	3	100%	4	4
124.		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	BPKPD	2,85%	3,13%	430,98%	7,12	5,22%
125.	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	BPKPD	99,08%	100%	58,04%		0
126.		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	BPKPD	63,64%	100%	100%	100	0

Sumber:LPPD Kota Cirebon



2.1.6 Aspek Pemenuhan Pelayanan Dasar

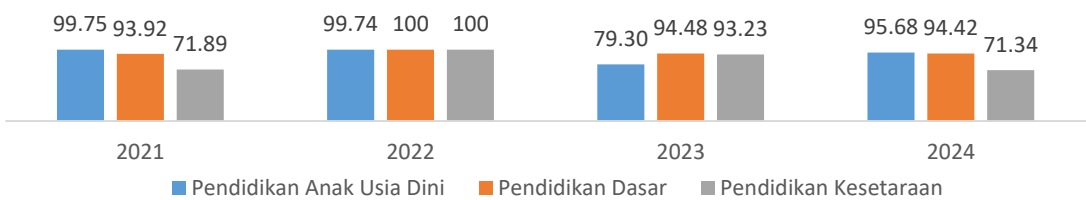
Berikut ini kondisi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Cirebon yang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Target yang akan dicapai harus disesuaikan dengan data penduduk yang tidak mampu sehingga kebutuhan dasar untuk hidup dapat terpenuhi untuk didukung oleh negara.

2.1.6.1 SPM Bidang Pendidikan

Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada antara lain tingkat partisipasi sekolah, HLS, RLS, ketersediaan sarana dan prasarana serta tingkat pendidikan.

Capaian Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar tingkat Kota Cirebon ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Aspek pelayanan minimal untuk pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

- 1. Pendidikan Dasar, yaitu jumlah warga negara usia 7–15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs);
- 2. Pendidikan Kesetaraan, yaitu jumlah warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang partisipasi dalam pendidikan kesetaraan; dan
- 3. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu jumlah warga negara usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).



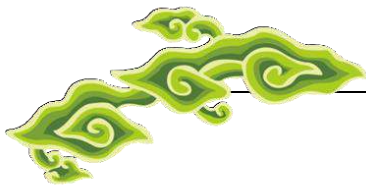
Gambar 2.76 Capaian SPM Bidang Pendidikan (%)

Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

2.1.6.2 SPM Bidang Kesehatan

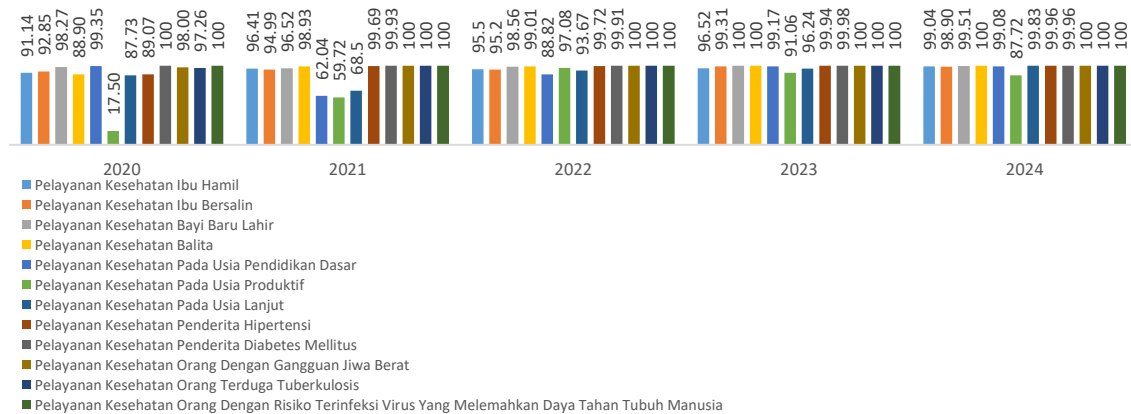
Untuk pelayanan kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2020 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan, untuk skala Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu:

- 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;



- 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- 4. Pelayanan Kesehatan Balita;
- 5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
- 8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
- 9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus;
- 10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Penentuan program prioritas bidang kesehatan dengan mempertimbangkan keterbatasan alokasi dana dan urgensi yang diformulasikan ke dalam arah dan kebijakan, dimana di dalamnya terdiri dari tujuan pelaksanaan program, sasaran yang hendak dicapai, dan indikator pencapaian yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan program. Berikut ini adalah pencapaian SPM Pemerintah Kota Cirebon.



Gambar 2.77 Capaian SPM Bidang Kesehatan (%)

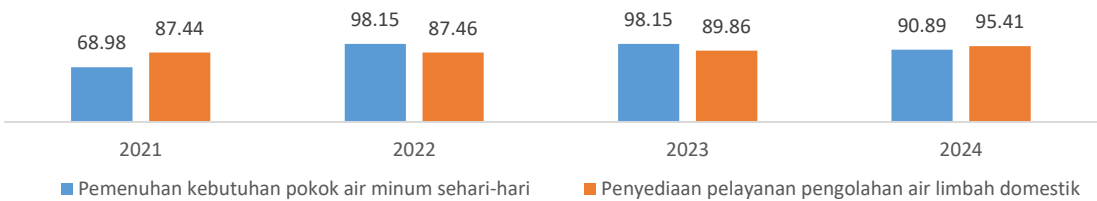
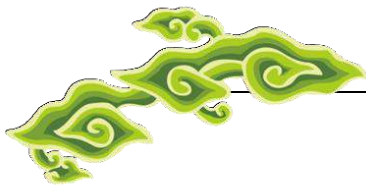
Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

2.1.6.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dalam rangka pelayanan penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar dalam bagi Bidang Urusan Pekerjaan Umum yaitu:

- 1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- 2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dalam memberikan SPM bidang urusan Pekerjaan Umum dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan dalam bentuk persentase adalah sebagai berikut:



Gambar 2.78 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%)

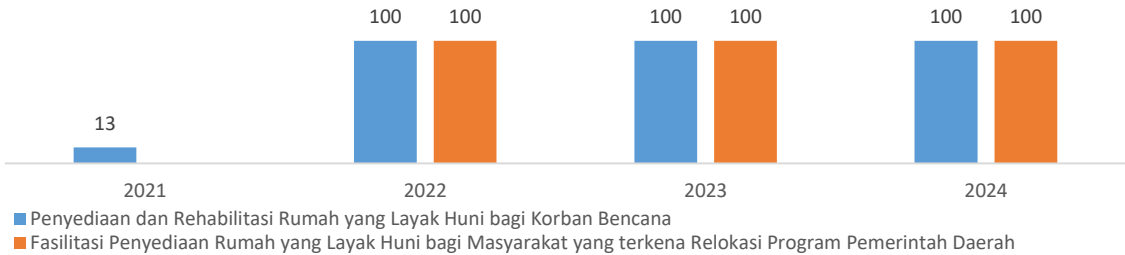
Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

2.1.6.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Pelayanan dasar terkait Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengacu pada Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 63 tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan yaitu:

- 1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana
- 2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah.

Target tahunan untuk capaian target SPM Perumahan di Kota Cirebon yang telah ditetapkan hanya sampai dengan akhir tahun 2015 sesuai Peraturan Wali Kota Cirebon No. 37 tahun 2013. sedangkan target tahunan untuk tahun 2021 ini ditetapkan berdasarkan simulasi pencapaian target SPM Perumahan hingga tahun 2025.

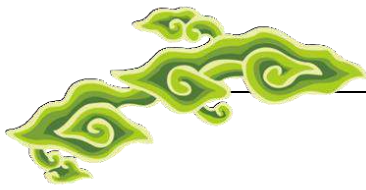


Gambar 2.79 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

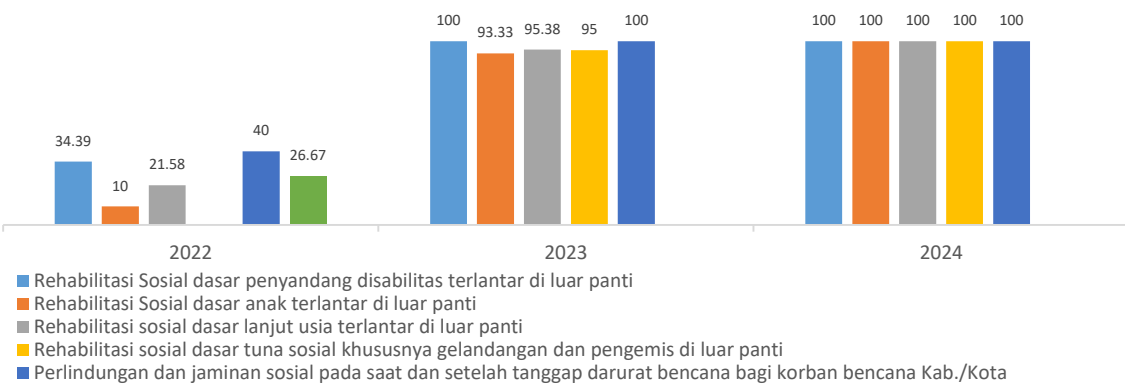
2.1.6.5 SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Linmas

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.02 tahun 2018 tentang SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, dalam bidang Ketentraman,



Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk skala Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu:

1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran;
2. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pelayanan informasi rawan bencana;
4. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
7. Yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban;
8. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; dan
9. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana.

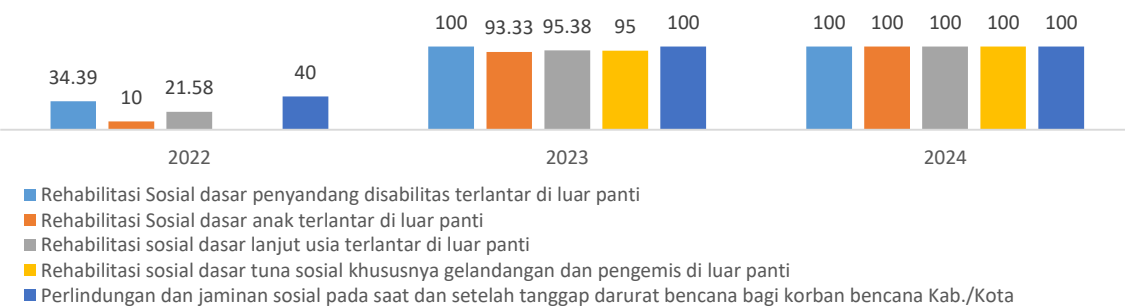


Gambar 2.80 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas

Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

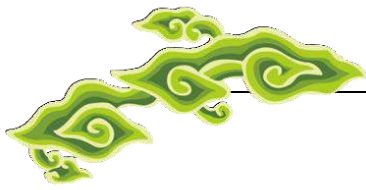
2.1.6.6 SPM Bidang Sosial

Pencapaian SPM Bidang Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan juga telah diturunkan dalam Peraturan Walikota Cirebon Nomor 36 tahun 2013 tentang SPM Bidang Sosial Di Kota Cirebon dan pelayanan dasar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 tentang SPM dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar, yaitu:



Gambar 2.81 Capaian SPM Bidang Sosial (%)

Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id



2.1.7 Aspek Kerja Sama Daerah

Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan pihak lain baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya dalam penyediaan infrastruktur dapat menjadi sumber pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk mendanai pelaksanaan pembangunan. Kota Cirebon telah menjalin kerjasama cukup lama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk pengadaan air bersih. Pada sektor pendidikan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berada di sekitar wilayah Kota Cirebon.

Wacana kerjasama pembangunan TPPAS (Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah) Regional di Ciwaringin Cirebon yang telah disepakati pada 13 Desember 2017 oleh Gubernur Jawa Barat beserta Kepala Daerah Kabupaten/Kota wilayah sekitar masih dalam proses. Selanjutnya untuk kerjasama Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan pihak lain dapat dikembangkan potensi jenis kerjasama selain dari kerjasama yang sudah pernah dilakukan.

Tabel 2.38 Perjanjian Kerja Sama Pemda Kota Cirebon dengan Pihak lain

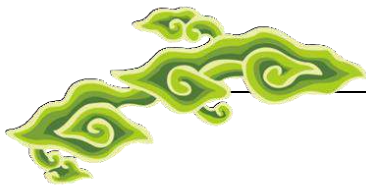
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kerja Sama	28	71	52	12	5

Sumber: Setda Kota Cirebon, 2025

2.1.8 Aspek Kinerja Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) adalah badan usaha milik daerah yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya dibentuk dengan Peraturan Daerah. Perumda didirikan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat. Perumda juga bertujuan untuk menunjang pembangunan daerah, meningkatkan kualitas usaha dan pasar, serta memperkuat lembaga-lembaga ekonomi masyarakat. Tujuan spesifik pendirian Perumda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan kualitas layanan publik, melayani kebutuhan masyarakat dan industri. Diharapkan Perumda dapat memberikan kontribusi terhadap pendanaan untuk pembangunan daerah, namun diperlukan kajian terhadap risiko eksistensi Perumda di Kota Cirebon.

Kota Cirebon memiliki lima perusahaan daerah, yaitu (1) Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon; (2) Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon; (3) Perumda Farmasi Ciremai Kota Cirebon; (4) Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon; (5) Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon. Selanjutnya disajikan gambaran kinerja Perumda Kota Cirebon.



2.1.8.1 Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon

Bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon yaitu penyediaan, pengolahan dan pendistribusian air bersih bagi penduduk Kota Cirebon dan sekitarnya. Hal ini merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduknya sebagai salah satu SPM yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Berikut data kondisi PDAM Tirta Giri Nata dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.39 Data Kepegawaian

No.	Status Pegawai (orang)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pegawai Tetap	161	175	168	169	158
2	Calon Pegawai	21	8	11	2	58
3	Honor Harian Tetap	10	9	8	7	11
4	Honor Tidak Tetap	0	2	0	0	0
5	Tenaga Kontrak	7	8	65	63	1
Jumlah		199	202	252	241	228

Sumber : LKPJ Kota Cirebon

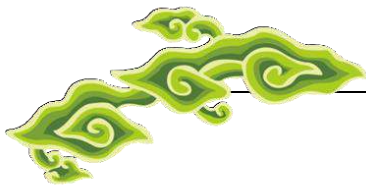
Tabel 2.40 Data Pelanggan

No.	Jenis Pelanggan	2020	2021	2022
1	Kelompok I	786	679	672
2	Kelompok II	19.528	19.152	19.137
3	Kelompok III	37.499	37.598	37.627
4	Kelompok IV	110	113	111
Jumlah		57.923	57.542	57.547

Sumber : LKPJ Kota Cirebon

Jumlah produksi air yang dihasilkan pada tahun 2021 sebesar $\pm 30.313.165 \text{ m}^3$ mencapai tingkat 104,17% dari kapasitas produksi terpasang $29.100.000 \text{ m}^3$.

Jumlah air yang dapat didistribusikan pada tahun 2021 sebesar $\pm 27.928.293 \text{ m}^3$ mencapai tingkat 105,39% dari jumlah distribusi air $26.500.000 \text{ m}^3$. Terdiri dari penjualan air sebesar $16.408.147 \text{ m}^3$ dan Non Rekening sebesar 98.533 m^3 dan kehilangan air sebesar $11.421.613 \text{ m}^3$.



Tingkat kehilangan air pada tahun 2021 sebesar 40,90% lebih tinggi dari standar kehilangan air nasional yaitu 20% dan lebih tinggi dari yang ditargetkan pada RKAP Perubahan tahun 2021 yaitu sebesar 31,83%.

Suplai dan tekanan air serta pemakaian air pada beberapa wilayah belum merata mendapat suplai air 24 jam per hari karena tekanan air masih di bawah standar pelayanan sehingga diperlukan pengaturan tekanan dan upaya-upaya penanggulangan kehilangan air lebih intensif lagi.

Investasi Perusahaan tahun 2021 sebesar Rp 7.981.648.969,94 atau 39,31% dari yang dianggarkan pada RKAP Perubahan tahun 2021 sebesar Rp 20.302.528.840,00.

Sedangkan investasi dalam proses yang berkaitan dengan investasi untuk program pengembangan SPAM yang telah terealisasi pada tahun 2021 sebesar Rp 999.278.604,26 atau 0,95% dari RKAP Perubahan 2021 sebesar Rp 104.843.899.000,00.

Tabel 2.41 Data Keuangan

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
Aset (Rp.)	79.592.401.155	87.349.594.373	83.452.061.545	178.065.309.753	185.079.363.031
Hutang (Rp.)	29.229.760.609	32.604.357.418	29.438.913.078	31.641.819.563	30.207.208.199
Laba (Rp.)	6.345.109.073	402.432.184	6.215.339.751	10.271.362.152	12.611.481.932
Ekuitas	50.362.640.546	54.745.236.953	56.431.908.163	146.423.490.191	154.872.154.832
ROA %	7,97	0,46	7,45	5,77	6,81

Sumber : LKPJ Kota Cirebon

*Belum di audit

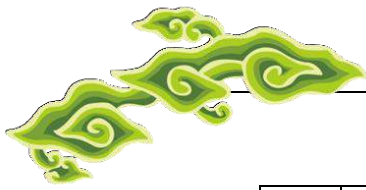
2.1.8.2 Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon

Perumda BPR Bank Cirebon merupakan satu-satunya Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kota Cirebon yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat yang kelebihan dana (*surplus spending units*) dengan masyarakat yang kekurangan dana (*deficits spending units*). Kegiatan utama perusahaan adalah :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk tabungan-tabungan (tabungan pasar-pasar, tabungan umum, tabungan debitur, tabungan simpati dan tabungan anak sekolah serta tabunganku) dan deposito berjangka (dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan).
- b. Menyalurkan dana melalui kredit yang diberikan (kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif).

Tabel 2.42 Data Kepegawaian

No.	Status Pegawai (orang)	2021	2022	2023	2024
1	Pegawai Tetap	77	77	74	56
2	Tenaga Kontrak	9	9	7	2
Jumlah Pegawai		86	86	83	58



No.	Jabatan	2021	2022	2023	2024
1	Kepala Satuan Pengawas Intern	1	1	1	1
2	Kepala Bagian	3	3	3	3
3	PE Kepatuhan/Menrisk/APU-PPT	1	1	1	-
4	Satuan Pengawas Intern	1	1	1	1
5	Kepala Seksi	12	12	13	11
6	Staf	68	68	63	40
	Jumlah	86	86	82	56

Sumber : LKPJ Kota Cirebon

Tabel 2.43 Data Keuangan

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Aset (Rp.)	241.360.622.157	251.818.899.946	261.676.276.502	255.831.519.424	149.589.548.368
Hutang (Rp.)	214.398.326.218	224.055.373.606	231.798.835.816	228.577.911.374	185.217.567.015
Laba (Rp.)	3.070.270.336	1.202.933.560	1.063.608.366	-843.082.828	-8.430.828.226
Ekuitas	26.962.295.938	27.763.526.340	29.877.440.685	231.839.990.836	-35.628.018.648
ROA %	1,27%	0,48%	0,41%	-0,33%	-5,64%
CAR (KPM)		16,60%	23,79%		
KAP		6,71%	6,37%		
NPL (Bruto)		8,76%	8,38%		
NPL (Net)		2,94%	3,28%		
PPAP		100,00%	100%		
BOPO		95,76%	95,75%		
Cash Ratio (CR)		14,89%	23,97%		
Loan Debt Ratio (LDR)		81,99%	84,59%		

Sumber : LKPJ Kota Cirebon

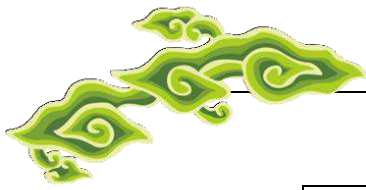
2.1.8.3 Perumda Farmasi Ciremai Kota Cirebon

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon, memiliki lapangan usaha perusahaan, yang terdiri-dari :

- 1. Unit Apotek Ciremai
- 2. Unit Pedagang Besar Farmasi (PBF)
- 3. Unit Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
- 4. Unit Laboratorium Klinik Ciremai; dan
- 5. Unit Usaha Lain di Bidang Farmasi

Tabel 2.44 Data Kepegawaian

No.	Status Pegawai (orang)	2021	2022	2023	2024
1	Direktur	1	1	1	1
2	Pegawai Tetap	18	16	13	11



3	Tenaga Kontrak	-	4	9	4
No.	Pendidikan	2021	2022	2023	2024
1	S1	3 orang	5 orang	6 orang	5 orang
2	D3/D4	2 orang	3 orang	2 orang	3 orang
3	D1	4 orang	4 orang	3 orang	4 orang
4	SMF	3 orang	3 orang	4 orang	3 orang
5	SLTA	6 orang	6 orang	8 orang	6 orang
Total		18 orang	21orang	23orang	21orang

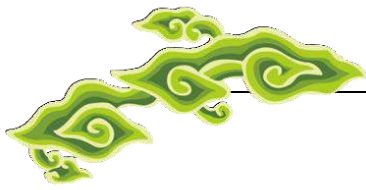
Sumber : LKPJ Kota Cirebon

Aset Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Siliwangi No. 171 Cirebon dengan luas tanah 1.139 m² dan luas bangunan 926 m². Secara administrasi pada bulan Desember tahun 2019 Aset Tanah dan Bangunan telah menjadi kekayaan perusahaan dengan bukti-bukti yang sah atas penguasaan dan pemilikan Aset tersebut. Pemanfaatan bangunan tersebut digunakan untuk :

1. Ruang Pelayanan (Apotek, Gudang Apotek dan Ruang Tunggu Pasien);
2. Ruang Praktek Dokter;
3. Ruang Laboratorium;
4. Ruang Pedagang Besar Farmasi dan Gudang;
5. Ruang Direktur dan Staf; dan
6. Tempat Parkir.

Lapangan usaha perusahaan tersebut di atas belum seluruhnya berjalan secara efektif sehingga sangat diperlukan kerja keras dan kerja cerdas serta dukungan dari pemerintah Kota Cirebon. Apotek merupakan unit usaha utama perusahaan yang melakukan penjualan obat melalui Penjualan Obat Bebas dan Resep Dokter, Hasil penjualan obat melalui Resep Dokter sebagai pendapatan apotek secara keseluruhan pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 89,95%, pada tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 75,67%. Disamping melayani secara tunai, penjualan obat juga dilakukan secara non-tunai bagi perusahaan/instansi yang sudah bekerjasama antara lain:

1. Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon;
2. Bank BJB;
3. Yakes Telkom;
4. OJK;
5. BPJS.



Unit Usaha PBF sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 mengalami kerugian sehingga Unit PBF tidak beroperasi lagi dan pemberhentian Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Unit usaha ini beroperasi tidak maksimal dikarenakan terbentur masalah perijinan dari Kementerian Kesehatan RI yang tidak dapat diproses disebabkan persyaratan tidak dapat dipenuhi yaitu bahwa untuk mendapatkan ijin PAK badan usaha harus berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.Oleh sebab itu kerjasama dengan pihak ketiga maupun penjualan alat kesehatan sangat terbatas sekali. Selama tahun 2021 penjualan alat kesehatan terbatas alat kesehatan tertentu saja dan itupun penjualannya atas nama Apotek Ciremai. Adapun sasaran penjualan alat kesehatan yang sudah dilakukan yaitu kepada Puskesmas-Puskesmas yang ada di Kota Cirebon dan beberapa Puskesmas yang ada di Kabupaten Cirebon.

Untuk unit Laboratorium Klinik Ciremai pada tanggal 13 September 2021 sudah mulai beroperasi kembali meskipun Perumda Farmasi Ciremai Kota Cirebon hanya bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

Tabel 2.45 Data Keuangan

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Aset (Rp.)	682.489.194	802.073.739	18.384.593.584	18.334.546.852	17.874.333.322
Hutang (Rp.)	392.750.156	835.008.207	1.012.376.471	978.235.470	1.038.130.765
Laba (Rp.)	-21.298.500	- 324.019.615	361.918.942	-868.110.921	-587.705.889
Equitas	289.739.038	-32.935.423	17.372.217.113	17.356.311.382	16.836.202.557
ROA %	-3,12%	-40,40%	1,97%	-4,73%	-3,29%

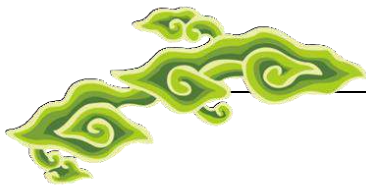
Sumber : LKPJ Kota Cirebon

2.1.8.4 PD. Pembangunan Kota Cirebon

Bidang usaha PD. Pembangunan meliputi area pedayahgunaan lahan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Cirebon seperti pemanfaatan lahan dengan bekerja sama dengan pihak lain (mitra usaha) dan penyewaan tanah ataupun bangunan. PD. Pembangunan menempati kantor seluas ±1.280 m² di jalan siliwangi no.13 Kota Cirebon. Kerjasama dengan mitra usaha yang dilaksanakan adalah pembangunan perumahan, dimana PD Pembangunan menyediakan lahan/tanahnya dan mitra usaha membangun perumahannya. Kerjasama penyediaan perumahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan dan juga penyerapan tenaga kerja.

Beberapa ikatan kerjasama PD. Pembangunan dinilai memiliki modal terlalu rendah dari total kerjasama dengan mitra usaha. Selain itu, intensifikasi pendapatan sewa yang tengah dilaksanakan meski pelaksanaan pembangunan perumahan dilakukan oleh perusahaan atau investor.

penetapan peruntukan dalam bisnis tanah tersebut mempertimbangkan tujuan yang diamanatkan dalam peraturan



perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan, mempertimbangkan pendapatan dan risiko, kepentingan masyarakat/ sosial dan pertimbangan lainnya yang menyertai keputusan bisnis tersebut.

Tabel 2.46 Data Kepegawaian

NO	JABATAN	2021	2022	2024
1	Pegawai Tetap	26	25	22
2	Kontrak	11	13	18
3	Magang	2	2	-
Total		39	40	40

Sumber : LKPJ Kota Cirebon

Tabel 2.47 Data Keuangan

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Aset (Rp.)	23.105.569.367	24.704.515.505	32.619.274.332	37.803.246.175	31.762.776.700
Hutang (Rp.)	8.420.116.604	9.516.414.251	10.868.693.113	12.093.924.100	14.935.412.096
Laba (Rp.)	1.031.480.082	985.578.104	6.987.395.804	8.302.861.729	-6.751.902.595
Ekuitas	14.685.452.763	15.188.201.254	21.750.581.219	25.709.322.075	16.836.202.557
ROA %	4,46%	3,99%	21,42%	21,96%	-21,26%

Sumber : LKPJ Kota Cirebon

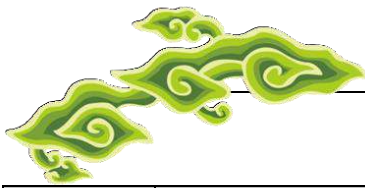
2.1.8.5 Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon

Kegiatan Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon bergerak dalam bidang usaha pengelolaan sarana prasarana berupa bangunan pasar, toko, kios, los dasaran dan lain-lain serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang perpasaran berupa penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan keindahan serta pemeliharaan bangunan-bangunan pasar dan lain-lain. Pasar di Kota Cirebon yang dikelola oleh Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon adalah:

- 1. Pasar Pagi
- 2. Pasar Kramat
- 3. Balong Indah Plaza (Balinza)
- 4. Pasar Kanoman
- 5. Pasar Drajat
- 6. Pasar Jagasatru
- 7. Pusat Perdagangan Harjamukti (PPH)
- 8. Pasar Perumnas
- 9. Pasar Gunungsari
- 10. Pasar Kesepuhan/Besi

Table 2.60 Data Keuangan

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Aset (Rp.)	27.442.422.978,03	22.170.115.532,30	20.012.968.749	18.662.000.370	16.613.050.144
Hutang (Rp.)	20.996.245.544,20	16.087.665.174,77	13.432.168.101	11.773.823.205	9.661.705.842
Laba (Rp.)	669.347.113,10	43.538.542,82	475.261.091	719.997.465	883.329.852
Ekuitas	1.734.872.498,00	1.734.872.498,00	1.734.872.498	6.899.530.965	6.951.344.302



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
ROA %	0,02	0,00	2,37%	3,86%	5,32%

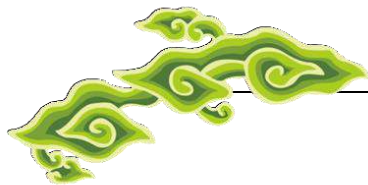
Sumber : LKPJ Kota Cirebon

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan Daerah menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sementara Analisis Keuangan Daerah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 156 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah serta Kapasitas riil keuangan Daerah serta diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Kondisi keuangan daerah sebagaimana dijelaskan di atas, digambarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah. APBD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
- b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.



- e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan.

Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Dan upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Cirebon dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

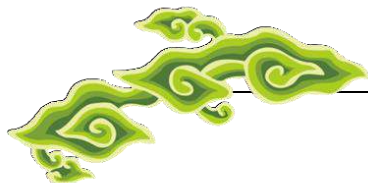
Kinerja dan kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah selama periode RPJMD sebelumnya dapat tercermin dari realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai kebutuhan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

2.2.1 Realisasi APBD

Realisasi APBD merupakan pencapaian atau implementasi dari rencana keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD. Untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah perlu ada perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan.

2.2.1.1 Capaian Kinerja Keuangan

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka APBD. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan.



Untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Gambaran kinerja keuangan daerah Kota Cirebon secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2023 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan Perubahan APBD tahun Anggaran 2024, pasca adanya perubahan akibat dikeluarkannya kebijakan keuangan daerah. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Perkiraan proyeksi selama 5 tahun ke depan menggunakan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah.

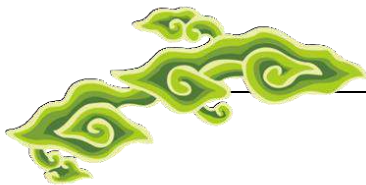
Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun, maka komponen APBD terdiri atas:

- 1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- 2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; dan
- 3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berjalan.

Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

2.2.1.2 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja dan kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah selama periode RPJMD sebelumnya dapat tercermin dari realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai kebutuhan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.



2.2.1.3 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, dengan kekayaannya tersebut pemerintah daerah membuat program dan kegiatan untuk menjawab kebutuhan pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam permasalahan dan isu strategis baik jangka pendek/tahunan maupun jangka menengah.

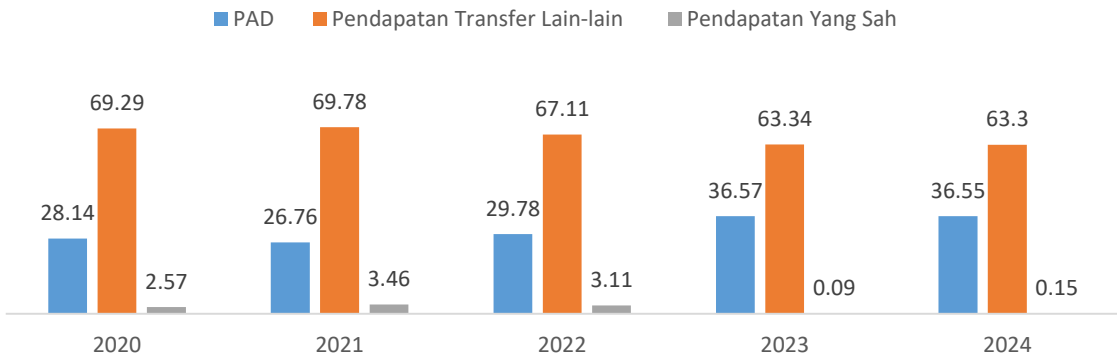
Dari tahun 2019-2024, total akumulasi target Pendapatan Daerah Kota Cirebon yaitu sebesar Rp. 9,013 triliun dengan akumulasi realisasi sebesar Rp. 7,458 triliun atau 93,19 persen. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.61 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cirebon

Tahun	Pendapatan	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
2019	1.543.026.589.244	434.208.148.078	1.069.201.519.166	39.616.922.000
2020	1.633.922.078.236	437.212.356.611	1.140.141.743.749	56.567.977.876
2021	1.346.961.959.551	401.086.141.279	903.950.858.272	41.924.960.000
2022	1.477.506.731.354	540.343.015.082	935.824.150.272	1.339.566.000
2023	1.457.195.241.975	532.649.747.319	922.411.391.491	2.130.000.000
2024	1.554.932.852.016	559.128.776.388	991.867.548.844	3.936.526.784
Rata-Rata Pertumbuhan	-0,84	6,43	-3	-5,22

Sumber = LRA Kota Cirebon tahun 2019-2024

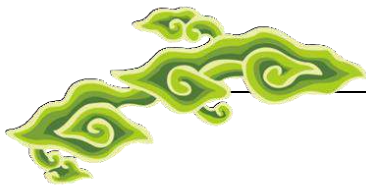
Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Cirebon pada periode tahun 2019-2024 mengalami perlambatan sebesar minus 0,84 persen. PAD mengalami rata- rata pertumbuhan sebesar 6,43 persen, sementara Pendapatan Transfer serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah menunjukkan rata-rata perlambatan sebesar minus 3,00 persen dan minus 5,22 persen.



Gambar 2.82 Proporsi Pendapatan Daerah Kota Cirebon

Sumber : LRA Kota Cirebon tahun 2019-2024

Pada periode 2020-2024 sebagaimana Grafik di atas, Pendapatan Daerah Kota Cirebon terbesar bersumber dari Pendapatan Transfer dengan lebih dari 60 persen. Sedangkan proporsi PAD berada pada kisaran 28 - 37 persen, yaitu 28,14 persen pada tahun 2020 dan 36,55 persen pada tahun 2024.



Selama lima tahun, target Pendapatan Daerah yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD sudah dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini terlihat dari data realisasi yang dapat diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2022 dan 2023 mencapai lebih dari 96 persen. Berikut merupakan data target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Cirebon tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 secara rinci dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2.62 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cirebon

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Selisih
1	2019	1.670.947.134.450,00	1.543.026.589.244,00	92,34	(127.920.545.206)
2	2020	1.690.836.799.865,00	1.633.922.078.236,00	96,63	(56.914.721.629)
3	2021	1.610.668.038.477,00	1.346.961.959.551,00	83,63	(263.706.078.926)
4	2022	1.534.219.728.177,00	1.477.506.731.354,00	96,30	(56.712.996.823)
5	2023	1.497.346.698.859,00	1.457.195.241.975,00	97,31	(40.151.456.884)
6	2024	1.637.782.303.140,00	1.554.932.852.016,00	94,94	(82.849.451.124)

Sumber : diolah dari LRA Pemerintah Kota Cirebon

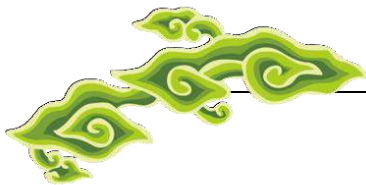
Cukup tingginya pencapaian target Pendapatan Daerah dapat dilihat dari dua hal, bahwa kinerja pengelola Pendapatan Daerah sudah baik sehingga dapat merealisasikan target yang ditetapkan, selain itu rencana Pendapatan Daerah yang ditetapkan masih terlalu rendah sehingga sangat mudah bagi pengelola Pendapatan Daerah untuk merealisasikannya. Berdasarkan dua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelola Pendapatan Daerah perlu diberikan tantangan berupa target Pendapatan Daerah yang lebih tinggi di masa mendatang.

Struktur Pendapatan Daerah, berdasarkan peraturan yang berlaku terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Pendapatan Transfer, yaitu transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Tranfer pemerintah pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Sementara transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu dari pendapatan hibah, dana darurat, serta lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.3.1 Pendapatan Asli Daerah

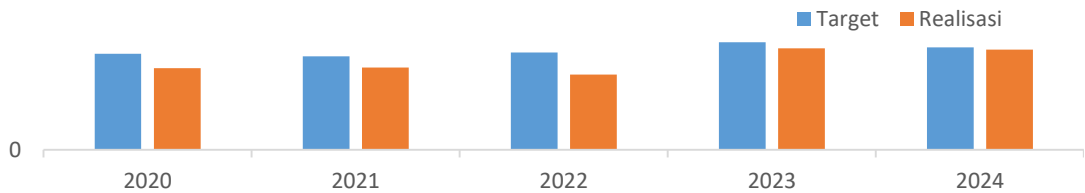
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.



Peningkatan PAD merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*), dan melaksanakan pembangunan (*development function*).

Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diberikan kewenangan antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah.

Pada tahun 2019 target PAD Kota Cirebon sebesar Rp. 510,852 milyar terealisasi sebesar Rp. 434,208 milyar atau 85,00 persen. Selanjutnya target dan realisasi PAD Kota Cirebon menurun pada tahun 2020 dari target sebesar Rp. 497,946 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 437,212 milyar atau 87,80 persen kemudian meningkat kembali di tahun 2021 dari target sebesar Rp. 517,307 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 401,086 milyar atau 77,53 persen. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada grafik berikut.



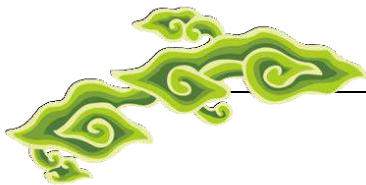
Gambar 2.83 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Sumber : LRA Kota Cirebon tahun 2019-2024

PAD Kota Cirebon terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selama tahun 2019-2024, alokasi realisasi PAD terbesar berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu sebesar 57,64 persen, kemudian disusul oleh pajak daerah sebesar 39,08 persen, kemudian retribusi daerah sebesar 2,30 persen dan alokasi paling kecil berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu sebesar 1,20 persen.

Tabel 2.63 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Jumlah
2019	187.970.567.869	11.082.898.549	4.501.629.676	230.653.051.984	434.208.148.078
2020	153.928.723.961	9.971.513.081	5.158.642.121	268.153.477.448	437.212.356.611
2021	164.895.032.591	10.057.960.722	6.856.419.363	219.276.728.603	401.086.141.279



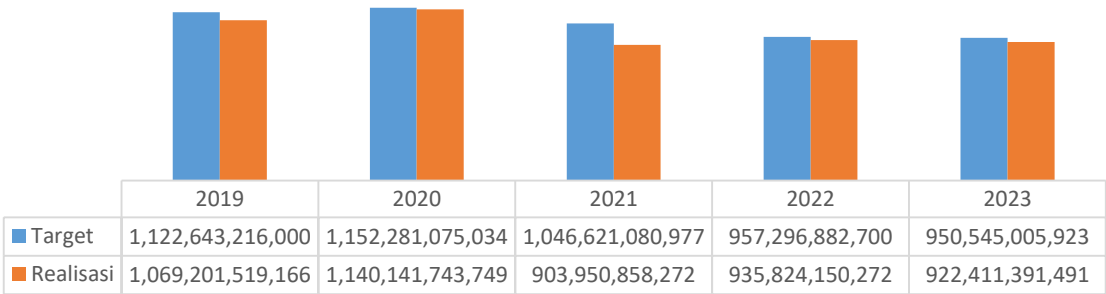
Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Jumlah
2022	191.999.856.661	11.335.203.103	4.860.296.914	332.147.658.404	540.343.015.082
2023	217.861.895.888	11.408.967.314	6.850.064.199	296.532.923.083	532.653.850.484
2024	226.058.293.884	317.148.358.456	8.570.399.813	7.351.724.235	559.128.776.388
Rata-rata Alokasi	39,08	2,3	1,2	57,42	100

Sumber : LRA Kota Cirebon tahun 2019-2024

Alokasi lain-lain pendapatan asli daerah sebagaimana pada Tabel II-62 di atas, terbesar berasal dari Pendapatan Badan Layanan Umum daerah (BLUD) Rumah Sakit Gunung Jati. Sementara untuk pajak daerah lebih dari 50 persen berasal dari pajak restoran, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sisanya tersebar ke beberapa sektor pajak daerah lainnya. Sementara untuk retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdistribusi cukup merata dan tidak terlalu signifikan berkontribusi terhadap PAD.

2.2.1.3.2 Pendapatan Transfer

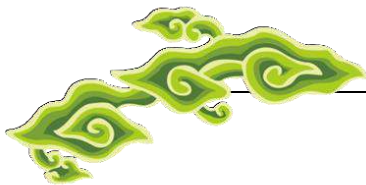
Pada tahun 2019 Pendapatan Transfer Kota Cirebon dari target sebesar Rp. 1,122 Triliun terealisasi sebesar Rp. 1,069 triliun atau 95,24 persen, di tahun 2020 realisasinya meningkat menjadi sebesar 98,95 persen, dan turun kembali di tahun 2021 menjadi sebesar 86,37 persen. Sementara untuk tahun 2022 dan 2023, walau secara besaran target dan realisasi menurun, namun secara prosentase realisasi melebihi 97 persen. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada grafik berikut.



Gambar 2.84 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer

Sumber : LRA Kota Cirebon tahun 2019-2023

Pendapatan Transfer sebagaimana pada Grafik di atas terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat periode tahun 2019-2023 berasal dari Dana Perimbangan, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah. Sementara realisasi pendapatan transfer antar daerah periode tahun 2019-2023 berasal dari pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.



Tabel 2.64 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Alokasi
Transfer Pemerintah Pusat	803.587.681.346	817.506.344.852	781.480.595.484	789.571.543.248	794.770.094.338	872.744.168.801	81,74
Dana Bagi Hasil	57.473.349.170	89.440.938.804	111.251.578.057	89.561.544.764	70.099.657.226	51.836.263.000	8,57
Dana Alokasi Umum (DAU)	593.145.833.000	545.286.189.000	536.524.293.000	531.584.976.683	559.232.958.000	606.158.280.000	56,7
Dana Alokasi Khusus (DAK)	152.968.499.176	182.779.217.048	133.704.724.427	168.425.021.801	165.437.479.112	182.899.823.801	16,47
Dana Insentif Daerah (DID)	22.488.561.000	31.470.454.000	0	27.043.861.000	12.674.059.000	0	1,92
Transfer Pemerintah Provinsi	243.125.276.820	291.164.944.897	122.470.262.788	119.208.746.024	114.967.238.153	119.123.380.043	18,26
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	96.108.159.099	81.172.515.237	86.856.798.502	99.749.759.624	102.377.882.941	103.270.333.234	9,56
Bantuan Keuangan	147.017.117.721	209.992.429.660	35.613.464.286	19.458.986.400	12.589.355.212	15.853.046.809	8,71

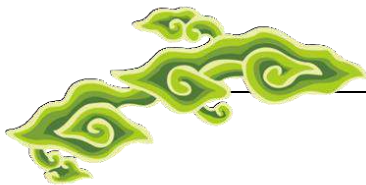
Sumber : LRA Kota Cirebon tahun 2019-2024

Seperti yang dijelaskan pada tabel di atas, Kota Cirebon mendapatkan alokasi DID yang dialokasikan untuk memberikan penghargaan (reward) kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan pemerintahan umum, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang seluruhnya terealisasi 100 persen.

Terlihat pada tabel Proporsi Pendapatan Daerah Kota Cirebon tahun 2019-2024 selama kurun waktu 5 (lima) tahun, lebih dari 60 persen alokasi Pendapatan Daerah Kota Cirebon bersumber dari Pendapatan Transfer, dimana rata-rata alokasi dari Pendapatan Transfer selama 5 (lima) tahun terakhir lebih dari 50 persen bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dimana DAU dialokasikan untuk memenuhi Belanja Gaji dan Tunjangan dari Pusat dan sisanya untuk mengimbangi kesenjangan Fiskal Daerah yang Kebutuhan Fiskalnya lebih besar dari Kapasitas Fiskal atau disebut dengan Celah Fiskal. Celah Fiskal ini dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan daerah sesuai kebutuhan di daerahnya masing-masing.

Namun sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebelumnya diberikan dengan peruntukan sesuai kebutuhan di daerah, mulai tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya tahun Anggaran 2024, diperuntukan alokasi khusus untuk:

- a. penggajian formasi PPPK;
- b. pendanaan Kelurahan;
- c. bidang pendidikan;

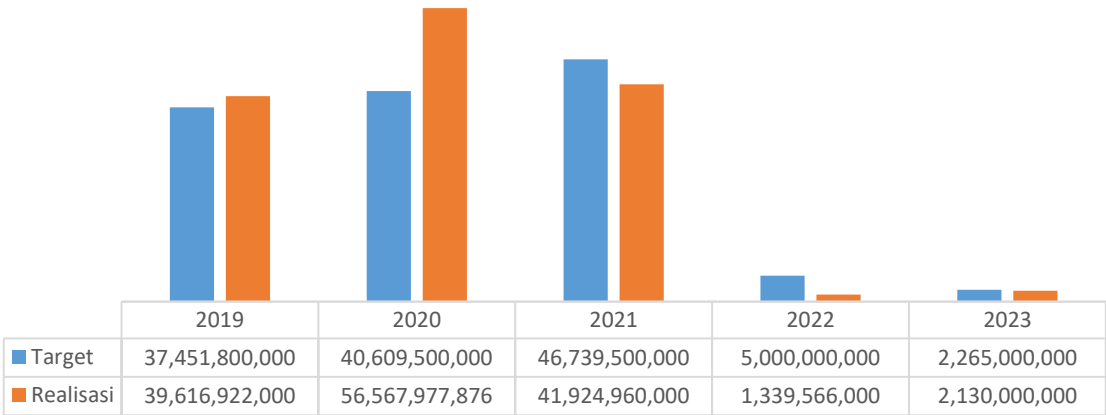


- d. bidang kesehatan; dan
- e. bidang pekerjaan umum.

Implementasi DAU yang alokasinya sudah diperuntukan ini terus berlangsung sampai dengan APBD tahun berikutnya.

2.2.1.3.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Pada tahun 2019 dari target sebesar Rp. 37,451 milyar terealisasi sebesar Rp. 39,616 milyar atau 105,78 persen. Selanjutnya target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kota Cirebon pada tahun 2020 dengan target sebesar Rp. 40,609 milyar terealisasi sebesar Rp. 56,567 milyar atau 139,30 persen. Sementara tahun 2021 dari target sebesar Rp. 46,739 milyar terealisasi sebesar Rp. 41,924 milyar atau 89,70 persen.

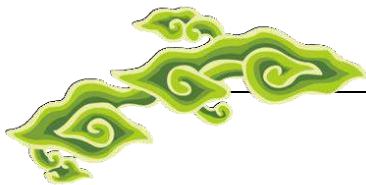


Gambar 2.85 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Sumber : LRA Kota Cirebon tahun 2019-2023

Tabel Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebagaimana terdiri atas pendapatan hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Tidak ada realisasi pendapatan hibah selama kurun waktu tahun 2019-2020, sementara tahun 2021 - 2023 terdapat realisasi sebesar Rp5.806.566.000,00. Komponen lainnya yaitu Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pada tahun 2019-2023 terdapat realisasi sebesar Rp 135.772.859.876,00.

Tabel 2.65 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Tahun	Pendapatan Hibah	Lain-lain Pendapatan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah
2019	-	39.616.922.000	39.616.922.000
2020	-	56.567.977.876	56.567.977.876
2021	2.337.000.000	39.587.960.000	41.924.960.000
2022	1.339.566.000	0	1.339.566.000
2023	2.130.000.000	0	2.130.000.000



Tahun	Pendapatan Hibah	Lain-lain Pendapatan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah
2024	3.936.526.784	0	3.936.526.784

Sumber : LRA Kota Cirebon tahun 2019-2024

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kota Cirebon tahun 2019-2024 yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, merupakan Hibah Sanitasi dan Hibah Air Minum (Australia). Sementara Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dialokasikan untuk tambahan alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah.

2.2.1.4 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

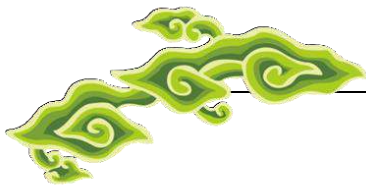
Total akumulasi rencana Belanja Daerah Kota Cirebon tahun 2019-2024 yaitu sebesar Rp. 8,244 triliun dengan akumulasi realisasi sebesar Rp. 7,383 triliun atau 89,55 persen. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada grafik berikut.

Tabel 2.66 Realisasi Belanja Daerah Kota Cirebon

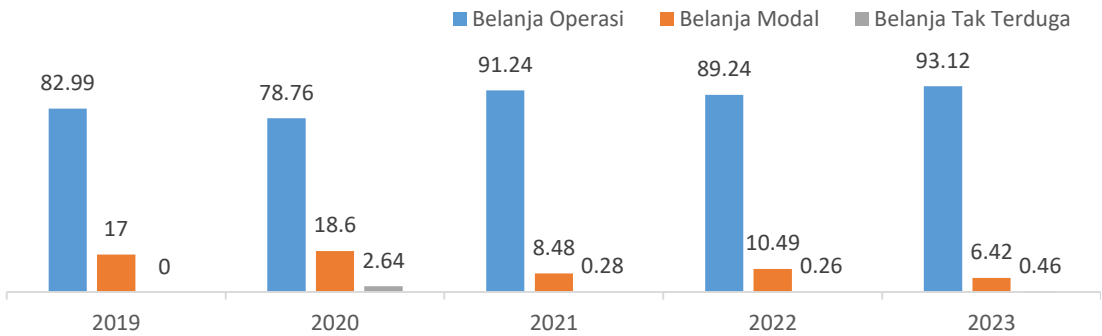
Tahun	Belanja Daerah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga
2019	1.587.295.590.992	1.317.333.551.093	269.915.807.939	46.231.960
2020	1.582.881.804.426	1.246.736.172.464	294.349.725.481	41.795.906.481
2021	1.334.562.609.268	1.217.702.537.368	113.104.657.435	3.755.414.465
2022	1.433.814.101.322	1.279.606.281.288	150.426.743.343	3.781.076.691
2023	1.444.792.084.073	1.345.404.690.783	92.790.771.193	6.596.622.097
2024	1.581.403.559.072	1.448.287.654.155	127.030.325.736	6.085.579.181
Rata-rata Pertumbuhan	-1,94	0,63	-14,46	22.572,23

Sumber : LRA Kota Cirebon tahun 2019-2024

Rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kota Cirebon pada periode tahun 2019- 2024 mengalami perlambatan sebesar minus 1,94 persen. Belanja Operasi mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,63 persen, sementara Belanja Modal rata-rata perlambatan sebesar minus 14,46



persen. Komponen belanja lainnya yaitu Belanja Tak Terduga mengalami rata-rata pertumbuhan yang sangat besar yaitu 22.572,23 persen. Rata-rata pertumbuhan ini terjadi karena lonjakan alokasi yang sangat besar di tahun 2019 ke tahun 2020. Dimana belanja tak terduga ini dialokasikan untuk belanja atas tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 yang terjadi di Kota Cirebon tahun 2020.



Gambar 2.86 Proporsi Belanja Daerah Kota Cirebon
Sumber : LRA Kota Cirebon tahun 2019-2023

Pada grafik Proporsi Belanja Daerah Kota Cirebon, Belanja Daerah Kota Cirebon terbesar bersumber dari Belanja Operasi dengan lebih dari 70 persen. Sedangkan proporsi Belanja Modal berada pada kisaran 6-18 persen. Sementara untuk proporsi Belanja Tak Terduga relative kecil, terbesar hanya pada tahun 2020 sebesar 2,64 persen karena terdapat belanja atas Tanggap darurat bencana pandemi Covid-19.

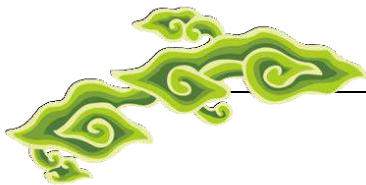
Sementara berdasarkan di bawah menunjukkan target dan realisasi serta capaian kinerja Belanja Daerah Kota Cirebon tahun 2019-2024. Selama lima tahun, target Pendapatan Daerah yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD sudah dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini terlihat dari data realisasi yang dapat diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2022 dan 2023 mencapai lebih dari 96 persen.

Tabel 2.67 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Cirebon

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Selisih
2019	1.739.629.471.092	1.587.295.590.992	91,24	[152.333.880.100]
2020	1.689.345.566.970	1.582.881.804.426	93,7	[106.463.762.544]
2021	1.655.717.079.392	1.334.562.609.268	80,6	[321.154.470.124]
2022	1.576.560.018.375	1.433.814.101.322	90,95	[142.745.917.053]
2023	1.583.114.687.564	1.444.792.084.073	91,26	[138.322.603.491]
2024	1.737.285.680.512	1.581.403.559.072	91,03	[136.611.474.999]

Sumber : LRA Kota Cirebon tahun 2019-2024

Berdasarkan tabel terlihat bahwa dalam lima tahun daya serap Belanja Daerah Kota Cirebon tidak berhasil mencapai 100 persen. Daya serap terendah terjadi pada tahun 2021 dengan 80,60 persen dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan 93,70 persen. Meskipun demikian dalam 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2022 dan 2023 daya serap Belanja Daerah terus meningkat. Belanja Daerah terdiri dari 3 jenis belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

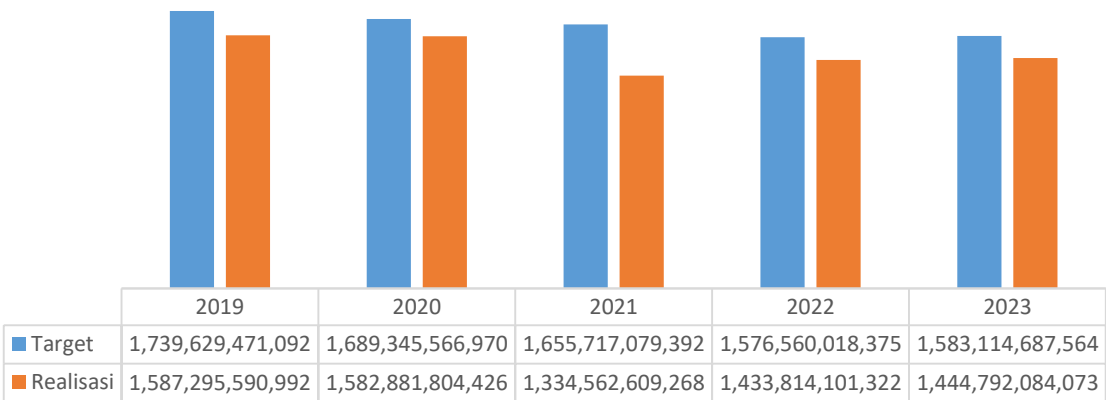


- Belanja Operasi, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- Belanja Modal, yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
- Belanja Tidak Terduga, dan
- Belanja Transfer

2.2.1.4.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. tahun 2019 Belanja Operasi Kota Cirebon dari target sebesar Rp. 1,406 triliun terealisasi sebesar Rp. 1,317 triliun atau 93,64 persen. Selanjutnya target dan realisasi Belanja Operasi Kota Cirebon menurun pada tahun 2020 dari target sebesar Rp. 1,343 triliun terealisasi sebesar Rp. 1,246 triliun atau 92,81 persen, kemudian target dan realisasinya terus menurun dari tahun 2020 di tahun 2021 menjadi sebesar 88,86 persen. Sementara untuk tahun 2022 dan 2023 realisasi belanja operasi terus meningkat

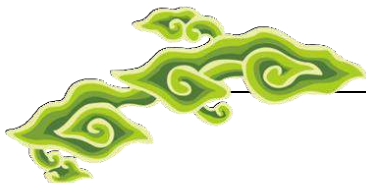
Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Selama kurun waktu tahun 2019-2024, realisasi Belanja Operasi masih didominasi oleh Belanja Pegawai dengan rata-rata alokasi sebesar 51,24 persen serta Belanja Barang dan Jasa sebesar 44,85 persen.



Gambar 2.87 Target dan Realisasi Belanja Operasi
Sumber : LRA Kota Cirebon tahun 2019-2023

Tabel 2.68 Realisasi Belanja Operasi

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Alokasi
Belanja Pegawai	660.622.891.682	649.899.173.688	649.639.116.575	656.158.815.756	666.258.493.164	717.083.685.121	51,24
Belanja Barang dan Jasa	600.326.303.396	541.273.784.740	541.509.414.768	573.126.767.194	617.287.816.179	661.041.786.903	44,85
Belanja Bunga	0	0	0	0	809.375.001	0	0,01
Belanja Subsidi	0	0	0	1.500.000.000	1.350.000.000	1.858.030.479	0,04
Belanja Hibah	52.655.887.215	52.243.034.036	26.554.006.025	48.820.698.338	59.341.506.439	64.194.151.652	3,74
Belanja	2.970.200.000	3.320.180.000	0	0	357.500.000	4.110.000.000	0,1



Bantuan Sosial							
Belanja Bantuan Keuangan	758.268.800	0	0	0	0		0,01
Jumlah	1.317.333.551.093	1.246.736.172.464	1.217.702.537.368	1.279.606.281.288	1.345.404.690.783	1.581.403.559.072	100

Sumber : LRA Kota Cirebon tahun 2019-2024

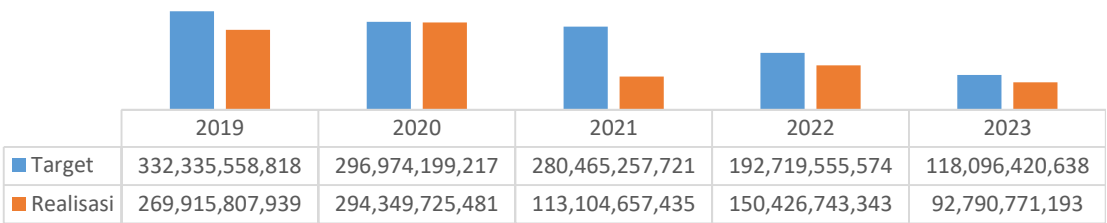
Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Bantuan Hibah berisikan pengeluaran atas Belanja Hibah Kepada Pemerintah serta Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan. Belanja Bantuan Sosial dialokasikan untuk Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga. Sementara Belanja bantuan Keuangan Pada tahun 2019 teralokasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilu Periode 2014-2019.

2.2.1.4.2 Belanja Modal

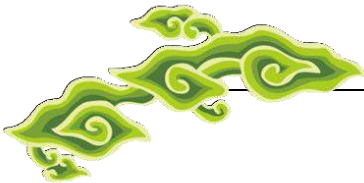
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pada tahun 2019 Belanja Modal Kota Cirebon dari target sebesar Rp. 332,335 milyar terealisasi sebesar Rp. 269,915 milyar atau 81,22 persen. Selanjutnya target Belanja Modal Kota Cirebon menurun pada tahun 2020 dari target sebesar Rp. 296,974 milyar, namun realisasinya meningkat dari tahun 2019 sebesar Rp. 294,349 milyar atau 99,12 persen.

Sementara target dan realisasi belanja modal menurun kembali di tahun 2021 sebesar Rp. 280,465 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 113,104 milyar atau 40,33 persen. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada grafik.



Gambar 2.88 Target dan Realisasi Belanja Modal
Sumber : LRA Kota Cirebon tahun 2019-2023

Belanja Modal terdiri atas belanja tanah, belanja Peralatan dan Mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja Jalan, belanja Irigasi, dan Jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Selama kurun waktu tahun 2019-2024, realisasi Belanja modal sebagaimana Tabel di bawah.



Tabel 2.69 Realisasi Belanja Modal

Uraian	Realisasi Tahun [Rupiah]						Rata-rata Alokasi
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Belanja Tanah	138.070.200	309.742.600	0	0	0	457.500.000	0,05
Belanja Peralatan dan Mesin	95.192.820.539	177.995.373.530	47.093.162.370	83.180.133.918	53.826.260.442	66.965.119.218	49,67
Belanja Gedung dan Bangunan	146.314.990.412	96.173.347.051	58.205.309.931	48.257.931.967	22.024.728.830	35.762073.628	40,3
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	27.577.663.438	19.380.399.600	4.010.301.969	16.273.304.000	12.096.508.000	19.895.322.040	8,62
Belanja Aset Tetap Lainnya	692.263.350	490.862.700	3.795.883.165	2.715.373.458	4.821.551.121	3.950.310.850	1,36
Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0	21.622.800	0	0
Jumlah	269.915.807.939	294.349.725.481	113.104.657.435	150.426.743.343	92.790.771.193	127.030.325.736	100

Sumber : LRA Kota Cirebon tahun 2019-2024

2.2.1.4.3 Belanja Tak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 ayat (1), bahwa Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Selama kurun waktu tahun 2019-2024 Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengalokasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana tabel berikut:

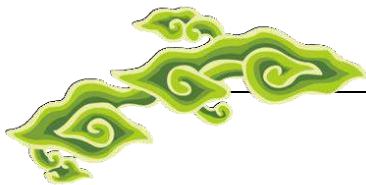
Tabel 2.70 Realisasi Belanja Tidak Terduga

Tahun	Belanja Tak Terduga
2019	46.231.960
2020	41.795.906.481
2021	3.755.414.465
2022	3.781.076.691
2023	6.596.622.097
2024	6.085.579.181

Sumber : LRA Kota Cirebon tahun 2019-2024

Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2019 adalah sebesar Rp46.231.960,00 merupakan belanja atas restitusi Pembayaran Pajak Reklame An. PT Bank BCA Tbk Cabang Cirebon sebesar Rp2.112.500,00, Restitusi Pembayaran BPHTB An. Surya Wijaya QQ PT Indojoya Panpratama sebesar Rp.1.020.300,00 Pengembalian Kelebihan Bayar BPHTB (Restitusi) sebesar Rp. 3.000.000,00 dan Restitusi salah Pembayaran Rekening sebesar Rp. 40.099.160,00.

Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2020 adalah sebesar Rp. 41.795.906.481,00, belanja tersebut merupakan belanja atas tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 yang terjadi di Kota Cirebon kepada OPD tertentu. Sementara realisasi Belanja tidak terduga tahun 2021 adalah sebesar Rp 3.755.414.465,00 digunakan sama seperti Belanja



Tidak Terduga tahun 2020 yaitu untuk Tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 namun besarnya berkurang dari tahun 2020 karena menurunnya intensitas pandemi Covid-19 yang terjadi di Kota Cirebon.

2.2.1.4.4 Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

Tabel 2.71 Realisasi Belanja Wajib dan Mengikat

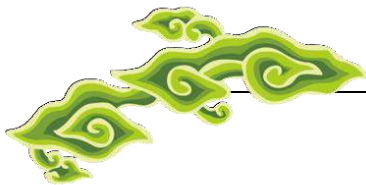
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA OPERASI						
Gaji dan Tunjangan	334.746.171.671	336.755.501.072	319.680.567.963	314.925.966.475	317.596.240.720	364.923.401.215
Tambahan Penghasilan PNS	287.833.205.470	263.460.748.921	188.573.685.558	206.196.379.858	199.835.202.538	196.123.074.761
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			78.124.135.672	69.572.097.796	72.361.191.946	74.290.498.937
Gaji dan Tunjangan DPRD	6.891.000.000	5.127.000.000	24.359.166.097	28.079.132.131	29.640.029.076	29.798.084.009
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH			172.107.740	171.348.940	164.819.036	0
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH			717.000.000	811.500.000	807.231.343	836.750.000
Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi	9.697.076.325					
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	2.750.000.000	2.525.000.000	500.000.000	1.570.000.000	1.950.000.000	5.950.000.000
Hibah Kepada Organisasi Masyarakat	49.905.887.215	49.718.034.036	25.247.619.025	45.638.070.638	46.543.279.326	46.965.373.554
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik			806.387.000	1.612.627.700	1.612.627.700	1.653.406.860
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH						
Penyertaan Modal	5.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	8.177.022.525	3.265.000.000	2.000.000.000

Sumber : LKD Kota Cirebon tahun 2019-2024

2.2.1.5 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih besar dari pada anggaran belanja, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih kecil dari pada anggaran belanja.

Surplus anggaran dapat dimanfaatkan melalui pengeluaran anggaran pembiayaan untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran



cicilan utang, penyertaan modal (investasi) dan/atau menjadi sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan. Sebaliknya, apabila terjadi defisit anggaran maka perlu ditutup/dibiayai dari sisa lebih anggaran tahun lalu, pinjaman daerah dan atau transfer/penarikan dana cadangan daerah yang dianggarkan pada penerimaan anggaran pembiayaan.

2.2.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tersebut diantaranya digunakan untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Pinjaman Daerah (Koreksi Pendapatan BLU ke Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan-LRA). Berikut tabel penerimaan pembiayaan daerah periode tahun 2019-2024.

Tabel 2.72 Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran Sebelumnya	73.751.336.642	44.482.334.894	49.618.040.915	57.517.391.198	93.032.998.705	102.171.156.607
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	160.000.000.000	31.200.000.000	0	0	25.000.000.000	7.000.000.000
Jumlah	233.751.336.642	75.682.334.894	49.618.040.915	57.517.391.198	118.032.998.705	109.171.156.607

Sumber : LRA Kota Cirebon tahun 2019-2024

2.2.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

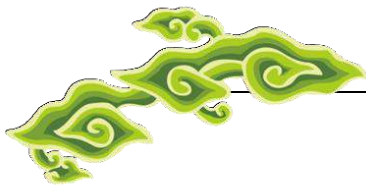
Pengeluaran pembiayaan daerah adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Target, realisasi serta capaian realisasi pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.73 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000	0	4.500.000.000	8.177.022.525	3.265.000.000	2.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	140.000.000.000	77.104.567.789	0	0	25.000.000.000	7.000.000.000
Jumlah	145.000.000.000	77.104.567.789	4.500.000.000	8.177.022.525	28.265.000.000	9.000.000.000

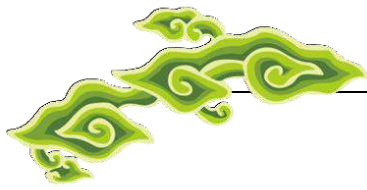
Sumber : LRA Kota Cirebon tahun 2019-2024

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tersebut diantaranya digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah untuk PD. BPR Bank Cirebon, Bank BJB, Perumda Air Minum Tirta Giri Nata dan Pembayaran Pokok Utang Koreksi Pendapatan BLU ke Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan-LRA.



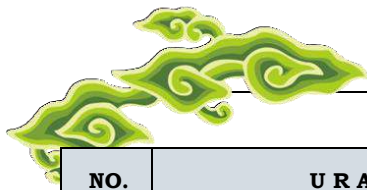
2.2.2 Rata-Rata Pertumbuhan APBD

Berdasarkan data-data yang tersaji pada tabel dan grafik perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan APBD dapat dilihat pada tabel berikut:



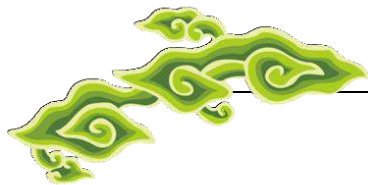
Tabel 2.74 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi APBD tahun 2019-2024

NO.	U R A I A N	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
	PENDAPATAN	1.543.026.589.244	1.633.922.078.236	1.346.961.959.551	1.477.506.731.354	1.457.195.241.975	1.554.932.852.016	-0,84
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	434.208.148.078	437.212.356.611	401.086.141.279	532.653.850.484	532.649.747.319	559.128.776.388	6,43
	Pajak Daerah	187.970.567.869	153.928.723.961	217.861.895.888	191.999.856.661	217.861.895.888	226.058.293.884	4,73
	Retribusi Daerah	11.082.898.549	9.971.513.081	11.408.967.314	11.335.203.103	11.408.967.314	317.148.358.456	1,05
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.501.629.676	5.158.642.121	6.850.064.199	4.860.296.914	6.850.064.199	8.570.399.813	14,83
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	230.653.051.984	268.153.477.448	296.532.923.083	332.147.658.404	296.528.819.918	7.351.724.235	9,70
	PENDAPATAN TRANSFER	1.069.201.519.166	1.140.141.743.749	903.950.858.272	935.824.150.272	922.411.391.491	99.867.548.844	-3,00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN	803.587.681.346	817.506.344.852	781.480.595.484	789.571.543.248	794.770.094.338	872.744.168.801	-0,25
	Dana Bagi Hasil	57.473.349.170	89.440.938.804	111.251.578.057	89.561.544.764	70.099.657.226	51.836.263.000	9,70
	Dana Alokasi Umum (DAU)	593.145.833.000	545.286.189.000	536.524.293.000	531.584.976.683	559.232.958.000	606.158.280.000	-1,35
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	152.968.499.176	182.779.217.048	133.704.724.427	168.425.021.801	165.437.479.112	182.899.823.801	4,21
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	22.488.561.000	31.470.454.000	0	27.043.861.000	12.674.059.000	0	-3,30
	Dana Insentif Daerah (DID)	22.488.561.000	31.470.454.000	0	27.043.861.000	12.674.059.000	0	-3,30
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	243.125.276.820	291.164.944.897	122.470.262.788	119.208.746.024	114.967.238.153	119.123.380.043	-11,10
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	96.108.159.099	81.172.515.237	86.856.798.502	99.749.759.624	102.377.882.941	103.270.333.234	2,24
	Bantuan Keuangan	147.017.117.721	209.992.429.660	35.613.464.286	19.458.986.400	12.589.355.212	15.850.046.809	-30,22
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	39.616.922.000	56.567.977.876	41.924.960.000	1.339.566.000	2.130.000.000	3.936.526.784	-5,22
	Pendapatan Hibah	0	0	2.337.000.000	1.339.566.000	2.130.000.000	3.936.526.784	29,08
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	39.616.922.000	56.567.977.876	39.587.960.000	0	0		-21,81
	BELANJA	1.587.295.590.992	1.582.881.804.426	1.334.562.609.268	1.433.814.101.322	1.444.792.084.073	1.581.403.559.072	-1,94
	BELANJA OPERASI	1.317.333.551.093	1.246.736.172.464	1.217.702.537.368	1.279.606.281.288	1.345.404.690.783	1.448.287.654.155	0,63
	Belanja Pegawai	660.622.891.682	649.899.173.688	649.639.116.575	656.158.815.756	666.258.493.164	717.083.685.121	0,22
	Belanja Barang dan Jasa	600.326.303.396	541.273.784.740	541.509.414.768	573.126.767.194	617.287.816.179	661.041.786.903	0,92
	Belanja Bunga	0	0	0	0	809.375.001	0	25,00



NO.	U R A I A N	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
	Belanja Subsidi	0	0	0	1.500.000.000	1.350.000.000	1.858.030.479	22,50
	Belanja Hibah	52.655.887.215	52.243.034.036	26.554.006.025	48.820.698.338	59.341.506.439	64.194.151.652	13,86
	Belanja Bantuan Sosial	2.970.200.000	3.320.180.000	0	0	357.500.000	4.110.000.000	2,95
	Belanja Bantuan Keuangan	758.268.800	0	0	0	0		-25,00
	BELANJA MODAL	269.915.807.939	294.349.725.481	113.104.657.435	150.426.743.343	92.790.771.193	127.030.325.736	-14,46
	Belanja Tanah	138.070.200	309.742.600	0	0	0	457.500.000	6,08
	Belanja Peralatan dan Mesin	95.192.820.539	177.995.373.530	47.093.162.370	83.180.133.918	53.826.260.442	66.965.119.218	13,70
	Belanja Gedung dan Bangunan	146.314.990.412	96.173.347.051	58.205.309.931	48.257.931.967	22.024.728.830	35.762.073.628	-36,30
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	27.577.663.438	19.380.399.600	4.010.301.969	16.273.304.000	12.096.608.000	19.895.322.040	42,77
	Belanja Aset Tetap Lainnya	692.263.350	490.862.700	3.795.883.165	2.715.373.458	4.821.551.121	1.390.310.850	173,33
	Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0	21.622.800	0	25,00
	BELANJA TAK TERDUGA	46.231.960	41.795.906.481	3.755.414.465	3.781.076.691	6.596.622.097	6.085.579.181	22.572,23
	Belanja Tak Terduga	46.231.960	41.795.906.481	3.755.414.465	3.781.076.691	6.596.622.097	6.085.579.181	22.572,23
I	PENDAPATAN	1.543.026.589.244	1.633.922.078.236	1.346.961.959.551	1.477.506.731.354	1.457.191.138.810	1.554.932.852.016	-0,84
II	BELANJA	1.587.295.590.992	1.582.881.804.426	1.334.562.609.268	1.433.814.101.322	1.444.598.299.399	1.581.403.559.072	-1,94
SURPLUS / DEFISIT (I - II)		44.269.001.748	51.040.273.810	12.399.350.283	43.692.630.032	12.592.839.411	(26.470.707.056)	(26.470.707.056)
III	PEMBIAYAAN							
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	233.751.336.642	75.682.334.894	49.618.040.915	57.517.391.198	118.032.998.705	109.171.156.607	4,77
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	73.751.336.642	44.482.334.894	49.618.040.915	57.517.391.198	93.032.998.705	102.171.156.607	12,38
	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0		0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	160.000.000.000	31.200.000.000	0	0	25.000.000.000	7.000.000.000	-20,13
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	145.000.000.000	77.104.567.789	4.500.000.000	8.177.022.525	28.265.000.000	9.000.000.000	46,60
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000	0	4.500.000.000	8.177.022.525	3.265.000.000	7.000.000.000	-19,59
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	140.000.000.000	77.104.567.789	0	0	25.000.000.000	2.000.000.000	-11,23
PEMBIAYAAN NETTO		88.751.336.642	1.422.232.895	45.118.040.915	49.340.368.673	89.767.998.705	100.171.156.607	100.171.156.607
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		44.482.334.894	49.618.040.915	57.517.391.198	93.032.998.705	102.171.156.607	73.700.449.551	73.700.449.551

Sumber : LRA Kota Cirebon tahun 2019-2024



Selama kurun waktu tahun 2019-2023 terdapat sejumlah anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Saldo Anggaran lebih Akhir adalah selisih Saldo Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun Berjalan ditambah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun Berjalan (SILPA/SiKPA) ditambah Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya dan Pos Lain Lain, yang terdiri dari:

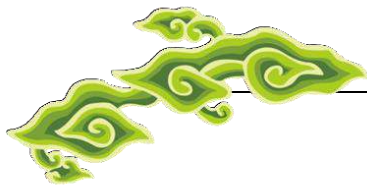
1. Saldo Kas di Kas Daerah
2. Saldo Kas BLUD RSUD Gunung Jati
3. Saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP
4. Saldo Kas di Bendahara Dana BOS
5. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah
6. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah

2.2.3 Neraca Keuangan Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

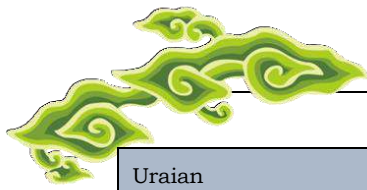
Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan good government governance dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Terakhir, analisis rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dan persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau pelayanan. Berikut tabel perkembangan neraca daerah periode 5 tahun dan rata-rata pertumbuhannya.

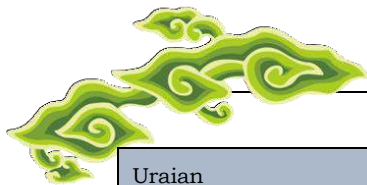


Tabel 2.75 Perkembangan Neraca Daerah Pemerintah Kota Cirebon dan Rata-rata Pertumbuhannya

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET							
ASET LANCAR							
Kas di Kas Daerah	30.503.030.856,00	14.793.898.478,00	23.274.583.913,00	39.344.647.060,00	63.995.768.963,00	61.144.550.174,00	27,51%
Kas di Bendahara Penerimaan	5.585.000,00	9560.000,00	6.007.500,00	13.828.000,00	17.830.000,00	103.249.000,00	38,63%
Kas di Bendahara Pengeluaran			60.004.029,00	41.090.117,00	5.601.078,00	425.489,00	-39,30%
Kas di BLUD RSUD Gunung Jati	9.064.513.401	32.849.848.421,00	34.006.815.814	53.518.382.597,00	38.140.927.401,00	124.445.378.415,00	58,91%
Kas di Bendahara Kapitasi JKN	4.470.344.414,00	1.692.947.674,00					
Kas di Bendahara Dana BOS	438.861.223,00	271.786.333,00	298.396.075,00	115.050.931,00	10.939.165,00	6.846.473,00	-36,04%
Kas Lainnya	0,00	1.788.300,00	0,00	0,00	4.582.300,00	00,00	
Piutang Pajak Daerah	46.186.306.951,00	52.820.511.740,00	61.043.753.538,00	69.201.967.133,00	77.703.394.228,00	102.552.299.402,00	11,12%
Piutang Retribusi Daerah	13.495.050.944,68	13.650.609.419,68	14.408.478.538,00	15.051.840.496,43	15.791.965.971,12	85.120.358.55,00	3,22%
Piutang Dana Bagi Hasil	39.328.344.034,00	6.121.542.315,00	0,00	5.823.299.378,00	4.428.285.982,00	22.415.638.822,00	9
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	17.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	39.346.224,00	55.816.691,00	33,84%
Piutang Lainnya	119.754.985.892,00	52.503.611.271,00	144.477.834.761,00	62.448.830.849,90	55.025.000.945,00	5.112.313,00	10,07%
Penyisihan Piutang	(40.974.926.847,36)	(45.265.331.380,73)	(48.944.902.668,84)	(53.650.204.094,87)	(58.850.214.996,50)	(66.599.196.861,79)	7,58%
Beban di Bayar Dimuka	306.930.694,66	340.888.062,88	400.485.447,74	401.596.095,74	446.986.832,52	464.904.512,68	8,03%
Persediaan	19.224.145.652,75	28.364.890.487,00	34.935.387.997,00	35.487.605.747,00	53.923.492.425,00	57.226.645.011,39	24,85%
Jumlah Aset Lancar	241.820.642.215,73	158.170.021.129,83	263.980.314.710,58	227.811.404.300,20	250.683.996.518,14	274.942.028.000,33	5,73%
INVESTASI JANGKA PANJANG							
Investasi Jangka Panjang Non Permanen							
Dana Bergulir	1.438.136.619,50	1.438.136.619,50.	1.438.136.619,50	1.438.136.619,50.	1.438.136.619,50.	1.438.136.619,50.	0,00%
Cadangan Kerugian Investasi Jangka Panjang Non Permanen	(1.438.136.619,50)	(1.438.136.619,50)	(1.438.136.619,50)	(1.438.136.619,50)	(1.438.136.619,50)	(1.438.136.619,50)	
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi Jangka Panjang Permanen							
Penyertaan Modal	95.594.135.251,53	104.580.776.550,70	109.562.101.630,69	137.038.752.204,47	132.512.693.086,32	154.853.725.465,00	7,19%

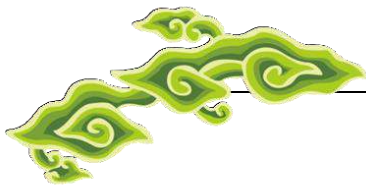


Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Pemerintah Daerah							
Jumlah Investasi Permanen	95.594.135.251,53	104.580.776.550,70	109.562.101.630,69	137.038.752.204,47	132.512.693.086,32	154.853.725.465,00	7,19%
Jumlah Investasi Jangka Panjang	95.594.135.251,53	104.580.776.550,70	109.562.101.630,69	137.038.752.204,47	132.512.693.086,32	154.853.725.465,00	7,19%
ASET TETAP							
Tanah	2.021.288.628.015,00	2.031.648.817.015,77	2.031.648.817.015,77	2.088.290.129.016,02	2.118.120.778.281,02	2.140.855.761.919,02	0,95%
Peralatan dan Mesin	794.394.008.681,30	969.197.888.555,50	1.008.326.783.117,50	1.114.909.914.637,66	1.115.536.242.921,01	1.167.694.586.699,01	7,33%
Gedung dan Bangunan	848.054.455.417,00	873.749.912.199,08	1.065.183.891.718,18	1.160.325.779.030,08	1.215.916.647.324,08	1.258.145.980.191,58	7,73%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	868.869.227.258,61	910.678.425.665,61	927.284.537.814,61	971.207.197.794,61	1.064.910.874.171,61	1.109.616.807.111,61	4,20%
Aset Tetap Lainnya	11.467.100.615,00	8.982.879.877,00	8.983.579.877,00	8.993.556.877,00	8.951.515.677,00	8.748.205.001,00	-4,20%
Konstruksi dalam Pengerjaan	226.189.785.514,51	269.153.412.489,51	142.252.959.859,92	71.405.186.369,00	0,00	1.673.720.926,00	-35,59%
Akumulasi Penyusutan	(1.237.950.235.577,69)	(1.406.590.344.345,84)	(1.668.544.254.757,52)	(1.846.640.017.191,16)	(1.970.174.720.184,84)	(2.125.488.132.980,36)	9,92%
Jumlah Aset Tetap	3.530.312.969.861,51	3.656.820.991.456,64	3.515.136.314.644,46	3.356.491.746.533,21	3.553.261.338.189,88	3.561.246.928.867,86	0,21
DANA CADANGAN							
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASET LAINNYA							
Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00	52.133.431,00	25.381.582,00	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	27.508.808.500,00	17.354.489.500,00	17.354.489.500,00	17.354.489.500,00	17.344.000.000,00	8.500.000.000,00	7,39%
Aset Tak Berwujud	26.756.992.010,00	28.720.267.283,00	28.821.525.283,00	28.821.525.283,00	37.348.884.381,00	38.305.908.381,00	7,46%
Aset Lain-Lain	38.584.921.187,15	33.255.361.874,98	33.019.672.436,98	53.922.267.804,98	64.667.720.129,55	48.634.447.717,55	13,74%
Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya	(52.540.812.113,87)	(60.052.482.317,98)	(60.238.930.566,98)	(60.258.315.074,98)	(60.359.257.316,55)	(66.355.325.878,55)	2,96%
Jumlah Aset Lainnya	40.299.909.583,28	19.277.645.340,00	18.956.765.653,00	39.839.976.513,00	59.053.480.625,00	29.110.411.802,00	20,92%
JUMLAH ASET	3.908.027.656.912,28	3.938.849.434.477,17	3.907.635.496.638,00	3.973.181.879.550,88	3.995.511.508.419,34	4.022.065.606.497,34	0,45%
KEWAJIBAN							
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	1.788.300,00	128.416.143,00	0,00	4.582.300,00	0,00	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	68.709.000,00	68.709.000,00	68.709.000,00	68.709.000,00	0,00	0,00	-20,00%
Pendapatan Diterima Dimuka	3.771.258.103,14	2.675.553.391,11	2.664.289.127,34	2.938.255.144,67	2.981.595.170,88	6.247.515.279,28	-3,54%
Utang Beban	1.312.611.320,00	1.086.683.241,00	1.108.984.116,00	33.123.754.837,00	92.787.762.669,00	101.164.858.226,00	610,36%
Utang Jangka Pendek Lainnya	76.952.957.674,00	37.924.444.944,00	52.508.526.867,00	58.633.643.363,00	4.730.207.183.183,00	344.625.692,00	1593,36%



Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	82.105.536.097,14	41.757.178.876,11	56.478.925.253,34	94.764.362.344,67	100.504.147.322,88	107.756.999.197,28	11,99%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN	82.105.536.097,14	41.757.178.876,11	56.478.925.253,34	94.764.362.344,67	100.504.147.322,88	119.482.905.491,28	11,99%
EKUITAS	3.825.992.120.814,91	3.897.092.255.601,06	3.851.156.571.385,39	3.878.417.517.206,21	3.895.007.361.096,46	3.902.582.701.005,90	0,36%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.908.027.656.912,05	3.938.849.434.477,17	3.907.635.496.638,73	3.973.181.879.550,88	3.995.511.508.419,34	4.022.065.606.497,18	0,45%

Sumber : diolah dari LRA Pemerintah Kota Cirebon



Berdasarkan penyajian laporan keuangan yang dijelaskan di atas, maka selanjutnya dilakukan perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dari tahun ke tahun pada periode tahun 2019 sampai tahun 2023 disajikan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.76 Analisis Rasio Keuangan Kota Cirebon tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Rasio Lancar (Curent Ratio)	2,945	3,788	4,674	2,404	2,494
2	Rasio Cepat (Quick Ratio)	2,711	3,109	4,055	2,029	1,958
3	Rasio Total Utang Terhadap Aset	0,0210	0,01060	0,01444	0.02385	0,02515
4	Rasio Utang Terhadap Modal	0,0214	0,01070	0,01466	0,02443	0,02580

Sumber : diolah dari LRA Pemerintah Kota Cirebon

Hasil perhitungan rasio keuangan yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Secara rinci Analisis tersebut disajikan sebagai berikut.

2.2.4 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yaitu:

1) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

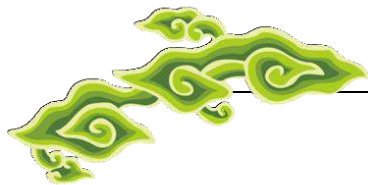
Rasio Lancar guna mengevaluasi kemampuan organisasi untuk membayar kewajiban jangka pendeknya atau sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar pada tahun 2019 adalah sebesar 2,945 dan sampai dengan periode tahun 2023 mencapai sebesar 2,494.

2) Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat berguna untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Quick ratio pada tahun 2019 sebesar 2,711 dan pada tahun 2023 quick ratio sebesar 1,958. Dengan hasil tersebut menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

2.2.5 Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas yaitu rasio dengan fungsi menilai kemampuan suatu organisasi dalam melunasi semua kewajiban. Termasuk dalam jangka pendek atau jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan atau rasio ini merupakan rasio yang



menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas secara rinci sebagai berikut:

1) Rasio Total Utang Terhadap Total Aset

Rasio Total Utang Terhadap Total Aset menggambarkan seberapa besar pengaruh utang terhadap aktiva, yaitu semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Besar rasio total utang terhadap total aset pada tahun 2019 sebesar 0,0210 dan pada tahun 2023 sebesar 0,02515 Hal ini berarti menunjukkan bahwa pengaruh utang terhadap aktiva sangat kecil.

2) Rasio Utang Terhadap Modal

Rasio Utang merupakan rasio yang menunjukkan seberapa perlu utang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, Dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri dan tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2019 Rasio Utang Terhadap Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebesar 0,0214 serta periode tahun 2023 sebesar 0,02580. Dari perhitungan tersebut bahwa nilai total utang masih jauh di bawah nilai modal, sehingga dapat disimpulkan Pemerintah Daerah Kota Cirebon semakin mandiri serta tidak tergantung pada utang.

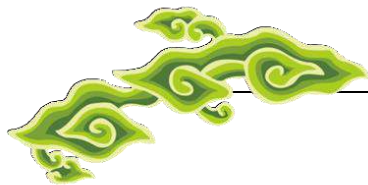
2.2.6 Proyeksi Keuangan Daerah tahun Anggaran 2025-2029.

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan.

Dalam upaya menurunkan ketimpangan vertikal dan horizontal, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merancang ulang pengelolaan transfer ke daerah dengan mereformulasi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Istimewa dan Dana Desa dengan mengedepankan kinerja Daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Daerah sekaligus mendorong tanggung jawab Daerah dalam memberikan layanan publik.

2.2.6.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Sebelum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) pengaturan pendapatan daerah diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu pendapatan daerah



berupa pajak dan retribusi diatur di dalam Undang-undang Nomor tahun 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) sementara dana perimbangan yang berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Perimbangan Keuangan). Namun dalam UU HKPD, sumber-sumber pendanaan Daerah diatur secara terintegrasi di dalam UU HKPD.

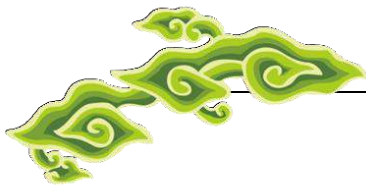
UU HKPD didesain untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, melaksanakan transfer ke daerah yang berkualitas dan memperluas akses pembiayaan. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat dicapai dengan memperkuat desentralisasi fiskal agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia lebih merata. Untuk mengoptimalkan desentralisasi fiskal, UU HKPD disusun berdasarkan 4 (empat) pilar yaitu ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, penguatan local taxing power, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Dalam upaya menurunkan ketimpangan vertikal dan horizontal, UU HKPD merancang ulang pengelolaan transfer ke daerah dengan mereformulasi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Istimewa dan Dana Desa dengan mengedepankan kinerja Daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Daerah sekaligus mendorong tanggung jawab Daerah dalam memberikan layanan publik. Alokasi DBH akan disusun dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan 1 (satu).

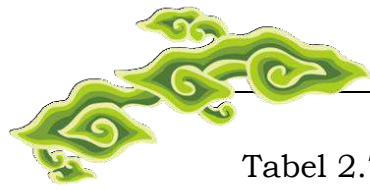
Penyesuaian terhadap target Pajak dan Retribusi Daerah juga telah dilakukan serta penurunan dan relaksasi terhadap penerimaan dari Pendapatan Transfer juga perlu dipertimbangkan. Penurunan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah serta bagi hasil pajak provinsi juga harus diperhitungkan. Penerimaan Dana Alokasi Umum.

Proyeksi pendapatan dan belanja untuk tahun 2025-2029 masih dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pasca pandemi Covid 19, kondisi sosial politik dalam pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024 dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah serta asumsi lainnya.

Penyesuaian terhadap target Pajak dan Retribusi Daerah juga telah dilakukan serta penurunan dan relaksasi terhadap penerimaan dari Pendapatan Transfer juga perlu dipertimbangkan. Penurunan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah serta bagi hasil pajak provinsi juga harus diperhitungkan. Penerimaan Dana Alokasi Umum. Untuk Proyeksi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Total Penerimaan Daerah.

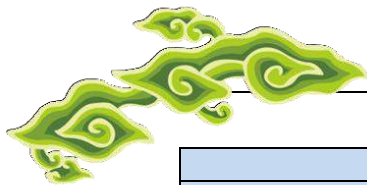


Berdasarkan asumsi dan kebijakan di atas, maka perhitungan proyeksi disajikan dalam tabel sebagai berikut :



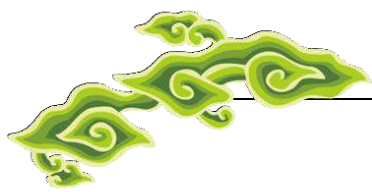
Tabel 2.77 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon tahun 2025-2029

Uraian		2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN DAERAH	1,768,082,629,455	1,820,923,808,182	1,900,870,705,220	1,980,817,602,259	2,060,764,499,298
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	779,879,929,358	709,867,605,445	735,505,732,162	761,143,858,878	786,781,985,594
	Pajak Daerah	384,669,545,456	285,001,770,508	295,295,114,577	305,588,458,647	315,881,802,716
	Retribusi Daerah	339,822,727,989	101,389,730,218	105,051,600,025	108,713,469,831	112,375,339,638
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15,900,000,000	11,227,255,265	11,632,747,488	12,038,239,710	12,443,731,933
	Lain-lain PAD yang Sah	39,487,655,913	312,248,849,454	323,526,270,072	334,803,690,689	346,081,111,307
	PENDAPATAN TRANSFER	988,202,700,097	1,110,167,757,674	1,164,444,440,227	1,218,721,122,782	1,272,997,805,337
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	925,497,600,000	854,295,579,491	899,330,984,830	944,366,390,170	989,401,795,511
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62,705,100,097	255,872,178,183	265,113,455,397	274,354,732,612	283,596,009,826
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	888,445,063	920,532,831	952,620,599	984,708,367
	Pendapatan Hibah	-	888,445,063	920,532,831	952,620,599	984,708,367
B	BELANJA	1,747,877,496,705	1,820,923,808,182	1,900,870,705,220	1,980,817,602,259	2,060,764,499,298
	BELANJA OPERASI	1,554,632,671,596	1,657,040,665,445	1,729,792,341,750	1,802,544,018,056	1,875,295,694,361
	BELANJA MODAL	188,222,091,447	154,778,523,695	161,574,009,944	168,369,496,192	175,164,982,440
	BELANJA TIDAK TERDUGA	5,022,733,662	9,104,619,041	9,504,353,526	9,904,088,011	10,303,822,496
(A-B)	SURPLUS / (DEFISIT)	20,205,132,750	-	-	-	-
C	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya	0	0	0	0	0
	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0				
D	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.000.000.000	0	0	0	0
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0	0	0	0	0



Uraian		2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6
	Penyertaan Modal Daerah	9.000.000.000	0	0	0	0
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
(C-D)	PEMBIAYAAN NETTO	-9.000.000.000	0	0	0	0
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0	0
	(A-B) - (C-D)	0	0	0	0	0

Sumber : diolah dari LRA Pemerintah Kota Cirebon



Hasil proyeksi dilakukan berdasarkan data eksisting pertumbuhan rata-rata untuk komponen Pendapatan Daerah dan dilakukan untuk tahun 2026-2029, khusus untuk tahun 2025 digunakan data berdasarkan Nota Kesepakatan KUAPPAS tahun 2025, dimana tahun 2025 disusun berdasarkan pada target realisasi pendapatan tahun 2023 ditambah kenaikan bervariasi untuk beberapa komponen pendapatan asli daerah. Sementara untuk komponen Belanja Daerah digunakan asumsi prosentase komponen Belanja Daerah dengan menggunakan Baseline Data tahun 2025. Selanjutnya untuk komponen Pembiayaan Daerah diasumsikan tidak ada angka karena melihat dari data tahun 2025 dan kemungkinan dalam 4 (empat) tahun ke depan.

Selanjutnya, hasil proyeksi APBD terutama dalam komponen Belanja Daerah akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang akan direncanakan dalam lima tahun mendatang yang akan dirumuskan dalam RPJMD. Sedangkan untuk memandu alokasi pendanaan, dibagi menjadi tiga prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, sebagai berikut:

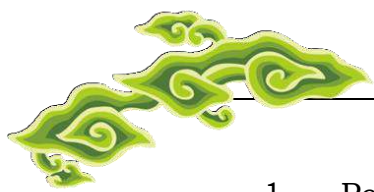
- a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran terkait program-program pelayanan dasar;
- b. Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Wali Kota (Janji Wali Kota) di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar;
- c. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.2.7 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah tahun 2025-2029

Pada prinsipnya, Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD, target pencapaian IPM, dukungan terhadap SDGs, dukungan terhadap program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Barat. Kebijakan daerah diupayakan dengan mengatur pola belanja daerah yang proposional optimal dan efisiensi untuk berbagai kebutuhan pembangunan yang sinergis antara Pembangunan Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kota.

2.2.7.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam upaya menutupi nilai belanja dan pembiayaan yang tidak seimbang dengan proyeksi pendapatan daerah maka Pemerintah Kota Cirebon berupaya dalam mencari sumber sumber pembiayaan lain di luar APBD agar semua kegiatan peningkatan pembangunan akan dapat terlaksana.



1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan kewenangan pemerintah maka kebijakan tentang sumber pendapatan ini tergantung kebijakan tentang sumber pendapatan ini tergantung kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun demikian Pemerintah Kota Cirebon tetap mengharapkan adanya peningkatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat khususnya yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Penghasilan, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp 853.082.000,00. Proyeksi tersebut bersumber dari pendapatan hibah. Pendapatan Hibah ini berasal dari Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

2.2.7.2 Kebijakan Belanja Daerah

Adapun kebijakan belanja daerah Kota Cirebon adalah sebagai berikut.:

1. Kebijakan Belanja Operasi

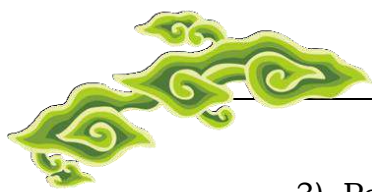
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Kebijakan belanja operasi secara rinci adalah sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Kebijakan penganggaran belanja pegawai memperhatikan :

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN;



- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2 (dua) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
 - 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN dibebankan pada APBD tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah, setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dan besaran standar satuan biayanya dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
 - 7) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- b. Belanja Barang dan Jasa

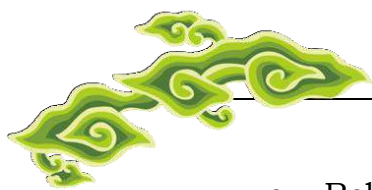
Digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/ pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

c. Belanja Bunga

Pemerintah Daerah Kota Cirebon tidak mengalokasikan Belanja bunga karena tidak memiliki kewajiban pembayaran bunga utang.

d. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengalokasikan belanja subsidi dalam APBD.



e. Belanja Hibah

Pemerintah Daerah Kota Cirebon menganggarkan Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuansosial yang bersumber dari APBD Kota Cirebon.

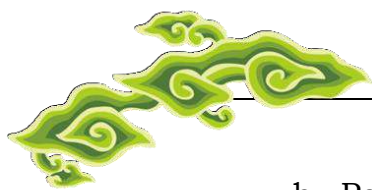
2. Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c) batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Wali Kota. Selain itu, juga memuat kriteria lainnya, yaitu : berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk :

- a. Keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;



- b. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya; dan
 - c. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja tidak terduga tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.
4. Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

2.2.7.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari :

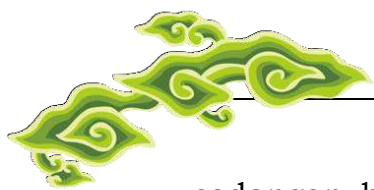
a. SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun Anggaran tahun berikutnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- Pelampauan penerimaan PAD;
- Pelampauan penerimaan pendapatan transfer
- Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- Penghematan belanja;
- Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

b. Pencairan Dana Cadangan

Digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana



cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan, dan digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus menganggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

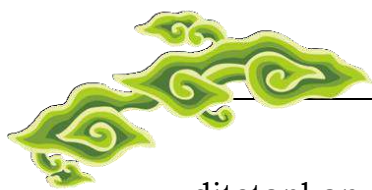
Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk :

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

b. Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN, apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peraturan daerah dimaksud



ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

2.2.8 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kota Cirebon dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Kota Cirebon. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain:

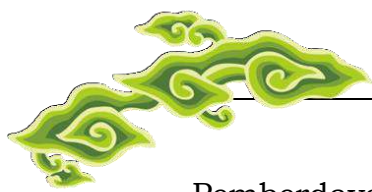
- 1) APBN;
- 2) APBD Provinsi;
- 3) Dana Masyarakat/Umat;
- 4) Corporate Social Responsibility (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL));
- 5) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); dan
- 6) Hibah.

Adapun penjelasan alternatif pembiayaan pembangunan adalah sebagai berikut:

2.2.8.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kota Cirebon selain bersumber dari APBD Kota Cirebon, juga memperoleh dukungan pendanaan dari APBN. Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menjadi Kunci Menghadapi Keterbatasan Fiskal dalam APBD. APBN sebagai suatu rencana keuangan, mengandung arti bahwa pemerintah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintahan. Dalam perencanaan keuangan, bisa saja pengeluaran direncanakan setinggi-tingginya, atau serendah-rendahnya. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun Perangkat Daerah Provinsi.

Dana pembangunan yang bersumber dari APBN juga dapat berupa DID. DID merupakan Pendapatan dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu. Beberapa kesempatan untuk mendapatkan DID, antara lain berasal dari kompetisi pemerintah daerah kabupaten/kota yang digelar oleh pemerintah nasional, seperti Innovative Government Award oleh Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIP) oleh Kementerian



Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. DID didapatkan jika pemerintah daerah mampu menjadi pemenang kompetisi dan memenuhi persyaratan penetapan APBD tepat waktu.

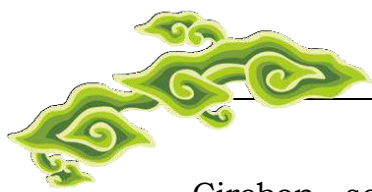
2.2.8.2 APBD Provinsi

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kota Cirebon dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD Provinsi. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan Kota Cirebon sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah provinsi sehingga antara provinsi dan Kota Cirebon dapat bekerja sama di dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

Salah satu mekanisme pendanaan dari APBD Provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah pendanaan Bantuan Keuangan Kompetitif. Mekanisme pendanaan Bantuan Keuangan Kompetitif berbeda dari mekanisme pendanaan dari APBD Provinsi yang lain di mana pemerintah daerah mengusulkan kegiatan dalam tema tertentu, dipresentasikan secara terbuka dengan proposal, video, infografis dan data-data pendukungnya secara terbuka dan kompetitif. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kota Cirebon terdorong untuk mendapatkan tambahan pendanaan untuk belanja daerah secara unggul dan bertanggung jawab.

2.2.8.3 Dana Masyarakat/Umat

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Kota Cirebon adalah melalui dana masyarakat/umat mengingat jumlah penduduk Kota Cirebon yang sangat besar, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana umat cukup besar. Akan tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam menyejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana umat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat. Dana yang dikumpulkan pemerintah dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai jenis dana umat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Kota



Cirebon secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

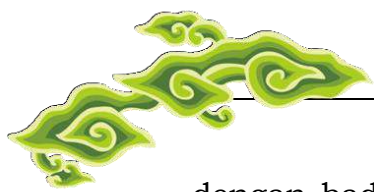
2.2.8.4 Corporate Social Responsibility (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))

Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD Kota Cirebon yang lainnya adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Mitra PKBL dan TJSL diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini harus berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang.

Sampai dengan saat ini, telah terdaftar sebanyak 19 mitra PKBL dan TJSL Kota Cirebon yang di dalamnya terbagi menjadi 7 perusahaan swasta, 6 BUMN dan 6 (enam) BUMD. tahun 2019 Pemerintah Kota Cirebon mengeluarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 460.05/Kep.121-Adm.Perek/2019 Tentang Pembentukan Mitra Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Kota Cirebon agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Program pembangunan yang dikolaborasikan dengan mitra PKBL dan TJSL adalah program yang kesinambungan serta berdampak positif terhadap masyarakat, penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Program yang dikolaborasikan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

2.2.8.5 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama

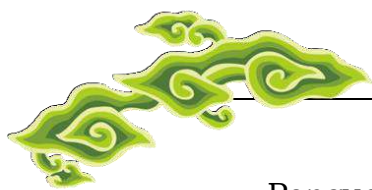


dengan badan usaha. Saat ini banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”.

Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah APBD tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan. Secara definisi dapat diartikan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

2.2.8.6 Hibah

Hibah dimaksud adalah Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan di berbagai sektor. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) diperlukan karena adanya kebutuhan investasi untuk membangun ekonomi dan adanya keterbatasan sumber dana pemerintah untuk investasi. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Peraturan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), di antaranya Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 4 tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

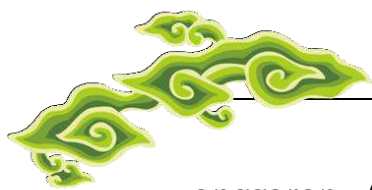


Pengusulan kegiatan yang dibiayai dengan PHLN dapat dilakukan oleh Kementerian Negara (departemen dan non departemen), lembaga pemerintahan non departemen (selanjutnya disebut lembaga), Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kegiatan yang dapat diusulkan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri untuk penerusan pinjaman; Untuk usulan kegiatan ini harus melampirkan Surat Persetujuan DPRD calon penerima penerusan pinjaman, dan memenuhi kriteria khusus sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan yang diusulkan merupakan kegiatan investasi untuk prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan penerimaan pada APBD Pemda, yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut;
 - 2) Kegiatan tersebut merupakan urusan Pemda;
 - 3) Kegiatan yang diusulkan adalah dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sejalan dengan program RPJM;
 - 4) Hasil dari kegiatan PHLN yang diusulkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat daerah setempat; dan
 - 5) Pemda mempunyai kemampuan fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.
- b. Kegiatan yang dibiayai dari hibah luar negeri untuk penerusan hibah. Untuk usulan kegiatan ini harus memenuhi kriteria khusus sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan tersebut untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan;
 - 2) Kegiatan tersebut untuk meningkatkan pemberian layanan dasar umum;
 - 3) Kegiatan tersebut untuk pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah.
 - 4) Sumber PHLN adalah Negara Asing, Lembaga Multilateral, Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan Asing. Jenis PHLN meliputi pinjaman lunak, Fasilitas Kredit Ekspor, Pinjaman Komersial dan Pinjaman Campuran.

2.2.9 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan instrumen evaluasi yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah. Pengukuran dilakukan melalui enam dimensi, yaitu: (1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) pengalokasian anggaran belanja, (3) transparansi keuangan, (4) penyerapan



anggaran, (5) kondisi keuangan daerah, serta (6) opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa capaian IPKD Kota Cirebon selama periode 2020-2022 cenderung masih berada pada kategori “Perlu Perbaikan (B)”, dengan skor yang relatif fluktuatif.

1. Tahun 2020

Pada tahap uji coba pengukuran, Kota Cirebon belum memperoleh predikat karena terdapat eliminasi dimensi dalam penilaian, sehingga capaian belum dapat digunakan sebagai rujukan penuh.

2. Tahun 2021

Kota Cirebon memperoleh skor 64,117 dengan predikat Perlu Perbaikan (B). Dimensi yang menunjukkan capaian kuat adalah kesesuaian dokumen (12,283) dan opini BPK (15), sedangkan aspek yang relatif rendah adalah transparansi keuangan (8,793) serta kondisi keuangan daerah (3,903).

3. Tahun 2022

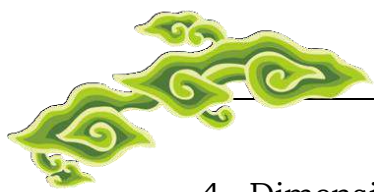
Skor IPKD Kota Cirebon menurun menjadi 58,604 dengan kategori yang sama, yaitu Perlu Perbaikan (B). Penurunan terutama terlihat pada dimensi transparansi (2,586) dan penyerapan anggaran (6,667), meskipun aspek pengalokasian anggaran (19,828) tetap menunjukkan capaian tinggi.

4. Tahun 2023

Skor IPKD Kota Cirebon menurun menjadi 64,943 masih dengan kategori yang sama, yaitu Perlu Perbaikan (B). Peningkatan terutama terlihat pada kesesuaian dokumen (9,043), dimensi transparansi meningkat dari tahun sebelumnya (14,483) sedangkan penyerapan anggaran masih sama dengan tahun sebelumnya (6,667) dan adanya peningkatan kondisi keuangan daerah (5,096), meskipun aspek pengalokasian anggaran ada penurunan (14,655) dan opini BPK (15) tetap menunjukkan capaian tinggi.

Secara keseluruhan, capaian IPKD Kota Cirebon memperlihatkan pola yang relatif konsisten pada kategori Perlu Perbaikan (B), Hal ini menegaskan perlunya peningkatan pada aspek transparansi, penyerapan anggaran, serta penguatan kondisi keuangan daerah. Untuk itu dapat disimpulkan IPKD Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Dimensi 1 (Kesesuaian Dokumen) relatif stabil (12,283→12,151).
2. Dimensi 2 (Pengalokasian Anggaran) meningkat signifikan (14,138→19,828). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan.
3. Dimensi 4 (Penyerapan Anggaran) juga menurun (10→6,667), sehingga efektivitas penggunaan anggaran perlu ditingkatkan.



4. Dimensi 5 (Kondisi Keuangan Daerah) relatif rendah di kedua tahun (3,903→2,373), menunjukkan keterbatasan kemandirian fiskal daerah.
5. Dimensi 6 (Opini BPK) konsisten memperoleh nilai maksimal (15), yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah sudah sesuai standar pemeriksaan.

Upaya strategis diarahkan pada optimalisasi tata kelola anggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas dokumentasi dan pelaporan, serta perbaikan struktur fiskal agar predikat pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat di masa mendatang.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

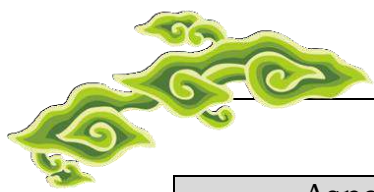
Pembangunan Kota Cirebon telah menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Berdasarkan realisasi indikator makro pembangunan Kota Cirebon memperlihatkan angka yang terus meningkat dengan capaian yang cukup menggembirakan. Namun demikian, angka-angka tersebut tidak lantas membuat Kota Cirebon berhenti berbenah untuk terus mengatasi permasalahan dan isu strategis yang muncul. Permasalahan di berbagai aspek pembangunan harus segera ditangani melalui pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan lingkungan yang sangat pesat di masa depan juga memunculkan isu-isu strategis yang perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

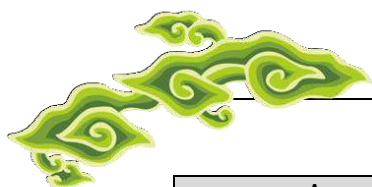
Permasalahan pembangunan Kota Cirebon dirumuskan dari hasil analisis data yang telah tersaji dan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang telah dilakukan oleh Bappelitbangda. Dari hasil tersebut permasalahan pembangunan kota Cirebon dapat dikategorikan dalam 5 (lima) aspek utama yaitu: (1) Aspek Geografi, (2) Aspek Demografi, (3) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (4) Aspek Daya Saing Daerah, dan (5) Aspek Pelayanan Umum.

Tabel 2.78 Kerangka Permasalahan Pembangunan Kota Cirebon

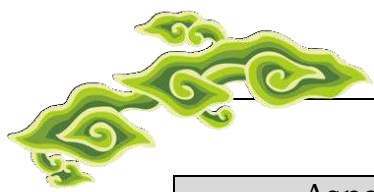
Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
GEOGRAFI	Sumber daya air	Terbatasnya sumber air bersih yang tersedia di wilayah Kota Cirebon.	• Kondisi hidrologi Intrusi air laut di kawasan pesisir • Status daya dukung air telah terlampaui di sebagian besar wilayah • Ketergantungan



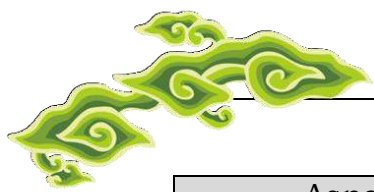
Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			yang tinggi terhadap suplai air bersih dari luar wilayah
	Sumber daya lahan	Terbatasnya luas wilayah dengan proporsi kawasan terbangun yang tinggi.	• Luas wilayah administrasi relatif kecil. • Karakter kawasan perkotaan dengan intensitas lahan terbangun yang tinggi. • Masih lemahnya komitmen terhadap konsistensi pengendalian pemanfaatan ruang.
	Kualitas lingkungan hidup	Degradasi kualitas lingkungan hidup perkotaan.	• Belum terpenuhinya 20 persen luasan RTH publik di Kota Cirebon. • Belum optimalnya pengelolaan persampahan. • Dampak perubahan iklim di lingkungan perkotaan meningkat. • Degradasi ekosistem lingkungan di kawasan pesisir • Pengendalian tutupan lahan yang rendah • Potensi Keanekaragaman



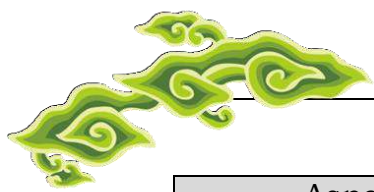
Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			hayati yang rendah • Masih tingginya ketergantungan terhadap energi fosil dan masih rendahnya pemanfaatan EBT pada berbagai sektor
	Kerawanan bencana	Risiko Bencana berada pada kategori sedang dengan tingkat kerentanan bencana umumnya relatif tinggi.	• Belum tersedianya early warning system multi bencana. • Belum optimalnya aksi mitigasi dan adaptasi bencana. Belum tersedianya rencana kontigensi bencana. • Dampak perubahan iklim. • Dukungan infrastruktur belum sepenuhnya mengintegrasikan faktor resiko bencana. • Tingginya intensitas alih fungsi lahan. • Belum optimalnya kinerja penanggulangan bencana yang multisektor.
	Sumber daya pangan	Belum optimalnya sistem pangan yang	• Terbatasnya produksi pangan yang dihasilkan karena terbatasnya



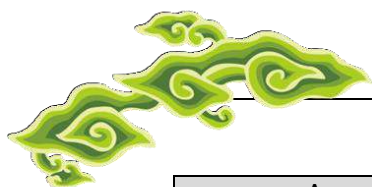
Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
		berkelanjutan.	lahan pertanian dan perkebunan dan penggunaan teknologi pertanian belum optimal. • Pemanfaatan sumber daya perikanan sebagai sumber pangan belum dikelola secara optimal. • Ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan pangan dari luar wilayah. • Belum optimalnya pengembangan urban farming melalui pemanfaatan lahan perkotaan untuk mendukung ketersediaan pangan. • Pengelolaan distribusi dan pergudangan yang belum efektif.
	Pengelolaan pesisir	Belum optimalnya pengelolaan kawasan pesisir, termasuk di dalamnya potensi ekonomi perikanan dan ekowisata pesisir.	• Masih rendahnya upaya konservasi keanekaragaman hayati. • Terjadi okupasi lahan pada kawasan tanah timbul di pesisir. • Penatagunaan lahan di kawasan



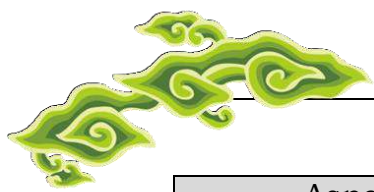
Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			tanah timbul belum berjalan efektif. •Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pesisir yang belum optimal. •Masih terbatasnya implementasi hasil inovasi penelitian dan pengembangan potensi pesisir. •Belum efektifnya koordinasi lintas lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pesisir, antara lain dengan Pelindo dan PPN Kejawanan.
	Pengelolaan ruang kota	Pemanfaatan ruang belum efektif dalam memenuhi kualitas ruang perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan.	•Rencana pola ruang yang belum ideal karena persoalan status lahan dan kompleksitas pemanfaatan lahan eksisting. •Konsistensi pengendalian tutupan lahan masih rendah. •Masih lemahnya dukungan regulasi penegakan pelanggaran pemanfaatan ruang. •Masih terbatasnya



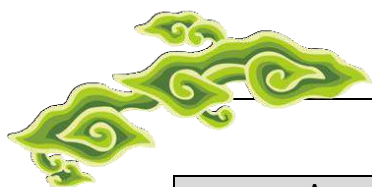
Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			SDM di bidang penataan ruang
DEMOGRAFI	Pertambahan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk cenderung meningkat.	• Migrasi masuk terjadi dalam gelombang tenaga kerja (khususnya perempuan) • Jumlah kelahiran yang surplus terhadap jumlah kematian
	Distribusi penduduk	Distribusi penduduk yang kurang merata	• Penduduk kota Cirebon cenderung berdomisili di wilayah pusat kota • Sebaran layanan sarana prasarana yang belum merata
	Kualitas sumber daya manusia	Kesenjangan kualitas sumber daya manusia.	• Terdapat kesenjangan kualifikasi pendidikan di masyarakat dimana proporsi lulusan pendidikan tinggi sangat rendah. • Belum meratanya derajat kesehatan masyarakat. Upaya pencegahan balita stunting belum optimal.
	Urbanisasi	Tekanan pada infrastruktur dan layanan publik.	• Ketersediaan lapangan kerja terpusat di perkotaan. • Kelengkapan infrastruktur terkonsentrasi di



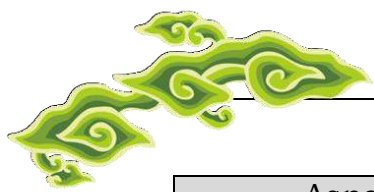
Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			pusat perkotaan •Tingginya jumlah komuter yang beraktivitas di Kota Cirebon.
	Angkatan kerja dan penduduk lanjut usia	Tingginya proporsi penduduk usia produktif yang memiliki daya saing rendah memunculkan meningkatnya risiko ketergantungan dari penduduk lanjut usia.	•Tingkat pendidikan angkatan kerja didominasi oleh lulusan dasar dan menengah. •Rasio ketergantungan usia produktif cenderung tinggi. •Penanganan penduduk lanjut usia belum optimal.
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kesejahteraan ekonomi		
	Ketimpangan	Ketimpangan pendapatan masih tinggi.	•Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. •Distribusi pendapatan masyarakat kurang merata. •Kesenjangan pasar kerja. •Jaminan sosial yang belum menyeluruh. •Keterbatasan akses ke pelayanan sosial.
	Kemiskinan	Masih tingginya tingkat kemiskinan, di atas persentase penduduk	•Tingkat pendidikan kepala rumah tangga rendah, umumnya lulusan SD dan SMP.



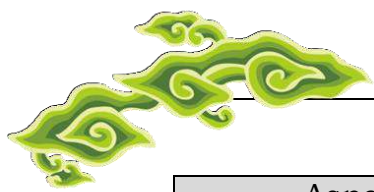
Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
		miskin Provinsi Jawa Barat.	• Rendahnya akses ke fasilitas layanan rujukan tingkat lanjut. • Ketidakstabilan pekerjaan. • Akses yang terbatas terhadap air bersih dan sanitasi. • Terdapat fenomena siklus kemiskinan yang diturunkan antar generasi.
	Pengangguran	Tingkat pengangguran masih tinggi	• Rendahnya kompetensi yang dimiliki pencari kerja. • Adanya kesenjangan kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja. • Kurang tersedianya pekerjaan fomal bagi pencari kerja lulusan SD dan SMP. • Masih rendahnya kompetensi nalaria realistik pada lulusan SMA Kejuruan untuk dapat bersaing di pasar kerja. • Tingkat pendidikan tenaga kerja didominasi lulusan pendidikan SLTA ke



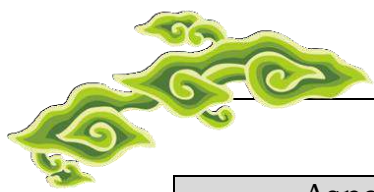
Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			bawah, terutama yang berpendidikan SD dan SMA.
	Daya beli	Daya beli masyarakat masih rendah.	•Tingkat pendapatan riil sebagian besar masyarakat masih rendah. •Pengeluaran kebutuhan sehari-hari cenderung tinggi.
	Kesejahteraan sosial budaya		
	Akses layanan sosial	Belum meratanya akses layanan sosial	•Belum optimalnya verifikasi dan validasi data penduduk miskin secara berkala. •Belum terpadunya program layanan sosial di tingkat kota. •Kurangannya jumlah SDM yang terlibat pelayanan sosial.
	Keluarga sehat	Kota Cirebon termasuk dalam Kota dengan kategori Keluarga Tidak Sehat.	•Belum optimalnya penderita penyakit menular dan tidak menular yang melakukan pengobatan. •Minimnya penderita gangguan jiwa berat yang terobati. •Belum optimalnya pelaksanaan perilaku hidup sehat di masyarakat.



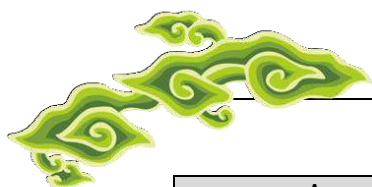
Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
	Kualitas keluarga	Belum optimalnya pembangunan keluarga	• Terdapat fenomena disfungsi keluarga. Masih tingginya keluarga yang rentan secara ekonomi. • Masih rendahnya pemahaman dan keterampilan dalam manajemen keluarga.
	Perlindungan anak	Masih terjadi peningkatan pada masing-masing kategori kasus kekerasan.	• Masih rendahnya kesadaran terhadap perlindungan anak. Tekanan ekonomi yang tinggi. • Diskriminasi terhadap kelompok rentan (kelompok minoritas, disabilitas, status sosial rendah). • Kurangnya pendidikan dan pengetahuan mengenai hak anak. • Maraknya paparan konten kekerasan dari media.
	Ketimpangan gender	Peningkatan Indeks Ketimpangan Gender	• Turunnya Indeks Pemberdayaan Gender. Masih terdapat budaya patriarki di sebagian kelompok masyarakat. Masih rendahnya kesadaran terhadap



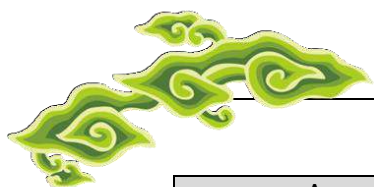
Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			stereotif gender.
	Peran pemuda	Masih rendahnya peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.	• Kurangnya anggota aktif yang memiliki komitmen dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan organisasi. • Kurangnya pemanfaatan teknologi dengan efektif untuk menarik perhatian pemuda. • Minimnya jumlah fasilitator atau pelatih yang berpengalaman dan berkualitas sehingga program tidak berjalan efektif. • Kurangnya program pelatihan yang memadai untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan organisasi di kalangan anggota muda dapat menghambat proses kaderisasi.
	Pembangunan kebudayaan	Masih minimnya upaya pelestarian budaya Cirebon	• Dukungan regulasi belum optimal. • Penggunaan atribut kebudayaan Cirebon belum melekat dalam



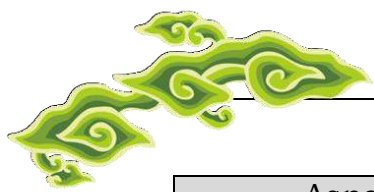
Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			keseharian masyarakat.
DAYA SAING DAERAH	Daya saing ekonomi daerah	Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan.	•Menurunnya kontribusi dari sektor-sektor strategis.
		Belum optimalnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal	•Investasi yang masuk di daerah belum optimal dalam mendorong tumbuhnya investasi lokal. •Produk-produk unggulan daerah masih mengalami hambatan di bidang pemasaran, permodalan, pemanfaatan teknologi dan informasi •Belum optimalnya sinergitas kerjasama ekonomi antar wilayah maupun antar pelaku ekonomi lokal. •Kurang akses sumber daya seperti modal, teknologi dan pelatihan. •Infrastruktur yang kurang memadai. •Minimnya inovasi dan ketergantungan daerah terhadap



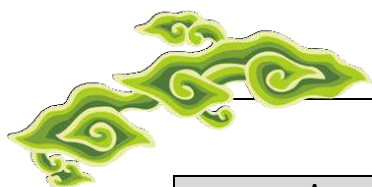
Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			ketersediaan dan produksi pangan. Belum optimalnya pemanfaatan shelter bagi sektor informal.
		Daya saing IKM/UMKM yang masih rendah.	• Masih terbatasnya pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maupun Industri Kecil dan Menengah. • Masih terbatasnya akses keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maupun Industri Kecil dan Menengah. • Masih terbatasnya inovasi dalam pengembangan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maupun Industri Kecil dan Menengah.
		Belum maksimalnya penataan dan pengelolaan pasar tradisional, baik dari segi kualitas layanan maupun okupansi kios pasar.	• Tingginya aktivitas ekonomi di Kota Cirebon belum sejalan dengan penataan dan pengelolaan pasar tradisional. • Kurangnya perhatian terhadap penataan infrastruktur fisik,



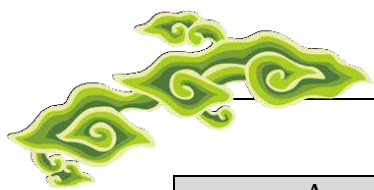
Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			mobilitas barang dan manusia. •Belum optimalnya strategi manajemen untuk mengoptimalkan okupansi kios. •Belum optimalnya kompetensi SDM pelaku usaha di pasar tradisional.
		Kurang signifikannya peningkatan kualitas koperasi.	•Masih terdapat koperasi yang belum memenuhi kelengkapan legalitas usaha. •Manajemen yang masih konvensional. •Kurang akses terhadap sumber daya finansial. •Kurang pemberdayaan anggota koperasi. •Pola kemitraan antara koperasi dan usaha mikro-kecil belum optimal.
		Belum optimalnya pengelolaan pariwisata lokal dan industri kreatif sebagai sektor ekonomi potensial.	•Masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan. •Kurang



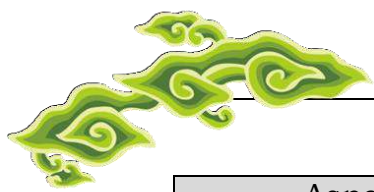
Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			memadainya sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan event-event yang diselenggarakan di Kota Cirebon. • Belum optimalnya kolaborasi pentahelix. • Kompetensi SDM industri kreatif masih di skala lokal. • Transformasi digital yang belum merata. • Promosi dan pemasaran belum efektif menjangkau pasar baru. • Kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai.
		Belum optimalnya sinergitas pelayanan perizinan.	• Keterbatasan SDM (tim teknis) dalam asesmen perijinan. • Dukungan regulasi masing-masing jenis perizinan belum optimal. • Proses bisnis pelayanan perizinan belum berjalan optimal. • Belum optimalnya kinerja pertimbangan



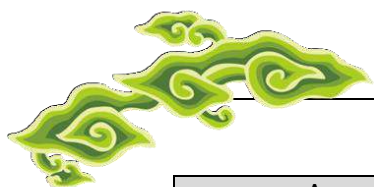
Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			teknis perijinan.
	Daya saing SDM	Terdapat gap kompetensi tenaga kerja.	• Angkatan kerja didominasi oleh lulusan SMA ke bawah. • Produktivitas tenaga kerja daerah tinggi tidak disertai dengan peningkatan pendapatan per kapita. • Jenis pelatihan berbasis kompetensi belum memadai.
		Belum optimalnya pemanfaatan (TIK).	• Pemanfaatan TIK belum sepenuhnya digunakan untuk kegiatan produktif.
	Daya saing infrastruktur	Layanan infrastruktur yang belum merata.	• Infrastruktur strategis terpusat di pusat perkotaan. • Perencanaan sebaran infrastruktur belum optimal. • Belum optimalnya keterlibatan swasta dalam penyediaan infrastruktur.
		Sistem transportasi massal yang belum optimal.	• Layanan BRT belum menjangkau seluruh area wilayah Kota Cirebon. • Belum terwujudnya integrasi antar moda transportasi.



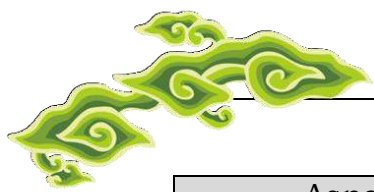
Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			(kereta api, bus, taksi dan lainnya). • Perencanaan jaringan transportasi belum memenuhi kebutuhan pergerakan lintas wilayah Kabupaten/Kota.
		Tingkat kemacetan di Kota Cirebon belum tertangani.	• Tingginya intensitas aktivitas di pusat-pusat kegiatan. • Adanya perlintasan sebidang dengan jalur kereta api. • Perilaku ketidakdisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.
		Belum optimalnya pengelolaan sampah di tingkat kota.	• Volume sampah semakin bertambah, sementara penanganan sampah masih menggunakan metode sanitary landfill. • Masih rendahnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya. • Kapasitas dan daya tampung fasilitas pengelolaan sampah di TPA Kopi Luhur masih



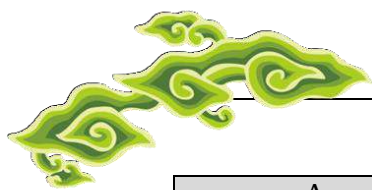
Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			sangat terbatas. • Keberadaan bank sampah belum efektif. • Peran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah belum optimal.
	Daya saing iklim investasi	Regulasi terkait insentif investasi masih terbatas.	• Belum ada kebijakan khusus terkait investasi. • Masih didominasi oleh investasi resiko rendah.
		Belum optimalnya kepastian ruang untuk investasi.	• Luas wilayah yang terbatas. • Layanan infrastruktur yang kurang mendukung. • Belum optimalnya ruang informasi bagi investor.
PELAYANAN UMUM	Tata kelola regulasi daerah	Tata kelola regulasi daerah	• Proses bisnis pembentukan regulasi daerah belum optimal. • Belum tersedia dukungan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan SOP pembentukan regulasi daerah di lingkup internal Pemda Kota Cirebon .



Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			• Belum dilakukan upaya pengukuran efektivitas regulasi daerah. • Komitmen pengendalian dan penegakan regulasi daerah belum berjalan konsisten. • Keterbatasan SDM, baik dalam hal jumlah maupun kapasitas.
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum berjalan optimal.	• Kebijakan arsitektur SPBE yang telah disusun belum diimplementasikan sepenuhnya. • Belum dilakuakn pengukuran efektivitas pada aplikasi-aplikasi penyelenggaraan layanan publik yang telah dibuat. • Pelayanan publik pada layanan publik prioritas belum terintegrasi. • Keamanan siber belum memenuhi standar.
	Pelayanan publik	Kualitas pelayanan publik belum optimal.	• Dukungan infrastruktur digital belum terpenuhi sesuai standar. • Penggunaan TIK belum merata.



Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			•Kompetensi digital penyelenggara dan pengguna pelayanan publik •Proses bisnis dalam penyelenggaraan pemerintahan belum efektif •Penyederhanaan struktur organisasi belum disesuaikan sepenuhnya pasca penyetaraan jabatan •Masih terdapat gap dalam sinkronisasi kebijakan pembangunan makro dengan sektoral •Penerapan Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik belum dilaksanakan secara merata
	Manajemen ASN	Pengelolaan sumber daya manusia ASN belum optimal.	•Penerapan sistem merit belum berjalan sepenuhnya. •Belum diterapkan manajemen talenta. •Distribusi SDM belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan unit kerja
	Manajemen resiko	Belum tersedianya	•Proses MR belum diterapkan sesuai



Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
		manajemen resiko yang handal	kebijakan • Struktur MR belum berjalan • Perencanaan belum mempertimbangkan risiko • Kompetensi pengelolaan risiko pada pegawai belum merata
	Inovasi daerah	Belum terbentuk ekosistem inovasi daerah yang efektif.	• Belum tersedia regulasi daerah untuk pengembangan inovasi daerah. • Belum optimalnya dukungan kelembagaan dalam pengelolaan inovasi daerah. • Keikutsertaan dalam gelaran inovasi masih minim. • Kemitraan dan kolaborasi belum optimal.

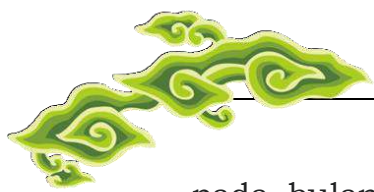
Sumber: Hasil Analisa

2.3.2 Isu Strategis

2.3.2.1 Isu Global

2.3.2.1.1 Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh seluruh dunia pada abad ke-21. Peningkatan emisi gas rumah kaca, akibat dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan produksi industri, telah menyebabkan pemanasan global. Peneliti BRIN Erma Yulihastin menyampaikan dalam acara Hari Meteorologi Dunia ke-73 di Bandung 28 Maret 2023 melalui kanal zoom bahwa *European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)* yang dilaksanakan



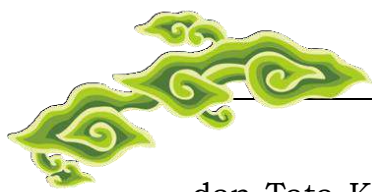
pada bulan Januari 2023 dinyatakan mengenai pemanasan global akan mencapai hingga 1,21°C dan melampaui hingga mencapai 1,5°C di bulan Maret 2023. Tantangan perubahan iklim mencakup dampak ekstrem pada cuaca, kenaikan permukaan air laut, perubahan pola hujan, dan kerugian keanekaragaman hayati. Fenomena cuaca ekstrem, seperti badai yang lebih kuat, kebakaran hutan yang meluas, dan gelombang panas yang ekstrim, semakin sering terjadi, mengancam keberlanjutan ekosistem dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Perubahan iklim juga menghadirkan tantangan untuk ketahanan pangan, mengingat perubahan pola hujan dan suhu dapat mempengaruhi produksi tanaman dan peternakan.

Untuk itu pemerintah Indonesia berupaya untuk menekan emisi gas rumah dengan percepatan program kendaraan listrik melalui Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan dan telah diubah pada Peraturan Presiden nomor 79 Tahun 2023. Pemerintah Indonesia berkomitmen pada tahun 2035 sampai tahun 2040 dapat mengurangi penjualan kendaraan berbahan bakar fosil hingga dihentikan seluruhnya untuk mencapai elektrifikasi 100% di tahun 2050⁷. Sudah saatnya penggunaan kendaraan listrik bertenaga baterai ataupun hidrogen sejak dini yang dipelopori oleh Lembaga dan Instansi Pemerintah serta mengurangi secara bertahap penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil.

2.3.2.1.2 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu pendekatan dalam pengembangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini muncul sebagai tanggapan terhadap tantangan global terkait pertumbuhan populasi, perubahan iklim, kemiskinan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan maka dibangunlah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goal (SDG's). SDG's dibangun berdasarkan lintasan historis yang telah dirintis oleh negara-negara dan PBB, termasuk The Economic and Social Council (ECOSOC) yang merupakan salah satu organisasi bagian dari PBB. Agenda SDGs berisi 17 Tujuan yang tersebar ke dalam empat pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, serta Pilar Hukum

⁷ <https://iesr.or.id/kendaraan-listrik-dan-dekarbonisasi-sektor-transportasi-darat-indonesia/>



dan Tata Kelola. Pada setiap Goal terdapat 1 (satu) atau lebih target (total terdapat 169 target), dan pada setiap target, terdapat 1 (satu) atau lebih indikator (per April 2022 terdapat total 248 indikator). SDG's terdiri dari 17 Tujuan yang mencakup empat pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola. Setiap tujuan diarahkan untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dalam bidang-bidang ini, sehingga keseluruhan pembangunan lebih seimbang dan menyeluruh.

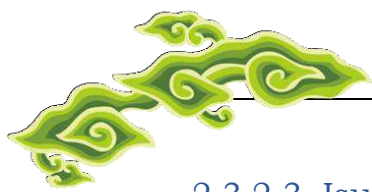
2.3.2.2 Isu Nasional

2.3.2.2.1 Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung

Kenaikan suhu global tahun 2022 mencapai 0,89 dibandingkan suhu pada tahun 1900 dan dikhawatirkan akan terus meningkat melampaui 1,5°C. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Indonesia turut berkontribusi dalam Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global. Pada tahun 2020 Indonesia berkontribusi sebesar 2,67% dari total emisi global (*Our World in Data Based on the global Carbon project, 2022*). Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim penting dan mendesak guna mengurangi risiko perubahan iklim. Dampak krisis perubahan iklim sudah lebih parah dari yang diperkirakan khususnya pada aspek ketahanan pangan, ketersediaan air, kesehatan, kemiskinan dan kematian.

Daya dukung sumber daya alam merujuk pada kemampuan suatu lingkungan atau ekosistem untuk memberikan sumber daya alam yang dapat digunakan oleh manusia tanpa merusak atau merugikan kapasitas alamiahnya untuk memperbaharui atau mempertahankan sumber daya tersebut. Ini mencakup air, tanah, hutan, energi, dan keanekaragaman hayati.

Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun mengakibatkan krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Daya tampung kualitas udara juga sudah melampaui standar baku mutu dimana konsentrasi rata-rata tahunan polusi terus meningkat dan berada di atas baku mutu. Daya tampung lahan mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas dimana sebanyak 11 provinsi memiliki kondisi buruk akibat kebakaran hutan dan lahan. Daya tampung lingkungan laut mengalami penurunan karena aktivitas yang tidak berkelanjutan dan peningkatan persaingan akan laut.



2.3.2.3 Isu Jawa Barat

2.3.2.3.1 Green dan blue economy serta pembangunan inklusif

Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektor-sektor perekonomian menjadi lebih bersih, pengarusutamaan *green economy*. Perekonomian yang bersih atau *clean economy* mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ekonomi biru atau *blue economy* mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pemanfaatan laut, samudera, dan sumber daya alam didalamnya dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan pembangunan inklusif adalah pembangunan yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga mengedepankan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik, antarindividu, antarkelompok dan antarwilayah.

2.3.2.3.2 Kualitas dan daya saing sumber daya manusia

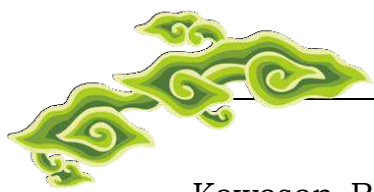
Kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Kualitas sumber daya manusia mencakup kualifikasi pendidikan, keterampilan, pengetahuan, derajat kesehatan, karakter sosial budaya dan produktivitas. Karakter sosial budaya yang inklusif adalah sosial budaya yang terbuka dan ramah serta saling menghargai. Sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Daya saing sumber daya manusia mengacu pada kemampuan untuk bersaing secara efektif dalam pasar kerja global serta kontribusi pada pembangunan.

2.3.2.3.3 Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dalam pembangunan

Penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka panjang perlu mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penggunaan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan serta mempertahankan nilai produk, bahan dan sumber daya perekonomian sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya.

2.3.2.3.4 Pembangunan Kawasan Rebana

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Cirebon didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 87/2021 tentang Percepatan Pembangunan



Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Berdasarkan Peraturan tersebut, percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan. Pengembangan kawasan tersebut berbasis ecoindustry, yang dilakukan melalui pembangunan eco-industrial park atau kawasan industry berwawasan lingkungan.

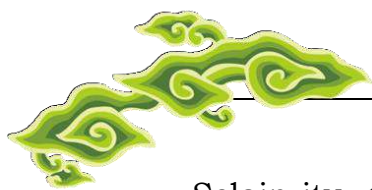
Dalam kebijakan percepatan pembangunan Kawasan Rebana, arah fungsi kawasan perkotaan di Kota Cirebon diarahkan sebagai Pusat Perkotaan Inti yang berperan melayani kegiatan skala internasional. Kawasan Peruntukan Industri Cirebon yang berlokasi di Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon pada Kawasan Rebana dengan spesialisasi investasi, seperti: Industri pengolahan makanan dan minuman, furnitur dan barang dari kayu, perkapalan, pakan, bahan galian non-logam, bahan bangunan, pengolahan garam konsulasi, pengolahan *hotmix* dan pengolahan beton.

Beberapa program yang akan dikembangkan di Kota Cirebon diantaranya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap I & Tahap II dan Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan. Merespon hal tersebut terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh Kota Cirebon untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan perkembangan kota dengan adanya pengembangan kawasan Rebana tersebut. Perkembangan kawasan peruntukan industry di pengembangan Rebana akan membawa dampak bagi pergerakan arus barang dan orang yang melewati kota Cirebon. Hal ini harus dipandang sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan oleh kota Cirebon untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Cirebon.

2.3.2.4 Isu Strategis Kota Cirebon

2.3.2.4.1 Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia

Kota Cirebon mengutamakan peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang mengacu pada Pemerintah Kota Cirebon telah melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Beberapa kebijakan tersebut termasuk dalam upaya penguatan pemberdayaan masyarakat, akselerasi pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan produktivitas daya saing daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan kota kreatif berbasis budaya dan sejarah serta mengatasi permasalahan seperti peningkatan angka kemiskinan, penurunan nilai IIPM, dan kenaikan jumlah pengangguran.



Selain itu, terdapat juga upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran di wilayah Kota Cirebon.

2.3.2.4.2 Optimalisasi Pertumbuhan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing Tinggi, Inklusif, dan Berkelanjutan

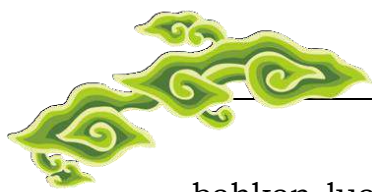
Potensi ekonomi lokal yang memiliki daya saing tinggi, inklusif, dan berkelanjutan menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi lokal Kota Cirebon mengacu pada aktivitas ekonomi yang tumbuh dan memiliki potensi daya saing. Cakupan aktivitas ekonomi lokal di Kota Cirebon seperti UMKM, IKM, sektor ekonomi kreatif, pariwisata lokal, perikanan, termasuk aktivitas yang terjadi pada pasar tradisional dan modern.

Pertama-tama, fokus pada daya saing tinggi menuntut pemanfaatan sumber daya lokal, pengembangan inovasi, dan peningkatan produktivitas. Dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif, komunitas lokal dapat menonjolkan sektor-sektor unggulannya dalam pasar global. Selanjutnya, inklusivitas dalam konteks ini menekankan pentingnya memberdayakan semua lapisan masyarakat, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah serta industri kecil dan menengah. Dengan menyediakan akses terhadap pelatihan, pendanaan, dan pasar, ekonomi lokal inklusif menciptakan peluang yang setara untuk pertumbuhan usaha bagi semua. Terakhir, aspek berkelanjutan merujuk pada prinsip-prinsip pembangunan yang memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan, mendukung pekerjaan yang layak, dan mempromosikan inklusi sosial adalah kunci untuk mencapai ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan memadukan ketiga dimensi ini, potensi ekonomi lokal dapat dioptimalkan, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dan memperkuat daya saing di tingkat yang lebih luas.

Dampak yang akan ditimbulkan ketika isu ini mampu diintervensi dengan baik yaitu peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, peningkatan kapasitas pelaku usaha dari segi akses keuangan, inovasi produk, pemasaran, dan adaptasi teknologi, peningkatan jaringan infrastruktur pendukung sarana ekonomi, peningkatan daya saing potensi ekonomi dari sektor pariwisata dan industri kreatif, dan peningkatan peluang investasi

2.3.2.4.3 Ketahanan Pangan dan Air

Masalah pokok ketahanan pangan di Kota Cirebon mencakup tingginya ketergantungan terhadap ketersediaan dan produksi pangan, yang dapat menyebabkan kerentanan terhadap gangguan pasokan dan fluktuasi harga pangan. Pertama-tama, ketergantungan pada pasokan pangan luar kota atau



bahkan luar provinsi dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan pasokan, terutama dalam situasi darurat atau krisis kesehatan seperti pandemi. Terbatasnya produksi lokal juga dapat berdampak negatif terhadap ketahanan pangan, mengingat adanya risiko gangguan dalam rantai pasokan yang panjang.

Selain itu, faktor perubahan iklim dan bencana alam dapat mempengaruhi produksi pangan lokal di Kota Cirebon. Jika kota ini terlalu bergantung pada pasokan dari luar wilayah, kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam dapat meningkat, menyebabkan ketidakpastian dalam ketersediaan pangan. Dalam konteks ini, diversifikasi sumber pasokan pangan dan pendorong produksi lokal menjadi krusial. Mendorong pertanian perkotaan, mendukung petani lokal, dan membangun sistem distribusi pangan yang efisien dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar kota. Inisiatif ini juga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat lokal dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, edukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan lokal dan budaya makanan sehat dapat memberikan dukungan kepada usaha lokal dan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat komunitas. Pembangunan kebijakan yang mendukung inisiatif pertanian perkotaan dan penyediaan insentif bagi pelaku usaha lokal juga menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah ketergantungan pada pasokan dan produksi pangan di Kota Cirebon. Dengan demikian, upaya bersama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat membantu membangun ketahanan pangan yang lebih kokoh dan berkelanjutan di tingkat lokal.

2.3.2.4.4 Optimalisasi Ruang Kota Tanpa Melampaui Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan

Optimalisasi ruang kota menjadi sangat penting dalam konteks pertumbuhan perkotaan yang cepat dan berkelanjutan. Untuk menjawab kebutuhan populasi yang terus berkembang, diperlukan perencanaan perkotaan yang bijak dan berkelanjutan. Optimalisasi ruang kota adalah langkah untuk memastikan bahwa pertumbuhan perkotaan tidak melampaui daya dukung daya tampung lingkungan.

Ruang kota bukanlah sumber daya tidak terbatas, melainkan suatu ekosistem yang memerlukan pemeliharaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Optimalisasi ruang kota mencakup penggunaan lahan yang efisien, pelestarian ruang terbuka hijau, dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Hal ini, harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, keseimbangan ekosistem perkotaan, dan kemampuan alam untuk menanggung beban dari aktivitas manusia. Integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan perkotaan diharapkan dapat mengoptimalkan pertumbuhan perkotaan,



menjaga keanekaragaman lingkungan, serta memastikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi penduduk kota.

2.3.2.4.5 Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif mengacu pada upaya pemerintah Kota Cirebon untuk mengembangkan sistem tata kelola yang lebih baik dan efektif dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah dapat mencakup digitalisasi pelayanan publik, kolaborasi antar daerah dan pelaku pembangunan, koordinasi perencanaan dan penganggaran untuk percepatan pembangunan, serta peluang dan tantangan dalam penerapan kontrak kinerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Transformasi riset dan inovasi juga dapat membantu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.3.2.4.6 Kemantapan Jaringan Infrastruktur Perkotaan yang Inklusif dan Berketahanan di Seluruh Wilayah

Kemantapan jaringan infrastruktur perkotaan yang mendukung kehidupan dan aktivitas masyarakat menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Cirebon. System transportasi yang terintegrasi, kualitas jalan yang baik, ketersediaan energy dan kelistrikan, ketersediaan air minum dan sanitasi, infrastruktur pelayanan public sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Kota Cirebon bersama dengan para pemangku kepentingan berkomitmen dan bercita-cita untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang ada dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Hal ini digambarkan secara ringkas dalam visi dan misi pembangunan Kota Cirebon untuk jangka panjang maupun menengah. Pemerintah Kota Cirebon berupaya untuk meningkatkan berbagai aspek pembangunan secara seimbang dan berkelanjutan sehingga akan tercipta masyarakat yang maju dan sejahtera sebagaimana tertuang pada Visi RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan yaitu “KOTA CIREBON MAJU, SEJAHTERA, BERKELANJUTAN”. Visi jangka Panjang ini selanjutnya menjadi pijakan dalam perumusan visi jangka menengah untuk periode 2025-2029.

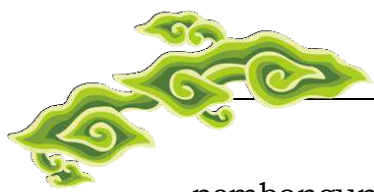


Gambar 3.1 Sinkronisasi Visi Pembangunan 2025-2045

3.1 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 2025-2029

3.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang ingin diwujudkan atau cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh Pemerintah Daerah bersama seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam periode jangka panjang atau jangka menengah. Visi mencerminkan arah



pembangunan yang bersifat aspiratif, menggambarkan cita-cita kolektif, serta menjadi dasar dalam penyusunan misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Visi dalam RPJMD merupakan Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan lima tahun.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjabarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam lima tahun ke depan, sebagai dasar untuk menyusun tujuan, sasaran, program, serta indikator kinerja pembangunan yang terukur.

Visi dan Misi ini disusun berdasarkan hasil identifikasi terhadap kondisi objektif daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, tantangan dan peluang pembangunan, aspirasi masyarakat, serta sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Cirebon menetapkan visi pembangunan daerah yang menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi Kota Cirebon untuk periode Tahun 2026-2029 berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA KOTA CIREBON YANG SEJAHTERA, TERTATA, ASPIRATIF, RELIGIUS, AMAN DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029."

Lebih ringkasnya, visi ini kemudian disingkat dengan:

"Terwujudnya Kota Cirebon yang "SETARA Berkelanjutan Tahun 2029"

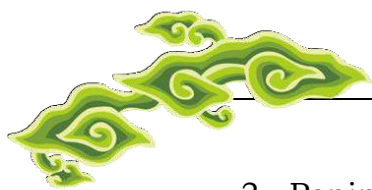
Visi ini menggambarkan cita-cita kolektif Kota Cirebon untuk menjadi kota yang setara dalam pelayanan publik, setara dalam pembangunan antar wilayah di Kota Cirebon, setara dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya dan setara dengan kota-kota maju lainnya dengan mengedepankan kekuatan budaya lokal sebagai basis identitas dan sumber daya ekonomi.

Berikut ini penjelasan pernyataan Visi "Terwujudnya Kota Cirebon yang "SETARA Berkelanjutan" Tahun 2029":

SEJAHTERA

Pembangunan di Kota Cirebon berorientasi pada kemajuan di segala bidang, berbasis pada budaya dan kearifan lokal yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon yang secara materiil dapat terpenuhi melalui:

1. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat yang diikuti dengan pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat,
2. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat,



3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,
4. Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat,
5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur penunjang lainnya.

TERTATA

1. Bahwa aparatur Pemerintah Kota Cirebon perlu ditata agar menjadi birokrasi yang berintegritas, akuntabel, kapabel, adaptif dan responsif terhadap kemajuan jaman.
2. Bahwa wilayah Kota Cirebon perlu untuk ditata agar sesuai dengan peruntukan wilayah dalam rencana tata ruang dan tata wilayahnya, agar tertib dan teratur berlandaskan pada keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

ASPIRATIF

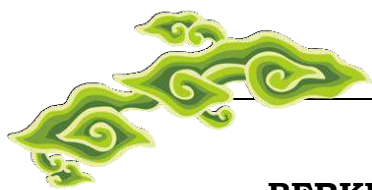
1. Peningkatan sinergitas dan harmonisasi hubungan, koordinasi dan kerjasama antar lembaga (eksekutif, legislatif, yudikatif, forkopimda, instansi vertikal lainnya dan antar pemerintah daerah).
2. Transparansi dan Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (LKK, Posyandu, Pihak Swasta, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Pers/Media, LSM, Kelompok Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Keagamaan, Pemangku Adat, Budayawan, Ormas dan Unsur Masyarakat lainnya).

RELIGIUS

1. Nilai-nilai luhur keagamaan dan budaya menjadi spirit Aparatur Pemerintahan untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (*Good and Clean Governance*) dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa, efektif, efisien, berintegritas, akuntabel, kapabel, adaptif dan responsif terhadap kemajuan jaman.
2. Nilai-nilai luhur keagamaan dan budaya tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat

AMAN

1. Semua pihak taat peraturan dan hukum demi terciptanya keamanan dan ketertiban bersama.
2. Dalam penegakkan Peraturan Daerah tetap dengan pendekatan manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kemaslahatan bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Kondusifitas kamtibmas untuk mendorong stabilitas ekonomi dan peningkatan iklim investasi serta pengembangan usaha.



BERKELANJUTAN

Kemampuan kota untuk menjaga dan mendukung produktifitas masyarakat dan lingkungan dengan aman dan nyaman secara terus menerus tanpa terbatas waktu.

Untuk mendukung pencapaian visi Terwujudnya Kota Cirebon Yang “SETARA Berkelanjutan” Tahun 2029, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang menjadi dasar perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama periode RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja.

Misi ini berfokus pada pengembangan manusia agar mampu menghadapi tantangan zaman, dunia kerja dan perubahan global. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam arti memiliki tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan keterampilan yang tinggi, mendorong karakter yang religi, mandiri, dan produktif serta mampu berdaya saing di tingkat lokal maupun nasional dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada.

Misi II: Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal

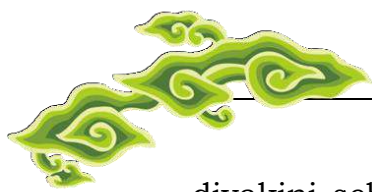
Pembangunan diprioritaskan pada penguatan ekonomi kota berbasis sektor unggulan.

Misi ini berfokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi lokal seperti perdagangan dan jasa, pariwisata heritage dan religi, seni dan budaya, kuliner dan kerajinan.

Misi III: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pembangunan diprioritaskan pada meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Misi ini berfokus pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik



diyakini sebagai salah satu strategi utama dalam mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien.

Misi IV: Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan berketahanan

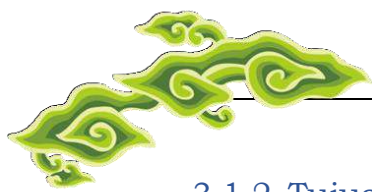
Pembangunan diprioritaskan pada penataan lingkungan perkotaan yang berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.

Misi ini berfokus pada upaya penataan ruang kota berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan, dengan memperhatikan mitigasi bencana melalui pengendalian pemanfaatan lahan di daerah rawan bencana serta menjaga daerah resapan air agar tetap hijau dan berfungsi optimal. Pengelolaan sampah yang terpisah antara organik dan anorganik, serta larangan membuang sampah di sungai, menjadi bagian penting untuk mencegah pencemaran dan bencana lingkungan. Hal ini disertai upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, khususnya pengembangan dan pemeliharaan ruang hijau sebagai paru-paru kota yang berfungsi menurunkan suhu udara, menyerap polutan, mengendalikan erosi, serta meningkatkan daya serap air hujan sehingga dapat mengurangi risiko banjir dan kekeringan. Dalam hal itu juga dilakukan upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam konservasi lingkungan, seperti gerakan penanaman pohon, sedekah air, dan pengelolaan sampah secara masif sebagai upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan memperkuat ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.

Misi V: Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal

Pembangunan diprioritaskan pada terwujudnya kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan.

Misi ini berfokus pada upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi sosial dan budaya lokal sebagai modal utama dalam membangun kota yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pemberdayaan sosial dan budaya lokal tidak hanya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya dan tradisi yang menjadi identitas masyarakat, namun sekaligus meningkatkan potensi ekonomi masyarakat. Lebih jauhnya, hal ini diyakini dapat meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mampu beradaptasi dan berperan aktif dalam proses pembangunan daerah yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat tanpa kecuali.



3.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2029

3.1.2.1 Tujuan

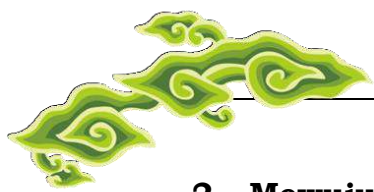
Tujuan pembangunan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon ke dalam arah pembangunan yang lebih terukur dan sistematis. Tujuan ini disusun sebagai bagian penting dalam menyusun kerangka kerja pembangunan jangka menengah daerah yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai selama periode perencanaan 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dalam RPJMD Kota Cirebon bertujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi pencapaian pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kondisi faktual, potensi lokal, serta tantangan strategis yang dihadapi. Tujuan ini juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, sehingga diharapkan mampu menciptakan sinergi antar lembaga pemerintahan. Tujuan dari RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul, kompetitif dan berkarakter

Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, kompetitif dan berkarakter merupakan salah satu tujuan dari misi pertama yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Tujuan ini menggambarkan pembangunan manusia, yang tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas individu dari segi intelektual dan keterampilan, tetapi juga menekankan pentingnya karakter dan daya saing. Tujuan mewujudkan SDM unggul yang memiliki kapasitas tinggi dari segi intelektual dan keterampilan, kreatifitas hingga kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Membangun SDM yang kompetitif dan berkarakter dalam arti mampu bersaing secara sehat baik di tingkat lokal maupun nasional, mendorong terciptanya tenaga kerja yang tidak hanya siap kerja tapi juga mampu menciptakan lapangan kerja. Pembangunan manusia tidak hanya dari aspek kognitif dan keterampilan tetapi juga karakternya. Karakter menjadi pondasi utama agar SDM memiliki moral/etika, integritas, dan tanggungjawab. Karakter yang kuat akan menjadi penyangga utama agar tercipta SDM unggul yang kompetitif dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Tujuan ini sejalan dengan agenda Pembangunan Nasional dan global (SDGs), serta menjadi dasar bagi pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Pencapaian tujuan ini akan mendorong peningkatan daya saing daerah maupun negara secara keseluruhan, dan menjadi investasi jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah.

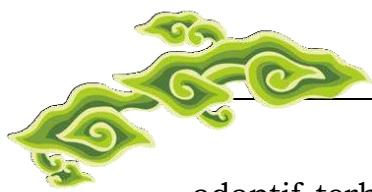
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah merupakan salah satu tujuan dari misi ke dua yaitu Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal. Tujuan ini menggambarkan upaya untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah secara merata dan berkesinambungan berbasis pada potensi khas Kota Cirebon yang mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok miskin, rentan dan pelaku UMKM. Pembangunan ekonomi dikuatkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar yang memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon seperti perdagangan, jasa, pariwisata heritage dan religi, seni dan budaya, kuliner dan kerajinan.

Tujuan ini sejalan dengan visi Pembangunan Nasional yang menekankan pentingnya *economic growth with equity* dan keberlanjutan. Dengan memaksimalkan potensi lokal, daerah dapat membangun ketahanan ekonomi sendiri, mengurangi ketimpangan antar wilayah, dan menjadi kontributor signifikan terhadap perekonomian nasional.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu tujuan dari misi ke tiga yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tujuan ini menggambarkan pembangunan pemerintahan yang bertumpu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana pemerintah hadir sebagai fasilitator dan pelayan masyarakat secara efektif, efisien, dan terpercaya. Pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjamin keterbukaan informasi, memperkuat kepercayaan publik, mengurangi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, memastikan masyarakat ikut mengawasi jalannya pemerintahan secara aktif. Penyelenggara pemerintahan juga harus bertanggungjawab terhadap kebijakan, pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran secara terbuka dan jujur. Pemerintahan yang partisipatif membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Fokus utama dari peningkatan tata kelola pemerintahan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, ditandai dengan layanan yang cepat, murah, mudah, adil, dan ramah dengan sistem layanan yang



adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menjawab tuntutan masyarakat secara efektif.

4. Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan

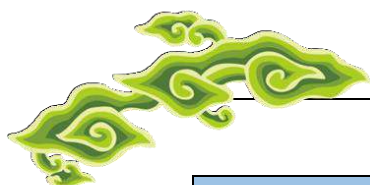
Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan merupakan salah satu tujuan dari misi ke empat yaitu Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan berketahanan. Tujuan ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kota Cirebon mewujudkan kota yang tertata rapi, nyaman dan ramah lingkungan dengan mempertimbangkan keseimbangan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan berketahanan guna mendukung kualitas hidup masyarakat dan keberlangsungan pembangunan kota.

5. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, melalui pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan.

Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, melalui pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan merupakan salah satu tujuan dari misi ke lima yaitu Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal. Tujuan ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan fokus utama pada penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan. Penurunan kemiskinan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh melalui pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, pelestarian budaya lokal, serta pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap tahapan pembangunan.

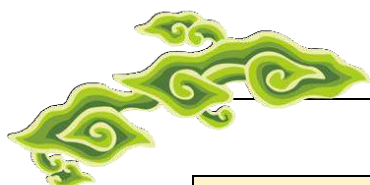
3.1.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dengan cakupan yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam jangka waktu menengah. Sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Cirebon disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap capaian yang ingin diraih selama periode lima tahun ke depan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan program, kegiatan, dan indikator kinerja daerah. Sasaran disusun agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan Kota Cirebon. Dengan adanya sasaran yang terukur, pemerintah daerah memiliki pijakan yang kuat dalam mengelola pembangunan secara efektif dan akuntabel. Hasil rumusan sasaran pembangunan Kota Cirebon Tahun 2025-2029 berdasarkan visi, misi dan tujuan adalah sebagai berikut:



Tujuan 1	Terwujudnya SDM yang unggul, kompetitif dan berkarakter
Indikator Tujuan	• Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
SASARAN 1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas
Indikator Sasaran	• Harapan Lama Sekolah • Angka Literasi/Numerasi • Rata-rata Lama Sekolah
SASARAN 2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara merata
Indikator Sasaran	• Usia Harapan Hidup (UHH) • Prevalensi Stunting • Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk*
SASARAN 3	Meningkatnya kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat usia produktif
Indikator Sasaran	• Tingkat produktivitas tenaga kerja kota
SASARAN 4	Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius
Indikator Sasaran	• Indeks Pengembangan SDM Berkarakter*

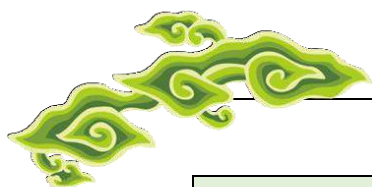
Tujuan 2	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah.
Indikator Tujuan	• Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) • Indeks Gini
SASARAN 1	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan jasa, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif
Indikator Sasaran	• Kontribusi PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran • Kontribusi PDRB sektor Transportasi dan pergudangan • Kontribusi PDRB sektor Pariwisata • Kontribusi PDRB sektor ekonomi kreatif • Indeks Akses Keuangan Daerah
SASARAN 2	Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif
Indikator Sasaran	• Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) • Persentase peningkatan investasi
SASARAN 3	Meningkatnya kinerja BUMD
Indikator Sasaran	• Return on Asset (ROA) BUMD
SASARAN 4	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dan Koperasi
Indikator Sasaran	• Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB • Rasio Volume Usaha UMKM terhadap PDRB
SASARAN 5	Meningkatnya kesempatan kerja
Indikator Sasaran	• Tingkat Kesempatan Kerja



SASARAN 6	Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru
Indikator Sasaran	- Indeks ekonomi hijau pilar Ekonomi - Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
SASARAN 7	Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan
Indikator Sasaran	- Indeks Ketahanan Pangan Daerah - Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)

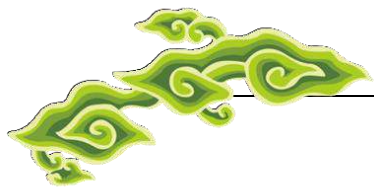
Tujuan 3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas
Indikator Tujuan	- Indeks Reformasi Birokrasi - Indeks Daya Saing Daerah
SASARAN 1	Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel
Indikator Sasaran	- Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah - Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Nilai SAKIP Kota - Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah - Indeks SPBE/Pemerintah Digital (Pemdi)
SASARAN 2	Meningkatnya lingkungan kota yang tentram, tertib dan kondusif bagi masyarakat
Indikator Sasaran	Indeks ketenteraman dan ketertiban umum
SASARAN 3	Meningkatnya kinerja dan profesionalisme ASN
Indikator Sasaran	Indeks Profesionalitas ASN
SASARAN 4	Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Indikator Sasaran	- Indeks Pelayanan Publik - Indeks Kepuasan Masyarakat
SASARAN 5	Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik
Indikator Sasaran	Indeks inovasi Daerah

Tujuan 4	Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan
Indikator Tujuan	Persentase penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca
SASARAN 1	Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup
Indikator Sasaran	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



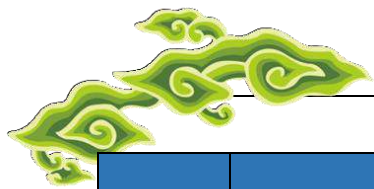
SASARAN 2	Tertatanya ruang kota yang fungsional, estetis, dan ramah lingkungan dengan pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas
Indikator Sasaran	• Indeks Layanan Infrastruktur Kota • Proporsi ruang terbuka hijau • Indeks Smart City
SASARAN 3	Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi
Indikator Sasaran	• Rasio konektivitas kota
SASARAN 4	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim
Indikator Sasaran	• Indeks Resiko Bencana • Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif

Tujuan 5	Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan
Indikator Tujuan	• Persentase tingkat kemiskinan
SASARAN 1	Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
Indikator Sasaran	• Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan akses layanan dasar
SASARAN 2	Meningkatnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya daerah yang berkelanjutan
Indikator Sasaran	• Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya
SASARAN 3	Meningkatnya kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan, serta tercapainya kesetaraan gender
Indikator Sasaran	• Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan • Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) • Indeks Pembangunan Gender/IPG • Indeks Ketimpangan Gender • IPA (Indeks Perlindungan Anak)
SASARAN 4	Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis
Indikator Sasaran	• Indeks Harmoni Indonesia

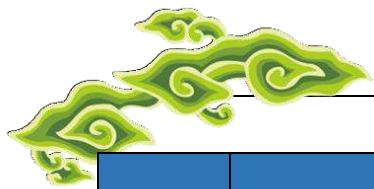


Tabel 3.1
Rumusan Visi Misi Tujuan dan Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2025-2029

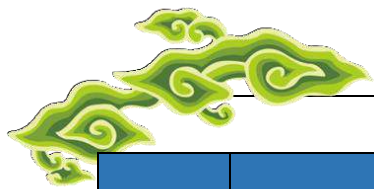
VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	BASELINE	TARGET					KET
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : TERWUJUDNYA KOTA CIREBON YANG SEJAHTERA, TERTATA, ASPIRATIF, RELIGIUS, AMAN DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029													
MISI 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing													
		Indeks Pembangunan Manusia	Poin			77,08	77,91	78,99	79,11	79,42	79,86	80,30	
		1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Peserta didik memperoleh layanan pendidikan secara merata dan mampu mencapai standar kompetensi literasi dan numerasi yang ditetapkan nasional.	Harapan Lama Sekolah	Persen	13,17	13,18	13,19	13,20	13,21	13,22	13,23	
				Angka Literasi/Numerasi	Skor	67,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	
				Rata-rata Lama Sekolah	Persen	13,16	13,18	13,19	13,20	13,21	13,22	13,23	
		2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara merata	Masyarakat menikmati layanan kesehatan yang mudah dijangkau, sehingga angka harapan hidup meningkat dan kasus penyakit menular dapat ditekan.	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	75,48	75,48	75,61	75,74	75,87	76,00	76,13	
				Prevalensi Stunting	Persen	14,90	13,95	13,05	12,95	11,25	10,35	10,00	
				Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk*	per 100.000 pddk	1,136	451	405	359	359	359	359	



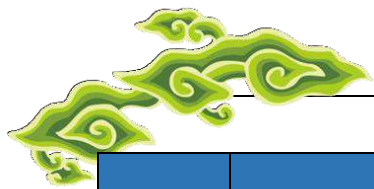
VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	BASELINE	TARGET					KET
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3. Meningkatnya kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat usia produktif	Angkatan kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri lokal, sehingga daya saing dan produktivitas tenaga kerja meningkat.	Tingkat produktivitas tenaga kerja kota	Rupiah Per Tenaga Kerja	47.920.181,23	49.360.000	50.840.000	52.360.000	53.930.000	55.550.000	57.220.000	
		4 Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius	Pemuda dan pelajar menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral, budaya, dan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.	Tingkat Pengembangan SDM Berkarakter*									
MISI 2. Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal													
	Tujuan 2 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah			Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,02	4,98 -5,39	6,14	6,15 - 7,41	6,16 - 7,64	6,17 - 7,96	6,18 - 8,00	
				PDRB per kapita	Rupiah Juta	88,56	91,98	98,97	101,9 - 103,65	105,69 - 108,49	109,33 - 113,48	112,97 - 119,18	
				Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,29	6,21	6,00	5,99	5,98	5,89	5,81	
				Indeks Gini	Indeks	0,424	0,422	0,419	0,417	0,415	0,412	0,409	
		1. Meningkatnya kontribusi sektor jasa perdagangan,	Sektor-sektor unggulan daerah tumbuh pesat, tercermin dari	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran	persen	27,31	28,33	28,37	28,42	28,46	28,51	28,53	



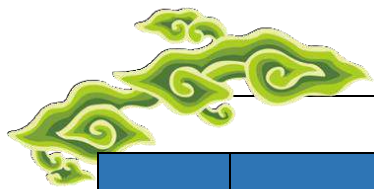
VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	BASELINE	TARGET					KET
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif	meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru.	Kontribusi PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan	persen	15,14	15,18	15,21	15,23	15,26	15,30	15,32	
				Kontribusi PDRB sektor Pariwisata	persen	5,72	5,82	6,12	6,16	6,22	6,24	6,50	
				Kontribusi PDRB sektor Ekonomi Kreatif	persen	18,79	18,8	18,85	18,95	19,00	19,10	19,15	
		2. Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	Investor merasakan kemudahan dalam proses perizinan dan insentif, sehingga realisasi investasi daerah meningkat setiap tahun.	Indeks Akses Keuangan Daerah	poin	6,68	6,68	6,68	6,68	6,69	6,69	6,69	
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen PDRB	24,34	24,34	24,41	24,48	24,55	24,62	24,69	
				Persentase peningkatan investasi	persen	18,83	13,25	14,00	14,75	15,00	15,25	15,55	
		3. Meningkatnya kinerja BUMD	BUMD mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui peningkatan efisiensi dan inovasi layanan.	Return on Asset (ROA) BUMD	persen	N/A	2,51	2,69	2,86	3,03	3,21	3,38	
		4. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dan Koperasi	Pelaku UMKM dan koperasi memperoleh akses permodalan, pelatihan, serta pemasaran yang lebih luas sehingga omzet usaha meningkat.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	persen	2,38	2,39	2,40	2,41	2,42	2,43	2,44	
				Rasio Volume Usaha UMKM terhadap PDRB	persen	0,28	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	



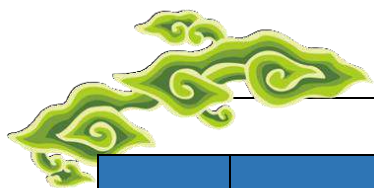
VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	BASELINE	TARGET					KET
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5. Meningkatnya kesempatan kerja	Terserapnya angkatan kerja dalam lapangan pekerjaan formal dan informal, sehingga tingkat pengangguran terbuka menurun	Tingkat Kesempatan Kerja	persen	93,71	94,71	95,71	96,71	97,71	98,71	99,71	
		6. Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru	Pelaku usaha dan masyarakat memanfaatkan sumber daya alam secara lestari untuk menciptakan nilai tambah ekonomi serta menjaga keberlanjutan lingkungan	Indeks ekonomi hijau pilar Ekonomi	Indeks	69,19	70,12	73,11	75,12	76,36	77,79	79,31	
				Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	persen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
		7. Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Ketersediaan dan distribusi pangan daerah terjaga, sehingga masyarakat tidak mengalami kekurangan pangan sepanjang tahun.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Indeks	83,78	84,12	84,46	84,79	85,13	85,47	85,80	
				Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	6,56	5,46	5,34	5,19	5,01	4,80	4,55	
MISI 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik													
	Tujuan 3 Meningkatnya tata			Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	85,14	85,24	85,34	85,44	85,54	85,64	85,74	



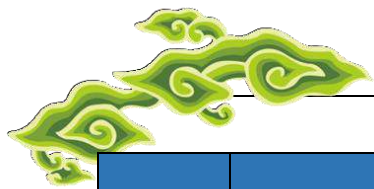
VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	BASELINE	TARGET					KET
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.			Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,95	4,00	4,05	4,10	4,15	4,20	4,25	
		1. Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel	Proses administrasi pemerintahan berjalan transparan dan responsif, didukung oleh sistem digital yang terintegrasi.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	97,94	97,95	99,10	99,32	99,54	99,76	99,97	
				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3.074	3.100	3.140	3.180	3.220	3.260	3.300	
				Nilai SAKIP Kota	Skor	69,04	69,25	69,50	69,75	70,00	70,50	71,00	
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	N/A	66,75	72,08	76,08	79,08	80,33	81,58	
				Indeks SPBE/Pemerintah Digital (Pemdi)	Poin	3,2	4,13	2,7	2,7	2,9	2,9	3,0	
		2. Meningkatnya lingkungan kota yang tentram, tertib dan kondusif bagi masyarakat	Tingkat kriminalitas dan pelanggaran ketertiban menurun, serta masyarakat merasa aman dalam beraktivitas di ruang publik.	Indeks ketenteraman dan ketertiban umum*	Poin								
		3. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme ASN	ASN menunjukkan kinerja optimal, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan	Indeks Profesionalitas ASN	Skor	77,75	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	



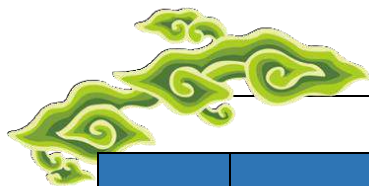
VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	BASELINE	TARGET					KET
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			sistem pemerintahan berbasis elektronik.										
		4. Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik meningkat, serta aspirasi warga terakomodasi secara efektif.	Indeks Pelayanan Publik	Skor	3,97	4,04	4,15	4,24	4,33	4,42	4,51	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86,59	86,64	86,69	86,74	86,79	86,84	86,89	
		5. Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Pemerintah daerah mampu menghadirkan solusi kreatif berbasis teknologi untuk mempercepat pelayanan masyarakat.	Indeks Inovasi Daerah	Poin	53,24	53,74	54,24	54,74	55,24	55,74	56,24	
MISI 4. Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan berketahanan													
	Tujuan 4 Terwujudnya penataan lingkungan kota yang berkelanjutan			Penurunan Intensitas Emisi GRK	tonCO2eq/2010 IDR Milyar	N/A	0,15	0,36	0,58	0,85	1,24	1,52	
		1. Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup	Kualitas udara, air, dan ruang terbuka hijau terjaga, serta pengelolaan sampah berjalan efektif dan ramah lingkungan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59,20	52,99	53,24	53,50	53,75	54,00	54,25	
		2. Tertatanya ruang kota yang fungsional, estetis,	Infrastruktur kota tertata baik, ruang	Indeks Layanan Infrastruktur Kota*									



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	BASELINE	TARGET					KET
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dan ramah lingkungan dengan pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas	publik hijau bertambah, dan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas umum meningkat	Proporsi ruang terbuka hijau*									
				Indeks Smart City	Indeks	3,31	3,44	3,51	3,59	3,67	3,75	4,00	
		3. Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi	Warga dapat memanfaatkan transportasi publik yang nyaman, terintegrasi, dan ramah lingkungan untuk mobilitas sehari-hari.	Rasio Konektivitas Kota	Persen	N/A	0,18	0,26	0,36	0,42	0,53	0,60	
		4. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Risiko bencana dapat diminimalisir melalui kesiapsiagaan, infrastruktur mitigasi, dan sistem peringatan dini yang efektif.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	112,32	112,32-112,07	112,07-111,82	111,82-111,57	111,57-111,32	111,32-111,07	111,07-110,82	
				Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	tonCO2eq	5.587,79	8.381,49	13.093,63	19.656,96	29.634,96	46.302,61	67.186,46	
MISI 5. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal													
	Tujuan 5 Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan			Tingkat kemiskinan	Persen	9,02	8,37	7,80	7,00	6,04	5,00	4,56	



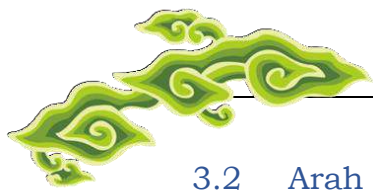
VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	BASELINE	TARGET					KET
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1. Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Kelompok rentan dan masyarakat miskin menerima bantuan sosial dan layanan dasar secara tepat sasaran.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat akses layanan dasar*	Persen	N/A	46,61	57,29	67,96	78,64	89,32	100	
		2. Meningkatnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya daerah yang berkelanjutan.	Warisan budaya daerah tetap lestari dan menjadi daya tarik wisata serta sumber edukasi generasi muda.	Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	persen	65,59	69,63	70,68	73,78	73,97	74,12	74,50	
		3. Meningkatnya kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan, serta tercapainya kesetaraan gender.	Keluarga, pemuda, dan kelompok rentan memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan*	Indeks	65,7	66,6	67,5	68,4	69,4	70,3	71,3	
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	61,4-61,9	61,54-62,8	61,74-64,1	61,94-65,3	62,14-66,5	62,34-67,6	62,54-68,7	
				Indeks Pembangunan Gender/IPG	Poin	95,83	95,85	95,87	95,89	95,91	95,93	95,95	
				Indeks Ketimpangan Gender	Poin	81,14	81,11	81,08	81,10	81,12	81,14	81,16	
				IPA (Indeks Perlindungan Anak)*	poin	N/A	67,63	67,65	67,67	67,69	67,71	67,73	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	BASELINE	TARGET					KET
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4. Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis.	Keluarga, pemuda, dan kelompok rentan memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.	Indeks Harmoni Indonesia	skor	N/A	6,65	6,70	6,75	6,80	6,85	6,90	

Sumber: Hasil Analisa Bappelitbangda Kota Cirebon, 2025.

* Realisasi IKLH masih menggunakan metode lama, sedangkan target menggunakan metode baru (sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh KLHK nomor : SK 129 tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029) dimana perubahan antara metode lama dan baru ini menyebabkan penurunan nilai IKLH.



3.2 Arah Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2025-2029

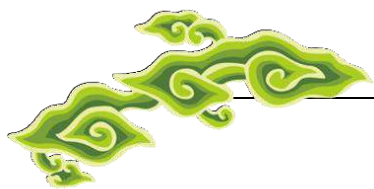
Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah yang selaras dengan arah pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Cirebon menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai pedoman utama dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan program pembangunan lima tahunan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon disusun sebagai penjabaran awal dari visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon tahun 2025-2045, yaitu “Kota Cirebon Maju, Sejahtera, Berkelanjutan”. Visi ini mencerminkan tekad bersama untuk mewujudkan Kota Cirebon sebagai kota yang memiliki daya saing ekonomi, infrastruktur yang mantap serta tata kelola pemerintahan yang adaptif, masyarakat Kota Cirebon memiliki derajat kesehatan, kualitas pendidikan, pekerjaan, dan tingkat sosial yang layak, memiliki ketahanan, kemandirian dan produktif serta berwawasan lingkungan untuk generasi masa depan.

Sebagai periode awal dari empat tahapan pembangunan dua puluh tahunan, RPJMD 2025-2029 memiliki peran strategis dalam meletakkan pondasi transformasi pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah Kota Cirebon untuk periode RPJMD Tahun 2025-2029 mengacu pada perumusan kerangka kerja pencapaian misi RPJPD 2025-2045 tahap pertama dengan tema Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola. Pada tahap pertama (Fondasi) merupakan persiapan dasar pembangunan yang berkesinambungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta penguatan capaian kinerja pembangunan yang belum optimal. Upaya penguatan fondasi dilaksanakan dengan mengacu pada pentahapan 8 Misi RPJPD 2025-2045 tahap I sebagai berikut:

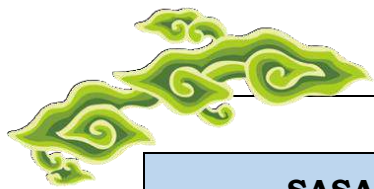
1. Peningkatan pemenuhan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta produktivitas sumber daya manusia.
2. Penguatan ekonomi lokal yang inovatif dan kesempatan kerja.
3. Penataan birokrasi yang adaptif dan responsif serta pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan sistem penegakan peraturan daerah.
5. Penguatan landasan perlindungan kebudayaan lokal dan tata kelola lingkungan hidup dengan partisipasi masyarakat.
6. Penyediaan infrastruktur mantap.
7. Penguatan basis data untuk penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar secara merata.
8. Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan kota yang berkelanjutan.

Dengan berpedoman pada pentahapan pencapaian misi RPJPD 2025-2045 tahap pertama (2025-2029) serta mengacu pada visi misi Wali Kota Cirebon periode 2025-2030, maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah Kota Cirebon sebagai berikut:

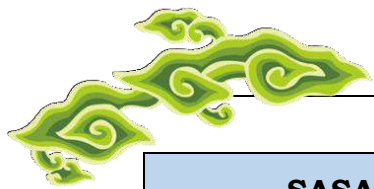


Tabel 3.2
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kota Cirebon

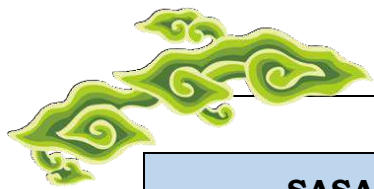
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
MISI 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing			
TUJUAN 1. Terwujudnya SDM yang unggul, kompetitif dan berkarakter			
1.1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Optimalisasi partisipasi dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	- Menyediakan beasiswa pendidikan untuk siswa dari keluarga tidak mampu serta melakukan fasilitasi untuk kemudahan akses terhadap beasiswa pendidikan dari beragam sumber pembiayaan serta - melakukan Peningkatan rasio guru terhadap murid sesuai standar nasional.	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan 4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 5. Program Pembinaan Perpustakaan
	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter	- Melaksanakan implementasi kurikulum deep learning dengan fokus literasi, numerasi, dan digitalisasi. - mengintegrasikan muatan budaya lokal terutama dalam mata	



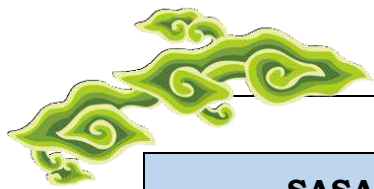
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		pelajaran seni, sejarah, dan kewarganegaraan.	
	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang merata di seluruh wilayah kota	Meningkatkan penyelenggaraan PAUD secara merata dengan memperhatikan kualitas pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan anak didukung sarana dan kualifikasi tenaga pendidik sesuai standar.	
	Kebijakan peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik sesuai dengan keahliannya	Memastikan adanya kemudahan informasi dan akses bagi setiap guru untuk mengikuti program sertifikasi dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi.	
	Penataan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur layanan pendidikan yang sesuai standar.	• Memastikan tersedianya data eksisting kondisi sekolah yang akurat • Melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat atau sedang di semua jenjang pendidikan.	



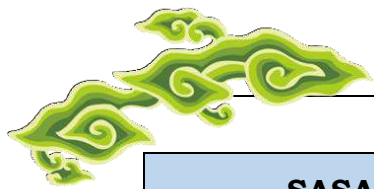
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Kebijakan pendidikan nonformal dan pendidikan terbuka, serta penyiapan akses dan pembangunan pendidikan bagi warga tidak mampu sebagai upaya peningkatan inklusi sosial, pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan.	Menyelenggarakan kursus keterampilan berbasis BLK komunitas serta program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C) yang terintegrasi dengan pelatihan kerja.	
	Penyiapan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan.	Mengembangkan program kaderisasi guru dan tenaga kependidikan	
1.2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara merata	Peningkatan akses terhadap kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas serta dapat menjangkau seluruh wilayah untuk pelayanan primer dan rujukan	• Meningkatkan layanan kesehatan melalui peningkatan layanan Puskesmas 24 jam, layanan 119, • Menyediakan fasilitas layanan rumah sakit yang fokus melayani warga Kota Cirebon.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Pemenuhan sarana dan prasarana air minum, sanitasi, ruang terbuka hijau untuk mendukung aktivitas fisik dan pola hidup sehat	• Meningkatkan kualitas lingkungan dengan layanan sanitasi sehat dan akses air bersih, baik individual maupun komunal,	



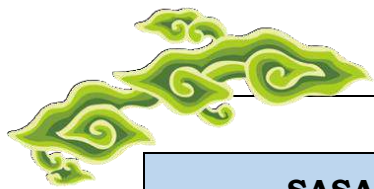
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		Revitalisasi taman kota sebagai ruang-ruang publik yang diiringi upaya meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.	4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan dan Minuman
	Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta memastikan distribusi tenaga medis dan non medis yang merata di seluruh wilayah layanan Kota Cirebon.	
	Pencegahan dan penuntasan stunting dengan dukungan integrasi data melalui pemanfaatan sistem informasi geospasial dan pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan lokal untuk mendukung upaya menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi	- Meningkatkan kualitas upaya penanggulangan stunting melalui optimalisasi peran Posyandu, Posbindu dan Poskesma di tiap kelurahan; - Peningkatan PMT berbasis pangan lokal bergizi, yang didukung upaya pemanfaatan sistem informasi geospasial untuk integrasi data perencanaan,	



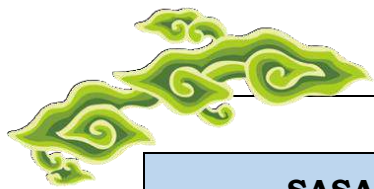
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		• Monitoring dan evaluasi konvergensi program dalam pencegahan dan penuntasan stunting.	
	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	• Meningkatkan dukungan kesehatan ibu dan anak melalui program 1000 HPK berbasis kunjungan rumah, • Menyediakan klinik laktasi dan edukasi reproduksi di Puskesmas, • Menyediakan ruang menyusui dan pojok ASI di fasilitas-fasilitas publik.	
	Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim	• Meningkatkan deteksi dini atau screening • Melaksanakan pengobatan untuk penyakit menular, termasuk TBC; • Melakukan edukasi perubahan iklim di	



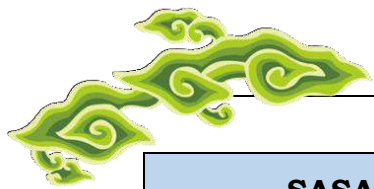
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		sekolah maupun komunitas.	
	Kebijakan layanan jaminan kesehatan nasional	• Memperluas cakupan BPJS melalui dukungan APBD; • Meningkatkan kualitas layanan jaminan kesehatan melalui penguatan koordinasi dengan fokus pada mutu layanan • Penguatan layanan aduan serta pendampingan klaim kesehatan.	
1.3. Meningkatnya kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat usia produktif	Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum melalui upskilling maupun reskilling yang terintegrasi dengan pemagangan dan penempatan tenaga kerja.	• Mengembangkan kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan industri lokal (pariwisata, pariwisata, UMKM, digital), • Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha/industri untuk program magang terstruktur dan sertifikasi kompetensi,	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Program Hubungan Industrial 4. Program Penempatan Tenaga Kerja
	Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan		



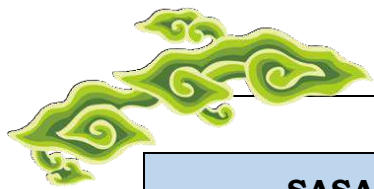
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		• Fasilitasi inkubasi bisnis dan start-up lokal dengan dukungan akses pembiayaan dan teknologi, • Penyelenggaraan job fair dan bursa kerja online secara rutin, • Mengembangkan pusat pelatihan vokasi terpadu (BLK, pelatihan digital, pelatihan wirausaha).	
1.4 Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius	Penguatan dan pengembangan individu yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas moral, etika kerja, dan mentalitas unggul dalam menyiapkan generasi emas	• Mengintegrasikan pendidikan karakter, budaya lokal, dan nilai religius ke dalam kurikulum sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler, • Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komunitas pemuda dalam program penguatan moral dan kebangsaan; • Menyelenggarakan program pelatihan kepemimpinan, bela negara, dan literasi	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 3. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan



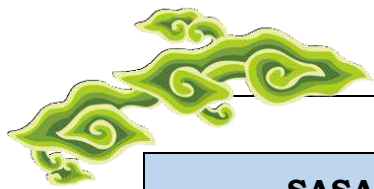
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		kebangsaan untuk pemuda; • Merevitalisasi kegiatan seni, olahraga, dan budaya sebagai wadah pengembangan karakter dan disiplin; • Program penghargaan bagi pemuda, pelajar, dan komunitas yang berprestasi dalam kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya.	
MISI 2. Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal			
Tujuan 2 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah			
2.1. Meningkatnya kontribusi sektor jasa perdagangan, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif	Peningkatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor jasa dan perdagangan didukung fasilitas MICE (Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran) yang sinergis dengan rencana pengembangan kawasan Rebana	• Mengembangkan sistem transportasi dan logistik terpadu yang mendukung sektor perdagangan dan pariwisata • Mengembangkan fasilitas MICE sebagai pusat kegiatan bisnis dan pariwisata yang sinergis	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



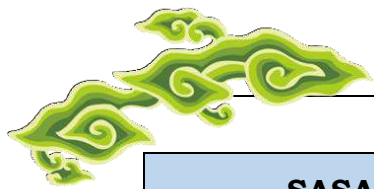
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		dengan pengembangan kawasan Rebana	4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Penguatan tata kelola sektor perdagangan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing, peningkatan ekspor, pembukaan pasar baru, pengembangan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia	• Mengembangkan ekosistem perdagangan berbasis digital • Meningkatkan akses pasar dan efisiensi distribusi, • Mendorong diversifikasi komoditas dan produk unggulan daerah • Memperkuat infrastruktur pasar yang ada • Mengembangkan pusat-pusat ekonomi kreatif dan inkubasi usaha berbasis potensi lokal • meningkatkan kapasitas pelaku usaha	5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 6. Program Pengelolaan Permuseuman 7. Program Pembinaan Sejarah 8. Program Pengembangan Kebudayaan 9. Program Pengembangan Kesenian Tradisional



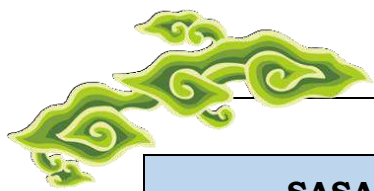
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Penataan dan penguatan daya tarik wisata budaya dan wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif sejalan dengan pengembangan MICE.	• Menata dan memperkuat daya tarik wisata budaya, sejarah, dan religi berbasis kearifan lokal; • Mengembangkan kawasan wisata perkotaan yang terintegrasi dengan kegiatan perdagangan dan ekonomi kreatif • Meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendukung wisata, termasuk sarana MICE, ruang publik, dan aksesibilitasnya • Peningkatan kolaborasi pemerintah, komunitas dan pelaku usaha dalam pengelolaan destinasi wisata.	



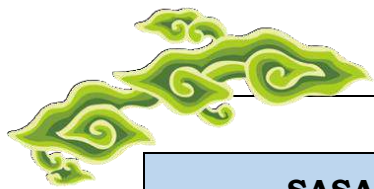
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
2.2. Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	Penguatan regulasi dan peningkatan kualitas pelayanan investasi	• Menyusun peta potensi investasi daerah berbasis data spasial dan sektoral, • Menyederhanakan regulasi dan prosedur perizinan untuk meningkatkan kemudahan berusaha, • Memperkuat kapasitas aparatur dalam pelayanan investasi dan promosi daerah, • Meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan pelaku usaha dan asosiasi bisnis untuk mendorong investasi produktif • Mengembangkan promosi investasi terpadu melalui platform digital dan kegiatan forum bisnis.	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pelayanan Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal



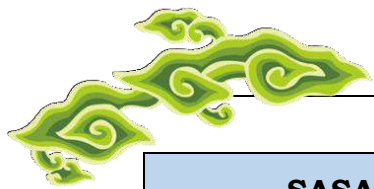
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Peningkatan penyelenggaraan layanan OSS, digitalisasi perizinan dan investasi	• Optimalisasi penyelenggaraan layanan OSS (Online Single Submission) secara terintegrasi di daerah • Mengembangkan dan peningkatan kualitas layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) berbasis digital, • Mengintegrasikan data dan sistem informasi perizinan lintas perangkat daerah untuk mempercepat pelayanan • Meningkatkan literasi digital bagi pelaku usaha dan aparatur terkait sistem OSS	
2.3. Meningkatnya kinerja BUMD	Penataan dan restrukturisasi BUMD	• Melakukan evaluasi kinerja • Meningkatkan tata kelola Pemerintahan dalam pengelolaan BUMD;	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Program Perekonomian Dan Pembangunan



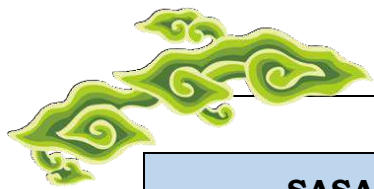
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		- Memperkuat kapasitas manajemen pengelola BUMD - Mengoptimalkan aset dan potensi sektor-sektor strategis daerah yang dikelola BUMD - Memberikan layanan masyarakat serta berkontribusi pada peningkatan PAD.	3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.4. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dan Koperasi	Penguatan proses bisnis UMKM dan koperasi melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis serta akses terhadap jasa keuangan.	- Pelatihan literasi digital dan manajemen usaha bagi pelaku UMKM dan koperasi, didukung platform daring - Menyediakan ruang inovasi serta inkubasi bisnis kolaboratif antar pelaku usaha, lembaga riset, dan perguruan tinggi - Mendukung penciptaan produk dan layanan baru.	- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) - Program Pengembangan UMKM - Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri



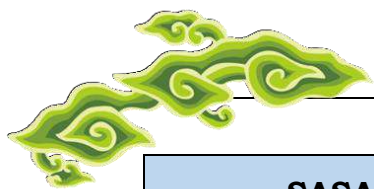
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.	• Mengembangkan ekosistem UMKM dan Koperasi berbasis komunitas dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang inklusif, • Fasilitasi pembentukan rumah produksi bersama serta membangun inkubator bisnis daerah.	Nasional 5. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 6. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 7. Program Pengembangan Ekspor 8. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 9. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 10. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 11. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 12. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen



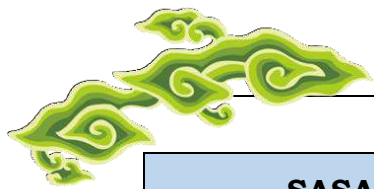
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
			13. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 14. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 15. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 16. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
	Perluasan akses pemasaran domestik dan global bagi UMKM melalui kemitraan, promosi digital, dan penguatan branding produk lokal.	• Memperluas akses pemasaran domestik dan global bagi UMKM melalui kemitraan, promosi digital, penguatan branding produk lokal, • Marketplace digital berbasis lokal untuk pemasaran dan pembinaan UMKM.	
	Peningkatan akses pembiayaan berbasis inklusi keuangan dan digitalisasi.	Fasilitasi akses dan inovasi pembiayaan didampingi klinik keuangan dan advokasi bisnis inklusif.	



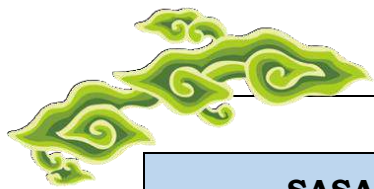
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Industrialisasi koperasi terutama pada komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna	• Mengembangkan koperasi berbasis komoditas unggulan daerah melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar, • Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajerial koperasi • Memfasilitasi kemitraan koperasi dengan pelaku usaha dan industri lokal.	
	Peningkatan kualitas alat ukur berstandar mutu nasional	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian alat ukur yang sesuai standar	
2.5. Meningkatnya kesempatan kerja	Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha bagi IKM/UMKM maupun usaha yang dapat menyerap tenaga kerja padat karya terampil.	• Memperluas dan memperkuat kerja sama dengan dunia usaha, industri, dan lembaga pelatihan; • Penyediaan lapangan kerja ; • Mendorong investasi di sektor-sektor produktif	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Program Hubungan Industrial



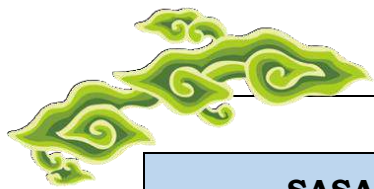
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		yang menyerap banyak tenaga kerja lokal.	4. Program Penempatan Tenaga Kerja
	Peningkatan iklim investasi daerah melalui kemudahan perizinan dan kepastian hukum	• Menyederhanakan proses perizinan usaha melalui digitalisasi layanan OSS daerah, • Meningkatkan kemudahan perizinan dan insentif bagi pelaku usaha padat karya.	
	Penguatan sektor UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Mengembangkan kawasan ekonomi kreatif dan inkubator bisnis untuk UMKM maupun start-up	
	Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan vokasional	Mendirikan pusat pelatihan kerja terpadu (BLK daerah) sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja	
	Diversifikasi lapangan kerja berbasis pariwisata, perdagangan, dan jasa modern	Melaksanakan revitalisasi kawasan wisata dan perdagangan untuk menciptakan multiplier	



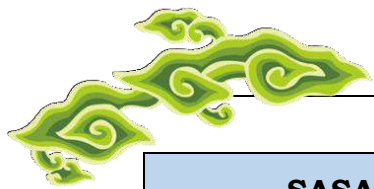
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		effect penyerapan tenaga kerja	
	Optimalisasi peran BUMD sebagai motor penciptaan lapangan kerja baru	Mengembangkan unit-unit usaha baru dalam naungan Perumda yang berorientasi padat karya	
	Pemberian insentif fiskal dan nonfiskal bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja lokal	Memberikan subsidi bunga kredit atau insentif bagi perusahaan yang memprioritaskan tenaga kerja lokal	
	Pengembangan ekosistem kewirausahaan dan start-up berbasis teknologi digital	Menyelenggarakan job fair rutin, sistem job matching digital, serta program pendampingan start-up berbasis teknologi	



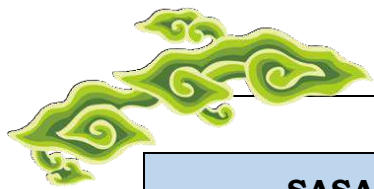
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
2.6. Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan usaha ekonomi lokal berbasis ekonomi hijau dan biru	• Melaksanakan fasilitasi pelatihan dan pendampingan UMKM/IKM di sektor pertanian, perikanan, dan pengelolaan limbah ramah lingkungan • Meningkatkan literasi masyarakat melalui praktik ekonomi hijau, efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan; • Pemberdayaan kelompok tani dan nelayan untuk mengelola sarana produksi bersama secara efisien.	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 4. Program Penanganan Kerawanan Pangan 5. Program Pengawasan Keamanan Pangan 6. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 7. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 8. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian



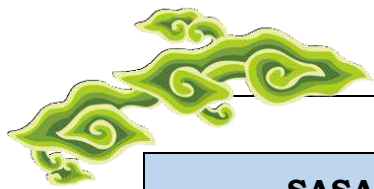
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
			9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 10. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 11. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 12. Program Penyuluhan Pertanian
	Penyediaan sarana prasarana pendukung untuk pengembangan varietas unggul komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan	Meningkatkan infrastruktur pendukung pertanian dan perikanan seperti irigasi, embung, dan pasar hasil tani, ternak ataupun laut, serta fasilitasi penyediaan bibit, benih, dan pakan unggul ramah lingkungan.	
	Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan	Memperkuat kelembagaan koperasi sektor pertanian dan perikanan sebagai lembaga ekonomi rakyat;	



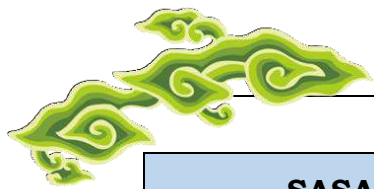
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		• Meningkatkan kemitraan usaha antara koperasi, pelaku pasar, dan lembaga keuangan termasuk dalam hal fasilitasi akses pembiayaan mikro dan kredit usaha rakyat berbasis hijau dan biru • Mengembangkan sistem asuransi pertanian dan perikanan untuk mitigasi risiko gagal panen atau penurunan hasil.	
	Pengembangan perikanan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan.	• Promosi praktik perikanan berkelanjutan dengan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, • Mengembangkan ekowisata bahari dan usaha olahan hasil laut berbasis masyarakat pesisir, rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove) sebagai penopang ekonomi biru;	



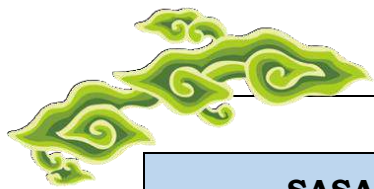
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		• Pendampingan kelompok nelayan dalam diversifikasi usaha.	
	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak dalam peningkatan produksi hasil perikanan	• Meningkatkan literasi digital dan manajemen usaha bagi kelompok nelayan termasuk dalam hal akses informasi kelautan dan cuaca; • Mendukung keselamatan dan efisiensi kerja; • Pemanfaatan teknologi digital dalam penyebaran informasi pasar hasil tangkapan.	
	Penyediaan sarana dan prasarana bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan	• Modernisasi sarana tangkap dan pengolahan hasil perikanan, • Membangun fasilitas cold storage dan logistik hasil laut, • Memperkuat promosi dan perluasan pasar ekspor produk perikanan unggulan daerah.	



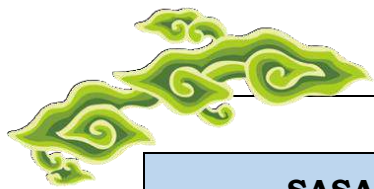
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
2.7. Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Peningkatan produktivitas pertanian yang berdaya saing dengan infrastruktur yang terintegrasi	Meningkatkan efisiensi dan kualitas infrastruktur pertanian seperti irigasi, drainase, dan akses pemasaran.	- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, optimalisasi lahan produktif, perluasan penerapan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pertanian	- Meningkatkan pengendalian dan pengawasan tata ruang untuk mencegah konversi lahan pertanian pangan berkelanjutan, - Optimalisasi lahan produktif, fasilitasi kebijakan insentif bagi petani dan masyarakat; - Mempertahakan lahan pertanian maupun lahan sawah dilindungi, - Meningkatkan program pemanfaatan lahan pekarangan dengan model urban farming, hidroponik, atau aquaponik di wilayah perkotaan dan pesisir.	- Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan - Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Pengawasan Keamanan Pangan - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan - Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian



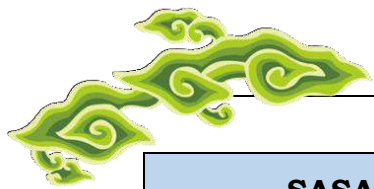
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
			9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 10. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 11. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 12. Program Penyuluhan Pertanian
	Peningkatan produksi peternakan, melalui peningkatan jumlah populasi ternak	• Fasilitasi penyediaan bibit, pakan, dan sarana peternakan yang berkelanjutan, • Meningkatkan kapasitas peternak melalui pelatihan manajemen usaha, pakan, dan kesehatan ternak.	
	Perluasan pembentukan kampung perikanan budidaya serta peningkatan kapasitas pembudidaya	• Mengembangkan kawasan kampung perikanan berbasis	



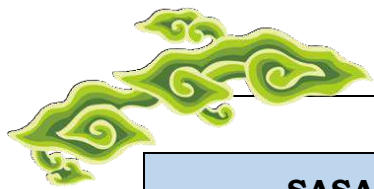
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		ekonomi biru dan ramah lingkungan, • Pendampingan dan pelatihan pembudidaya tentang teknologi dan manajemen usaha perikanan serta promosi dan pemasarannya.	
	Pembangunan pasar atau jaringan distribusi untuk makanan yang tersisa atau mendekati tanggal kadaluarsa yang aman dan terstruktur	• Membangun sistem manajemen pangan berkelanjutan untuk mengurangi limbah makanan, • Pemberdayaan pelaku usaha pangan lokal untuk mengelola dan menyalurkan produk yang masih layak konsumsi.	
	Penguatan kerja sama dan kelembagaan sektor pangan serta pengembangan produksi pangan di rumah tangga	• Memperkuat kelembagaan pangan daerah untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan, • Mengembangkan usaha pertanian skala rumah tangga dan komunitas	



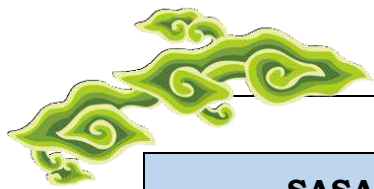
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		• Mengembangkan model bisnis pangan berkelanjutan berbasis komunitas dan digital.	
	Peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat tentang pentingnya kualitas konsumsi dan pemenuhan gizi seimbang serta pentingnya mengurangi pemborosan pangan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan	• Kampanye edukasi dan sosialisasi budaya konsumsi pangan sehat dan berkelanjutan, • Menjalankan promosi inovasi produk olahan lokal yang sehat dan ramah lingkungan; • Meningkatkan peran sekolah, lembaga pendidikan, dan komunitas dalam edukasi gizi seimbang dan zero waste.	
	Peningkatan pengetahuan dan akses masyarakat tentang pemanfaatan lahan pertanian di perkotaan salah satunya dengan pemanfaatan pekarangan atau rooftop farming untuk mendukung produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil	• Memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat melalui program pertanian perkotaan dan pertanian vertikal; • Fasilitasi jejaring pasar lokal untuk hasil pertanian perkotaan, dan penguatan kebijakan tata	



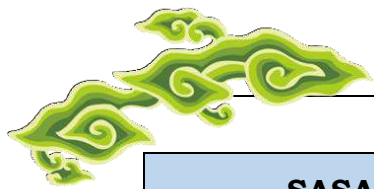
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		ruang untuk mendukung pertanian di kawasan perkotaan.	
	Penerapan praktik pertanian Tangguh untuk mendorong system produksi pangan yang berkelanjutan	• Menjalankan penerapan praktik pertanian ramah lingkungan (konservasi air, pengelolaan tanah, dan pupuk organik), sistem pertanian cerdas iklim; • Mendorong sertifikasi produk pertanian hijau.	
	Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis	• Meningkatkan perlindungan kesehatan melalui vaksinasi massal hewan ternak dan peliharaan, pemantauan rutin; • Edukasi masyarakat tentang zoonosis dan hidup sehat bersama hewan.	
	Pengawasan kualitas produk peternakan yang beredar, dengan pemeriksaan organoleptis dan pengujian laboratorium,	• Meningkatkan upaya pengawasan pangan hewani,	



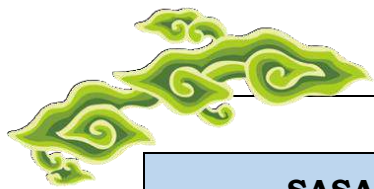
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	serta sosialisasi kualitas dan penanganan produk asal hewan	• Upaya sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai keamanan pangan; • Menyediakan prosedur yang adaptif dan responsif dalam penanganan hewan terindikasi zoonosis.	
MISI 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Tujuan 3 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas			
3.1. Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel	Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	• Menyusun dan menyelaraskan regulasi lintas wilayah dan lintas sektor • Mendukung pelayanan publik terpadu, • Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan antar wilayah untuk pengelolaan layanan publik bersama; • Meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah dalam pengelolaan lintas sektor.	1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral



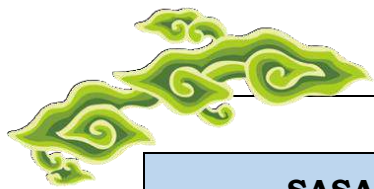
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH			
1	2	3	4			
			5. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat			
	Pembangunan sistem pengelolaan dan penyusunan regulasi daerah.	• Optimalisasi sistem digital untuk manajemen regulasi dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah, • Melakukan harmonisasi dan deregulasi kebijakan untuk mengurangi tumpang tindih aturan; • Mendorong partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan daerah.	6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Pembangunan infrastruktur digital yang merata, penguatan kapasitas SDM, dan peningkatan keamanan SPBE untuk percepatan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital.	• Mengembangkan infrastruktur jaringan dan data center pemerintahan, • Meningkatkan kompetensi ASN di bidang teknologi informasi dan keamanan siber;	7. Program Perekonomian Dan Pembangunan	8. Program Administrasi Pemerintahan Desa	9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat;	10. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD;



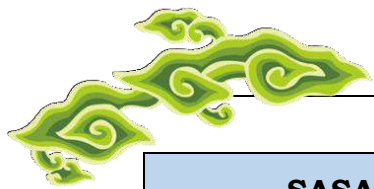
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		• Mengintegrasikan layanan publik melalui portal pelayanan digital terpadu.	12. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
	Pengembangan infrastruktur manajemen risiko untuk pengendalian pembangunan.	• Menyusun sistem manajemen risiko pembangunan daerah berbasis data dan teknologi informasi, • Melakukan audit risiko secara berkala pada proyek strategis daerah; • Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mitigasi risiko pembangunan.	13. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 14. Program Riset Dan Inovasi Daerah 15. Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Penguatan peran Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah yang terkoordinasi dan sinergis	• Meningkatkan kapasitas aparaturnya penegak Perda, • Membangun mekanisme koordinasi dan pengawasan antar instansi yang terkait dengan penegakan Perda, • Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penegakan hukum daerah.	16. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 17. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 18. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 19. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



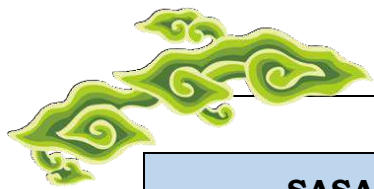
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Peningkatan kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan berbagai aspek pembangunan daerah	• Aktif dalam forum kerja sama antar daerah dalam bidang pelayanan publik, ekonomi, dan lingkungan • Menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk percepatan pembangunan daerah.	
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	• Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi pelayanan pajak, • Mendorong pengembangan sumber pembiayaan alternatif seperti KPBU dan CSR • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah sesuai prioritas pembangunan, • Mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer pusat; • Memperkuat koordinasi lintas sektor,	



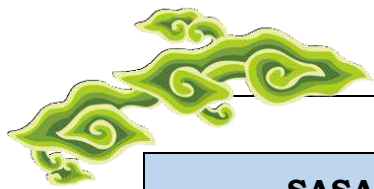
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		Menyusun perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang selaras dengan prioritas nasional.	
3. 2. Meningkatnya lingkungan kota yang tentram, tertib dan kondusif bagi masyarakat	Pengembangan kebijakan partisipasi masyarakat sipil dan adat dalam kegiatan Musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota	- Mendorong kolaborasi dengan lembaga adat, RT/RW, dan ormas untuk menjaga ketertiban sosial, - Penguatan kapasitas kelurahan dalam fasilitasi forum partisipatif dan musyawarah warga berbasis data spasial dan sosial, - penerapan e-Musrenbang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan daerah.	1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran



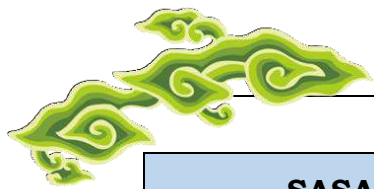
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Penguatan karakter dan identitas bangsa melalui pembinaan ideologi pancasila untuk mewujudkan kedaulatan politik hukum dan ketentraman serta ketertiban umum	• Mengembangkan program pembinaan karakter dan bela negara berbasis sekolah dan komunitas, • Mengembangkan ruang ekspresi budaya dan kearifan lokal untuk memperkuat identitas Cirebon sebagai kota budaya; • Meningkatkan kolaborasi lintas sektor untuk pencegahan konflik sosial dan kriminalitas perkotaan.	1. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	Penguatan peran Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah yang terkoordinasi dan sinergis	• Membangun sistem pengelolaan penegakan perda yang mengintegrasikan peran dan tugas Satpol PP dan Dinas Teknis terkait • Fasilitasi pelatihan terpadu Satpol PP dan aparat kelurahan dalam mediasi dan penegakan hukum non-represif.	



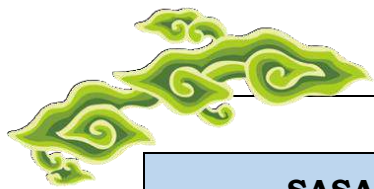
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	- Memperkuat skema kemitraan dengan BUMD dan swasta (KPBU, CSR, Sukuk Daerah). - Fasilitasi pelatihan keuangan daerah berbasis analisis fiskal modern.	
	Peningkatan kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan berbagai aspek pembangunan daerah	- Memperkuat koordinasi dengan kabupaten di wilayah Cirebon Raya untuk sinkronisasi infrastruktur dan investasi; - Mengembangkan kerja sama lintas batas untuk layanan publik dan transportasi.	
3.3. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme ASN	Pengembangan sistem meritokrasi untuk pengembangan karir ASN berbasis kinerja	- Menerapkan sistem meritokrasi secara konsisten dalam manajemen ASN melalui penempatan dan promosi jabatan berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, - Memfasilitasi pelatihan manajemen inovasi serta	- Program Kepegawaian Daerah - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia - Program Pengelolaan Arsip



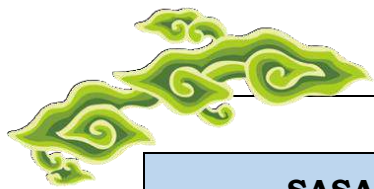
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		kepemimpinan digital bagi ASN, • Mengembangkan basis pengelolaan talenta melalui kompetensi dan prestasi.	4. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 5. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
3.4. Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kebijakan partisipasi masyarakat sipil dan adat dalam kegiatan Musrembang dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota	• Memperkuat kanal partisipasi digital untuk menjangkau generasi muda dan kelompok rentan, • Fasilitasi penggerak komunitas dan kader pembangunan kelurahan untuk memastikan suara masyarakat termarginalkan terakomodasi, • Melaksanakan survei kepuasan masyarakat berbasis digital secara periodik.	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Program Pendaftaran Penduduk 5. Program Pencatatan Sipil
	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	• Mengembangkan dashboard keterbukaan informasi publik, • Menyediakan forum dengar pendapat dan penilaian layanan publik secara rutin;	



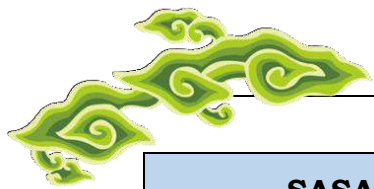
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		• Mempublikasikan secara rutin laporan kinerja perangkat daerah melalui media sosial resmi Pemerintahan kota.	
	Penguatan kolaborasi pemerintah dengan komunitas dan dunia usaha dalam pelayanan publik	• Membangun dan memperkuat kolaborasi Pentahelix (Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas, Media), • Mengembangkan CSR tematik untuk mendukung pelayanan publik dan pengelolaan kota • Meningkatkan kemitraan dengan komunitas lokal untuk pelayanan sosial.	
3.5. Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) daerah yang berdaya saing di tataran global.	• Fasilitasi kegiatan untuk mendorong lahirnya inovasi daerah untuk solusi pelayanan publik berbasis teknologi, • Melaksanakan kompetisi ide layanan publik yang melibatkan startup,	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Program Riset dan Inovasi Daerah



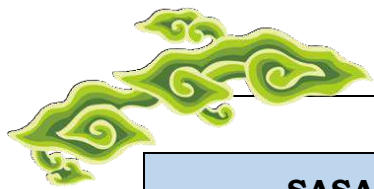
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		mahasiswa, dan komunitas teknologi; Menyediakan insentif dan penghargaan bagi ASN maupun pelaku usaha yang berhasil menghadirkan inovasi dengan dampak nyata bagi masyarakat.	
MISI 4. Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan berketahanan			
Tujuan 4 Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan			
4.1. Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup	Penguatan regulasi dan tata kelola Lingkungan Hidup dengan partisipasi masyarakat		- Program Pengelolaan Persampahan - Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) - Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)



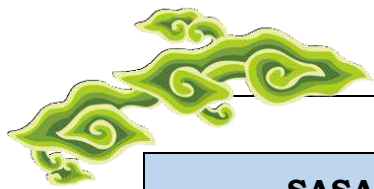
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
			4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 6. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 9. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	Penyusunan strategi pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem serta jasa lingkungannya.		
	Pengelolaan keanekaragamanhayati, pelestarian kawasan lindung, dan ekosistem alami		



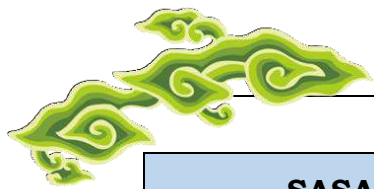
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Persiapan Pemulihan ex TPA Grenjeng menjadi kawasan lindung		
	Percepatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
	Pencapaian target pengurangan sampah dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah		
	Penerapan pengelolaan air limpasan melalui rekayasa teknis berupa pembuatan kolam retensi, biopori, dan perbaikan dan pengembangan jaringan drainase yang berwawasan lingkungan sebagai bagian dari konservasi air yang berketahanan		
	dengan peningkatan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana		
	Pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim		
	Pengintegrasian tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota		
	Peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, yang masuk kedalam badan air dan secara signifikan meningkatkan daur ulang		



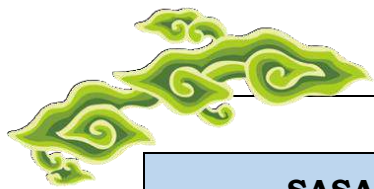
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
4.2. Tertatanya ruang kota yang fungsional, estetis, dan ramah lingkungan dengan pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas	Perencanaan dan penataan Kawasan pesisir yang sinergis dengan rencana tata ruang.		1. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 2. Program Penataan Bangunan Gedung 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 8. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional



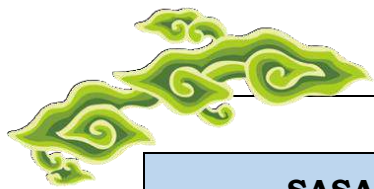
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
			9. Program Penyelenggaraan Jalan 10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 11. Program Penatagunaan Tanah 12. Program Kawasan Permukiman 13. Program Pengembangan Perumahan 14. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) 15. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
	Peningkatan kapasitas dalam upaya pembangunan rendah karbon serta penguatan adaptasi perubahan iklim		1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)



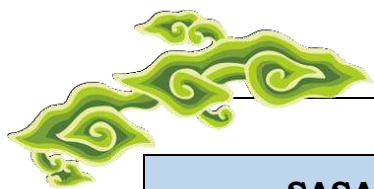
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Penyediaan dan penataan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan yang dibutuhkan untuk proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas pembangunan daerah maupun nasional diantaranya penyediaan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Cirebon, pembangunan embung, serta pendukung pengembangan MICE (Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran).		
4.3. Tertatanya ruang kota yang fungsional, estetis, dan ramah lingkungan dengan pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas	Penguatan pengelolaan jalan kota dan jalan lingkungan beserta kelengkapannya		
	Perencanaan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pemanfaatan energi rendah emisi berbasis energi baru dan terbarukan, khususnya sistem ketenagalistrikan skala kecil pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi		1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
	Penyelenggaraan penataan ruang yang mengarah pada penerapan compact city dalam penyediaan layanan perkotaan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketersediaan ruang terbuka hijau, keanekaragaman hayati, serta mempertimbangkan ketahanan terhadap		1. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya



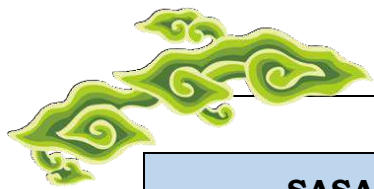
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	bencana dan perubahan iklim serta wilayah kesatuan lanskap ekologis.		
	Penyusunan rencana pengembangan kawasan, antara lain termasuk revisi RDTR, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, standar pelayanan, dsb.		
	Perencanaan dan implementasi penatagunaan tanah		
	Perencanaan penyediaan cadangan lahan untuk kepentingan pembangunan daerah.		
	Sinkronisasi periodisasi dan substansi serta integrasi rencana tata ruang dengan dokumen perencanaan pembangunan berbasis spasial		
	Penyediaan dan pengembangan perumahan yang layak dan terjangkau, infrastruktur air baku dan air minum, serta sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. Pengembangan layanan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada		



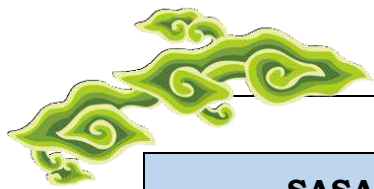
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	kawasan perkotaan untuk peningkatan ketahanan bencana.		
	Pemenuhan sarana dan prasarana persampahan		
	Peningkatan TPS menjadi TPS 3R serta optimalisasi Pusat Daur Ulang Sampah (PDU)		
	Clean and Clear lahan TPA Kopi Luhur dan revitalisasi TPA Kopi Luhur dengan pembangunann TPST dengan RDF Tahap I (240 ton/ hari)		
	Penguatan kolaborasi dan kemitraan penyediaan air bersih serta pengembangan strategi dan rencana darurat untuk mengatasi krisis air		
	Penyediaan dan penataan basis data potensi sumber daya air untuk ketersediaan air yang berkelanjutan		
	Pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh.		
	Pengembangan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air		



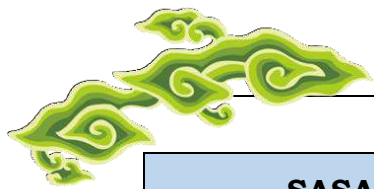
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	dengan mengoptimalkan sumber-sumber air baku alternatif, antara lain Jatigede.		
	Penyediaan dan pengelolaan data sarana prasarana pelayanan dasar yang terintegrasi dengan berbasis spasial		
	Perencanaan penyediaan hunian layak di perkotaan sesuai kebutuhan pengguna dan karakteristik wilayah antara lain melalui penyediaan hunian vertikal, rumah deret, dan optimalisasi kawasan campuran serta penataan kawasan kumuh dengan memperhatikan alternatif skema pembiayaan yang terjangkau.		
	Penyediaan, pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum yang merata, aman dan terjangkau bagi semua.		
	Peningkatan akses terhadap sanitasi yang memadai dan merata bagi semua orang		
4.4. Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas yang efisien dan merata, termasuk di Cirebon bagian selatan.		1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas perdagangan dan jasa yang inklusif dan berdaya saing, termasuk antara lain kemudahan aksesibilitas, ketersediaan prasarana		



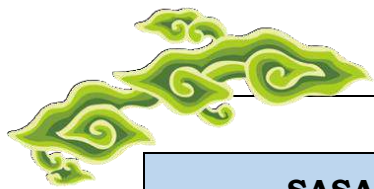
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	sarana umum yang memadai serta penyediaan akses telekomunikasi dan digital.		
	Pembangunan dan perluasan cakupan layanan sarana prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi yang saling terintegrasi antar moda pada wilayah kota dengan memperhatikan aksesibilitas terhadap prasarana umum dan obyek strategis serta kepentingan pengembangan MICE tourism.		
	Perencanaan dan penataan jaringan pergerakan yang mendukung mobilitas yang humanis dan berkelanjutan antara lain jalur pedestrian dan jalur sepeda.		
4.5. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Mainstreaming transisi energi di masyarakat		1. Program Penanggulangan Bencana
	Pengelolaan risiko bencana yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kota serta mitigasi bencana berbasis masyarakat untuk membangun kota yang berketahanan.		
	Perencanaan dan penyiapan kerangka implementasi standar bangunan dan penataan lingkungan yang berketahanan bencana dan iklim		



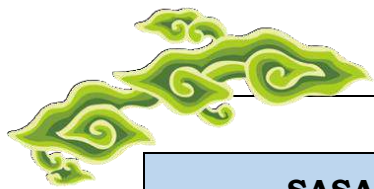
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
MISI 5. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal			
Tujuan 5 Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan yang berkelanjutan.			
5.1. Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Penguatan kebijakan pengendalian penduduk yang didukung sistem database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif Menyediakan data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan untuk mewujudkan transformasi digital layanan sosial.	• Mengembangkan sistem database kependudukan kota yang mendukung interoperabilitas data antar dinas untuk mendukung program yang tepat sasaran, • Mendukung pembangunan dashboard layanan sosial kota untuk kelompok rentan	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 5. Program Penanganan Bencana
	Pemenuhan akses sanitasi dasar pada rumah tangga, khususnya di kawasan kumuh dan pesisir	• Mengembangkan model layanan sanitasi di kawasan padat, kumuh dan pesisir, • Meningkatkan optimalisasi IPAL, • membangun IPLT • Optimalisasi layanan pengelolaan lumpur tinja, disertai kampanye perilaku hidup bersih dan sehat dengan	



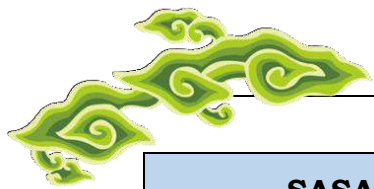
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		melibatkan komunitas dan lembaga kemasyarakatan	
	Penyediaan dan peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar yang merata khususnya di kawasan kumuh dan pesisir, meliputi antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi dan penunjang konektivitas, termasuk di kawasan Cirebon selatan.	• Mengembangkan SPAM perpipaan di kawasan padat dan berkembang, • Optimalisasi sistem air baku, • Mengembangkan alternatif sistem penyediaan air minum non perpipaan bagi wilayah-wilayah yang sulit terlayani khususnya di wilayah Cirebon selatan, • Mengembangkan jaringan drainase dan proteksi banjir, • Meningkatkan kualitas hunian dan penataan permukiman kumuh.serta • Meningkatkan sarana transportasi publik terintegrasi.	



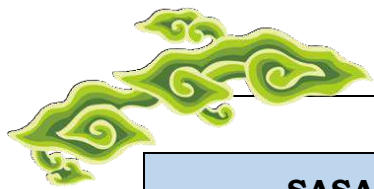
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Kebijakan masyarakat penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	• Meningkatkan kapasitas dan keterampilan kerja penyandang disabilitas yang didukung upaya fasilitasi penempatan kerja disertai penguatan regulasi daerah; • Meningkatkan kesadaran publik dan advokasi sosial.	
5.2. Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Penataan dan Pemenuhan penyediaan Jaminan Sosial terutama Bagi Kelompok Rentan dan Masyarakat	• Memperkuat data kesejahteraan sosial yang terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, • Memperluas cakupan layanan jaminan sosial di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan bantuan sosial, • Meningkatkan kapasitas lembaga layanan sosial daerah dalam menangani kelompok rentan; • Mengembangkan layanan sosial digital agar masyarakat lebih mudah mengakses bantuan dan informasi kesejahteraan.	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Penanganan Bencana 3. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 5. Program Rehabilitasi Sosial



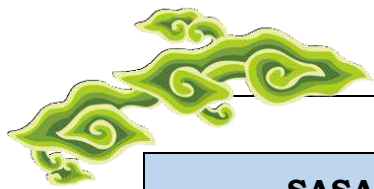
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Penguatan peran keluarga dalam pembentukan karakter masyarakat dengan kemudahan akses edukasi dan informasi publik	• Meningkatkan akses edukasi dan informasi publik, • Mengembangkan program pendidikan keluarga, • Memperluas kemitraan lintas sektor dalam mendukung ketahanan keluarga dan pembinaan generasi muda.	
	Perlindungan anak, perempuan, disabilitas, lansia dan pemuda	• Meningkatkan sistem perlindungan sosial terpadu bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan pemuda melalui penguatan layanan terpadu satu pintu, • Penyediaan pusat rehabilitasi dan pendampingan psikososial, • Penerapan mekanisme pengaduan; • Penegakan hukum yang responsif gender dan disabilitas.	



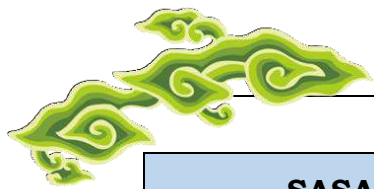
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Pemberdayaan perempuan, disabilitas, lansia dan pemuda	• Mendorong pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi perempuan, penyandang disabilitas, lansia dan pemuda untuk • Menciptakan kemandirian dan kesempatan yang setara.	
5.3. Meningkatnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya daerah yang berkelanjutan.	Penguatan peran masyarakat dalam pelestarian kebudayaan dan tradisi masyarakat Cirebon	• Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian dan revitalisasi tradisi lokal, • Mengembangkan program edukasi budaya di sekolah dan komunitas, • Fasilitasi festival budaya, pameran, dan kegiatan seni tradisional; • Mengoptimalkan peran lembaga adat, seniman, dan komunitas budaya dalam pelestarian nilai-nilai lokal.	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya



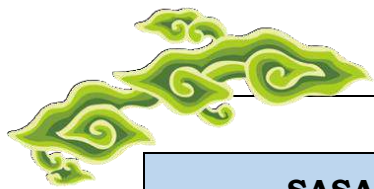
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
			6. Program Pengelolaan Permuseuman 7. Program Pembinaan Sejarah 8. Program Pengembangan Kebudayaan 9. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	Penguatan karakter dan identitas budaya lokal melalui penggunaan atribut budaya sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya Cirebon.	• Mendorong penggunaan atribut budaya dalam kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan pariwisata, • Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis nilai dan simbol budaya lokal, • Melakukan pendokumentasian dan digitalisasi karya budaya sebagai warisan pengetahuan daerah, • Memperluas promosi dan branding identitas budaya Cirebon melalui media digital dan event	



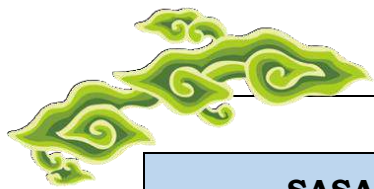
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		nasional maupun internasional.	
5.4. Meningkatnya kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan, serta tercapainya kesetaraan gender.	Peningkatan program sosial yang mendukung kesejahteraan keluarga dan pemuda, termasuk akses layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial serta integrasi perspektif gender dalam program-program pembangunan daerah.	• Mengembangkan program perlindungan sosial dan fasilitasi reintegrasi sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan korban kekerasan; • Meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan melalui kerja sama dengan lembaga kesehatan dan komunitas.	1. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 3. Program Pengendalian Penduduk 4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 5. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 6. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	Pemberdayaan kelompok rentan melalui kebijakan inklusif yang memastikan akses yang setara dan jaringan perlindungan sosial untuk memastikan tersedianya support system bagi kelompok rentan	• Menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi keluarga, pemuda, dan kelompok rentan untuk meningkatkan kemandirian dan produktivitas,	



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		• Membentuk forum atau wadah dialog antar kelompok masyarakat untuk mendukung partisipasi aktif dan advokasi kelompok rentan	8. Program Perlindungan Khusus Anak 9. Program Perlindungan Perempuan
	Penguatan kebijakan yang memperkuat kesetaraan gender, termasuk pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan partisipasi politik.	• Mengintegrasikan indikator kesetaraan dan kualitas hidup dalam monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah • Melaksanakan kampanye kesadaran dan edukasi tentang kesetaraan gender	
5.5. Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis.	Penguatan individu dan masyarakat dalam penghargaan terhadap keberagaman etnis dan agama sebagai kekayaan budaya Kota Cirebon.	• Mengembangkan kampanye kesadaran mengenai dampak positif keberagaman bagi pembangunan sosial dan ekonomi di Kota Cirebon • Fasilitasi forum dialog antar kelompok masyarakat untuk menyelesaikan konflik	1. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 3. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter

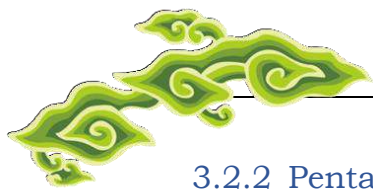


SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		secara damai dan membangun harmoni.	Kebangsaan 4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan 5. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	Integrasi nilai-nilai keberagaman dan perdamaian dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal	• Mengembangkan program pendidikan untuk meningkatkan pemahaman; • penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan etnis yang ada di Kota Cirebon. .	



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Pengembangan kolaborasi antar komunitas melalui kegiatan sosial dan kebudayaan yang mempromosikan inklusivitas dan toleransi.	Menyelenggarakan festival budaya dan perdagangan sebagai media penguatan kohesi sosial yang menonjolkan pluralitas Cirebon	

Sumber: Analisis Bappelitbangda, 2025.



3.2.2 Pentahapan Pembangunan

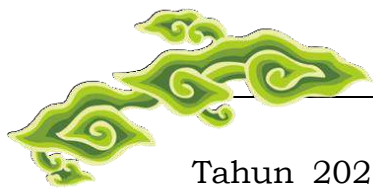
Pentahapan pembangunan disusun untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan strategi pembangunan dapat diimplementasikan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Setiap tahapan mencerminkan prioritas pembangunan sesuai visi misi pembangunan daerah, serta merespons isu strategis yang telah diidentifikasi. Melalui pentahapan ini, program dan kegiatan diarahkan agar selaras dengan sasaran pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Untuk mencapai visi Kota Cirebon sebagai kota yang setara dan berkelanjutan di tahun 2029, pembangunan daerah dirancang melalui tahapan yang terstruktur setiap tahunnya. Setiap tahap diarahkan untuk menjawab isu strategis yang berkembang dan memperkuat fondasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah secara bertahap, berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kota Cirebon yang telah dirumuskan.

- **Tahun 2025** difokuskan pada *penguatan sarana prasarana publik dan tata kelola pemerintahan* sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Tahap ini menjadi dasar pembentukan ekosistem pembangunan yang adil (*setara*) dan berorientasi keberlanjutan.
- **Tahun 2026** diarahkan pada *percepatan penataan lingkungan perkotaan* untuk menciptakan ruang hidup yang tertata, sehat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kota. Fokus ini mencerminkan pentingnya integrasi antara lingkungan dan aktivitas ekonomi dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.
- **Tahun 2027** menjadi fase *akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif* melalui penguatan sektor unggulan daerah. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada penciptaan nilai tambah ekonomi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
- **Tahun 2028** diarahkan pada *peningkatan daya saing daerah* melalui investasi pada penguatan sumber daya manusia, inovasi, dan optimalisasi sektor unggulan kota. Strategi ini menjadi penopang transformasi ekonomi berkelanjutan yang berbasis pengetahuan dan kreativitas.
- **Tahun 2029** merupakan tahap pencapaian *kesejahteraan masyarakat* sebagai hasil dari akumulasi tahapan sebelumnya. Pada tahap ini diharapkan Kota Cirebon telah menjadi kota yang setara dan berkelanjutan, dengan masyarakat yang hidup sejahtera dalam lingkungan yang inklusif dan produktif.

Setiap tahapan tersebut saling terkait dan mendukung, membentuk jalur transformatif yang menjamin bahwa arah kebijakan dan strategi pembangunan dilaksanakan secara konsisten, adaptif, dan berorientasi pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tematik pembangunan untuk setiap tahun diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2025: Penguatan sarana prasarana publik dan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat yang SETARA berkelanjutan.



Tahun 2026: Percepatan penataan lingkungan perkotaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Kota Cirebon yang SETARA berkelanjutan.

Tahun 2027: Akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah yang SETARA berkelanjutan.

Tahun 2028: Peningkatan daya saing melalui penguatan SDM, inovasi dan sektor unggulan kota yang SETARA berkelanjutan.

Tahun 2029: Mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon yang SETARA berkelanjutan.

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Cirebon sebagai kota yang maju, sejahtera dan berkelanjutan, penetapan program prioritas daerah menjadi fondasi utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Program-program ini disusun sebagai respons atas isu strategis sekaligus sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Program prioritas tidak hanya mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menyelaraskan arah pembangunan Daerah dengan prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Dengan fokus pada sektor-sektor kunci seperti kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, infrastruktur, ketahanan pangan, lingkungan hidup, serta pemberdayaan masyarakat, Kota Cirebon diarahkan untuk tumbuh sebagai kota SETARA berkelanjutan di tengah dinamika perubahan zaman.

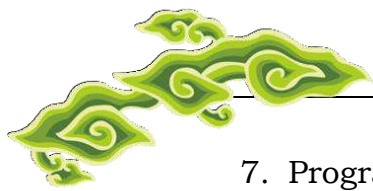
Kota Cirebon menetapkan 29 program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

Program prioritas pembangunan daerah pada misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing

1. Program pemerataan akses pendidikan berkualitas berbasis karakter dan budaya lokal
2. Program pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan
3. Program revitalisasi pendidikan keterampilan dan pelatihan vokasi
4. Program peningkatan peran pemuda dalam kegiatan produktif.

Program prioritas pembangunan daerah pada misi 2 Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal

1. Program pengembangan layanan investasi terpadu
2. Program pengembangan destinasi wisata unggulan melalui peningkatan infrastruktur dan promosi digital berbasis data wisatawan, dan penguatan city branding
3. Program peningkatan kinerja BUMD
4. Program pengembangan inkubasi UMKM dan peningkatan akses kesempatan kerja
5. Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal
6. Program pengembangan sektor perikanan berkelanjutan dan pengelolaan potensi pesisir



7. Program peningkatan kemandirian pangan keluarga.

Program prioritas pembangunan daerah pada misi 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

1. Program pengembangan satu data dan platform SPBE terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan publik digital
2. Program peningkatan ketentraman ketertiban umum masyarakat
3. Program implementasi sistem manajemen talenta untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan ASN berkinerja tinggi.
4. Program peningkatan Komunikasi Pemerintahan
5. Program penerapan inovasi pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat

Program prioritas pembangunan daerah pada misi 4 Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Berketahanan

1. Program pengembangan sistem pengelolaan sampah dan air limbah terpadu dengan pemanfaatan teknologi
2. Program pengendalian banjir dan penataan drainase perkotaan
3. Program pengelolaan Sumber Daya Air yang berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan air bersih di masa depan
4. Program peningkatan infrastruktur perkotaan dan transportasi publik untuk mendukung aksesibilitas dan manajemen logistik perkotaan yang efisien
5. Program penyediaan dan pengelolaan RTH dan penghijauan kawasan perkotaan
6. Program revitalisasi kawasan ekonomi potensial dan cagar budaya
7. Program peningkatan infrastruktur mitigasi dan adaptasi bencana untuk mendukung sistem kesiapsiagaan dan respon bencana

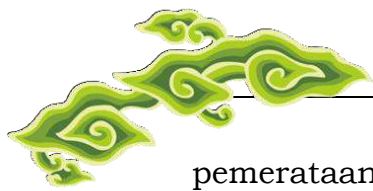
Program prioritas pembangunan daerah pada misi 5 Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Berketahanan

1. Program peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial
2. Program peningkatan layanan dasar di kantong-kantong kumuh
3. Program pengembangan inovasi penanganan masalah sosial
4. Program revitalisasi dan perlindungan warisan budaya dengan penguatan jaringan dukungan komunitas budaya
5. Program sistem layanan terpadu berbasis pemadanan data terintegrasi
6. Program pengembangan kampung harmoni dan inklusif di kawasan multikultur

Untuk mendukung program prioritas daerah disusun langkah strategis pembangunan dalam bentuk program kerja wali kota dan wakil wali kota sebagai berikut:

1. Pada sektor pendidikan dan olahraga (#semuabisasekolah)

Program kerja pada sektor ini dilaksanakan melalui kebijakan sekolah negeri bebas pungutan dan pemerataan kualitas pendidikan melalui



pemerataan guru, fasilitas dan sarana prasarana pendidikan; peningkatan perhatian Pemerintah Daerah kepada guru PAUD, guru TK, pegawai TU sekolah swasta dan guru honorer; dukungan anggaran, beasiswa, dan fasilitas untuk semua jenjang dengan meningkatkan anggaran beasiswa untuk siswa berprestasi maupun siswa dari keluarga kurang mampu; transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS sekolah; revitalisasi sarana olahraga khususnya Stadion Bima, meningkatkan olahraga prestasi dan pengembangan seni budaya di Kota Cirebon.

2. Pada sektor kesehatan (#semuaharussehat)

Program kerja pada sektor ini dilaksanakan dengan perluasan cakupan BPJS melalui dukungan APBD; penguatan layanan posyandu dan upaya pencegahan stunting melalui peningkatan bantuan PMT dan operasional untuk posyandu, posbindu dan poskesma; pemanfaatan ex RS Pamitran sebagai rumah sakit khusus warga kota Cirebon yaitu fasilitas pasien rujukan dari Puskesmas kota Cirebon diarahkan ke rumah sakit khusus warga kota Cirebon.

3. Pada sektor ekonomi

Program kerja pada sektor ini dilaksanakan melalui:

- a. Pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, perempuan dan pemuda. Dalam rangka mengatasi kemiskinan dan pengangguran serta untuk ketahanan ekonomi keluarga perlu upaya pemberdayaan ekonomi kreatif bagi perempuan kreatif, pemuda kreatif, IKM dan UMKM, termasuk akses pemasaran produk dan permodalan.
- b. Penciptaan lapangan kerja melalui BUMD, pariwisata, dan investasi.
Penciptaan lapangan kerja baru melalui pembuatan unit-unit usaha baru yang berada dalam naungan Perumda (BUMD), menghidupkan seni budaya dan meningkatkan kunjungan wisatawan melalui Revitalisasi Wisata Bahari, Wisata Religi, Wisata Sejarah dan Wisata Kuliner. Meningkatkan investasi melalui Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta kemudahan dan kecepatan perijinan untuk investasi usaha baru yang menyerap tenaga kerja banyak.
- c. Penguatan koperasi berbasis RW berbadan hukum untuk melawan rentenir dan pinjol ilegal.

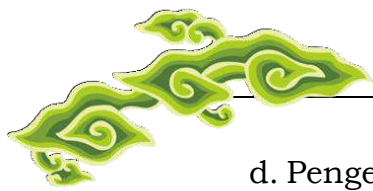
4. Pada sektor perlindungan sosial

Program kerja pada sektor perlindungan sosial meliputi peningkatan anggaran untuk bantuan sosial perbaikan rutilahu dan memperjuangkan penerima bantuan sosial pusat yang tepat sasaran.

5. Pada sektor Infrastruktur kota dan Lingkungan Hidup

Program kerja pada sektor infrastruktur kota dititikberatkan pada:

- a. Respons cepat dalam perbaikan infrastruktur kota;
- b. Penanganan banjir yang komprehensif, terintegrasi dengan memperhatikan masterplan drainase, sungai bersih dan pembangunan embung;
- c. Penataan lalu lintas, trotoar dan perparkiran, serta pembangunan flyover jalan kereta api.



- d. Pengelolaan Sampah yang profesional dan pemberdayaan komunitas lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, degradasi kawasan pesisir dan penghijauan kota;
- e. Penyediaan dan penataan ruang publik hijau yang ramah inklusif (instagramable dan ramah anak, perempuan, penyandang disabilitas) serta Penghijauan di area perkotaan;
- f. Penegakkan peraturan tentang lingkungan hidup dan
- g. Revitalisasi Kali Sukalila.

6. Pada sektor Birokrasi, Pemerintahan dan BUMD

Program kerja sektor ini meliputi:

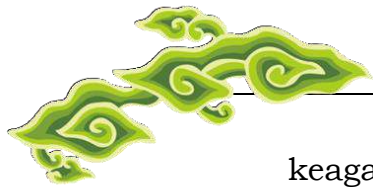
- a. Reformasi birokrasi berbasis kompetensi dan pelayanan digital melalui penempatan jabatan ASN sesuai dengan analisis pertimbangan kepangkatan, senioritas, pendidikan, kemampuan dan kelayakan, serta digitalisasi pelayanan pemerintah yang terintegrasi.
- b. Penguatan pelayanan terpadu, percepatan perizinan, dan sinergi antar lembaga melalui optimalisasi Mall Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Atap dan harmonisasi sinergitas Eksekutif - Legislatif dan Lembaga Vertikal.
- c. Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah dan pengoordinasian CSR.
- d. Media aspirasi langsung warga melalui Hotline Walikota Mendengar.
- e. Revitalisasi BUMD, dan optimalisasi pajak daerah sebagai penggerak ekonomi daerah.
- f. Integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan berfokus pada pencapaian visi misi daerah.
- g. Menghilangkan ego sektoral antar OPD menuju pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan kota yang berkelanjutan

7. Pada sektor Partisipasi dan pemberdayaan Masyarakat, meliputi:

- a. Program “Sapa Warga” dan pelibatan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi keagamaan, akademisi, pers dan *stakeholders* lainnya dalam pembangunan.
- b. Pemberdayaan RT/RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM.
- c. Kampung Pangan untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan warga yaitu Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan lahan lingkungan yang terbatas dengan tanaman hortikultura, budi daya ikan dan unggas sebagai sumber gizi keluarga untuk menjaga ketersediaan pangan keluarga, peluang usaha keluarga, pencegahan stunting dan pengendalian inflasi daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

8. Pada sektor Religi dan Budaya, meliputi:

- a. Dukungan kepada tokoh agama, rumah ibadah, dan guru ngaji melalui peningkatan perhatian pemerintah terhadap guru ngaji, marbot masjid dan pengurus rumah ibadah
- b. Penguatan pendidikan karakter religius dan budaya melalui pelibatan peran tokoh agama, organisasi keagamaan dan tempat ibadah dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama, peningkatan kegiatan

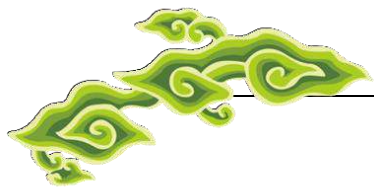


keagamaan dan budaya di sekolah untuk membentuk pribadi siswa berakhlakul karimah dan berbudaya, peningkatan kegiatan keagamaan di kantor Pemkot Cirebon dan implementasi Perda Diniyah Takmiliah.

- c. Ruang ekspresi seni dan penguatan struktur sosial keagamaan melalui penyediaan ruang pentas seni budaya dan pemberdayaan rukun kematian tingkat RW

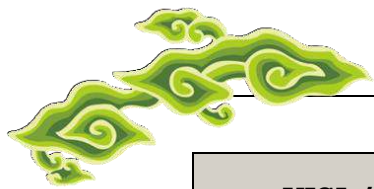
9. Pada sektor Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program kerja pada sektor keamanan meliputi: Peningkatan kerjasama Kamtibmas dengan kepolisian dalam penanggulangan kenakalan remaja; Peningkatan peran Satpol PP dalam penegakkan Perda dan Pemberdayaan Hansip RW.

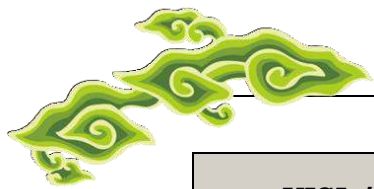


Tabel 3.4
Program Prioritas Daerah RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029

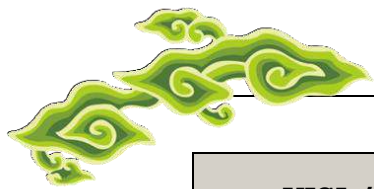
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
20252029 - TERWUJUDNYA KOTA CIREBON YANG SEJAHTERA, TERTATA, ASPIRATIF, RELIGIUS, AMAN DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029 - Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing - Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul, kompetitif dan berkarakter			Indeks Pembangunan Manusia(Indeks)		



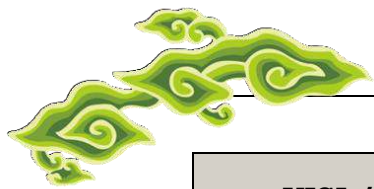
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan berketahanan - Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal						
		Meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas		Harapan Lama Sekolah (Tahun) (Tahun)		
				Angka Literasi/Numerasi (%)		
				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



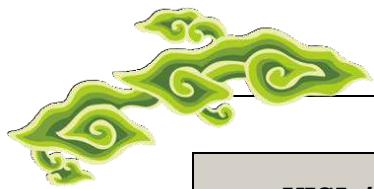
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan secara merata		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)		
				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
				Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. (Kasus)		



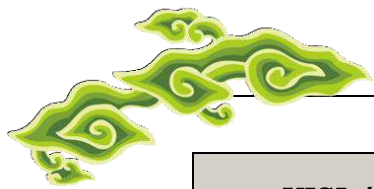
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
		Meningkatnya kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat usia produktif		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)		
			Meningkatnya Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
		Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius		Indeks Pengembangan SDM Berkarakter (Poin)		



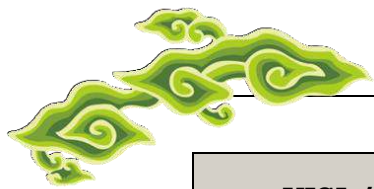
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah			Tingkat Pengangguran Terbuka(%)		
				PDRB Per Kapita (Rupiah Juta)(*)		
				Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)(%)		
				Indeks Gini (poin)(poin)		
		Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan jasa, transportasi,		Kontribusi PDRB sektor Akomodasi, Makan dan Minum (Pariwisata) (%)		



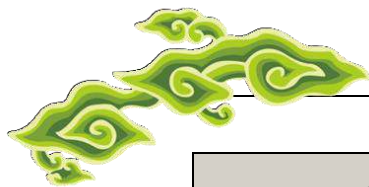
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		pariwisata, ekonomi kreatif				
				Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran (%)		
				Kontribusi PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan (%)		
				Kontribusi PDRB sektor Ekonomi Kreatif (%)		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN	



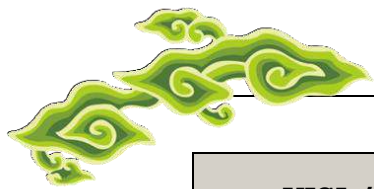
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
		Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif		Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (%)		
				Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)		
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	



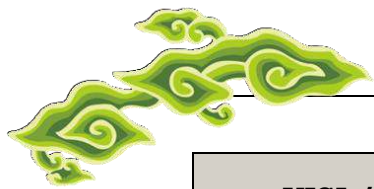
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya kinerja BUMD		Return on Asset (ROA) BUMD (%)		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
		Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dan Koperasi		Rasio Volume Usaha UMKM terhadap PDRB (Persentase)		
				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	



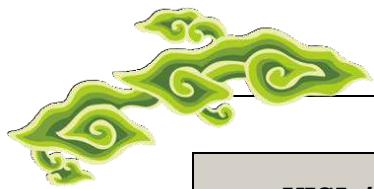
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya kesempatan kerja		Tingkat Kesempatan Kerja (Persentase)		
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru		Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Persentase)		
				Indeks Ekonomi Hijau Pilar Ekonomi (Indeks)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of		



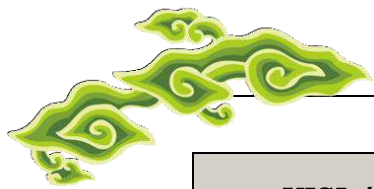
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		yang tangguh dan berkelanjutan		Undernourishment) ((%))		
				Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi) (Poin)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan) (Poin)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN	



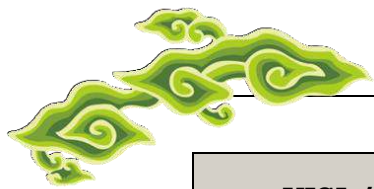
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					KERAWANAN PANGAN	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas			Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)(poin)		
				Indeks Daya Saing Daerah(Angka)		
		Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)		
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Poin)		
				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)		
				Nilai SAKIP Kota (Skor)		
				Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Poin)		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	



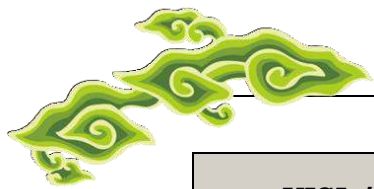
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				internet yang disediakan oleh DKIS (%)		
				Presentase Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	Capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Menurunnya kejadian penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
		Meningkatnya lingkungan kota yang tentram,		Indeks ketenteraman dan		



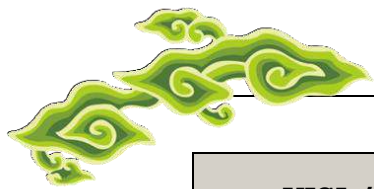
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		tertib dan kondusif bagi masyarakat		ketertiban umum (Poin)		
			Meningkatnya Penanganan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
		Meningkatnya kinerja dan profesionalisme ASN		Indeks Profesionalitas ASN (poin)		
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan		Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)		



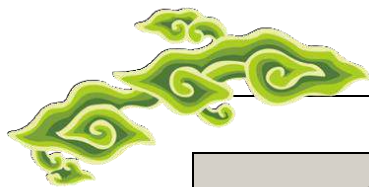
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	



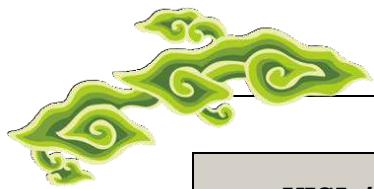
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik		Indeks Inovasi Daerah (Angka)		
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
	Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan			Penurunan Intensitas Emisi GRK (tonCO2eq/2010 idr Milyar)(TON CO2 EQ)		
		Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)		
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	



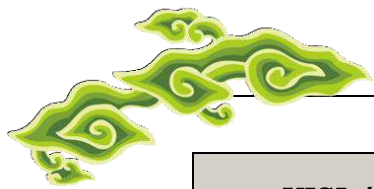
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Menurunannya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Tertatanya ruang kota yang fungsional, estetik, dan ramah lingkungan dengan pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas		Indeks Layanan Infrastruktur Kota (Poin)		
				Proporsi ruang terbuka hijau (Persentase)		



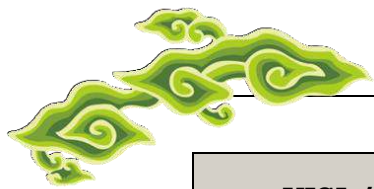
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Indeks Smart City (poin) (poin)		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Luas Taman Kehati yang Dikelola (Ha)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Persentase warga negara korban bencana yang	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	



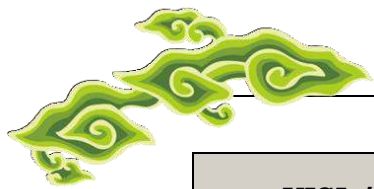
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				memperoleh rumah layak huni (%)		
		Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi		Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Konektivitas Darat (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
		Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif (TON CO2 EQ)		
				Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
			Meningkatnya kesiapan dan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	



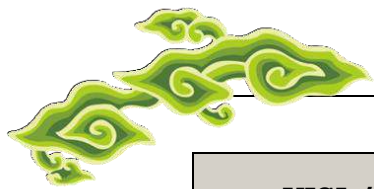
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			kebakaran di daerah layanan WMK			
				Persentase Terbentuknya Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di tingkat Kelurahan dalam daerah layanan WMK (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencan	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
	Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan			Tingkat Kemiskinan((%))		



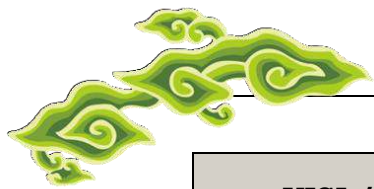
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat akses layanan dasar (%)		
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
		Meningkatnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya daerah yang berkelanjutan		Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya (%)		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
		Meningkatnya kualitas hidup keluarga, kelompok rentan serta tercapainya kesetaraan gender		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)		
				Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) (poin)		
				Indeks ketimpangan gender (Indeks)		
				Indeks Pembangunan Gender/IPG (Poin) (poin)		
				Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	

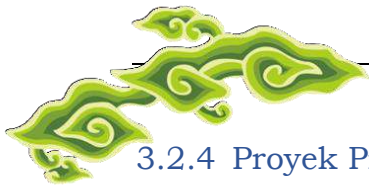


VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
		Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis		Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)		
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)		
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	

Sumber: Analisa Bappelitbangda, 2025



3.2.4 Proyek Prioritas Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam dinamika perjalanan implelementasi rencana pembangunan yang semakin kompleks, kebutuhan akan fokus pada proyek-proyek prioritas menjadi sangat penting untuk mendorong percepatan perubahan yang nyata, terukur, dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menyusun proyek pembangunan yang prioritas dan strategis, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran sehingga berkontribusi langsung pada percepatan pencapaian target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

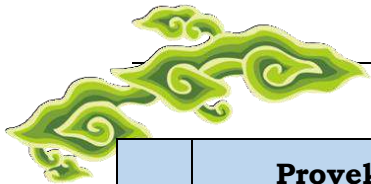
Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap potensi, tantangan, dan kebutuhan spesifik wilayah, serta sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Di samping itu, dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon turut menjadi pertimbangan penting.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, untuk percepatan pembangunan Kota Cirebon maka disusun beberapa Rencana Proyek Prioritas Daerah Kota Cirebon yang menjadi fokus dalam periode 2025-2029 sebagai berikut:

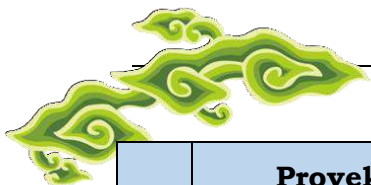


Tabel 3.4

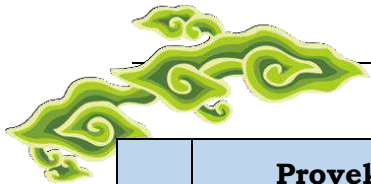
No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/Proyek Strategis Kota Cirebon	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
	Program Makan Bergizi Gratis	Nasional	▪ Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik ▪ Pangan bergizi dan nutrisi tinggi	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat	▪ Teras Pangan B2SA ▪ GEMARIKAN ▪ Kampung Pangan Lestari dan Hijau (KPLH) ▪ Pemeriksaan keamanan pangan ▪ Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Tempat Pengelolaan Pangan (Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan) ▪ Pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan koperasi merah putih maupun koperasi berbasis RW	▪ 22 Kelurahan ▪ 22 Kelurahan ▪ 22 Kelurahan ▪ 5 Kecamatan / 22 Kelurahan



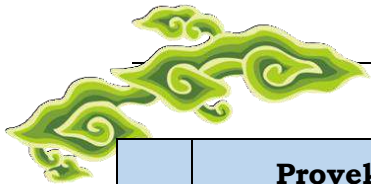
No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/Proyek Strategis Kota Cirebon	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Nasional	Pembangunan Ruang Kelas Baru	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat	Pemeliharaan Ruang Kelas Baru	5 Kecamatan / 22 Kelurahan
	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Nasional	▪ Pembangunan Unit Sekolah Baru; ▪ Pembangunan 10 Sekolah kejuruan unggulan	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat		
	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Nasional	Pembangunan RSUD Kab/Kota dengan layanan khusus	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat	1) Pengembangan Layanan Prioritas Kanker (Radioterapi) 2) Lanjutan Pengembangan IGD Terpadu (Lantai 5) 3) Lanjutan Pengembangan Rawat Jalan	RSD GUNUNG JATI
	Program Penuntasan TBC	Nasional	Program Sanitasi Lingkungan	DAS Citarum, serta kabupaten/kota yang belum ODF (<i>Open Defecation Free</i>)	1) Pengawasan dan pembinaan Higiene dan sanitasi tempat pengelolaan pangan, tempat	5 Kecamatan / 22 Kelurahan



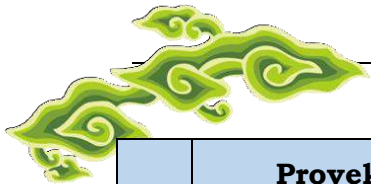
No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/Proyek Strategis Kota Cirebon	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
					fasilitas umum, sarana air minum, dan fasyankes 2) Penguatan Jejaring Petugas TB 3) Penyediaan obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai)	
	Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)	Jawa Barat	▪ Pendidikan berkarakter; ▪ Program beasiswa D3/S1/S2 di perguruan tinggi Jawa Barat	Kota Depok dan 27 Kab/kota di Jawa Barat	▪ Peningkatan Kompetensi dalam rangka Kearifan Muatan Lokal (ML); ▪	▪ 5 Kecamatan / 22 Kelurahan ▪
	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat	Nasional	▪ Pengamanan Mata Air ▪ Reboisasi hutan dan lahan ▪ Pengembangan kampung adat berbasis hutan dan aliran sungai	Kabupaten/kota pada DAS Citarum, Ciliwung, Cilamaya, serta DAS kritis lainnya	▪ Kampung Pangan Lestari dan Hijau (KPLH) ▪ Penanaman Pohon di Eks TPA Grenjeng ▪ Pembangunan Taman Kehati Cadas Ngampar ▪ Stabilisasi harga	▪ 22 Kelurahan ▪ Kelurahan Harjamukti ▪ Kelurahan Argasunya



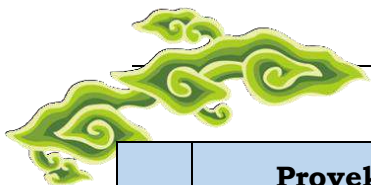
No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/Proyek Strategis Kota Cirebon	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
					barang kebutuhan pokok	
	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional	Nasional	▪ Peningkatan Layanan Jaringan Irigasi Teknis; ▪ Normalisasi Sungai dan Muara; ▪ Pengamanan Mata Air; ▪ Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan menuju sentra produksi);	Kabupaten/kota di WS Citarum, Cimanuk, Citanduy, Cisadea-Cibarena, Ciwulan-Cilaki		



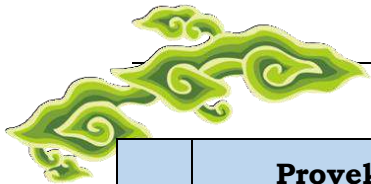
No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/Proyek Strategis Kota Cirebon	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi	Nasional	▪ Pembangunan EkosistemPertanian Organik; ▪ Pangan bergizi dan nutrisi tinggi; ▪ Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan menuju sentra produksi)	Kabupaten di wilayah REBANA, Cekungan Bandung (Kab. Bandung, Bandung Barat), Bodebek (Kabupaten Bogor) dan Kabupaten/kota Jawa Barat Bagian Selatan	▪ Pelatihan budidaya ternak dan unggas	22 Kelurahan
0	Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura	Jawa Barat	▪ Pembangunan KampungAdat Nelayan; ▪ Pangan bergizi dan nutrisi tinggi	Kabupaten/kota di Pesisir Utara dan Selatan jawa barat	▪ Pengembangan Kampung Budidaya Perikanan ▪ Pengembangan Budidaya Udang Vaname ▪ Pengembangan Budidaya Kerang Hijau ▪ GEMARIKAN ▪ Pengembangan Pantai Wisata Bahari Kejawanan	▪ 22 Kelurahan ▪ 22 Kelurahan ▪ Kelurahan Panjunan dan Kesenden ▪ 22 Kelurahan



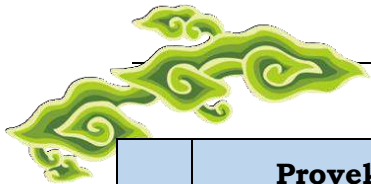
No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/Proyek Strategis Kota Cirebon	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa	DKI Jakarta, Jawa Barat , Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah	Dukungan untuk normalisasi Sungai dan Muara pada Wilayah Sungai kewenangan pusat dan Normalisasi Sungai dan muara di WS Provinsi	Kabupaten/kota di Pantura Jawa Barat	▪ Penanaman Mangrove di kawasan pesisir	Kelurahan kesenden dan Kelurahan Kasepuhan
2	Bioetanol (Berbasis Tebu)	Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat , Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan	Industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan	Kabupaten/kota di wilayah REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan	▪ Pengembangan Industri Kecil dan Menengah berbasis industri hijau	
3	Pembangunan Jaringan Gaserkotaan	Kepulauan Riau (Batam), Sumatera Selatan (Palembang), Riau (Pekanbaru),	▪ Program Energi ramah lingkungan; ▪ Mitigasi Dampak Sosial Lingkungan;	Kabupaten/kota Bodebek (Kabupaten Bekasi), Cekungan Bandung		



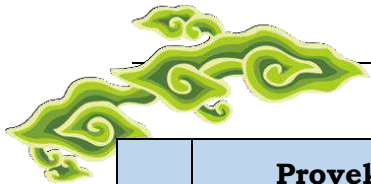
No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/Proyek Strategis Kota Cirebon	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
		Sulawesi Selatan (Makassar), DKI Jakarta, Jawa Barat (Bekasi) , dan Sulawesi Tenggara (Palu)				
4	Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar	Papua, Sumatera, Jawa , dan Nusa Tenggara	▪ Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik; ▪ Pangan bergizi dan nutrisi tinggi	Kabupaten/kota di wilayah REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan	▪ Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) ▪ Teras Pangan B2SA ▪ Pasar Tani ▪ KPLH (Kampung Pangan Lestari dan Hijau) ▪ Peningkatan kemampuan dan daya saing Industri Kecil dan Menengah	▪ 22 Kelurahan ▪ 22 Kelurahan ▪ 22 Kelurahan ▪ 22 Kelurahan
	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat ,	▪ Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik; ▪ Pangan bergizi dan nutrisi tinggi	Kabupaten/kota di wilayah REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan	▪ Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) ▪ Teras Pangan B2SA ▪ Pasar Tani ▪ KPLH (Kampung Pangan Lestari dan Hijau) ▪ Peningkatan kemampuan dan	▪ 22 Kelurahan ▪ 22 Kelurahan ▪ 22 Kelurahan ▪ 22 Kelurahan



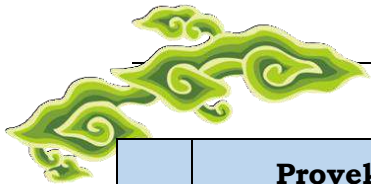
No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/Proyek Strategis Kota Cirebon	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
5		Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat			daya saing Industri Kecil dan Menengah	
6	Program Hilirisasi Nikel, Timah, Bauksit, Tembaga	Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara,	Program pengelolaan tambang berwawasan lingkungan	Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran	Peningkatan kemampuan dan daya saing Industri Kecil dan Menengah	



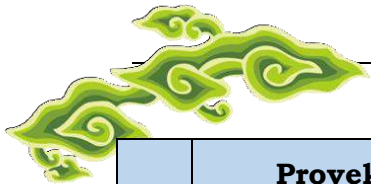
No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/Proyek Strategis Kota Cirebon	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
		Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat				
7	Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi	Nasional	Optimalisasi BIJB (bandara internasional Jawa Barat)	Kabupaten Majalengka, Indramayu, Cirebon, Subang, Kuningan, serta Kota Cirebon dan Kota Bandung	▪ Peningkatan kemampuan dan daya saing Industri Kecil dan Menengah ▪ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas: Operasional BRT (3 unit), trayek baru dengan 2 Bus, Pemeliharaan dan Penataan PJU di Jalan Tuparev Ujung.	Kota Cirebon



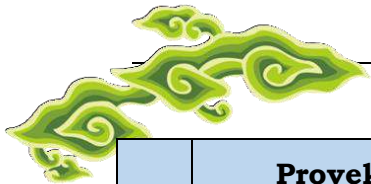
No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/Proyek Strategis Kota Cirebon	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
8	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	Nasional	Program Transformasi Birokrasi	27 Kabupaten/ kota di Jawa Barat	▪ Mall Pelayanan Publik Kota Cirebon berbasis digital ▪ Program Pengelolaan Aplikasi Informatika : a. Penyiapan Infrastruktur Teknologi Informasi; b. Aplikasi Sedulur Kota Cirebon, Aplikasi E-Government; c. Mempromosikan Literasi SPBE (Pemerintah Digital); d. Dua dokumen kebijakan tata kelola SPBE (Pemerintah digital). ▪ Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi : Tandatangan	Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon



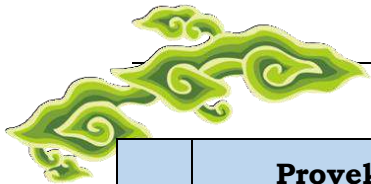
No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/Proyek Strategis Kota Cirebon	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
					elektronik yang terintegrasi dengan beberapa aplikasi untuk PD. ▪ Penyelenggaraan Statistik Sektoral: a. Bimtek pengolahan data; b. Penyusunan analisis data statistik; c. Penyusunan profil data statistik; d. Penyusunan metadata; e. Evaluasi CSD ▪	
9	Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia	Nasional	Transformasi birokrasi			



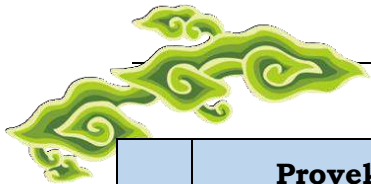
No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/Proyek Strategis Kota Cirebon	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
0	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Jawa Barat	- Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan Leucir); - Program Sanitasi Lingkungan	Kabupaten Subang	Pengembangan industri pendukung seperti pergudangan, logistik, jasa keuangan, dan jasa lainnya	Sepanjang jalan pesisir Kota Cirebon
1	Pembangunan Jakarta Metropolitan MassRapid TransitKoridor Timur-Barat	DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten	- Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Massal <i>Bus Rapid Transit</i> (Pengelolaan); - Kereta api perkotaan; - Reaktivasi rel kereta api; - Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (konektivitas	Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Bandung Barat, Pangandaran, Ciamis serta Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung, Cimahi, Kota Bogor, Kota Cirebon dan Kota Banjar	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas: a. Operasional BRT (3 unit), trayek baru dengan 2 Bus; b. 1 titik simpang dan ruas jalan yang didukung ITS di Jl. DR, Dipto MK; c. Pemeliharaan Marka Jalan Jl. Cipto MK dan Jl. Pemuda; d. Penertiban perparkiran di bahu jalan; e. Pemeliharaan dan Penataan PJU di Jl. Cipto M.K, Jl. Pemuda, dan Jl. Terusan Pemuda.	Kota Cirebon (22 Kelurahan) Kelurahan Pekiringan Kelurahan Pekiringan dan Sunyaragi Kota Cirebon Kelurahan Pekiringan dan Sunyaragi Banjir : 5 Kelurahan di Kecamatan Harjamukti, Kel Pegambiran, Kel Kesepuhan, Kel Pekiringan, Kel Drajat



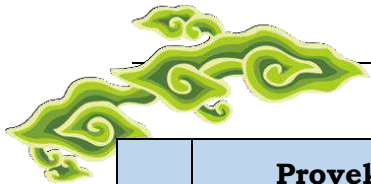
No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/Proyek Strategis Kota Cirebon	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
			menuju jalan simpul transportasi) ▪ Program Mitigasi Dampak Sosial dan lingkungan; ▪ Pembangunan kelembagaan Pengelola Transportasi		Program Penanggulangan Bencana (BPBD) : a. Pengadaan Alat Early Warning System (EWS) untuk Menangani Banjir untuk 13 Lokasi Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran : a. Pengawasan terhadap Ketersediaan dan Keberfungsian Alat Pemadam Kebakaran (APAR dan Alat serta Jaringan Pemadam Kebakaran Lainnya) pada Gedung Perkantoran, Pusat Perbelanjaan, Gedung Perhotelan	Banjir rob: Kel Kebon Baru, Kel Kesepuhan, Kel pegambiran, Kel panjunan. Kota Cirebon (22 Kelurahan)



No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/Proyek Strategis Kota Cirebon	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
					dll	
2	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Jawa Barat	▪ Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jala (Jalan Leucir);	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat		
3	Pembangunan 3 Juta Rumah	Nasional	Pembangunan rumah rakyat miskin	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat;		
	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	DKI Jakarta, Banten (Tangerang, Tangerang Selatan), Jawa Barat (Bekasi, Bandung) , Jawa Tengah (Semarang), Sulawesi Selatan (Makassar), Bali	▪ Pembangunan TPPAS Regional ◦ Pembangunan TPPASR Legok Nangka (Progres sedang tahap penyiapan pemenuhan perolehan pembiayaan-<i>financial</i>)		▪ Pengelolaan sampah melalui sistem controlled landfill di TPA ▪ Pembangunan TPST RDF tahap I kapasitas 240 ton/hari (progres sedang penyiapan Readiness Criteria) ▪ Optimalisasi Pusat Daur Ulang (PDU) Dukuh Semar ▪ Upgrading TPS	▪ TPA Kopi Luhur, Kelurahan Argasunya ▪ TPA Kopi Luhur, Kelurahan Argasunya ▪ PDU Dukuh Semar,



No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/Proyek Strategis Kota Cirebon	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
4		(Denpasar), Sumatera Selatan (Palembang), dan Sulawesi Utara (Manado)	<i>closed</i>); - o Pembangunan TPPASR Lulut Nambo (Progres sedang pencarian mitra investor baru untuk pembangunan kapasitas 1800-2300 ton/hari, serta telah terbangun fase I pelayanan tambahan sebelum operasional sebesar 50 ton/hari); - o Pembangunan TPPASR Cirebon Raya dengan rencana teknologi	Kabupaten Bandung, Cirebon, Karawang	menjadi TPS 3R	Kelurahan Kecapi ▪ TPS Galunggung, TPS Krucuk, dan TPS Grenjeng



No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/Proyek Strategis Kota Cirebon	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
			WtE/RDF (Progres penyusunan Kajian FS); - o Pembangunan TPPASR Bodebek dengan rencana teknologi WtE/RDF (Progres telah tersusun DED Fasilitas pengolahan sampah dan sedang disusun DED Jalan akses) ▪ Pengelolaan Sampah Mandiri			



3.2.5 Dukungan Program Daerah Terhadap Program Nasional

Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk mendukung penuh arah kebijakan pembangunan Nasional melalui integrasi program-program prioritas Daerah yang selaras dengan agenda strategis Pemerintah Pusat. Dukungan ini tidak hanya memperkuat pencapaian sasaran Nasional, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan Nasional dapat diimplementasikan ke daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat di daerah.

Sejumlah program Nasional yang menjadi fokus dukungan daerah antara lain: Program Makan Bergizi Gratis untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak sekolah, Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerataan akses pendidikan, Koperasi Merah Putih untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi, serta Program 3 Juta Rumah yang bertujuan memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.

3.2.5.1 Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak usia sekolah, menurunkan angka stunting, serta mendukung proses belajar melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis di sekolah-sekolah. Program ini juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan pelaku usaha kecil, khususnya di sektor pangan dan katering.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program ini, Pemerintah Kota Cirebon akan mengintegrasikan dan menyinergikan berbagai sektor terkait untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

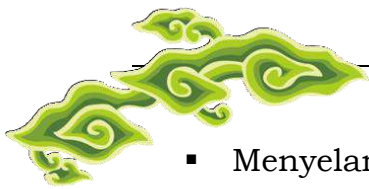
Sektor Pendidikan:

- Menetapkan satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP) sebagai lokasi pelaksanaan program berdasarkan tingkat kerentanan gizi dan status sosial ekonomi peserta didik.
- Mengintegrasikan edukasi gizi dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler untuk membangun kesadaran gizi sehat sejak dini.
- Menyiapkan mekanisme distribusi makanan yang aman dan higienis melalui kerja sama dengan pihak penyedia makanan.

Sektor Kesehatan:

- Melakukan pemetaan status gizi anak didik melalui Puskesmas dan kader posyandu sebagai dasar intervensi sasaran.
- Menyusun standar menu makanan bergizi seimbang sesuai kebutuhan usia anak, bekerja sama dengan ahli gizi dan tenaga kesehatan.
- Melaksanakan pemantauan rutin terhadap dampak program terhadap status gizi anak secara berkala.

Sektor Sosial dan Perlindungan Masyarakat



- Menyelaraskan data anak dari keluarga kurang mampu melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk penentuan sasaran prioritas.
- Mengintegrasikan program ini dengan program perlindungan sosial lainnya seperti bantuan pangan dan jaminan sosial keluarga.

Sektor Pemberdayaan Ekonomi dan UMKM

- Melibatkan UMKM lokal dan koperasi sebagai penyedia bahan pangan dan jasa boga, untuk mendukung perputaran ekonomi lokal.
- Mendorong penggunaan bahan baku lokal yang segar, sehat, dan sesuai standar gizi melalui kerja sama dengan petani dan pelaku usaha pangan di Kota Cirebon.
- Memberikan pelatihan kepada UMKM/katering sekolah dalam pengelolaan makanan sehat dan standar sanitasi.

Dampak yang diharapkan dari program ini adalah adanya peningkatan konsentrasi dan prestasi belajar siswa melalui pemenuhan gizi yang cukup, penurunan angka stunting dan gizi buruk di kalangan anak usia sekolah, meningkatnya pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelibatan pelaku usaha kecil dan koperasi pangan dan penguatan sinergi antarsektor dalam pelayanan sosial dasar dan pembangunan sumber daya manusia.

3.2.5.2 Program Sekolah Rakyat

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda Nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang tertinggal secara sosial dan ekonomi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pendidikan non formal dan alternatif yang terjangkau dan inklusif bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok marjinal dan masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan literasi dasar, serta mendorong keadilan pendidikan bagi semua kalangan, termasuk anak-anak dari keluarga miskin, pekerja informal, dan masyarakat adat atau terpencil.

Sebagai wujud dukungan terhadap program Nasional ini, Pemerintah Kota Cirebon akan mengembangkan berbagai bentuk layanan pendidikan non formal dan berbasis komunitas yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat.

Dari Sektor Pendidikan melalui penguatan pendidikan non formal dengan mengembangkan dan memperluas keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai basis penyelenggaraan Sekolah Rakyat, terutama di wilayah padat penduduk, kawasan kumuh, atau daerah dengan angka partisipasi pendidikan rendah; menyusun kurikulum fleksibel dan kontekstual berbasis kehidupan sehari-hari, kearifan lokal, dan potensi wilayah, untuk memastikan relevansi materi bagi peserta didik; Akses Beasiswa dan Sarana Pembelajaran melalui penyediaan dukungan alat



belajar, beasiswa pendidikan, serta akses teknologi sederhana bagi peserta Sekolah Rakyat.

Dari Sektor Sosial dan Perlindungan Masyarakat dengan penjangkauan kelompok rentan yaitu melakukan pendataan anak putus sekolah, anak dari keluarga miskin, pekerja anak, dan masyarakat marginal lainnya untuk menjadi peserta didik sekolah rakyat; pendampingan sosial dan keluarga dengan memberikan pendampingan sosial kepada keluarga peserta didik agar mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka di Sekolah Rakyat.

Dari Sektor Kepemudaan dan Kebudayaan melalui penguatan nilai kebangsaan dan budaya local dengan menyisipkan nilai-nilai Pancasila, kebhinekaan, dan budaya lokal dalam proses pembelajaran untuk membangun karakter dan rasa kebangsaan; pemberdayaan relawan dan komunitas yaitu menggerakkan pemuda, mahasiswa, guru relawan, dan komunitas literasi untuk terlibat dalam pengajaran dan pembinaan Sekolah Rakyat.

3.5.2.3 Program Koperasi Merah Putih

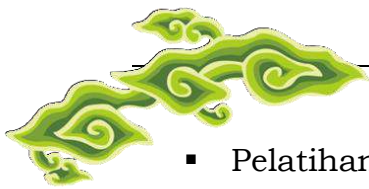
Program Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program strategis nasional untuk membangkitkan kembali peran koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat. Tujuan utamanya adalah memperkuat kelembagaan koperasi, meningkatkan partisipasi anggota, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong digitalisasi dan profesionalisasi pengelolaan koperasi agar menjadi wadah utama pemberdayaan ekonomi berbasis kolektif.

Program ini diarahkan untuk menciptakan koperasi modern yang adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap berakar pada nilai gotong royong dan keadilan sosial, sehingga mampu memperkuat struktur ekonomi nasional dari akar rumput.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program Nasional tersebut, Pemerintah Kota Cirebon berperan aktif dalam mendorong transformasi koperasi daerah agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat melalui berbagai pendekatan lintas sektor.

Dari Sektor Koperasi dan UMKM

- Revitalisasi Koperasi Eksisting: Melakukan pendataan dan pembinaan koperasi yang tidak aktif atau belum sehat, serta membantu proses konsolidasi atau reformasi manajemen.
- Fasilitasi Pembentukan Koperasi Baru: Mendukung terbentuknya koperasi berbasis komunitas, petani, nelayan, pekerja informal, dan pelaku UMKM.



- **Pelatihan dan Pendampingan:** Menyelenggarakan pelatihan manajemen koperasi modern, tata kelola berbasis prinsip koperasi, dan pelaporan keuangan transparan.

Dari Sektor Ekonomi dan Perdagangan

- **Integrasi Rantai Pasok:** Mendorong koperasi untuk terlibat dalam rantai pasok bahan pokok, produk pertanian, dan hasil industri kreatif lokal agar menjadi wadah distribusi dan pemasaran.
- **Akses Pembiayaan:** Memfasilitasi koperasi agar mendapat akses ke lembaga keuangan, perbankan syariah, dan dana bergulir dari pemerintah pusat maupun daerah.

Dari Sektor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- **Koperasi untuk Kelompok Rentan:** Mengembangkan koperasi perempuan, koperasi disabilitas, atau koperasi warga miskin kota sebagai alat pemberdayaan dan penguatan ekonomi rumah tangga.
- **Kemitraan CSR dan BUMD:** Menghubungkan koperasi dengan program CSR perusahaan swasta dan BUMD dalam bentuk pelatihan, permodalan, atau akses pasar.

3.5.2.4 Program 3 Juta Rumah

Program 3 Juta Rumah merupakan program strategis nasional yang ditujukan untuk menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini bertujuan mengurangi angka backlog perumahan, mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan properti, serta meningkatkan kualitas permukiman sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar atas perumahan.

Program ini mencakup pembangunan rumah tapak, rumah susun, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta skema pembiayaan yang memudahkan kepemilikan rumah oleh masyarakat miskin dan rentan.

Dalam mendukung pelaksanaan program nasional ini, Pemerintah Kota Cirebon akan melaksanakan berbagai intervensi yang menysasar penyediaan rumah layak huni sekaligus penataan kawasan permukiman secara terpadu.

Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman

- **Fasilitasi Pembangunan Rumah untuk MBR:** Penyediaan lahan dan perizinan bagi pengembang swasta dan BUMN/BUMD untuk membangun rumah bersubsidi dan rumah susun sederhana sewa/milik.
- **Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS):** Memberikan bantuan pembiayaan untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) kepada keluarga miskin.



- **Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR):** Mengintegrasikan zona perumahan rakyat dalam RDTR agar pembangunan rumah MBR sesuai dengan rencana tata ruang kota.

Sektor Pekerjaan Umum dan Infrastruktur

- **Peningkatan Infrastruktur Dasar Permukiman:** Pembangunan jalan lingkungan, sistem drainase, sanitasi, dan akses air bersih di kawasan perumahan baru maupun kawasan padat penduduk yang ditingkatkan kualitasnya.
- **Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU):** Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui intervensi berbasis masyarakat.

Sektor Sosial dan Kependudukan

- **Pemetaan Kebutuhan Hunian:** Identifikasi masyarakat miskin dan rentan yang belum memiliki rumah layak, sebagai sasaran prioritas program ini.
- **Pendampingan Sosial:** Pemberdayaan warga penerima rumah agar mampu menjaga dan merawat lingkungan hunian, serta membangun kehidupan sosial yang sehat dan produktif.



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah (PD) dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Penjabaran program ke kegiatan dan sub kegiatan dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) PD sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing Perangkat Daerah (PD).



Gambar 4. 1 Dasar Perumusan Program Perangkat Daerah

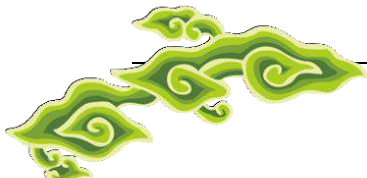
Penyusunan program perangkat daerah merujuk pada nomenklatur program yang mengacu kepada Permendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pembangunan Kota Cirebon periode tahun 2025 sampai dengan 2029 ditujukan untuk Terwujudnya SDM yang unggul, kompetitif dan berkarakter, Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan dan Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan



lokal dalam pembangunan. Tujuan pembangunan tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah. Berbagai program dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam RPJMD 2025 sampai dengan 2029.

Setiap program dilengkapi dengan indikator dan target indikator yang disertai dengan pagu indikatif. Program tersebut dijabarkan ke kegiatan dan subkegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Adapun penyusunan program perangkat daerah dalam bab ini merujuk pada nomenklatur program yang mengacu kepada Permendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kerangka pendanaan dalam RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 dirancang untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan optimal. Melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Kerangka Program Perangkat Daerah untuk RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang, sebagai berikut:



Tabel 4.1 Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					376.450.732.179,00		382.196.707.000,00		387.927.407.000,00		393.553.265.600,00		399.647.987.000,00	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					265.664.338.179,00		269.648.537.000,00		273.692.517.000,00		277.606.352.600,00		281.963.367.000,00	
Terpenuhinya Dukungan Teknis, Administratif,dan Operasional bagi Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	52.00	52.00	52.00	265.664.338.179,00	53.00	269.648.537.000,00	53.50	273.692.517.000,00	54.00	277.606.352.600,00	54.00	281.963.367.000,00	1.01.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					108.495.339.000,00		110.122.752.000,00		111.774.590.000,00		113.451.210.000,00		115.152.980.000,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	100	100	100	108.495.339.000,00	100	110.122.752.000,00	100	111.774.590.000,00	100	113.451.210.000,00	100	115.152.980.000,00	1.01.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					726.245.000,00		737.136.000,00		748.194.000,00		759.416.000,00		770.808.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembang kan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	100	726.245.000,00	100	737.136.000,00	100	748.194.000,00	100	759.416.000,00	100	770.808.000,00	1.01.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					1.564.810.000,00		1.588.282.000,00		1.612.106.000,00		1.636.287.000,00		1.660.832.000,00	
Meningatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	49.56	49.56	50.28	1.564.810.000,00	51.00	1.588.282.000,00	51.72	1.612.106.000,00	52.44	1.636.287.000,00	53.16	1.660.832.000,00	1.01.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	19.00	19.00	19.00	-	19.00	100.000.000,00	19.00	100.000.000,00	19.00	100.000.000,00	19.00	100.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					582.903.619.930,00		612.048.800.927,00		642.651.240.974,00		674.783.803.022,00		708.522.993.173,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				179.631.808.276,00		188.613.398.690,00		198.044.068.625,00		207.946.272.056,00		218.343.585.659,00	
Terpenuhinya Dukungan Teknis, Administratif, dan Operasional bagi Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	52.00	52.00	52.00	179.631.808.276,00	53.00	188.613.398.690,00	53.50	198.044.068.625,00	54.00	207.946.272.056,00	54.00	218.343.585.659,00	1.02.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KESEHATAN
														1.02.0.00.0.00.01. 0001 - RSD Gunung Jati
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				402.696.354.380,00		422.831.172.099,00		443.972.730.704,00		466.171.367.239,00		489.479.935.601,00	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	123	123	123	402.676.354.380,00	123	422.810.172.099,00	120	443.950.680.704,00	120	466.148.214.739,00	120	489.455.625.476,00	1.02.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (Persentase)	100	100	100	20.000.000,00	100	21.000.000,00	100	22.050.000,00	100	23.152.500,00	100	24.310.125,00	1.02.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KESEHATAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					276.800.000,00		290.640.000,00		305.172.000,00		320.430.600,00		336.452.130,00	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	100	100	100	276.800.000,00	100	290.640.000,00	100	305.172.000,00	100	320.430.600,00	100	336.452.130,00	1.02.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					298.657.274,00		313.590.138,00		329.269.645,00		345.733.127,00		363.019.783,00	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman					298.657.274,00		313.590.138,00		329.269.645,00		345.733.127,00		363.019.783,00	1.02.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KESEHATAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					55.184.583.687,00		56.288.275.359,00		57.916.547.420,00		59.074.878.369,00		60.256.375.938,00	
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN					8.657.660.524,00		8.830.813.734,00		9.007.430.009,00		9.187.578.609,00		9.371.330.182,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SUMBER DAYA AIR (SDA)														
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatkan akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	-	34.4	40	8.657.660.524,00	42	8.830.813.734,00	44	9.007.430.009,00	46	9.187.578.609,00	48	9.371.330.182,00	1.03.2.10.0.00.01. 0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
														1.03.2.10.0.00.01. 0001 - UPT Peralatan dan Perbengkelan
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-				1.223.583.820,00		1.248.055.496,00		1.273.016.606,00		1.298.476.938,00		1.324.446.477,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kot a (Persentase)	60.62	60.64	60.81	1.223.583.820,00	60.99	1.248.055.496,00	61.18	1.273.016.606,00	61.38	1.298.476.938,00	61.60	1.324.446.477,00	1.03.2.10.0.00.01. 0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-				287.783.694,00		293.539.368,00		299.410.155,00		305.398.358,00		311.506.326,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	100	20	20	287.783.694,00	20	293.539.368,00	20	299.410.155,00	20	305.398.358,00	20	311.506.326,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
														1.03.2.10.0.00.01.0001 - UPT Peralatan dan Perbengkelan
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-				3.612.538.123,00		3.684.788.885,00		3.758.484.663,00		3.833.654.356,00		3.910.327.444,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	15.88	16.35	16.92	3.612.538.123,00	1636	3.684.788.885,00	16.49	3.758.484.663,00	16.81	3.833.654.356,00	17.27	3.910.327.444,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-				7.929.145.158,00		8.087.728.061,00		8.249.482.622,00		8.414.472.275,00		8.582.761.720,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	70	86	0	7.929.145.158,00	0	8.087.728.061,00	0	8.249.482.622,00	0	8.414.472.275,00	0	8.582.761.720,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					9.078.669.960,00		9.260.243.359,00		9.445.448.226,00		9.634.357.191,00		9.827.044.335,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung					9.078.669.960,00		9.260.243.359,00		9.445.448.226,00		9.634.357.191,00		9.827.044.335,00	
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					160.997.870,00		164.217.827,00		167.502.184,00		170.852.228,00		174.269.272,00	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	0.3	82.6	0	160.997.870,00	0	164.217.827,00	0	167.502.184,00	0	170.852.228,00	0	174.269.272,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
														1.03.2.10.0.00.01.0001 - UPT Peralatan dan Perbengkelan
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					23.875.984.276,00		24.353.503.962,00		24.840.574.041,00		25.337.385.522,00		25.844.133.232,00	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	94	96	94	23.875.984.276,00	94.4	24.353.503.962,00	94.8	24.840.574.041,00	95.2	25.337.385.522,00	95.8	25.844.133.232,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														1.03.2.10.0.00.01. 0001 - UPT Peralatan dan Perbengkalan
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-				-		-		502.506.553,00		512.556.684,00		522.807.818,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	0	0	0.15	-	0.15	-	0.15	502.506.553,00	0.15	512.556.684,00	0.15	522.807.818,00	1.03.2.10.0.00.01. 0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
														1.03.2.10.0.00.01. 0001 - UPT Peralatan dan Perbengkalan
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	-				358.220.262,00		365.384.667,00		372.692.361,00		380.146.208,00		387.749.132,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	100	100	100	358.220.262,00	100	365.384.667,00	100	372.692.361,00	100	380.146.208,00	100	387.749.132,00	1.03.2.10.0.00.01. 0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
														1.03.2.10.0.00.01. 0001 - UPT Peralatan dan Perbengkalan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					28.654.742.803,00		28.363.145.543,00		29.843.603.941,00		31.335.784.137,00		32.902.573.345,00	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1.000.000.000,00		1.050.000.000,00		1.102.500.000,00		1.157.625.000,00		1.215.506.250,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	1.000.000.000,00	100	1.050.000.000,00	100	1.102.500.000,00	100	1.157.625.000,00	100	1.215.506.250,00	1.04.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.04.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					8.378.737.646,00		7.132.674.528,00		7.489.308.255,00		7.863.773.667,00		8.256.962.351,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang	30	-	43.48	8.378.737.646,00	55.69	7.132.674.528,00	67.90	7.489.308.255,00	80.12	7.863.773.667,00	92.33	8.256.962.351,00	1.04.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Ditangani (Persentase)													KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.186.688.000,00		1.186.688.000,00		1.308.323.520,00		1.373.739.696,00		1.442.426.681,00	
-					1.186.688.000,00		1.186.688.000,00		1.308.323.520,00		1.373.739.696,00		1.442.426.681,00	1.04.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					18.089.317.157,00		18.993.783.015,00		19.943.472.166,00		20.940.645.774,00		21.987.678.063,00	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman					18.089.317.157,00		18.993.783.015,00		19.943.472.166,00		20.940.645.774,00		21.987.678.063,00	1.04.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					33.786.751.536,00		34.583.049.274,00		30.902.142.072,00		37.537.733.000,00		38.628.956.603,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				27.268.592.046,00		28.046.375.577,00		23.994.959.193,00		30.342.943.398,00		31.233.077.929,00	
Terpenuhinya dukungan teknis, administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	46	46.10	46.20	13.617.890.619,00	46.30	14.298.785.150,00	46.40	15.013.724.407,00	46.50	15.764.410.628,00	46.60	16.552.631.159,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Terpenuhinya Dukungan Teknis, Administratif, dan Operasional bagi Penyelenggaraan Pemerintahan.	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	100	100	100	7.950.804.427,00	100	7.950.804.427,00	100	8.391.911.786,00	100	8.582.998.770,00	100	8.582.998.770,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Terpenuhinya Dukungan Teknis, Administratif, dan Operasional bagi Penyelenggaraan Pemerintahan.(bpbdd)	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	45	46	47	5.699.897.000,00	48	5.796.786.000,00	49	589.323.000,00	50	5.995.534.000,00	51	6.097.448.000,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				4.724.354.117,00		4.960.571.822,00		5.208.600.414,00		5.469.030.434,00		5.742.481.956,00	
Meningkatnya Penanganan Gangguan	Persentase Penyelenggaraan	100	100	100	4.724.354.117,00	100	4.960.571.822,00	100	5.208.600.414,00	100	5.469.030.434,00	100	5.742.481.956,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ketentraman dan Keterlibatan umum	Tibumtranmas (Persentase)													
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA					1.793.805.273,00		1.576.101.775,00		1.698.582.365,00		1.725.759.068,00		1.653.396.618,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	4.55	9	27	1.785.728.071,00	36	1.493.956.773,00	45	1.615.041.363,00	55	1.640.797.066,00	64	1.566.990.616,00	1.05.0.00.0.00.03. 0000 - BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	8.077.200,00	100	82.145.000,00	100	83.541.000,00	100	84.962.000,00	100	86.406.000,00	1.05.0.00.0.00.03. 0000 - BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	-	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	1.05.0.00.0.00.03. 0000 - BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	1.05.0.00.0.00.03. 0000 - BADAN PENANGGULAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														GAN BENCANA DAERAH
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					10.551.038.610,00		11.156.590.510,00		11.778.420.010,00		12.437.341.010,00		13.136.208.110,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.551.038.600,00		11.156.590.500,00		11.778.420.000,00		12.437.341.000,00		13.136.208.100,00	
Terpenuhinya dukungan teknis, administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	46	46.1	46.2	10.551.038.600,00	46.3	11.156.590.500,00	46.4	11.778.420.000,00	46.5	12.437.341.000,00	46.6	13.136.208.100,00	1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					-		-		-		-		-	
Indeks Kesejahteraan Sosial					-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
OT 1					10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN					20.654.026.000,00		21.735.110.000,00		22.238.725.000,00		24.435.852.000,00		25.338.355.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BIDANG TENAGA KERJA														
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.704.961.000,00		14.365.630.000,00		14.365.630.000,00		15.746.648.000,00		16.510.353.000,00	
Terpenuhinya Dukungan Teknis, Administratif, dan Operasional bagi Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	44.00	44.00	44.00	13.704.961.000,00	44.00	14.365.630.000,00	44.00	14.365.630.000,00	44.00	15.746.648.000,00	44.00	16.510.353.000,00	2.07.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS TENAGA KERJA
	Nilai IKM Perangkat Daerah (poin)	87.50	87.40	87.50		87.60		87.70		87.80		87.90		2.07.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS TENAGA KERJA
														2.07.0.00.0.00.01. 0001 - UPT Balai Latihan Tenaga Kerja
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					150.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		365.000.000,00		70.000.000,00	
Ketersediaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	53.85	53.85	53.85	150.000.000,00	54.00	55.000.000,00	55.00	60.000.000,00	56.00	365.000.000,00	57.00	70.000.000,00	2.07.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS TENAGA KERJA
														2.07.0.00.0.00.01. 0001 - UPT Balai



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Latihan Tenaga Kerja
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-				5.574.000.000,00		5.973.500.000,00		6.349.000.000,00		6.724.500.000,00		7.100.000.000,00	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja					5.574.000.000,00		5.973.500.000,00		6.349.000.000,00		6.724.500.000,00		7.100.000.000,00	2.07.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS TENAGA KERJA
	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	0.893	0.928	0.963		0.998		1.033		1.068		1.103		2.07.0.00.0.00.01. 0001 - UPT Balai Latihan Tenaga Kerja
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-				770.502.000,00		863.688.000,00		962.938.000,00		1.073.488.000,00		1.105.476.000,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	40.00	43.00	44.00	770.502.000,00	45.00	863.688.000,00	46.00	962.938.000,00	47.00	1.073.488.000,00	48.00	1.105.476.000,00	2.07.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS TENAGA KERJA
														2.07.0.00.0.00.01. 0001 - UPT Balai Latihan Tenaga Kerja
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-				454.563.000,00		477.292.000,00		501.157.000,00		526.216.000,00		552.526.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselesaikanya perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian Bersama	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	41.494	41.577	41.660	454.563.000,00	41.743	477.292.000,00	41.827	501.157.000,00	41.911	526.216.000,00	41.994	552.526.000,00	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
														2.07.0.00.0.00.01.0001 - UPT Balai Latihan Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.180.421.929,00		1.239.443.025,00		1.301.415.177,00		1.366.485.935,00		1.434.810.233,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					96.127.425,00		100.933.796,00		105.980.486,00		111.279.510,00		116.843.486,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	12.95	13.27	13.60	96.127.425,00	14.28	100.933.796,00	14.99	105.980.486,00	15.74	111.279.510,00	16.53	116.843.486,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	54.77	54.78	54.79		54.80		54.81		54.82		54.83		2.14.2.08.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					176.758.800,00		185.596.740,00		194.876.577,00		204.620.406,00		214.851.426,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100.00	100.00	100.00	176.758.800,00	100.00	185.596.740,00	100.00	194.876.577,00	100.00	204.620.406,00	100.00	214.851.426,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					362.008.000,00		380.108.400,00		399.113.820,00		419.069.511,00		440.022.987,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	0.05	0.06	0.06	362.008.000,00	0.07	380.108.400,00	0.08	399.113.820,00	0.09	419.069.511,00	0.10	440.022.987,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														KELUARGA BERENCANA
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-				14.030.600,00		14.732.130,00		15.468.737,00		16.242.173,00		17.054.282,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	18.00	20.00	25.00	14.030.600,00	28.00	14.732.130,00	31.00	15.468.737,00	34.00	16.242.173,00	37.00	17.054.282,00	2.14.2.08.0.00.01. 0000 - DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-				255.527.104,00		268.303.459,00		281.718.632,00		295.804.564,00		310.594.792,00	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	-	63.79	63.81	255.527.104,00	63.83	268.303.459,00	63.85	281.718.632,00	63.87	295.804.564,00	63.89	310.594.792,00	2.14.2.08.0.00.01. 0000 - DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07 PROGRAM	-				275.970.000,00		289.768.500,00		304.256.925,00		319.469.771,00		335.443.260,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK														
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	-	78.53	78.55	275.970.000,00	78.57	289.768.500,00	78.59	304.256.925,00	78.61	319.469.771,00	78.63	335.443.260,00	2.14.2.08.0.00.01. 0000 - DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100.00	100.0 0	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		2.14.2.08.0.00.01. 0000 - DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					16.126.814.978,00		18.245.447.985,00		20.045.876.585,00		22.026.484.317,00		24.206.943.061,00	
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.540.154.730,00		16.556.370.203,00		18.212.007.223,00		20.033.207.946,00		22.036.528.740,00	
Terpenuhinya dukungan teknis, administratif, dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	44.00	44.10	44.20	14.540.154.730,00	44.30	16.556.370.203,00	44.40	18.212.007.223,00	44.50	20.033.207.946,00	44.60	22.036.528.740,00	2.09.3.25.3.27.01. 0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-				994.125.000,00		1.024.313.460,00		1.106.814.963,00		1.198.543.649,00		1.300.607.742,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan) (Poin)	93.00	93.00	93.05	994.125.000,00	93.10	1.024.313.460,00	93.15	1.106.814.963,00	93.20	1.198.543.649,00	9.25	1.300.607.742,00	2.09.3.25.3.27.01. 0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi) (Poin)	92.58	92.58	92.60		92.65		92.70		92.80		92.85		2.09.3.25.3.27.01. 0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-				391.817.000,00		429.631.432,00		470.596.049,00		515.013.271,00		564.714.544,00	
Meningkatnya penangan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	18.18	18.18	18.18	391.817.000,00	18.18	429.631.432,00	13.64	470.596.049,00	13.64	515.013.271,00	13.64	564.714.544,00	2.09.3.25.3.27.01. 0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-				200.718.248,00		235.132.890,00		256.458.350,00		279.719.451,00		305.092.035,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	95.00	95.00	200.718.248,00	95.20	235.132.890,00	95.70	256.458.350,00	95.80	279.719.451,00	96.00	305.092.035,00	2.09.3.25.3.27.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					104.648.616,00		106.741.588,00		108.876.420,00		111.053.948,00		113.275.027,00	
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					104.648.616,00		106.741.588,00		108.876.420,00		111.053.948,00		113.275.027,00	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	100	100	100	104.648.616,00	100	106.741.588,00	100	108.876.420,00	100	111.053.948,00	100	113.275.027,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					48.215.530.405,00		54.475.542.029,00		56.100.089.734,00		58.343.075.201,00		61.074.143.373,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.375.994.182,00		30.505.291.091,00		32.030.555.646,00		33.632.083.428,00		35.313.687.599,00	
Terpenuhinya dukungan teknis,	Indeks Kematangan	43.00	43.00	43.10	29.375.994.182,00	43.20	30.505.291.091,00	43.30	32.030.555.646,00	43.30	33.632.083.428,00	43.50	35.313.687.599,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
administrasi, dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintah	Organisasi (Indeks)													LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-				140.000.000,00		250.000.000,00		760.000.000,00		250.000.000,00		595.000.000,00	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	140.000.000,00	100	250.000.000,00	100	760.000.000,00	100	250.000.000,00	100	595.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-				592.600.000,00		577.990.000,00		715.820.000,00		794.641.700,00		859.792.000,00	
Menurunannya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan (%)	17.10	17.10	17.10	592.600.000,00	17.10	577.990.000,00	17.10	715.820.000,00	17.10	794.641.700,00	17.10	859.792.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	-				250.000.000,00		370.000.000,00		390.000.000,00		600.000.000,00		420.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Luas Taman Kehati yang Dikelola (Ha)	4.70	4.70	4.70	250.000.000,00	4.70	370.000.000,00	4.70	390.000.000,00	4.70	600.000.000,00	4.70	420.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					145.000.000,00		875.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pembinaan teknis Pengelolaan Limbah B3 (%)	-	16.67	33.33	145.000.000,00	50	875.000.000,00	66.67	140.000.000,00	83.33	145.000.000,00	100	150.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					160.482.967,00		225.000.000,00		245.000.000,00		265.000.000,00		285.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU	71.43	72.73	74.04	160.482.967,00	75.32	225.000.000,00	76.62	245.000.000,00	77.92	265.000.000,00	79.22	285.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)													
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-				173.327.925,00		240.000.000,00		255.000.000,00		270.000.000,00		285.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Presentase Peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup (Persentase)	-	60.00	65.00	173.327.925,00	70.00	240.000.000,00	75.00	255.000.000,00	80.00	270.000.000,00	85.00	285.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-				217.997.750,00		230.000.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	-	8.33	16.67	217.997.750,00	25.00	230.000.000,00	33.33	240.000.000,00	41.67	250.000.000,00	62.50	260.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-				84.917.922,00		240.000.000,00		255.000.000,00		270.000.000,00		285.000.000,00	
Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasu s Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	84.917.922,00	100	240.000.000,00	100	255.000.000,00	100	270.000.000,00	100	285.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-				17.075.209.659,00		20.962.260.938,00		21.068.714.088,00		21.866.350.073,00		22.620.663.774,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase sampah yang terkelola (%)	85.26	93.50	95.90	17.075.209.659,00	100	20.962.260.938,00	100	21.068.714.088,00	100	21.866.350.073,00	100	22.620.663.774,00	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL					8.701.262.178,00		9.136.325.000,00		9.593.141.000,00		10.072.798.000,00		10.576.438.000,00	
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				7.842.262.178,00		8.258.675.000,00		8.671.041.000,00		9.122.198.000,00		9.600.438.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya dukungan teknis, administrasi, dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	49.00	49.25	49.50	7.842.262.178,00	49.75	8.258.675.000,00	50.00	8.671.041.000,00	50.25	9.122.198.000,00	50.50	9.600.438.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-				204.000.000,00		210.650.000,00		216.100.000,00		223.600.000,00		225.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	6.82	8.00	10.00	204.000.000,00	13.00	210.650.000,00	16.00	216.100.000,00	20.00	223.600.000,00	24.00	225.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	51.97	62.00	64.00		66.00		68.00		70.00		72.00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-				135.000.000,00		140.250.000,00		145.000.000,00		153.000.000,00		161.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	135.000.000,00	100	140.250.000,00	100	145.000.000,00	100	153.000.000,00	100	161.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Kematian yang	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)													N DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					520.000.000,00		526.750.000,00		561.000.000,00		574.000.000,00		590.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100	100	100	520.000.000,00	100	526.750.000,00	100	561.000.000,00	75.00	574.000.000,00	78.13	590.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					1.600.000.000,00		1.680.000.000,00		1.764.000.000,00		1.852.200.000,00		1.944.810.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					200.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		231.525.000,00		243.101.250,00	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	90.91	90.91	90.91	200.000.000,00	95.45	210.000.000,00	95.45	220.500.000,00	100	231.525.000,00	100	243.101.250,00	4.01.2.13.0.00.01. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.400.000.000,00		1.470.000.000,00		1.543.500.000,00		1.620.675.000,00		1.701.708.750,00	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Desa (LKD) (Persentase)	83.33	83.33	83.33	1.400.000.000,00	83.33	1.470.000.000,00	83.33	1.543.500.000,00	100	1.620.675.000,00	100	1.701.708.750,00	4.01.2.13.0.00.01. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					14.707.100.073,00		15.442.455.076,00		16.214.577.830,00		17.025.306.723,00		17.876.572.058,00	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					9.910.635.087,00		10.406.166.841,00		10.926.475.183,00		11.472.798.943,00		12.046.438.890,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Terpenuhinya dukungan teknis, administrasi, dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	-	46.00	46.00	9.910.635.087,00	46.25	10.406.166.841,00	46.50	10.926.475.183,00	46.75	11.472.798.943,00	47.00	12.046.438.890,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Nilai IKM Perangkat Daerah (poin)	86.43	86.43	86.43		87.00		87.50		87.50		87.75		2.14.2.08.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-				514.850.000,00		540.592.500,00		567.622.125,00		596.003.231,00		625.803.393,00	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	18.70-18.70	18.60 - 18.60	18.50-18.50	514.850.000,00	18.50-18.50	540.592.500,00	18.50-18.50	567.622.125,00	18.40-18.40	596.003.231,00	18.40-18.40	625.803.393,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	1.97	2.10	2.10		2.10		2.10		2.10		2.10		2.14.2.08.0.00.01. 0000 - DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-				1.963.477.802,00		2.061.651.692,00		2.164.734.277,00		2.272.970.991,00		2.386.619.540,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Moder n Contraceptive (mCPR) (Persentase)	62.10	62.20	63.10	1.963.477.802,00	63.40	2.061.651.692,00	63.70	2.164.734.277,00	64.00	2.272.970.991,00	64.30	2.386.619.540,00	2.14.2.08.0.00.01. 0000 - DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	15.70	15.40	15.10		14.80		14.50		14.20		13.90		2.14.2.08.0.00.01. 0000 - DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN	-				2.318.137.184,00		2.434.044.043,00		2.555.746.245,00		2.683.533.558,00		2.817.710.235,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)														
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	4.71	4.76	4.83	2.318.137.184,00	4.97	2.434.044.043,00	5.12	2.555.746.245,00	5.28	2.683.533.558,00	5.45	2.817.710.235,00	2.14.2.08.0.00.01. 0000 - DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					41.432.301.213,00		43.234.565.257,00		45.699.967.397,00		46.021.586.290,00		48.491.413.893,00	
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.950.804.427,00		7.950.804.427,00		8.391.911.786,00		8.582.998.770,00		8.582.998.770,00	
Terpenuhinya Dukungan Teknis, Administratif, dan Operasional bagi Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	44	-	-	7.950.804.427,00	-	7.950.804.427,00	-	8.391.911.786,00	-	8.582.998.770,00	-	8.582.998.770,00	2.15.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					33.481.496.786,00		35.283.760.830,00		37.308.055.611,00		37.438.587.520,00		39.908.415.123,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	0.2	0.23	0.26	33.481.496.786,00	0.36	35.283.760.830,00	0.42	37.308.055.611,00	0.53	37.438.587.520,00	0.60	39.908.415.123,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	52	55	60		62		67		70		75		2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					16.890.106.928,00		23.423.671.901,00		24.594.855.496,00		25.824.598.271,00		27.115.828.185,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.312.688.944,00		13.081.014.331,00		13.735.065.048,00		14.421.818.300,00		15.142.909.215,00	
Terpenuhinya Dukungan Teknis, Administratif, dan Operasional bagi Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	-	-	-	12.312.688.944,00	-	13.081.014.331,00	-	13.735.065.048,00	-	14.421.818.300,00	-	15.142.909.215,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (%)	80	83	87		87.5		88.5		88		89		2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.02 - PROGRAM					1.473.985.517,00		3.876.806.146,00		4.070.646.453,00		4.274.178.776,00		4.487.887.715,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK														
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	-	84.3	84.8	1.473.985.517,00	85.3	3.876.806.146,00	85.8	4.070.646.453,00	86.3	4.274.178.776,00	86.8	4.487.887.715,00	2.16.2.20.2.21.01. 0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah (%)	87	88	-		-		-		-		-		2.16.2.20.2.21.01. 0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-				3.103.432.467,00		6.465.851.424,00		6.789.143.995,00		7.128.601.195,00		7.485.031.255,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	-	4.15	4.17	3.103.432.467,00	4.19	6.465.851.424,00	4.21	6.789.143.995,00	4.23	7.128.601.195,00	4.25	7.485.031.255,00	2.16.2.20.2.21.01. 0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Presentase Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi (%)	38	39	-		-		-		-		-		2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS (%)	100	100	-		-		-		-		-		2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					19.108.532.684,00		19.002.959.318,00		19.953.107.284,00		20.950.762.648,00		21.998.300.781,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.138.532.684,00		13.805.459.318,00		14.495.732.284,00		15.220.518.898,00		15.981.544.843,00	
Terpenuhinya dukungan teknis, administratif, dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	48	48.1	48.2	13.138.532.684,00	48.3	13.805.459.318,00	48.4	14.495.732.284,00	48.5	15.220.518.898,00	48.6	15.981.544.843,00	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PERINDUSTRIA N
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					295.000.000,00		309.750.000,00		325.237.500,00		341.499.375,00		358.574.344,00	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	3.22	3.30	3.35	295.000.000,00	3.40	309.750.000,00	3.45	325.237.500,00	3.50	341.499.375,00	3.55	358.574.344,00	2.17.3.30.3.31.01. 0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					325.000.000,00		341.250.000,00		358.312.500,00		376.228.125,00		395.039.531,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	65.77	67.00	71.00	325.000.000,00	74.00	341.250.000,00	77.00	358.312.500,00	81.00	376.228.125,00	84.00	395.039.531,00	2.17.3.30.3.31.01. 0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN					175.000.000,00		183.750.000,00		192.937.500,00		202.584.375,00		212.713.594,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KSP/USP KOPERASI														
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	65.97	66.30	66.63	175.000.000,00	66.96	183.750.000,00	67.30	192.937.500,00	67.64	202.584.375,00	67.97	212.713.594,00	2.17.3.30.3.31.01. 0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					600.000.000,00		630.000.000,00		661.500.000,00		694.575.000,00		729.303.750,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	22	26	26	600.000.000,00	27	630.000.000,00	27	661.500.000,00	28	694.575.000,00	28	729.303.750,00	2.17.3.30.3.31.01. 0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					1.375.000.000,00		1.443.750.000,00		1.515.937.500,00		1.591.734.375,00		1.671.321.094,00	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	92.59	93.06	93.52	1.375.000.000,00	93.99	1.443.750.000,00	94.46	1.515.937.500,00	94.93	1.591.734.375,00	95.41	1.671.321.094,00	2.17.3.30.3.31.01. 0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PERINDUSTRIA N
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					1.900.000.000,00		924.000.000,00		970.200.000,00		1.018.710.000,00		1.069.645.500,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	10.76	11.16	11.72	1.900.000.000,00	11.99	924.000.000,00	12.04	970.200.000,00	11.94	1.018.710.000,00	11.73	1.069.645.500,00	2.17.3.30.3.31.01. 0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					1.300.000.000,00		1.365.000.000,00		1.433.250.000,00		1.504.912.500,00		1.580.158.125,00	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	6.33	6.33	6.33	1.300.000.000,00	6.33	1.365.000.000,00	6.33	1.433.250.000,00	6.33	1.504.912.500,00	6.33	1.580.158.125,00	2.17.3.30.3.31.01. 0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					14.896.172.128,00		15.152.480.734,00		15.913.854.771,00		16.098.558.624,00		16.880.986.556,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENANAMAN MODAL														
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				10.675.535.323,00		11.209.312.089,00		11.769.777.693,00		11.769.777.693,00		12.358.266.578,00	
Terpenuhinya dukungan teknis, administratif, dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	46	46.1	46.2	10.675.535.323,00	46.3	11.209.312.089,00	46.4	11.769.777.693,00	46.5	11.769.777.693,00	46.6	12.358.266.578,00	2.18.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-				670.000.000,00		487.500.000,00		500.625.000,00		489.406.250,00		503.876.563,00	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	66.00	70.00	72.50	670.000.000,00	75.00	487.500.000,00	77.50	500.625.000,00	80.00	489.406.250,00	82.50	503.876.563,00	2.18.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-				1.773.600.000,00		1.547.280.000,00		1.624.644.000,00		1.705.876.200,00		1.791.170.010,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	83.92	25	30	1.773.600.000,00	35	1.547.280.000,00	40	1.624.644.000,00	45	1.705.876.200,00	50	1.791.170.010,00	2.18.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-				663.036.805,00		696.188.645,00		730.998.078,00		767.547.981,00		805.925.380,00	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	80	70	75	663.036.805,00	80	696.188.645,00	85	730.998.078,00	90	767.547.981,00	95	805.925.380,00	2.18.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-				815.000.000,00		898.250.000,00		958.162.500,00		1.019.820.625,00		1.058.311.656,00	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	80	82	83	815.000.000,00	84	898.250.000,00	85	958.162.500,00	86	1.019.820.625,00	86	1.058.311.656,00	2.18.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-				299.000.000,00		313.950.000,00		329.647.500,00		346.129.875,00		363.436.369,00	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	80	82.25	299.000.000,00	85	313.950.000,00	87.50	329.647.500,00	90	346.129.875,00	92.50	363.436.369,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					94.867.075.674,00		77.603.179.457,00		99.193.363.430,00		81.892.859.101,00		84.257.162.307,00	
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				41.781.202.454,00		42.370.262.576,00		42.988.775.705,00		43.638.214.490,00		44.320.125.215,00	
Terpenuhinya Dukungan Teknis, Administratif, dan Operasional bagi Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	80.5	84	85	41.781.202.454,00	85.5	42.370.262.576,00	86	42.988.775.705,00	86.5	43.638.214.490,00	87	44.320.125.215,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (%)	80.5	84	83.5		84		84.5		85		85.5		2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					2.420.000.000,00		2.450.000.000,00		21.980.000.000,00		2.260.000.000,00		2.090.000.000,00	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	10	11	11.5	2.420.000.000,00	12	2.450.000.000,00	12.5	21.980.000.000,00	13	2.260.000.000,00	13.5	2.090.000.000,00	2.19.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					29.685.873.220,00		31.172.916.881,00		32.734.587.725,00		34.374.644.611,00		36.097.037.092,00	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlit yang masuk Pelatda Provinsi (Persentase)	0	10	12	29.685.873.220,00	13	31.172.916.881,00	14	32.734.587.725,00	14	34.374.644.611,00	15	36.097.037.092,00	2.19.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					20.980.000.000,00		1.610.000.000,00		1.490.000.000,00		1.620.000.000,00		1.750.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	8	10	12	20.980.000.000,00	15	1.610.000.000,00	17	1.490.000.000,00	20	1.620.000.000,00	22	1.750.000.000,00	2.19.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					615.439.806,00		559.980.357,00		587.979.375,00		617.378.344,00		648.247.261,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL					615.439.806,00		559.980.357,00		587.979.375,00		617.378.344,00		648.247.261,00	
Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	-	2.98	3.10	615.439.806,00	3.10	559.980.357,00	3.20	587.979.375,00	3.20	617.378.344,00	3.30	648.247.261,00	2.16.2.20.2.21.01. 0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	Persentase penyelenggara an statistik sektoral (%)	100	100	-		-		-		-		-		2.16.2.20.2.21.01. 0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					1.007.821.726,00		608.184.369,00		638.593.587,45		670.523.266,82		704.049.430,16	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					1.007.821.726,00		608.184.369,00		638.593.587,45		670.523.266,82		704.049.430,16	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Presentase Terselenggara nya Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah	86	93	-	1.007.821.726,00	-	608.184.369,00	-	638.593.587,45	-	670.523.266,82	-	704.049.430,16	2.16.2.20.2.21.01. 0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Daerah Kota Cirebon (%)													
	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	-	4	4.1		4.2		4.3		4.4		4.5		2.16.2.20.2.21.01. 0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					17.304.470.902,00		18.137.194.447,00		18.811.554.169,00		19.496.654.170,00		20.438.986.879,00	
2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.854.470.902,00		8.247.194.447,00		8.659.554.169,00		8.659.554.170,00		9.092.531.878,00	
Terpenuhinya dukungan teknis, administratif, dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan					7.854.470.902,00		8.247.194.447,00		8.659.554.169,00		8.659.554.170,00		9.092.531.878,00	2.22.3.26.0.00.01. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					4.100.000.000,00		4.080.000.000,00		4.319.000.000,00		4.467.450.000,00		4.675.822.500,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan	80.50	81.00	81.25	4.100.000.000,00	81.50	4.080.000.000,00	81.75	4.319.000.000,00	82.00	4.467.450.000,00	82.50	4.675.822.500,00	2.22.3.26.0.00.01. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	n Kebudayaan (Persentase)													
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-				250.000.000,00		512.500.000,00		275.625.000,00		539.406.250,00		553.876.563,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	22	32	32.85	250.000.000,00	32.95	512.500.000,00	33.10	275.625.000,00	43.35	539.406.250,00	43.35	553.876.563,00	2.22.3.26.0.00.01. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-				400.000.000,00		420.000.000,00		441.000.000,00		463.050.000,00		486.202.500,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	-	70.00	71.00	400.000.000,00	72.00	420.000.000,00	73.00	441.000.000,00	74.00	463.050.000,00	75.00	486.202.500,00	2.22.3.26.0.00.01. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-				2.250.000.000,00		2.305.000.000,00		2.415.250.000,00		2.531.012.500,00		2.652.563.125,00	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	77.14	77.14	77.50	2.250.000.000,00	77.75	2.305.000.000,00	78.00	2.415.250.000,00	78.25	2.531.012.500,00	78.50	2.652.563.125,00	2.22.3.26.0.00.01. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-				2.450.000.000,00		2.572.500.000,00		2.701.125.000,00		2.836.181.250,00		2.977.990.313,00	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase ketercapaian persyaratan pendirian dan pengelolaan museum (%)	-	80	81	2.450.000.000,00	82	2.572.500.000,00	83	2.701.125.000,00	84	2.836.181.250,00	85	2.977.990.313,00	2.22.3.26.0.00.01. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					13.939.372.614,00		15.302.249.725,00		16.832.474.697,00		18.340.030.167,00		20.174.033.183,00	
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				12.223.287.421,00		13.414.556.013,00		14.756.011.614,00		16.055.920.776,00		17.661.512.853,00	
Terpenuhinya Dukungan Teknis, Administratif, dan Operasional bagi Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	-	-	-	12.223.287.421,00	-	13.414.556.013,00	-	14.756.011.614,00	-	16.055.920.776,00	-	17.661.512.853,00	2.23.2.24.0.00.01. 0000 - DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (%)	75.00	75.00	75.50		76.00		76.00		77.00		77.50		2.23.2.24.0.00.01. 0000 - DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-				1.474.436.093,00		1.621.879.702,00		1.784.067.672,00		1.962.474.439,00		2.158.721.883,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	10.00	70.00	70.50	1.474.436.093,00	71.00	1.621.879.702,00	71.50	1.784.067.672,00	72.00	1.962.474.439,00	72.50	2.158.721.883,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					241.649.100,00		265.814.010,00		292.395.411,00		321.634.952,00		353.798.447,00	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	5.00	12.14	14.14	241.649.100,00	16.33	265.814.010,00	17.33	292.395.411,00	19.52	321.634.952,00	20.52	353.798.447,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					700.557.670,00		641.696.022,00		727.285.183,00		826.788.150,00		942.935.027,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					586.320.020,00		498.898.959,00		548.788.855,00		603.667.740,00		664.034.514,00	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip Digital (Perangkat Daerah)	5.00	5.00	10.00	586.320.020,00	15.00	498.898.959,00	20.00	548.788.855,00	25.00	603.667.740,00	32.00	664.034.514,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN					114.237.650,00		142.797.063,00		178.496.328,00		223.120.410,00		278.900.513,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENYELAMATAN ARSIP														
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	100.00	100.0 0	100.00	114.237.650,00	100.00	142.797.063,00	100.00	178.496.328,00	100.00	223.120.410,00	100.00	278.900.513,00	2.23.2.24.0.00.01. 0000 - DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.547.150.000,00		1.731.865.000,00		1.905.051.500,00		2.095.556.650,00		2.305.112.315,00	
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					230.194.000,00		268.213.400,00		295.034.740,00		324.538.214,00		356.992.035,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap					230.194.000,00		268.213.400,00		295.034.740,00		324.538.214,00		356.992.035,00	2.09.3.25.3.27.01. 0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.072.456.000,00		1.194.701.600,00		1.314.171.760,00		1.445.588.936,00		1.590.147.830,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	376.49	376.5 0	383.51	1.072.456.000,00	387.02	1.194.701.600,00	390.53	1.314.171.760,00	394.04	1.445.588.936,00	397.55	1.590.147.830,00	2.09.3.25.3.27.01. 0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														2.09.3.25.3.27.01. 0004 - UPT Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00	
Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Presentase pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku (Persentase)	-	-	84	30.000.000,00	84.15	33.000.000,00	84.25	36.300.000,00	84.50	39.930.000,00	84.75	43.923.000,00	2.09.3.25.3.27.01. 0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
														2.09.3.25.3.27.01. 0004 - UPT Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					214.500.000,00		235.950.000,00		259.545.000,00		285.499.500,00		314.049.450,00	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	38.15	39.05	40.05	214.500.000,00	40.55	235.950.000,00	41.05	259.545.000,00	41.55	285.499.500,00	42.06	314.049.450,00	2.09.3.25.3.27.01. 0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														2.09.3.25.3.27.01. 0004 - UPT Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					7.200.000.000,00		6.972.500.000,00		7.395.375.000,00		7.534.393.750,00		7.890.363.438,00	
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.900.000.000,00		1.770.000.000,00		1.854.000.000,00		1.942.200.000,00		2.034.810.000,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	0	1.00	1.50	1.900.000.000,00	2.00	1.770.000.000,00	2.50	1.854.000.000,00	3.00	1.942.200.000,00	3.50	2.034.810.000,00	2.22.3.26.0.00.01. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.700.000.000,00		1.785.000.000,00		1.874.250.000,00		1.967.962.500,00		2.066.360.625,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	2.54	2.75	3.00	1.700.000.000,00	3.25	1.785.000.000,00	3.50	1.874.250.000,00	3.75	1.967.962.500,00	4.00	2.066.360.625,00	2.22.3.26.0.00.01. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					1.875.000.000,00		1.825.000.000,00		1.803.750.000,00		1.886.437.500,00		1.973.259.375,00	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0.58	1.00	1.20	1.875.000.000,00	1.40	1.825.000.000,00	1.60	1.803.750.000,00	1.80	1.886.437.500,00	2.00	1.973.259.375,00	2.22.3.26.0.00.01. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.725.000.000,00		1.592.500.000,00		1.863.375.000,00		1.737.793.750,00		1.815.933.438,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	64.80	65.00	65.25	1.725.000.000,00	65.50	1.592.500.000,00	65.75	1.863.375.000,00	66.00	1.737.793.750,00	66.25	1.815.933.438,00	2.22.3.26.0.00.01. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					2.869.294.666,00		3.487.184.284,00		3.808.580.307,00		4.184.137.718,00		4.658.970.161,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.742.297.500,00		2.034.489.285,00		2.238.390.809,00		2.458.798.020,00		2.700.484.618,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	1357.85	1376. 00	1379.00	1.742.297.500,00	1384.00	2.034.489.285,00	1389.00	2.238.390.809,00	1394.00	2.458.798.020,00	1401.00	2.700.484.618,00	2.09.3.25.3.27.01. 0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)	1357.85	1376. 00	1379.00		1384.00		1389.00		1394.00		1401.00		2.09.3.25.3.27.01. 0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
														2.09.3.25.3.27.01. 0001 - UPT Rumah Potong Hewan
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					234.626.498,00		393.000.000,00		416.550.000,00		441.192.500,00		467.023.625,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	2.69	2.69	2.69	234.626.498,00	2.69	393.000.000,00	2.69	416.550.000,00	2.69	441.192.500,00	2.69	467.023.625,00	2.09.3.25.3.27.01. 0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														2.09.3.25.3.27.01. 0001 - UPT Rumah Potong Hewan
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					634.375.000,00		725.000.000,00		790.000.000,00		890.000.000,00		1.060.000.000,00	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	70.00	70.00	71.00	634.375.000,00	71.50	725.000.000,00	72.00	790.000.000,00	72.50	890.000.000,00	73.00	1.060.000.000,00	2.09.3.25.3.27.01. 0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
														2.09.3.25.3.27.01. 0001 - UPT Rumah Potong Hewan
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN					50.000.000,00		52.500.000,00		55.125.000,00		57.881.250,00		63.669.375,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	46.00	56.60	56.60	50.000.000,00	57.55	52.500.000,00	58.49	55.125.000,00	59.43	57.881.250,00	60.38	63.669.375,00	2.09.3.25.3.27.01. 0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN,



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PERTANIAN DAN PERIKANAN
														2.09.3.25.3.27.01.0001 - UPT Rumah Potong Hewan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					207.995.668,00		282.194.999,00		308.514.498,00		336.265.948,00		367.792.543,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	100	100	207.995.668,00	100	282.194.999,00	100	308.514.498,00	100	336.265.948,00	100	367.792.543,00	2.09.3.25.3.27.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
														2.09.3.25.3.27.01.0001 - UPT Rumah Potong Hewan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.971.000.000,00		2.069.550.000,00		2.173.027.500,00		2.281.678.875,00		2.395.762.819,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					125.000.000,00		131.250.000,00		137.812.500,00		144.703.125,00		151.938.281,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	4	5	6	125.000.000,00	7	131.250.000,00	8	137.812.500,00	9	144.703.125,00	9	151.938.281,00	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														DAN PERINDUSTRIA N
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-				100.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		115.762.500,00		121.550.625,00	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	4	6	7	100.000.000,00	8	105.000.000,00	9	110.250.000,00	10	115.762.500,00	10	121.550.625,00	2.17.3.30.3.31.01. 0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-				360.000.000,00		378.000.000,00		396.900.000,00		416.745.000,00		437.582.250,00	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	83	84	85	360.000.000,00	86	378.000.000,00	87	396.900.000,00	88	416.745.000,00	88	437.582.250,00	2.17.3.30.3.31.01. 0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N
3.30.05 PROGRAM	-				375.000.000,00		393.750.000,00		413.437.500,00		434.109.375,00		455.814.844,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGEMBANGAN EKSPOR														
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	295613 22.92	2186 7000. 00	22223000. 00	375.000.000,00	22590000. 00	393.750.000,00	22968000. 00	413.437.500,00	23357000. 00	434.109.375,00	24524000. 00	455.814.844,00	2.17.3.30.3.31.01. 0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					411.000.000,00		431.550.000,00		453.127.500,00		475.783.875,00		499.573.069,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	75.92	78	81	411.000.000,00	84	431.550.000,00	87	453.127.500,00	90	475.783.875,00	93	499.573.069,00	2.17.3.30.3.31.01. 0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N
3.30.07 PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					600.000.000,00		630.000.000,00		661.500.000,00		694.575.000,00		729.303.750,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/	8	9	10	600.000.000,00	11	630.000.000,00	12	661.500.000,00	13	694.575.000,00	14	729.303.750,00	2.17.3.30.3.31.01. 0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dilaksanakan (Persentase)													PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					3.680.000.000,00		2.965.250.000,00		3.132.262.500,00		3.281.375.625,00		3.437.944.407,00	
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					3.250.000.000,00		2.493.750.000,00		2.618.437.500,00		2.749.359.375,00		2.886.827.344,00	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	-	80	80	3.250.000.000,00	85	2.493.750.000,00	85	2.618.437.500,00	90	2.749.359.375,00	90	2.886.827.344,00	2.17.3.30.3.31.01. 0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					100.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		115.762.500,00		121.550.625,00	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100.00	70.00	70.00	100.000.000,00	70.00	105.000.000,00	70.00	110.250.000,00	70.00	115.762.500,00	70.00	121.550.625,00	2.17.3.30.3.31.01. 0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-				330.000.000,00		366.500.000,00		403.575.000,00		416.253.750,00		429.566.438,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	-	70.00	70.00	330.000.000,00	70.00	366.500.000,00	70.00	403.575.000,00	70.00	416.253.750,00	71.42	429.566.438,00	2.17.3.30.3.31.01. 0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N
4.01 SEKRETARIAT DAERAH	-				69.900.000.000,00		73.395.000.000,00		77.064.750.000,00		80.917.987.500,00		84.963.886.875,00	
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				62.350.000.000,00		65.467.500.000,00		68.740.875.000,00		72.177.918.750,00		75.786.814.650,00	
Terpenuhinya dukungan teknis administratif dan operasional bagi pelaksanaan urusan pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	-	48.00	48.25	62.350.000.000,00	48.50	65.467.500.000,00	49.00	68.740.875.000,00	49.50	72.177.918.750,00	50.00	75.786.814.650,00	4.01.2.13.0.00.01. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	-				5.644.500.000,00		5.926.725.000,00		6.223.061.250,00		6.534.214.300,00		6.860.925.050,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KESEJAHTERAAN RAKYAT														
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat, produk hukum yang dihasilkan	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	-	80.00	82.50	5.644.500.000,00	85.00	5.926.725.000,00	87.50	6.223.061.250,00	90.00	6.534.214.300,00	92.50	6.860.925.050,00	4.01.2.13.0.00.01. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	-	80.00	82.50		85.00		87.50		90.00		92.50		4.01.2.13.0.00.01. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	63.22	75.00	80,00		82.50		85,00		87.50		90.00		4.01.2.13.0.00.01. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				1.905.500.000,00		2.000.775.000,00		2.100.813.750,00		2.205.854.450,00		2.316.147.175,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	-	80.00	82.50	1.905.500.000,00	85.00	2.000.775.000,00	87.50	2.100.813.750,00	90.00	2.205.854.450,00	92.50	2.316.147.175,00	4.01.2.13.0.00.01. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.02 SEKRETARIAT DPRD	-				85.133.660.223,00		89.775.343.235,00		94.264.110.397,00		99.477.315.916,00		103.926.181.718,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				72.774.643.773,00		76.598.375.962,00		80.428.294.761,00		84.449.709.498,00		88.672.194.976,00	
Terpenuhinya dukungan teknis administratif dan operasional bagi pelaksanaan urusan pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	42.00	43.00	44.00	72.774.643.773,00	45.00	76.598.375.962,00	46.00	80.428.294.761,00	47.00	84.449.709.498,00	48.00	88.672.194.976,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (%)	25.71	25.71	25.71		25.71		25.71		25.71		25.71		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				12.359.016.450,00		13.176.967.273,00		13.835.815.636,00		15.027.606.418,00		15.253.986.742,00	
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100.00	100.00	100.00	6.129.000.000,00	100.00	6.535.450.000,00	100.00	6.862.222.500,00	100.00	7.205.333.625,00	100.00	7.565.600.308,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya kualitas persidangan	Ketepatan Penetapan	100.00	100.00	100.00	6.230.016.450,00	100.00	6.641.517.273,00	100.00	6.973.593.136,00	100.00	7.822.272.793,00	100.00	7.688.386.434,00	4.02.0.00.0.00.01.0000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan kajian peraturan perundang- undangan	Perda APBD Tahun N (Persentase)													SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	89.58	90.00	91.00		91.50		92.00		92.50		93.00		4.02.0.00.0.00.01. 0000 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 PERENCANAAN	-				15.742.469.029,00		15.108.860.834,00		15.502.692.737,00		15.907.175.957,00		16.322.617.052,00	
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				14.461.404.338,00		13.795.769.525,00		14.156.774.146,00		14.527.609.401,00		14.908.561.332,00	
Terpenuhinya dukungan teknis, administratif, dan operasional bagi pelaksanaan urusan pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	51.00	51.50	52.00	14.461.404.338,00	52.50	13.795.769.525,00	53.00	14.156.774.146,00	53.50	14.527.609.401,00	54.00	14.908.561.332,00	5.01.5.05.0.00.01. 0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-				609.961.885,00		625.210.932,00		640.841.206,00		656.862.236,00		673.283.792,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	-	98	98.2	609.961.885,00	98.4	625.210.932,00	98.6	640.841.206,00	98.8	656.862.236,00	99	673.283.792,00	5.01.5.05.0.00.01. 0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , PENELITIAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-				671.102.806,00		687.880.377,00		705.077.385,00		722.704.320,00		740.771.928,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	97.37	97.62	99.62	211.967.309,00	99.62	217.266.492,00	99.62	222.698.154,00	99.62	228.265.608,00	99.62	233.972.248,00	5.01.5.05.0.00.01. 0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100.00	97.62	99.62	254.135.707,00	99.62	260.489.100,00	99.62	267.001.327,00	99.62	273.676.360,00	99.62	280.518.269,00	5.01.5.05.0.00.01. 0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100.00	97.62	99.62	204.999.790,00	99.62	210.124.785,00	99.62	215.377.904,00	99.62	220.762.352,00	99.62	226.281.411,00	5.01.5.05.0.00.01. 0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN					56.111.861.733,00		58.917.454.821,00		61.863.327.562,00		64.956.493.940,00		68.204.318.641,00	
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					37.780.125.966,00		39.669.132.265,00		41.652.588.878,00		43.735.218.322,00		45.921.979.238,00	
Terpenuhinya dukungan teknis, administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	49	49.1	49.2	37.780.125.966,00	49.3	39.669.132.265,00	49.4	41.652.588.878,00	49.5	43.735.218.322,00	49.5	45.921.979.238,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					11.489.352.970,00		12.063.820.619,00		12.667.011.650,00		13.300.362.232,00		13.965.380.348,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	Capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah (%)	100	100	100	11.489.352.970,00	100	12.063.820.619,00	100	12.667.011.650,00	100	13.300.362.232,00	100	13.965.380.348,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.782.847.162,00		1.871.989.520,00		1.965.588.996,00		2.063.868.446,00		2.167.061.868,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap	100	100	100	1.782.847.162,00	100	1.871.989.520,00	100	1.965.588.996,00	100	2.063.868.446,00	100	2.167.061.868,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	perencanaan Barang Milik Daerah (%)													
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				5.059.535.635,00		5.312.512.417,00		5.578.138.038,00		5.857.044.940,00		6.149.897.187,00	
Meningkatnya pendapatan asli daerah secara optimal dan berkelanjutan	Persentase peningkatan penerimaan PAD (%)	4.95	100	100	5.059.535.635,00	100	5.312.512.417,00	100	5.578.138.038,00	100	5.857.044.940,00	100	6.149.897.187,00	5.02.0.00.0.00.01. 0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.03 KEPEGAWAIAN	-				2.400.250.000,00		2.520.262.500,00		2.646.275.625,00		2.755.100.000,00		2.892.855.000,00	
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				108.000.000,00		113.400.000,00		119.070.000,00		124.100.000,00		130.305.000,00	
Terpenuhinya dukungan teknis, administratif, dan operasional bagi pelaksanaan urusan pemerintah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	49.00	49.01	49.02	108.000.000,00	49.03	113.400.000,00	49.04	119.070.000,00	49.05	124.100.000,00	49.06	130.305.000,00	5.03.5.04.0.00.01. 0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-				2.292.250.000,00		2.406.862.500,00		2.527.205.625,00		2.631.000.000,00		2.762.550.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan n Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	100.00	100.0 0	100.00	572.500.000,00	100.00	601.125.000,00	100.00	631.181.250,00	100.00	656.000.000,00	100.00	688.800.000,00	5.03.5.04.0.00.01. 0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	90.00	90.50	91.00	1.189.000.000,00	92.00	1.248.450.000,00	93.00	1.310.872.500,00	94.00	1.368.000.000,00	95.00	1.436.400.000,00	5.03.5.04.0.00.01. 0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bemilai Baik (Persentase)	90.00	91.00	92.00	530.750.000,00	93.00	557.287.500,00	94.00	585.151.875,00	95.00	607.000.000,00	96.00	637.350.000,00	5.03.5.04.0.00.01. 0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					3.679.622.550,00		3.863.700.000,00		4.056.885.000,00		4.257.830.000,00		4.470.721.500,00	
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					3.679.622.550,00		3.863.700.000,00		4.056.885.000,00		4.257.830.000,00		4.470.721.500,00	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan n Kompetensi Teknis (Persentase)	13.90	14.00	14.10	200.000.000,00	14.20	210.000.000,00	14.53	220.500.000,00	14.54	231.525.000,00	14.55	243.101.250,00	5.03.5.04.0.00.01. 0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														5.03.5.04.0.00.01. 0001 - UPT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai,
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	100.00	100.0 0	100.00	3.479.622.550,00	100.00	3.653.700.000,00	100.00	3.836.385.000,00	100.00	4.026.305.000,00	100.00	4.227.620.250,00	5.03.5.04.0.00.01. 0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
														5.03.5.04.0.00.01. 0001 - UPT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai,
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2.402.000.000,00		3.540.881.718,00		3.590.783.443,00		3.741.935.795,00		3.935.484.189,00	
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.530.000.000,00		2.562.500.000,00		2.626.562.500,00		2.692.226.563,00		2.759.532.227,00	
Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam	100	100	100	1.530.000.000,00	100	2.562.500.000,00	100	2.626.562.500,00	100	2.692.226.563,00	100	2.759.532.227,00	5.01.5.05.0.00.01. 0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)													
5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					872.000.000,00		978.381.718,00		964.220.943,00		1.049.709.232,00		1.175.951.962,00	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	100	100	100	872.000.000,00	100	978.381.718,00	100	964.220.943,00	100	1.049.709.232,00	100	1.175.951.962,00	5.01.5.05.0.00.01. 0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
6.01 INSPEKTORAT DAERAH					15.340.890.019,00		17.244.062.295,00		18.111.331.450,00		19.022.470.666,00		19.979.724.108,00	
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.120.938.539,00		15.963.113.241,00		16.761.268.903,00		17.599.332.348,00		18.479.298.966,00	
Terpenuhinya dukungan teknis, administratif, dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	38.00	38.00	38.10	14.120.938.539,00	38.20	15.963.113.241,00	38.30	16.761.268.903,00	38.40	17.599.332.348,00	38.40	18.479.298.966,00	6.01.0.00.0.00.01. 0000 - INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN					462.201.000,00		485.311.050,00		514.642.643,00		545.947.419,00		579.374.698,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Menurunnya kejadian penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanjuz Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	68.00	68.00	69.00	462.201.000,00	70.00	485.311.050,00	71.00	514.642.643,00	72.00	545.947.419,00	73.00	579.374.698,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					757.750.480,00		795.638.004,00		835.419.904,00		877.190.899,00		921.050.444,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terinteg rasi (Integrat ed)	Terint egrasi (Integ rated)	Terintegra si (Integrate d)	757.750.480,00	Terintegra si (Integrate d)	795.638.004,00	Terintegra si (Integrate d)	835.419.904,00	Terintegra si (Integrate d)	877.190.899,00	Terintegra si (Integrate d)	921.050.444,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
7.01 - KECAMATAN					98.144.224.219,00		107.270.451.193,00		125.505.662.899,00		146.842.520.641,00		171.805.749.149,00	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					56.705.963.802,00		59.045.008.847,00		69.082.660.351,00		80.826.712.611,00		94.567.253.755,00	
Terpenuhinya Dukungan Teknis, Administratif, dan Operasional bagi Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	100	100	100	11.091.030.678,00	100	11.647.382.212,00	100	13.627.437.188,00	100	15.944.101.510,00	100	18.654.598.767,00	7.01.2.13.0.00.01.0000 - KECAMATAN KEJAKSAN
Terpenuhinya Dukungan Teknis.	Indeks Kematangan	100	100	100	12.727.610.978,00	100	13.045.801.753,00	100	15.263.588.051,00	100	17.858.398.020,00	100	20.894.325.683,00	7.01.2.13.0.00.02.0000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Administratif, dan Operasional bagi Penyelenggaraan Pemerintahan	Organisasi (Indeks)													KECAMATAN KESAMBI
														7.01.2.13.0.00.02. 0001 - KELURAHAN KESAMBI
Terpenuhinya Dukungan Teknis Administratif dan Operasional bagi Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	100	100	100	11.787.932.123,00	100	12.468.096.020,00	100	14.587.672.343,00	100	17.067.576.642,00	100	19.969.064.671,00	7.01.2.13.0.00.03. 0000 - KECAMATAN HARJAMUKTI
														7.01.2.13.0.00.03. 0001 - KELURAHAN HARJAMUKTI
Terpenuhinya Dukungan Teknis, Administratif, dan Operasional bagi Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	81	81	82	11.222.789.473,00	83	11.919.578.862,00	84	13.945.907.269,00	85	16.316.711.504,00	86	19.090.552.460,00	7.01.2.13.0.00.04. 0000 - KECAMATAN LEMAHWUNGKU K
														7.01.2.13.0.00.04. 0001 - KELURAHAN LEMAHWUNGKU K
Terpenuhinya Dukungan Teknis, Administratif, dan Operasional bagi Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	81	81	82	9.876.600.550,00	83	9.964.150.000,00	84	11.658.055.500,00	85	13.639.924.935,00	86	15.958.712.174,00	7.01.2.13.0.00.05. 0000 - KECAMATAN PEKALIPAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														7.01.2.13.0.00.05.0001 - KELURAHAN PEKALIPAN
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					763.055.208,00		622.356.684,00		727.392.320,00		851.944.065,00		996.774.556,00	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	105.000.000,00	100	122.085.000,00	100	143.734.500,00	100	168.169.365,00	7.01.2.13.0.00.03.0000 - KECAMATAN HARJAMUKTI
														7.01.2.13.0.00.03.0001 - KELURAHAN HARJAMUKTI
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan (%)	100	100	100	350.900.000,00	100	53.445.000,00	100	62.530.650,00	100	73.160.861,00	100	85.598.207,00	7.01.2.13.0.00.01.0000 - KECAMATAN KEJAKSAN
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi	100	100	100	30.651.060,00	100	31.417.336,00	100	36.758.283,00	100	43.007.191,00	100	50.318.414,00	7.01.2.13.0.00.02.0000 - KECAMATAN KESAMBI



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan (%)													
														7.01.2.13.0.00.02.0001 - KELURAHAN KESAMBI
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan (%)	100	100	100	156.494.348,00	100	306.494.348,00	100	358.598.387,00	100	419.560.113,00	100	490.885.332,00	7.01.2.13.0.00.04.0000 - KECAMATAN LEMAHWUNGKU K
														7.01.2.13.0.00.04.0001 - KELURAHAN LEMAHWUNGKU K
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan (%)	100	100	100	125.009.800,00	100	126.000.000,00	100	147.420.000,00	100	172.481.400,00	100	201.803.238,00	7.01.2.13.0.00.05.0000 - KECAMATAN PEKALIPAN
														7.01.2.13.0.00.05.0001 - KELURAHAN PEKALIPAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					39.681.174.744,00		46.426.974.449,00		54.319.560.108,00		63.553.885.326,00		74.358.045.830,00	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi yang efektif antar perangkat daerah dan instansi terkait serta partisipasi aktif masyarakat	Presentase Kondisi Sarana Fasilitas Umum di Wilayah Kelurahan dengan kondisi baik (Persentase)	100	100	100	11.600.255.033,00	100	13.572.298.389,00	100	15.879.589.115,00	100	18.579.119.264,00	100	21.737.569.539,00	7.01.2.13.0.00.03.0000 - KECAMATAN HARJAMUKTI
	Presentase RW di Wilayah Kecamatan dengan predikat Baik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.2.13.0.00.03.0000 - KECAMATAN HARJAMUKTI
														7.01.2.13.0.00.03.0001 - KELURAHAN HARJAMUKTI
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi yang efektif antar perangkat daerah dan instansi terkait, serta partisipasi aktif masyarakat	Presentase Kondisi Sarana Fasilitas Umum di Wilayah Kelurahan dengan kondisi baik (Persentase)	100	100	100	6.724.469.281,00	100	7.867.629.059,00	100	9.205.125.999,00	100	10.769.997.419,00	100	12.600.896.979,00	7.01.2.13.0.00.01.0000 - KECAMATAN KEJAKSAN
	Presentase RW di Wilayah Kecamatan	100	100	100		100		100		100		100		7.01.2.13.0.00.01.0000 -



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dengan predikat Baik (Persentase)													KECAMATAN KEJAKSAN
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi yang efektif antar perangkat daerah dan instansi terkait, serta partisipasi aktif masyarakat	Presentase Kondisi Sarana Fasilitas Umum di Wilayah Kelurahan dengan kondisi baik (Persentase)	50	50	80	9.271.459.699,00	81	10.847.607.847,00	82	12.691.701.182,00	83	14.849.290.383,00	84	17.373.669.748,00	7.01.2.13.0.00.02.0000 - KECAMATAN KESAMBI
	Presentase RW di Wilayah Kecamatan dengan predikat Baik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.2.13.0.00.02.0000 - KECAMATAN KESAMBI
														7.01.2.13.0.00.02.0001 - KELURAHAN KESAMBI
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi yang efektif antar perangkat daerah dan instansi terkait, serta partisipasi aktif masyarakat	Presentase Kondisi Sarana Fasilitas Umum di Wilayah Kelurahan dengan kondisi baik (Persentase)	100	100	100	7.422.567.392,00	100	8.684.403.848,00	100	10.160.752.503,00	100	11.888.080.429,00	100	13.909.054.102,00	7.01.2.13.0.00.04.0000 - KECAMATAN LEMAHWUNGKU K
	Presentase RW di Wilayah Kecamatan dengan predikat Baik (Persentase)	50	50	75		76		77		78		79		7.01.2.13.0.00.04.0000 - KECAMATAN LEMAHWUNGKU K



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														7.01.2.13.0.00.04.0001 - KELURAHAN LEMAHWUNGKU K
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi yang efektif antar perangkat daerah dan instansi terkait, serta partisipasi aktif masyarakat	Presentase Kondisi Sarana Fasilitas Umum di Wilayah Kelurahan dengan kondisi baik (Persentase)	100	100	100	4.662.423.339,00	100	5.455.035.306,00	100	6.382.391.309,00	100	7.467.397.831,00	100	8.736.855.462,00	7.01.2.13.0.00.05.0000 - KECAMATAN PEKALIPAN
	Presentase RW di Wilayah Kecamatan dengan predikat Baik (Persentase)	50	50	70		71		72		73		74		7.01.2.13.0.00.05.0000 - KECAMATAN PEKALIPAN
														7.01.2.13.0.00.05.0001 - KELURAHAN PEKALIPAN
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					675.142.629,00		847.180.901,00		991.201.654,00		1.159.705.936,00		1.356.855.944,00	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi yang efektif antar perangkat daerah dan instansi terkait	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Persentase)	100	100	100	200.000.000,00	100	205.000.000,00	100	239.850.000,00	100	280.624.500,00	100	328.330.665,00	7.01.2.13.0.00.03.0000 - KECAMATAN HARJAMUKTI



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
serta partisipasi aktif masyarakat														
														7.01.2.13.0.00.03.0001 - KELURAHAN HARJAMUKTI
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi yang efektif antar perangkat daerah dan instansi terkait, serta partisipasi aktif masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Persentase)	100	100	100	110.000.000,00	100	68.250.000,00	100	79.852.500,00	100	93.427.425,00	100	109.310.087,00	7.01.2.13.0.00.01.0000 - KECAMATAN KEJAKSAN
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi yang efektif antar perangkat daerah dan instansi terkait, serta partisipasi aktif masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Persentase)	100	100	100	254.865.269,00	100	261.236.901,00	100	305.647.174,00	100	357.607.194,00	100	418.400.417,00	7.01.2.13.0.00.02.0001 - KELURAHAN KESAMBI
														7.01.2.13.0.00.02.0002 - KELURAHAN DRAJAT
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi yang efektif antar perangkat daerah dan instansi terkait.	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Persentase)	100	100	100	78.759.360,00	100	82.294.000,00	100	96.283.980,00	100	112.652.257,00	100	131.803.140,00	7.01.2.13.0.00.04.0000 - KECAMATAN LEMAHWUNGKU K



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
serta partisipasi aktif masyarakat														
														7.01.2.13.0.00.04.0001 - KELURAHAN LEMAHWUNGKU K
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi yang efektif antar perangkat daerah dan instansi terkait, serta partisipasi aktif masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Persentase)	100	100	100	31.518.000,00	100	230.400.000,00	100	269.568.000,00	100	315.394.560,00	100	369.011.635,00	7.01.2.13.0.00.05.0000 - KECAMATAN PEKALIPAN
														7.01.2.13.0.00.05.0001 - KELURAHAN PEKALIPAN
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					318.887.836,00		328.930.312,00		384.848.466,00		450.272.703,00		526.819.064,00	
Meningkatnya sinergi antar lembaga pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penanganan konflik sosial yang ditangani (Persentase)	100	100	100	72.732.809,00	100	77.732.809,00	100	90.947.387,00	100	106.408.442,00	100	124.497.877,00	7.01.2.13.0.00.03.0000 - KECAMATAN HARJAMUKTI
														7.01.2.13.0.00.03.0001



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														KELURAHAN HARJAMUKTI
Meningkatnya sinergi antar lembaga pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penanganan konflik sosial yang ditangani (Persentase)	100	100	100	75.000.000,00	100	78.750.000,00	100	92.137.500,00	100	107.800.875,00	100	126.127.024,00	7.01.2.13.0.00.01. 0000 KECAMATAN KEJAKSAN
Meningkatnya sinergi antar lembaga pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penanganan konflik sosial yang ditangani (Persentase)	100	100	100	17.699.027,00	100	18.141.503,00	100	21.225.559,00	100	24.833.903,00	100	29.055.667,00	7.01.2.13.0.00.02. 0000 KECAMATAN KESAMBI
														7.01.2.13.0.00.02. 0001 KELURAHAN KESAMBI
Meningkatnya sinergi antar lembaga pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penanganan konflik sosial yang ditangani (Persentase)	100	100	100	83.306.000,00	100	83.306.000,00	100	97.468.020,00	100	114.037.583,00	100	133.423.973,00	7.01.2.13.0.00.04. 0000 KECAMATAN LEMAHWUNGKU K
														7.01.2.13.0.00.04. 0001 KELURAHAN LEMAHWUNGKU K
Meningkatnya sinergi antar lembaga pemerintahan dalam penyelenggaraan	Persentase penanganan konflik sosial yang ditangani (Persentase)	100	100	100	70.150.000,00	100	71.000.000,00	100	83.070.000,00	100	97.191.900,00	100	113.714.523,00	7.01.2.13.0.00.05. 0000 KECAMATAN PEKALIPAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
urusan pemerintahan umum														
														7.01.2.13.0.00.05.0001 - KELURAHAN PEKALIPAN
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					10.763.507.279,00		10.978.777.425,00		11.148.859.314,00		11.422.320.033,00		11.650.766.434,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.971.112.533,00		8.130.534.784,00		8.293.145.480,00		8.459.008.389,00		8.628.188.557,00	
Terpenuhinya dukungan teknis, administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	-	45	45.25	7.971.112.533,00	45.50	8.130.534.784,00	45.25	8.293.145.480,00	45.50	8.459.008.389,00	45.75	8.628.188.557,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					366.234.913,00		373.559.611,00		381.030.804,00		388.651.419,00		396.424.448,00	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	0	70	71	366.234.913,00	72	373.559.611,00	73	381.030.804,00	74	388.651.419,00	75	396.424.448,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)													
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					2.426.159.833,00		2.474.683.030,00		2.474.683.030,00		2.574.660.225,00		2.626.153.429,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	0	70	71	2.426.159.833,00	72	2.474.683.030,00	73	2.474.683.030,00	74	2.574.660.225,00	75	2.626.153.429,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN				1.796.469.053.987,00		1.860.204.938.208,00		1.963.508.073.786,45		2.043.374.093.359,82		2.146.152.842.229,16		

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

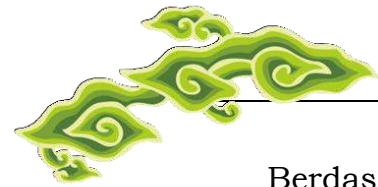
Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan acuan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Sejumlah indikator pencapaian diuraikan berdasarkan sasaran sasaran makro (indikator makro) yang merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang disusun berdasarkan pertimbangan target penyelenggaraan pembangunan periode 2025-2029 sesuai proporsi terhadap target jangka panjang pembangunan daerah 2025-2045. Selain itu, terdapat pula indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan acuan kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD 2025-2029.



Gambar 4. 2 Konsep Kinerja Pada RPJMD

Indikator makro merupakan kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Adapun indikator makro dimaksud meliputi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Rasio dan Indeks Pembangunan Manusia. Penetapan indikator makro Kota Cirebon dilengkapi dengan target indikator per tahun mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya dan tantangan pembangunan kedepan serta kemampuan daerah. Pencapaian indikator makro sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian beberapa indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029.



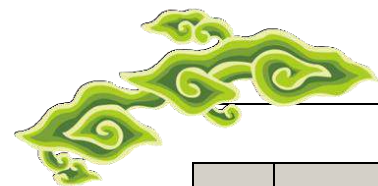
Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. IKU tersebut merupakan kinerja pemerintah daerah pada posisi paling tinggi dan merupakan kinerja dampak (impact) atau ultimate outcome. Pencapaian IKU didukung oleh kinerja outcome atau intermediate outcome, yang pada umumnya merupakan hasil dari crosscutting beberapa urusan atau program. Penetapan indikator kinerja mulai dari Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan indikator kinerja program secara berjenjang sesuai kinerja yang akan dihasilkan/dicapai diharapkan dapat memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah Kota Cirebon Tahun 2025-2029.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

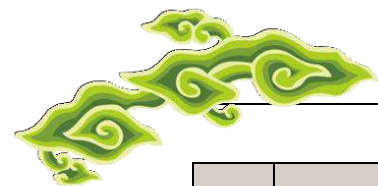
Kinerja Makro ditunjukkan dengan Indikator Makro, sedangkan kinerja utama ditunjukkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU Kota Cirebon merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan Visi Misi Walikota dan diperoleh dari Indikator Tujuan / Sasaran yang terseleksi. IKU Kota Cirebon disajikan dalam Tabel 4.2

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kota Cirebon 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	poin	85,34	85,44	85,54	85,64	85,74	
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,97	79,42	79,86	80,30	80,30	
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,14	7,41	7,64	7,96	7,96	
4.	Tingkat Kemiskinan	(%)	7,80	7,00	6,04	5,00	4,56	
5.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (tonCO ₂ eq/2010 idr Milyar)	TON CO ₂ EQ	0,36	0,58	0,85	1,24	1,52	
6.	PDRB Per Kapita (Rupiah Juta)	*	92.83-95.78	93.69-99.22	94.54-102.66	95.39-106.10	95.39-106.10	
7.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	4,05	4,10	4,15	4,20	4,25	
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6.10-6.62	6.07-6.59	5.98-6.56	5.89-6.52	5.89-6.52	
9.	Indeks Gini (poin)	poin	0.414-0.423	0.408-0.417	0.403-0.412	0.398-0.410	0.398-0.410	
10.	Indeks ketenteraman dan ketertiban umum	Poin	-	-	-	-	-	
11.	Indeks Profesionalitas ASN	poin	80,50	81,00	82,00	83,00	84,00	



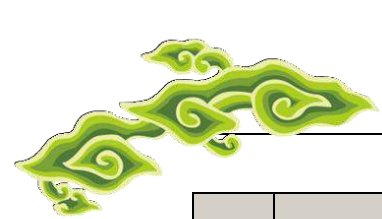
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
12.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Indeks	84,46	84,79	85,13	85,47	85,80	
13.	Indeks Layanan Infrastruktur Kota	Poin	-	-	-	-	-	
14.	Tingkat Kesempatan Kerja	Persentase	95,71	96,71	97,71	98,71	99,71	
15.	Return on Asset (ROA) BUMD	%	2,69	2,86	3,03	3,21	3,38	
16.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,40	2,41	2,42	2,43	2,44	
17.	Indeks Ekonomi Hijau Pilar Ekonomi	Indeks	72,63	73,69	74,36	75,01	75,64	
18.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,19	13,20	13,21	13,22	13,23	
19.	Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	%	70,68	73,78	73,97	74,12	74,50	
20.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat akses layanan dasar	%	57,29	67,96	78,64	89,32	100	
21.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,15	4,24	4,33	4,42	4,51	



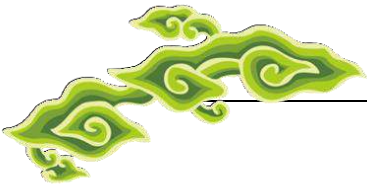
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
22.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	67,5	68,4	69,4	70,3	71,3	
23.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	99,10	99,32	99,54	99,76	99,97	
24.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	53,24	53,50	53,75	54,00	54,25	
25.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,50	75,51	75,52	75,53	75,54	
26.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	54,24	54,74	55,24	55,74	56,24	
27.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0,26	0,36	0,42	0,53	0,60	
28.	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,70	6,75	6,80	6,85	6,90	
29.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	123,84	122,62	121,40	120,18	109,32	
30.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	TON CO2 EQ	13.093,63	19.656,96	29.634,96	46.302,61	67.186,46	
31.	Proporsi ruang terbuka hijau	Persentase	-	-	-	-	-	
32.	Rasio Volume Usaha UMKM terhadap PDRB	Persentase	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
33.	Angka Literasi/Numerasi	%	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	
34.	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persentase	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
35.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	13,05	12,95	11,25	10,35	10,00	
36.	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	86,62	86,64	86,66	86,68	86,70	
37.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	poin	61,74	61,94	62,14	62,34	-	
38.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	5,34	5,19	5,01	4,80	4,55	
39.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	14,00	14,75	15,00	15,25	15,55	
40.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,140	3,180	3,220	3,260	3,300	
41.	Insiden Tuberkulosis (ITB)	Kasus	414	364	325	296	273	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
	per 100.000 penduduk.							
42.	Indeks ketimpangan gender	Indeks	81,08	81,10	81,12	81,14	81,16	
43.	Nilai SAKIP Kota	Skor	69,50	69,75	70,00	70,25	70,50	
44.	Indeks Smart City (poin)	poin	3,51	3,59	3,67	3,75	4,00	
45.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	13,19	13,20	13,21	13,22	13,23	
46.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	72,08	76,08	79,08	80,33	81,58	
47.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	50,84	52,36	53,93	55,55	57,22	
48.	Indeks Pembangunan Gender/IPG (Poin)	poin	95,87	95,89	95,91	95,93	95,95	
49.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,65	67,67	67,69	67,71	67,73	
50.	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Poin	2,70	2,70	2,90	2,90	3,00	
51.	Indeks Pengembangan SDM Berkarakter	Poin	-	-	-	-	-	
52.	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran	%	28,37	28,42	28,46	28,51	28,53	

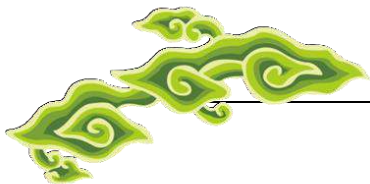


NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
53.	Kontribusi PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan	%	14,72	14,86	15,01	15,15	15,32	
54.	Kontribusi PDRB sektor Ekonomi Kreatif	%	18,85	18,95	19,00	19,10	19,15	



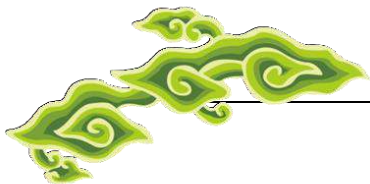
4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator kinerja kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah sesuai dengan kewenangan daerah. Indikator ini disajikan berdasarkan aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Adapun penetapan target dan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025-2030 disajikan pada tabel berikut :

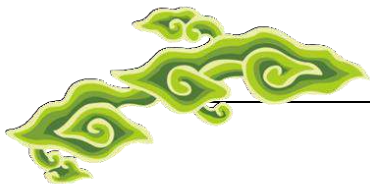


Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Kota Cirebon 2025-2029

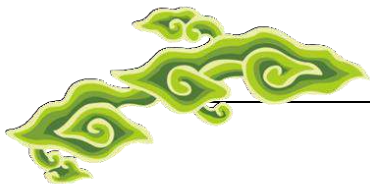
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,53	78,53	78,97	79,42	79,86	80,30	80,30	
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,06	5,06	6,14	7,41	7,64	7,96	7,96	
3	PDRB Per Kapita (Rupiah Juta)	*	91.98-92.34	91.98-92.34	92.83-95.78	93.69-99.22	94.54-102.66	95.39-106.10	95.39-106.10	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6.15-6.64	6.15-6.64	6.10-6.62	6.07-6.59	5.98-6.56	5.89-6.52	5.89-6.52	
5	Indeks Gini (poin)	poin	0.419-0.428	0.419-0.428	0.414-0.423	0.408-0.417	0.403-0.412	0.398-0.410	0.398-0.410	
6	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,17	13,18	13,19	13,20	13,21	13,22	13,23	
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,48	75,49	75,50	75,51	75,52	75,53	75,54	
8	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	13,16	13,18	13,19	13,20	13,21	13,22	13,23	
9	Indeks Pembangunan Gender/IPG (Poin)	poin	-	95,85	95,87	95,89	95,91	95,93	95,95	
10	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran	%	27,31	28,33	28,37	28,42	28,46	28,51	28,53	
11	Tingkat partisipasi warga negara usia	%	100	100	100	100	100	100	100	



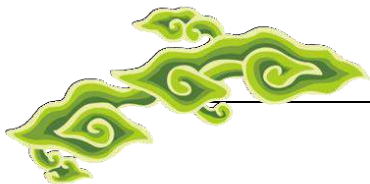
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar									
II ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,95	4,00	4,05	4,10	4,15	4,20	4,25	
III ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	6,56	5,46	5,34	5,19	5,01	4,80	4,55	
2	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Kasus	1,136	485	414	364	325	296	273	
3	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	%	97,94	97,95	99,10	99,32	99,54	99,76	99,97	
4	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78	0,78	0,79	
5	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	1	2	3	4	5	6	7	



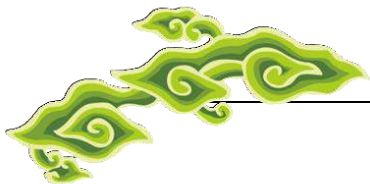
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Persentase Penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat	Persentase	15	17	19	21	23	25	27	
8	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
10	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	73,43	73,78	74,13	74,48	74,83	75,18	75,53	
11	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	%	99,68	99,69	99,70	99,71	99,72	99,73	99,74	



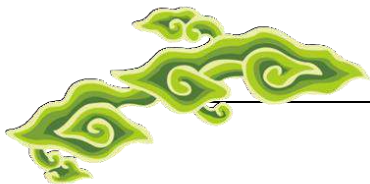
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan									
12	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	15,70	15,40	15,10	14,80	14,50	14,20	13,90	
15	Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	87	88	88,5	89	89,5	90	90,5	
16	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	



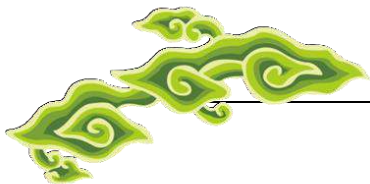
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
17	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	70	86	0	0	0	0	0	
18	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persentase	15,88	16,35	16,92	1.636	16,49	16,81	17,27	
19	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase	48,84	49,56	50,28	51,00	51,72	52,44	53,16	
20	Presentase Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	%	38	39	40	41	42	43	44	
21	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	4,55	9	27	36	45	55	64	
22	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi	Persentase	-	-	17,99	17,99	17,99	17,99	17,99	



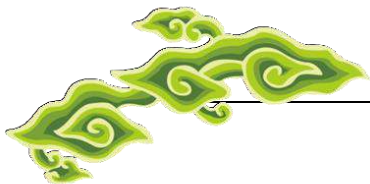
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)									
23	Persentase Rumah Layak Huni	%	-	-	96,19	96,32	96,45	96,57	96,69	
24	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase	85	85	86	87	88	89	90	
25	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,98	2,98	3,00	3,00	3,10	3,10	3,10	
26	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persentase	60,62	60,64	60,81	60,99	61,18	61,38	61,60	
27	Persentase Terselenggaranya Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Lingkungan	%	86	93	100	100	100	100	100	



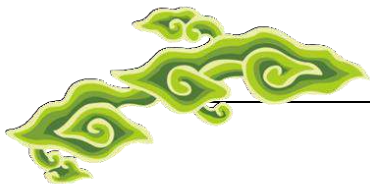
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Pemerintah Daerah Kota Cirebon									
28	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	94	96	94	94,4	94,8	95,2	95,6	
29	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	18.70-18.70	18.60-18.1	18.50-17.5	18.50-17.0	18.50-16.5	18.40-16.0	18.40-15.5	
30	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	123	123	123	123	100	100	100	
31	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	3	-	43,48	55,69	67,9	80,12	92,33	
32	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	1,97	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	
33	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS	%	100	100	100	100	100	100	100	
34	Angka Kematian Bayi (AKB) per	Orang	13	13	12	12	12	12	12	



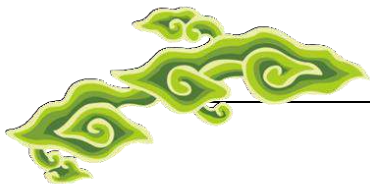
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	1.000 kelahiran hidup									
35	Nilai SAKIP	poin	81,75	82	82,15	82,30	82,50	82,75	83,00	
IV	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	%	-	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	-	100	100	100	100	100	100	
AB	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	Poin	92,58	92,58	92,60	92,65	92,70	92,80	92,85	



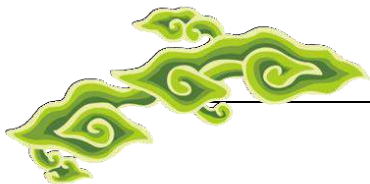
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	44,00	44,10	44,20	44,30	44,40	44,50	44,60	
3	Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan)	Poin	93,00	93,00	93,05	93,10	93,15	93,20	9,25	
4	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	18,18	18,18	18,18	18,18	13,64	13,64	13,64	
5	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	100	95,00	95,00	95,20	95,70	95,80	96,00	
6	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	66,93	66,95	67,00	67,05	67,10	67,15	67,20	
AC	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	59,20	52,99	53,24	53,50	53,75	54,00	54,25	
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	49,90	55	60	65	70	75	80	



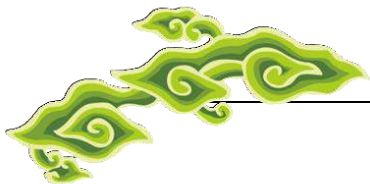
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	71,43	72,73	74,03	75,32	76,62	77,92	79,22	
4	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	41,00	41,50	41,50	42,00	42,50	43,00	43,50	
5	Presentase Peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase	-	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	67,36	86,51	98,04	100	100	100	100	
7	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh	%	72,64	90,90	95,12	99,54	100	100	100	



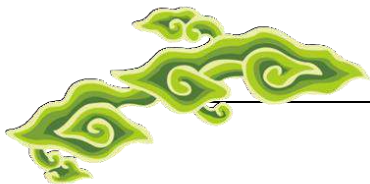
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Pengumpulan Sampah									
9	Luas Taman Kehati yang Dikelola	Ha	4,70	4,70	4,70	4,70	6,20	6,20	6,20	
10	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	19,26	21,31	23,36	25,41	27,46	29,51	31,56	
12	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan	%	17,10	17,10	17,10	17,00	16,80	16,70	16,70	
AD	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									



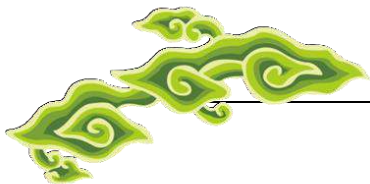
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jenis	5	5	5	5	5	5	5	
2	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	6,82	8,00	10,00	13,00	16,00	20,00	24,00	
3	Dokumen hasil pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jenis	1	1	1	3	3	3	3	
4	Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jenis	2	2	3	3	3	3	3	
5	Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jenis	3	3	3	3	3	3	3	
6	Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	70	50	50	50	50	50	50	
7	Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Jenis	3	3	3	3	3	3	3	



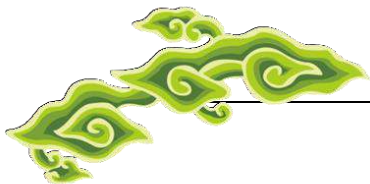
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	daerah pada Perangkat daerah									
8	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	Jenis	1	1	3	3	3	3	3	
10	Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jenis	2	2	2	2	2	2	2	
11	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis	7	7	7	7	7	7	7	
12	Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	6	6	6	6	6	6	6	
13	Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	Jenis	1	1	1	1	1	1	1	
14	Persentase cakupan kepemilikan buku	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



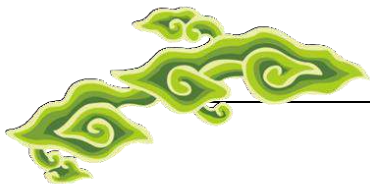
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan									
15	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	51,97	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00	
16	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jenis	3	3	3	3	3	3	3	
19	Dokumen Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jenis	3	3	3	3	3	3	3	



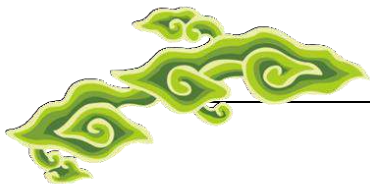
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AE	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	10,76	11,16	11,72	11,99	12,04	11,94	11,73	
2	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	65,97	66,30	66,63	66,96	67,30	67,64	67,97	
3	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	22	26	26	27	27	28	28	
4	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	92,59	93,06	93,52	93,99	94,46	94,93	95,41	
5	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	65,77	67,00	71,00	74,00	77,00	81,00	84,00	
6	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	48	48,1	48,2	48,3	48,4	48,5	48,6	
7	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persentase	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	
8	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	3,22	3,30	3,35	3,40	3,45	3,50	3,55	
AF	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									



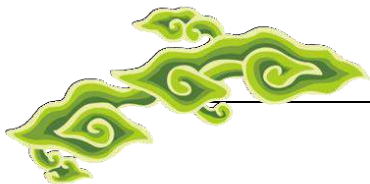
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	80	82,25	85	87,50	90	92,50	
2	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	46	46,1	46,2	46,3	46,4	46,5	46,6	
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	80	70	75	80	85	90	95	
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	80	82	83	84	85	86	86	
5	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	83,92	25	30	35	40	45	50	
6	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	66,00	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	82,50	
AG	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap	Persentase	80,50	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00	82,50	



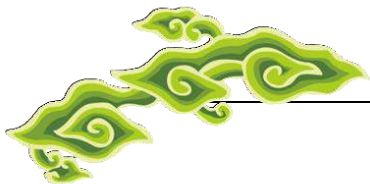
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Pengembangan Kebudayaan									
2	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	22	32	32,85	32,95	33,10	43,25	43,35	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persentase	-	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	
4	Persentase ketercapaian persyaratan pendirian dan pengelolaan museum	%	-	80	81	82	83	84	85	
5	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	77,14	77,14	77,50	77,75	78,00	78,25	78,50	
6	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	43,00	43,50	44,00	44,50	45,00	45,50	46,00	
AH	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	376,49	376,50	383,51	387,02	390,53	394,04	397,55	
2	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	38,15	39,05	40,05	40,55	41,05	41,55	42,06	



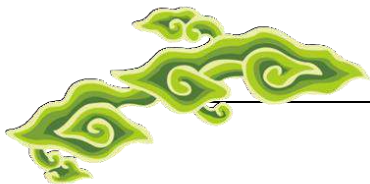
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	7.784,42	5.090,40	5.140,40	5.190,40	5.240,40	5.294,40	5.340,40	
4	Presentase pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku	Persentase	-	-	84	84,15	84,25	84,50	84,75	
5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Ton	8.160,91	5.466,90	5.523,91	5.577,42	5.630,93	5.688,44	5.737,95	
AI	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	0,58	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	
2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	0	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	
3	Persentase Pelaku Pariwisata dan	Persentase	64,80	65,00	65,25	65,50	65,75	66,00	66,25	



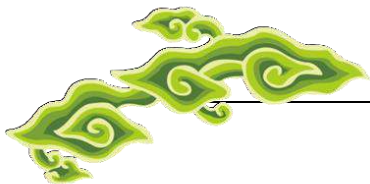
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi									
4	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	2,54	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	
AJ	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	5,6	5,6	5,6	5,7	5,7	5,8	5,8	
2	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ton	1.357,85	1.376,00	1.379,00	1.384,00	1.389,00	1.394,00	1.401,00	
3	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	46,00	56,60	56,60	57,55	58,49	59,43	60,38	
5	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	
6	Persentase tingkat pencegahan dan pengendalian penyakit hewan	%	70,00	70,00	71,00	71,50	72,00	72,50	73,00	



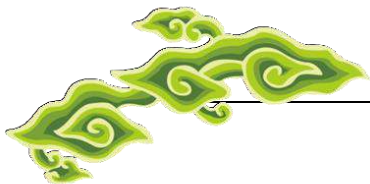
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7	Produksi Komoditas Peternakan	Ton	9.313,97	9.381,00	9.381,00	9.381,00	9.381,00	9.381,00	9.381,00	
8	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	50	50	50	50	50	50	50	
AK	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Nilai Ekspor Barang	Nilai	29.561.322,92	21.867.000,00	22.223.000,00	22.590.000,00	22.968.000,00	23.357.000,00	24.524.000,00	
2	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	4	6	7	8	9	10	10	
3	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	4	5	6	7	8	9	9	
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	75,92	78	81	84	87	90	93	
5	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Persentase	8	9	10	11	12	13	14	
6	Persentase Stabilisasi Harga	Persentase	83	84	85	86	87	88	88	



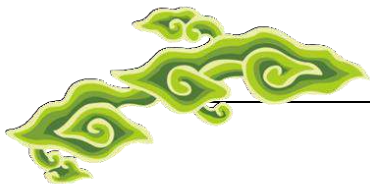
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting									
AL	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	-	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	71,42	
2	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
3	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase	-	80	80	85	85	90	90	
AM	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH									
1	Nilai SAKIP Kota (poin)	poin	69,04	69,25	69,50	69,75	70,00	70,25	70,50	
AN	4.02 - SEKRETARIAT DPRD									
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	0	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	
AO	5.02 - KEUANGAN									
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	100	Wajar Tanpa	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	



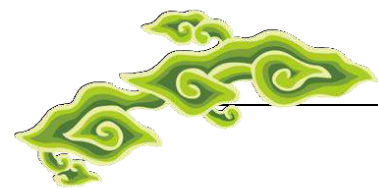
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
				Pengecualian					Pengecualian	
2	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	
3	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	5,23	5,11	4,99	4,87	4,74	4,62	4,50	
4	Rasio PAD	%	35.95:35.95	36.3:36.8	36.8:37.5	37.3:38.0	37.8:38.5	38.3:39.0	38.8:39.5	
5	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	%	87,15	86,71	86,28	85,85	85,42	85,00	84,57	
6	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	13,92	13,27	12,61	11,96	11,30	10,65	10,00	
7	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	31.96:31.96	31.2:31.5	29.8:30	29.5:29.8	29.2:29.5	29:29.3	28.8:29	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AP	5.03 - KEPEGAWAIAN									
1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	82,50	82,75	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	
2	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persentase	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	
3	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	90,50	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	
AQ	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase	13,90	14,00	14,10	14,20	14,53	14,54	14,55	
AR	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	38,00	38,00	38,10	38,20	38,30	38,40	38,50	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	
3	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	68,00	68,00	69,00	70,00	71,00	72,00	73,00	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	87,00	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00	
5	Hasil Survey Penilaian Integritas	poin	66,51	66,51	68	70	72	74	76	



BAB V

P E N U T U P

Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Cirebon 2025-2029 merupakan suatu keharusan dan amanat peraturan perundang-undangan yang secara garis besar memuat ketercapaian dan keberlanjutan pembangunan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah memperhatikan visi, misi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman bagi arah pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah Kota Cirebon dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, yang berupaya untuk mewujudkan Kota Cirebon yang SETARA (Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman, dan Berkelanjutan) pada tahun 2029. Kesimpulan secara umum terhadap keterkaitan dan hubungan antar bab pada Dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029, secara substansial adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan: Kota Cirebon menghadapi tantangan serius dalam bidang lingkungan hidup, yang ditandai dengan tren penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), tekanan pada daya dukung air, dan daya tampung terhadap perbandingan antara lahan terbangun dan lahan terbuka hijau yang masih belum memenuhi target, kerentanan terhadap dampak perubahan iklim serta bencana (banjir, rob, kebakaran). Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya alam, dan penguatan ketahanan bencana menjadi keharusan dalam setiap program pembangunan untuk mewujudkan Kota yang Aman dan Berkelanjutan.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Bonus demografi harus dimanfaatkan secara optimal dengan memperkuat kualitas SDM melalui pendidikan yang berkualitas, pelatihan vokasi, serta penguatan di bidang kesehatan dalam penurunan stunting, penanggulangan TBC dan HIV-AIDS. Peningkatan literasi dan keterampilan digital juga mutlak diperlukan untuk menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan berdaya saing untuk menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan berdaya saing menuju masyarakat yang Sejahtera.



3. Penguatan Perekonomian Berbasis Lokal: Struktur ekonomi Kota Cirebon yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa perlu didorong dengan memperkuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan pariwisata berbasis kearifan lokal serta budaya. Peningkatan daya saing ekonomi harus sejalan dengan upaya pemerataan dan pengentasan kemiskinan serta penguatan UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata berbasis kearifan lokal serta budaya untuk mendukung pemerataan ekonomi yang Sejahtera.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Digital: Penerapan Sistem Pemerintahan Digital (Pemdi) dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sinergi antar perangkat daerah dan partisipasi aktif masyarakat harus terus ditingkatkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang Tertata, profesional, bersih, dan bebas dari KKN.

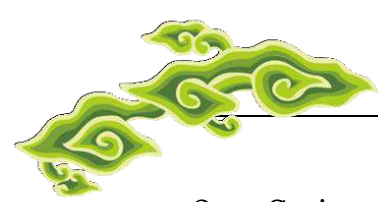
Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan: Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar (jalan, drainase, air bersih, sanitasi) harus diprioritaskan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi, dengan memperhatikan dampak lingkungan dan keberlanjutan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan keberlanjutan guna mewujudkan kota yang Tertata dan Berkelanjutan.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah merupakan produk hukum daerah yang mengikat dan menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan serta Dokumen penganggaran lainnya.

Untuk memastikan pelaksanaan RPJMD ini dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terarah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan wajib mengedepankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang kuat antar Perangkat Daerah, antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, serta dengan DPRD, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam periode tahun 2025-2029.



2. Setiap program dan kegiatan pembangunan harus dirumuskan dan dilaksanakan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, Spesifik dan Spasial (THISS) yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, serta berorientasi pada keberlanjutan untuk generasi mendatang.
3. Seluruh tahapan pembangunan harus melibatkan masyarakat secara aktif dan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, untuk menjamin bahwa pembangunan benar-benar aspiratif dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
4. Pelaksanaan pembangunan didorong untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan inovasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta membuka lapangan kerja dan ekonomi baru.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian sasaran pembangunan. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sebagai berikut:

1. Sistem Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Dilakukan pemantauan secara rutin dan berkala terhadap kinerja pembangunan yang diukur melalui capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan setahun sekali melalui evaluasi mid-term dan evaluasi akhir masa perencanaan.
2. Peran serta DPRD dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP): DPRD melaksanakan fungsi pengawasan melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota. Inspektorat dalam hal ini selaku APIP berperan dalam audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.
3. Mekanisme Korektif dan Penyesuaian: Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, dilakukan langkah-langkah korektif dan penyesuaian program-kebijakan jika diperlukan, termasuk melakukan revisi atau perubahan terhadap RPJMD melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Transparansi dan Akuntabilitas Publik: Hasil-hasil pemantauan, evaluasi, dan audit harus diumumkan kepada publik secara transparan untuk menjamin akuntabilitas kinerja pemerintahan dan membangun kepercayaan masyarakat.



Dengan dilaksanakannya kaidah pelaksanaan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi secara konsisten dan akuntabel, diharapkan seluruh sasaran dan tujuan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 dapat tercapai secara optimal, yang pada akhirnya mewujudkan Kota Cirebon yang SETARA dan bermartabat bagi seluruh warganya.

Cirebon, Agustus 2025
WALI KOTA CIREBON

ttd,

EFFENDI EDO.